

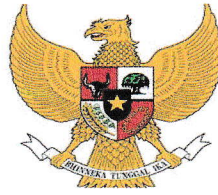


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025–2029



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2025



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

19/12

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah. *RPJMD*

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
20. Bupati adalah Bupati Lembata.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan Daerah selama periode 5 (lima) tahun ke depan, menjamin keberlanjutan dan keselarasan dengan RPJPD Tahun

18/12

2025-2045, serta menghasilkan dokumen perencanaan strategis yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:

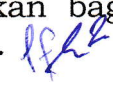
- a. menyediakan pedoman dan acuan yang jelas untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah selama periode 2025-2029 dan Tahun 2030 sebagai masa transisi kepemimpinan Bupati;
- b. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi program pembangunan antar PD serta antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah desa;
- c. sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan turunan, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- d. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
- e. sebagai tolok ukur keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD terdiri dari:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
- c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. Bab V Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

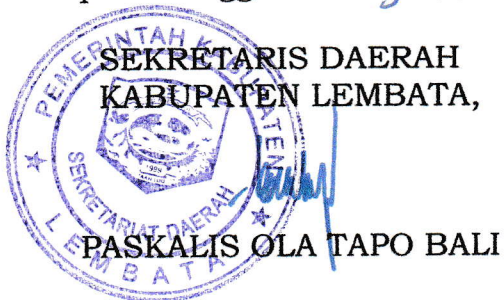
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LEMBATA,
P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEMBATA,
PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR 315

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA:
NOREG/02/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Kabupaten Lembata merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah yang harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan
 2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program PD dan

RPJMD

lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis melalui pembahasan bersama DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten tetangga, dan konsultasi RPJMD Kabupaten ke Pemerintah Provinsi NTT. Pendekatan holistik-tematik adalah upaya penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada pencapaian visi Indonesia Emas 2025-2045 Tahap I. Pendekatan integratif yaitu keterpaduan dokumen perencanaan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai Sasaran Prioritas Nasional (SPN). Pendekatan spasial berdasarkan aspek kewilayahan dengan memperhatikan struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antar wilayah.

RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu P. Kanisius Tuaq dan Muhamad Nasir yang dilantik serentak pada 20 Februari 2025, dengan masa bakti 2025-2030. RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lembata yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata harus menitikberatkan masyarakat Lembata sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Sehubungan dengan itu, RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra PD kabupaten Tahun 2025-2029, memperhatikan data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, memperhatikan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/ atau Tujuan Pembangunan

18/02

Berkelanjutan (TPB), daya dukung dan daya tampung lingkungan, isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, manajemen risiko Pembangunan Nasional di Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya seperti Rencana Induk Pariwisata, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM,) dan rencana induk lainnya. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD) dan digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

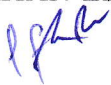
Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 315



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	12
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	39
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	62
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	71
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	85
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	85
2.2.2 Kerangka Pendanaan	100
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	121
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	121
2.3.2 Isu Strategis Daerah.....	129
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	136
3.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	136
3.1.1. Visi dan Misi	136
3.1.2. Arah Pengembangan Wilayah	153
3.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	165
3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	181
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	181
3.2.2 Program Prioritas Daerah	196
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	217
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	217
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	266
BAB V PENUTUP	283
5.1 PEDOMAN TRANSISI.....	283
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN.....	284
5.3. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	285

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa, dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata	12
Tabel 2.2	Formasi Geologi di Kabupaten Lembata	17
Tabel 2.3	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tiap Bulan Kabupaten Lembata Tahun 2023-2024	18
Tabel 2.4	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata	22
Tabel 2.5	Hasil Daya Dukung Lahan Pertanian "Odum, Howard dan Issard" Kabupaten Lembata Tahun 2023	23
Tabel 2.6	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.7	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi NTT Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.8	Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.9	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata	27
Tabel 2.10	Data Mata Air di Kabupaten Lembata	28
Tabel 2.11	Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata	29
Tabel 2.12	Formasi Hidrologi Akuifer di Kabupaten Lembata	30
Tabel 2.13	Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	31
Tabel 2.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.15	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.16	Penanganan Sampah Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.18	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.19	Data Demografi Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.20	Kepadatan Penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024	38
Tabel 2.21	Proyeksi Penduduk Kabupaten Lembata Tahun 2024-2029	39
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	40
Tabel 2.23	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	40
Tabel 2.24	Kemiskinan Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024	44

Tabel 2.26	Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.27	Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2021-2024	46
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020 – 2024	47
Tabel 2.29	Rekapitulasi Data P3KE Per Kecamatan Tahun 2024	47
Tabel 2.30	Indeks Gini Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	50
Tabel 2.31	Usia Harapan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	52
Tabel 2.32	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	53
Tabel 2.33	Angka Kematian Ibu Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	55
Tabel 2.34	Prevalensi Kekurangan Gizi dan <i>Wasting</i> Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024	55
Tabel 2.35	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	56
Tabel 2.36	Capaian Pendidikan Berkualitas Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	57
Tabel 2.37	Capaian Perlindungan Sosial yang Adaptif Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	58
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT Tahun 2020-2024.....	59
Tabel 2.39	Capaian Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif Kabupaten Lembata dan NTT Tahun 2020-2024	60
Tabel 2.40	Angka Ketergantungan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	62
Tabel 2.41	Capaian Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	63
Tabel 2.42	Capaian Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2020-2024.....	64
Tabel 2.43	Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2020-2024	67
Tabel 2.44	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	67
Tabel 2.45	Capaian Infrastruktur Jalan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024.....	69
Tabel 2.46	Capaian Permukiman dan Akses Kelembagaan Desa Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024.....	70
Tabel 2.47	Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024.....	70
Tabel 2.48	Capaian Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2020-2024.....	71
Tabel 2.49	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh Dan Demokrasi Substansial Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	74

Tabel 2.50	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lembata dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024	75
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	76
Tabel 2.52	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	87
Tabel 2.53	Realisasi Belanja di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	91
Tabel 2.54	Realisasi Pembiayaan Daerah 2020-2024	94
Tabel 2.55	Kinerja (Realisasi) APBD Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	96
Tabel 2.56	Neraca Daerah Tahun 2020-2024.....	99
Tabel 2.57	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030.....	102
Tabel 2.58	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030.....	105
Tabel 2.59	Tabel Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030	109
Tabel 2.60	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030.....	112
Tabel 2.61	Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	117
Tabel 2.62	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata	119
Tabel 2.63	Prioritas Pendanaan*)	120
Tabel 2.64	Pemetaan Permasalahan, Isu Strategis yang akan diatasi melalui Misi Pembangunan	134
Tabel 3.1	Sasaran dan Target Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045.....	138
Tabel 3.2	Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029.....	139
Tabel 3.3	Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029.....	168
Tabel 3.4	Keselarasan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029.....	173
Tabel 3.5	Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	176
Tabel 3.6	Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029.....	177
Tabel 3.7	Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029.....	179
Tabel 3.8	Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029.....	181
Tabel 3.9	Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029.....	185

Tabel 3.10	Prioritas Pembangunan Tahunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030	194
Tabel 3.11	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029.....	197
Tabel 3.12	Integrasi Janji Politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Program Prioritas.....	213
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	218
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029	267
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030	268

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainya.....	8
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Lembata.....	13
Gambar 2.2	Kondisi Morfologi Kabupaten Lembata.....	14
Gambar 2.3	Grafik Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata	15
Gambar 2.4	Grafik Kemiringan Kabupaten Lembata	16
Gambar 2.5	Peta Topografi Kabupaten Lembata.....	16
Gambar 2.6	Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata.....	21
Gambar 2.7	Grafik Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata , NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024	41
Gambar 2.9	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lembata , NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024	42
Gambar 2.10	Kemiskinan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024	43
Gambar 2.11	Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lembata Tahun 2021-2024.....	46
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020- 2024.....	49
Gambar 2.13	Penduduk Yang Bekerja (PYB) Kabupaten Lembata Tahun 2022-2023.....	49
Gambar 2.14	IPM Lembata, NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024	51
Gambar 2.15	Prevalensi Stunting Kabupaten Lembata dan NTT Tahun 2020-2024.....	54
Gambar 2.16	Komposisi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024.....	89
Gambar 3.1	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045	143
Gambar 3.2	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lembata dan Asta Cita RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.....	144
Gambar 3.3	Pemetaan Misi dan Tema Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029.....	145
Gambar 3.4	Segitiga Kutub Pertumbuhan di Kabupaten Lembata	155
Gambar 3.5	Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata	158
Gambar 3.6	Kawasan Strategi Provinsi di Daerah Kabupaten Lembata	159
Gambar 3.7	Peta Kawasan Ekonomi Altaka.....	160
Gambar 3.8	Peta Tematik Integrasi Cluster Food Estate Terintegrasi Bobu-Tobotani dalam Kebijakan LP2B.	161
Gambar 3.9	Peta Tematik Integrasi Kebijakan Sektorial Terhadap Penetapan Kawasan Strategi.....	162
Gambar 3.10	Sepuluh Standar ESG.....	163
Gambar 3.11	Skenario Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 Berdasarkan Pendekatan ESG	164
Gambar 3.12	Heksahelix Integrasi Hulu-Hilir Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	165

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah yang harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri dari: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana Perangkat Daerah terdiri dari (a) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJPD. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, sedangkan yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis melalui pembahasan bersama DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten tetangga, dan konsultasi RPJMD Kabupaten ke Pemerintah Provinsi NTT. Pendekatan holistik-tematik adalah upaya penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada pencapaian visi Indonesia Emas 2025-2045 Tahap I. Pendekatan

integratif yaitu keterpaduan dokumen perencanaan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai Sasaran Prioritas Nasional (SPN). Pendekatan spasial berdasarkan aspek kewilayahan dengan memperhatikan struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antar wilayah.

RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu P. Kanisius Tuaq dan Muhamad Nasir yang dilantik serentak pada 20 Februari 2025, dengan masa bakti 2025-2030. RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025–2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lembata yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata harus menitikberatkan masyarakat Lembata sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Sehubungan dengan itu, RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra PD kabupaten Tahun 2025-2029, memperhatikan data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, memperhatikan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/ atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), daya dukung dan daya tampung lingkungan, isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, manajemen risiko Pembangunan Nasional di Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya seperti Rencana Induk Pariwisata, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM,) dan rencana induk lainnya.

Selanjutnya, RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD) dan digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan dimaksud meliputi 3 (tiga) kluster yakni: 1) Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Dasar Hukum Terkait Materi Muatan RPJMD; dan 3) Dasar Hukum Selain Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967); dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Dasar Hukum Terkait Materi Muatan RPJMD
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);

- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 03); dan
 - 30) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 312).
3. Dasar Hukum Selain Peraturan Perundang-undangan
 - 1) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

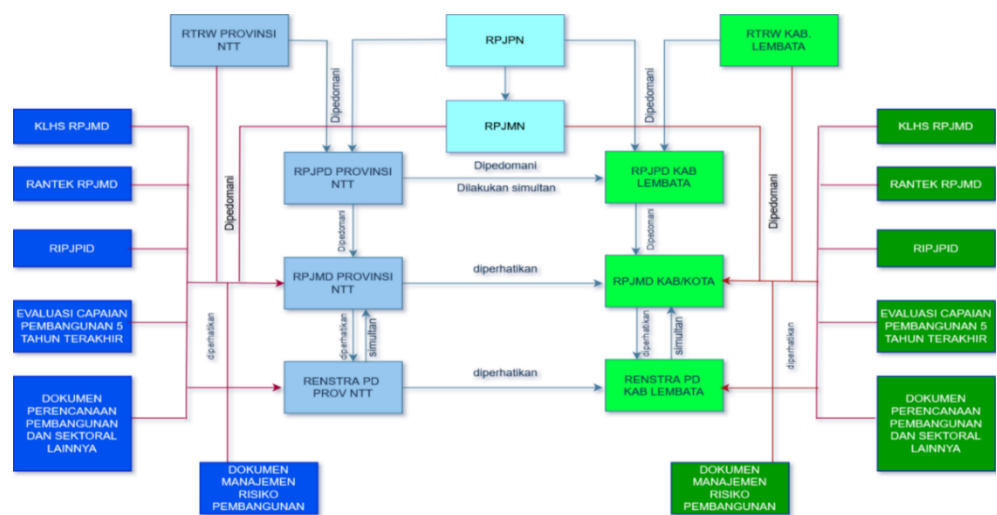
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional, sehingga diperlukan penyelarasan antara RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dan menjadi implementasi Tahap I dari RPJPD tersebut;
2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 memperhatikan komitmen nasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029;
3. Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang mengintegrasikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;

4. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 untuk menjamin sinkronisasi pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota di Provinsi NTT;
5. RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 berpedoman pada rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dan wilayah sebagaimana tercantum dalam RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042;
6. RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 disusun secara simultan, terkoordinasi, dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
7. RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dijabarkan secara operasional ke dalam perencanaan tahunan daerah yaitu RKPD;
8. RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Desa, sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa.

Adapun keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Diolah, Instruksi Mendagri No.2 Tahun 2025

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembangunan Daerah selama periode 5 (lima) tahun ke depan, menjamin keberlanjutan dan keselarasan dengan RPJPD Tahun 2025-2045, serta menghasilkan dokumen perencanaan strategis yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan pedoman dan acuan yang jelas untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah selama periode 2025-2029 dan Tahun 2030 sebagai masa transisi kepemimpinan Bupati;
2. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi program pembangunan antar perangkat daerah serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah desa;
3. Sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan turunan, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
4. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan;
5. Sebagai tolak ukur keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun dalam 5 (lima) bab yang saling terkait. Secara umum, substansinya meliputi pendahuluan, gambaran umum daerah, visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penutup, yang keseluruhannya mencakup aspek latar belakang, landasan penyusunan, kondisi daerah, arah kebijakan, program pembangunan, pendanaan, dan kaidah pelaksanaan, serta pedoman masa transisi.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat berbagai aspek fundamental yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2025–2029, meliputi uraian mengenai latar belakang penyusunan yang menjelaskan konteks strategis perencanaan pembangunan jangka menengah, dasar hukum yang menjadi pijakan normatif dalam penyusunan dokumen, keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, penjabaran mengenai maksud dan tujuan penyusunan sebagai bentuk arah dan sasaran yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian pertama bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lembata yang mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Melalui analisis komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut, bab ini memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan dinamika pembangunan daerah sebagai landasan perumusan kebijakan dalam RPJMD 2025-2029.

Bagian kedua bab ini menguraikan gambaran keuangan daerah yang terdiri dari analisis kinerja keuangan daerah masa lalu dan proyeksi keuangan daerah untuk periode 2025-2029. Analisis ini mencakup perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang menjadi kerangka fiskal bagi perencanaan pendanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD.

Bagian terakhir membahas permasalahan dan isu strategis daerah yang diidentifikasi berdasarkan kondisi dan tantangan pembangunan Kabupaten Lembata. Identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis daerah membantu menentukan prioritas dan fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata yang ditetapkan untuk periode 2025-2029. Visi sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dijabarkan ke dalam misi-misi strategis yang kemudian diterjemahkan secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur dan dapat dievaluasi pencapaiannya.

Bagian selanjutnya menguraikan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai program prioritas pembangunan daerah. Strategi menggambarkan pilihan langkah dan pendekatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan arah kebijakan menyediakan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan prioritas. Bagian ini juga memuat program prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah Kabupaten Lembata dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah periode 2025-2029. Bab ini menyajikan daftar program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pelaksanaan program tersebut.

Bagian selanjutnya dalam bab ini membahas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merangkum kesimpulan substansial dari keseluruhan dokumen, menetapkan kaidah pelaksanaan yang jelas, serta menguraikan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai instrumen pengarah, bab ini dirumuskan untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, memungkinkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian bila diperlukan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Lembata memiliki luas sebesar 1.268,11 km² (126.810,5 ha), yang terdiri dari Pulau Lembata seluas 126.301,70 ha, Pulau Komba seluas 505,48 ha, Pulau Suanggi seluas 2,87 ha, Pulau Karang Pahangwa seluas 0,37 ha dan Pulau Karang Wa'toya seluas 0,30 ha. Secara geografis, Kabupaten Lembata terletak pada 08^o,04'-08^o,40' LS dan antara 123^o,57'-122^o,38' BT dengan batas wilayah administratif terdiri dari sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alor dan Kabupaten Alor dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Boleng, Selat Lamakera, dan Kabupaten Flores Timur.

Secara administratif, Kabupaten Lembata terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 144 desa dan 7 (tujuh) kelurahan, dengan Kota Lewoleba yang berada di Kecamatan Nubatukan sebagai ibu kota Kabupaten Lembata. Data administrasi Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lembata

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Luas (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Nagawutung	Loang	153,447	12,10	18	-
2	Wulandoni	Wulandoni	77,218	6,09	15	-
3	Atadei	Kalikasa	157,409	12,41	15	-
4	Ile Ape	Waipukang	99,859	7,87	17	-
5	Ile Ape Timur	Lamau	39,249	3,10	9	-
6	Lebatukan	Hadakewa	234,379	18,48	17	-
7	Nubatukan	Lewoleba	188,174	14,84	11	7
8	Omesuri	Balauring	203,095	16,02	22	-
9	Buyasuri	Wairiang	115,275	9,09	20	-
	Jumlah		1.268,105	100	144	7

Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042.

Setiap kecamatan memiliki karakteristik geografis dan administratif yang berbeda-beda, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah satuan pemerintahan terkecil (desa dan kelurahan). Struktur administratif Kabupaten Lembata sebagian besar didominasi oleh wilayah pedesaan, yang memberikan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan infrastruktur dasar.

Data administrasi di atas disajikan dalam bentuk peta sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 1 Gambar Wilayah Administrasi Kabupaten Lembata



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Peta ini menggambarkan pembagian wilayah Kabupaten Lembata ke dalam 9 (sembilan) kecamatan, yang masing-masing dibedakan dengan warna gradasi hijau dan cokelat untuk menunjukkan karakteristik topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di pesisir utara hingga perbukitan dan gunung berapi di bagian tengah dan selatan. Garis-garis batas wilayah kecamatan terlihat jelas, memberikan informasi spasial mengenai letak dan luas masing-masing kecamatan.

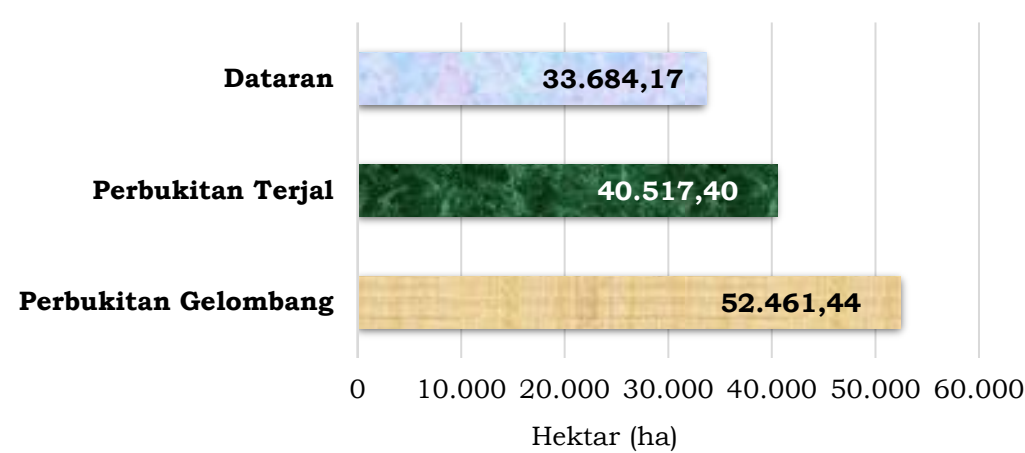
Ibu kota Kabupaten Lembata, Lewoleba, terletak di wilayah Kecamatan Nubatukan dan ditandai secara khusus di bagian tengah barat pulau. Selain itu, peta ini juga menyajikan elemen penting seperti sistem jaringan jalan, lokasi desa/kelurahan, serta titik-titik topografis utama, yang membantu dalam analisis spasial maupun dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Secara keseluruhan, peta ini berfungsi sebagai referensi visual dan geografis yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta penyusunan kebijakan sektoral berbasis wilayah dan potensi lokal di Kabupaten Lembata.

Secara geografis-geoekonomi, Kabupaten Lembata memiliki letak strategis sebagai dampak dari posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” dan didukung oleh jaringan aksesibilitas moda terpadu Tol Laut-Udara dan Darat serta berbatasan dengan wilayah sentra pertumbuhan dapat mendorong berkembangnya kerja sama ekonomi regional maupun domestik. Pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan kerja sama antar daerah yaitu kerja sama percepatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores (BPOLBF) pada tahun 2021 dan 2022, melalui perjanjian kerja sama Nomor HK.180/12/VI/2021 dan Nomor HK.180/124/X/2022 dan kerja sama pelayanan pelayaran lintasan Lewoleba Kabupaten Lembata ke Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi dengan perjanjian kerja sama Nomor HK.180/21/VIII/2012. Beberapa peninjauan kerja sama juga telah dilakukan diantaranya Alor-Lembata-Larantuka (Altaka)

yang berada dalam satu kawasan ekonomi, Kabupaten Belu dalam mempercepat pembangunan sumber daya ekonomi laut, maritim dan ekonomi kreatif, dan Kabupaten Nunukan berkaitan dengan perlindungan buruh migran.

Kondisi geografis Kabupaten Lembata secara morfologi diklasifikasikan menjadi wilayah dataran, wilayah perbukitan gelombang dan wilayah perbukitan terjal. Wilayah tersebut terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik dan vulkanik. Kondisi morfologi Kabupaten Lembata sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Kondisi Morfologi Kabupaten Lembata

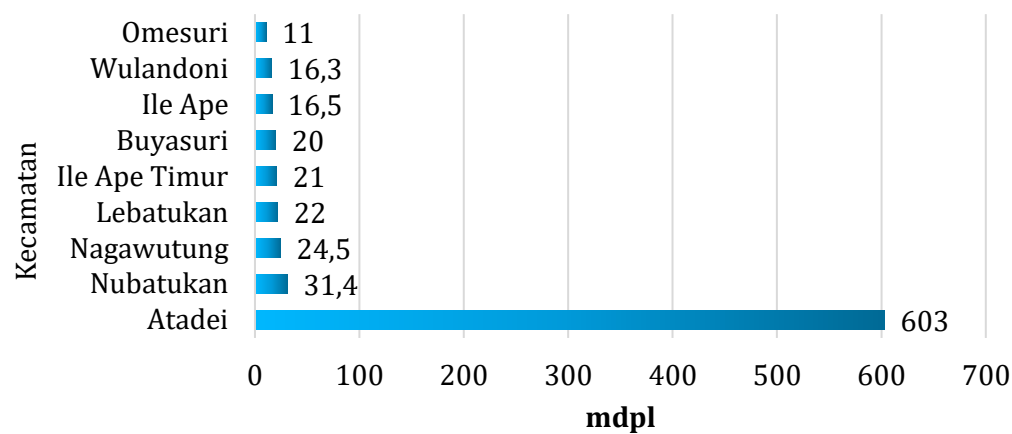


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, 2024

Kondisi morfologi Kabupaten Lembata menunjukkan keragaman bentang alam yang didominasi oleh wilayah perbukitan gelombang yang terbentang dari bagian Timur, Selatan dan Barat Kabupaten Lembata. Perbukitan gelombang ini umumnya dimanfaatkan untuk permukiman dan budidaya lahan pertanian karena memiliki kontur yang relatif stabil dibanding perbukitan terjal. Wilayah terbesar berikutnya yaitu perbukitan terjal yang terletak di Utara, Selatan dan Barat Kabupaten Lembata. Perbukitan terjal cenderung memiliki tingkat kemiringan tinggi sehingga lebih rentan terhadap erosi, longsor, dan memiliki keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur dan permukiman. Wilayah dataran yang merupakan area dengan luas paling kecil umumnya terletak di kawasan pesisir, terutama di bagian utara dan menjadi lokasi utama konsentrasi permukiman penduduk, pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, serta layanan publik. Dengan komposisi morfologi seperti ini, Kabupaten Lembata memiliki tantangan tersendiri dalam tata ruang, terutama dalam pengembangan wilayah yang mempertimbangkan kemiringan lahan, risiko bencana, dan kesesuaian lahan untuk berbagai fungsi pembangunan.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Lembata dibedakan berdasarkan ketinggian wilayah maupun kemiringan lahan disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.3 Grafik Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lembata



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

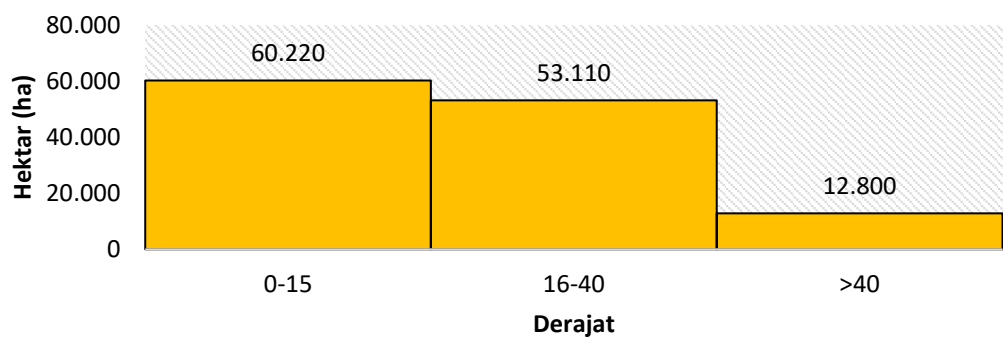
Grafik di atas menampilkan rata-rata ketinggian wilayah per kecamatan di Kabupaten Lembata dalam satuan meter di atas permukaan laut (mdpl). Data ini memberikan gambaran mengenai topografi wilayah yang sangat bervariasi antar kecamatan, mulai dari daerah pesisir hingga daerah dataran tinggi dan pegunungan.

Kecamatan dengan ketinggian tertinggi secara signifikan adalah Atadei menunjukkan bahwa wilayah ini didominasi oleh kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang curam. Kondisi ini memengaruhi tata guna lahan, jenis pertanian yang dapat dikembangkan, serta tingkat kerentanan terhadap erosi dan longsor.

Kecamatan yang memiliki ketinggian rata-rata yang jauh lebih rendah yaitu Omesuri, Wulandoni dan Ile Ape. Wilayah-wilayah ini umumnya merupakan daerah pesisir dengan kontur datar, yang lebih mudah diakses dan dikembangkan sebagai kawasan permukiman atau pusat aktivitas ekonomi. Kecamatan Buyasuri, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, dan Nubatukan memiliki ketinggian sedang. Meskipun tidak setinggi Atadei, variasi ketinggian ini tetap menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan lahan, konservasi lingkungan, serta mitigasi risiko bencana seperti banjir dan longsor. Perbedaan ketinggian antar kecamatan di Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki topografi yang kompleks. Kondisi ini memerlukan pendekatan perencanaan wilayah yang responsif terhadap karakteristik lokal, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pengelolaan risiko bencana.

Adapun kemiringan lahan di Kabupaten Lembata dikelompokkan menjadi 3 kisaran, yaitu kemiringan 0-1 derajat, 16-40 derajat, dan >40 derajat disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4 Grafik Kemiringan Kabupaten Lembata



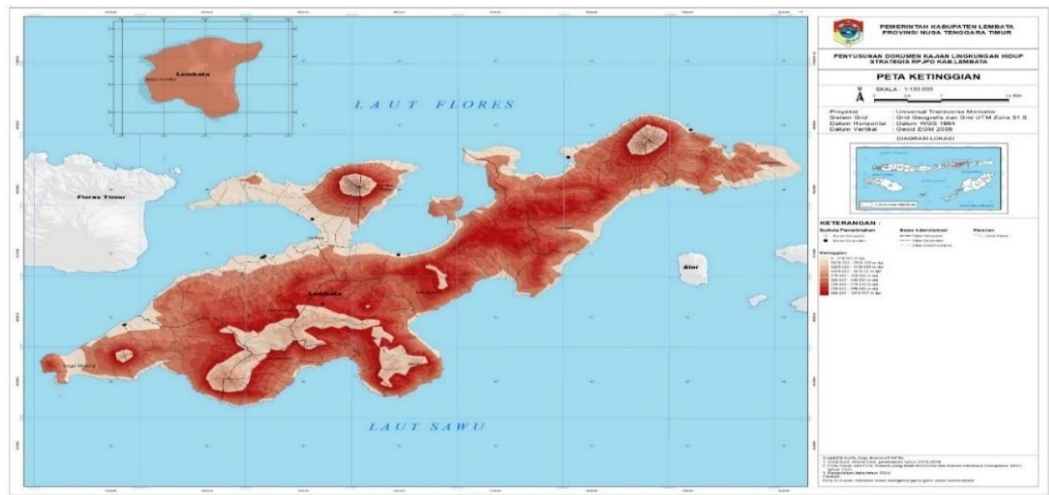
Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Grafik di atas menunjukkan kategori kemiringan 0–15 derajat sebagai lahan datar hingga landai dan merupakan wilayah terluas. Lahan jenis ini ideal untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat karena risiko erosi dan longsor relatif rendah. Lahan dengan kemiringan 16–40 derajat dikategorikan sebagai lahan berbukit yang lebih rentan terhadap risiko erosi jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Kategori terakhir, yakni lahan dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, tergolong sebagai kawasan curam dan sangat rawan terhadap bencana alam seperti longsor dan erosi berat. Oleh karena itu, lahan ini sebaiknya dibatasi penggunaannya dan difungsikan sebagai kawasan lindung atau konservasi.

Secara keseluruhan, lebih dari separuh wilayah Kabupaten Lembata berada dalam kelas kemiringan landai hingga sedang, yang mendukung pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Namun, keberadaan area curam yang signifikan menuntut kebijakan pengelolaan ruang yang bijak agar tidak memicu kerusakan lingkungan dan bencana.

Topografi Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk peta pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5 Peta Topografi Kabupaten Lembata



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Peta topografi di atas menggambarkan ketinggian wilayah Kabupaten Lembata dalam berbagai gradasi warna, yang merepresentasikan perubahan elevasi permukaan tanah dari wilayah dataran rendah hingga kawasan pegunungan. Peta ini sangat penting untuk memahami kondisi fisik wilayah sebagai dasar perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, serta pengelolaan sumber daya alam.

Secara umum, topografi Kabupaten Lembata didominasi oleh wilayah berbukit dan bergunung, dengan ketinggian paling ekstrem tampak tersebar di bagian tengah hingga selatan, serta di sisi timur pulau. Wilayah ini mengindikasikan keberadaan gunung-gunung aktif dan perbukitan terjal, termasuk Gunung Ile Lewotolok dan Gunung Uyelewun. Sebagian besar desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir, yang jumlahnya mencapai 86 desa, dan 65 desa berada di dataran tinggi.

Sementara itu, wilayah dataran rendah tersebar terutama di sepanjang garis pantai utara, barat laut, dan sebagian kecil di wilayah selatan. Area ini merupakan lokasi permukiman utama, pusat aktivitas ekonomi, serta kawasan pertanian dan perikanan. Wilayah dengan kemiringan dan ketinggian curam mendominasi sebagian besar struktur geomorfologi Lembata, yang terbentuk akibat proses tektonik dan vulkanik. Hal ini menjadikan sebagian besar wilayah Lembata rawan terhadap bencana seperti longsor, erosi, dan letusan gunung berapi.

Dengan komposisi topografi yang demikian, pengembangan wilayah di Kabupaten Lembata memerlukan pendekatan berbasis tata ruang yang sensitif terhadap kondisi alam dan perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Kabupaten Lembata memiliki kondisi geologis yang didominasi oleh Formasi Kiro dan Gunung Api Tua disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Formasi Geologi di Kabupaten Lembata

Formasi Geologi	Luas (ha)	Persentase (%)
Aluvial dan Endapan Koastal	2.679,97	2,11
Batuan Gunung api Tua	35.220,39	27,77
Batuan Gamping Korai	16.510,90	13,02
Formasi Kiro	44.359,78	34,98
Formasi Laka	157,18	0,12
Formasi Nangapanda	15.896,98	12,54
Formasi Waihekang	3.253,52	2,57
Produk Vulkanik Muda	8.731,82	6,89
Luas Total	126.810,54	100,00

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

Tabel di atas menunjukkan keragaman geologi yang kompleks, yang terbentuk dari proses-proses vulkanik, sedimentasi, dan tektonik dengan karakteristik dan potensi berbeda.

Formasi geologi di Kabupaten Lembata mencerminkan dinamika geologi yang tinggi, dengan dominasi batuan vulkanik dan sedimentasi laut yang membentuk topografi berbukit dan terjal. Kondisi ini

menuntut perencanaan pemanfaatan ruang yang berhati-hati, terutama dalam pembangunan infrastruktur, eksplorasi sumber daya alam, dan mitigasi risiko bencana.

Kondisi klimatologi Kabupaten Lembata ditandai dengan curah hujan dan hari hujan tahun 2023-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tiap Bulan Kabupaten Lembata Tahun 2023-2024

Bulan	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	359,6	22	281,8	20
Februari	495,3	19	81,0	20
Maret	70,3	13	336,5	18
April	8,6	3	121,5	11
Mei	31,6	7	33,2	2
Juni	71,7	8	0,8	1
Juli	7,4	1	24,0	4
Agustus	44,4	4	0	0
September	8,8	3	5,2	2
Oktober	55,0	10	15,0	2
November	118,7	8	44,6	7
Desember	355,7	12	436,3	5
Rata-rata	135,59		114,99	8

Sumber: BPS Kabupaten Lembata Tahun 2023,2024

Data klimatologis Kabupaten Lembata menunjukkan adanya variasi signifikan dalam jumlah curah hujan dan hari hujan bulanan antara tahun 2023 dan 2024. Informasi ini penting dalam memahami pola musim hujan dan kering yang berdampak pada sektor pertanian, sumber daya air, serta potensi bencana iklim seperti kekeringan dan banjir.

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata tergolong daerah beriklim agak kering dengan pola hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Terdapat sekitar 4 (empat) bulan basah (Desember–Maret) dan 6–8 bulan kering, dengan curah hujan <250 mm per bulan, yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan air dan ketahanan terhadap kekeringan. Selain itu, tingginya curah hujan dalam hari-hari tertentu menandakan adanya anomali iklim yang dapat berpotensi menimbulkan banjir lokal atau longsor di daerah perbukitan. Kondisi ini memerlukan kebijakan adaptif dalam pengelolaan sumber daya air, pertanian, dan pembangunan infrastruktur drainase yang tangguh terhadap perubahan cuaca ekstrem.

Kondisi wilayah ekologis Kabupaten Lembata merupakan suatu entitas yang terdiri atas komponen-komponen yang memiliki keterkaitan (hubungan fungsional) satu sama lain. Salah satunya sistem kompleks, yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah dan jenis komponen yang ada serta keragaman bentuk hubungan antara komponen-komponen tersebut, yaitu sistem ekologi (ekosistem). Konsep wilayah ekologis ini memberikan landasan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan karena dalam sistem ekologi ini

pembatasan kawasan didasarkan pada komponen ekologi yang tersusun di dalamnya yang saling berpengaruh atau terkait satu dengan yang lainnya dan berdasarkan adanya kesamaan karakteristik fenomena alami yang menyusunnya. Apabila pengelolaan kawasan dapat menjaga sistem ekologi yang ada di dalamnya maka keberlangsungan kawasan akan tetap terjaga walaupun di dalamnya terjadi perubahan-perubahan. Perencanaan pengembangan wilayah yang terpadu antara bagian hulu dan bagian hilir penting untuk dilakukan karena dalam jangka panjang apabila terjadi kerusakan atau tidak terjadinya keterpaduan dalam perencanaan di daerah hulu akan berdampak juga pada bagian hilir. Konsep wilayah ekologis di Kabupaten Lembata mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS), kemiringan lereng, ketinggian tempat, geomorfologi, dan geologi, bentang alam dan vegetasi alami.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Struktur ekonomi Kabupaten Lembata saat ini didominasi kegiatan berbasis sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Kabupaten Lembata memiliki keunggulan komparatif yang dapat dioptimalkan untuk memajukan daerah sesuai prinsip-prinsip pembangunan baik potensi lahan/kawasan maupun potensi komoditi meliputi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri serta sektor riil yang tidak diperdagangkan seperti hotel dan restoran, jasa perjalanan (*travel*), konstruksi, telekomunikasi dan jasa lainnya. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan rencana pola ruang kawasan dan budidaya sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lembata berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas 605 hektar atau sebesar 0,48% dari luas Kabupaten Lembata yang terdapat di Kecamatan Buyasuri. Hutan produksi yang mendominasi adalah kemiri dan kayu-kayuan;

2. Kawasan Pertanian

Alokasi ruang kawasan pertanian terdiri atas:

- 1) Kawasan tanaman pangan seluas 9.019 hektar atau sebesar 7,11% dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Atadei, Buyasuri, Ile Ape, Lebatukan, Nagawutung, Nubatukan, Omesuri, dan Wulandoni. Kawasan pertanian berpotensi untuk pengembangan berbagai komoditi pertanian tanaman pangan terutama jagung, padi lahan kering, kacang hijau, kacang tanah, sorghum, dan porang;
- 2) Kawasan hortikultura seluas 267 hektar atau sebesar 0,21% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan. Kawasan hortikultura yang memiliki nilai komparatif adalah alpukat, nenas, mangga, jeruk, bawang merah, cabai, dan jahe;

- 3) Kawasan perkebunan seluas 57.759 hektar atau sebesar 45,55% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan berpotensi untuk dikembangkan terutama komoditi kelapa, mente, tembakau, dan kapas;
- 4) Kawasan peternakan seluas 153 hektar atau sebesar 0,12% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Buyasuri, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Nubatukan, dan Omesuri. Kawasan peternakan dapat dikembangkan berbagai ternak besar dan kecil yaitu sapi, kuda, babi, kambing, domba dan ayam.
3. Kawasan Pergaraman
Untuk mendukung pemanfaatan potensi budidaya garam di Kabupaten Lembata dialokasikan lahan seluas 77 hektar atau sebesar 0,06% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Buyasuri, Ile Ape, Ile Ape Timur, Lebatukan, Nagawutung, Nubatukan, dan Wulandoni;
4. Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Lembata berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 18 hektar atau sebesar 0,014 % dari luas Kabupaten Lembata, yang berada di Kecamatan Atadei, Ile Ape, Lebatukan, Nubatukan, dan Omesuri;
5. Kawasan Peruntukan Industri
Alokasi ruang kawasan peruntukan industri seluas 11 hektar atau sebesar 0,009% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan. Industri yang berpotensi untuk dikembangkan seperti industri pakan ternak dan industri tepung ikan;
6. Kawasan Pariwisata
Alokasi ruang kawasan pariwisata adalah seluas 1.014 hektar atau sebesar 0,80% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan;
7. Kawasan Perikanan
Kabupaten Lembata memiliki wilayah lautan seluas 3.354,363 km² (72,59%) dengan garis pantai sepanjang 492,80 km² terletak di antara 2 (dua) kabupaten kepulauan yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor dan di antara 2 (dua) laut yang kaya dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya hayati perikanan yaitu Laut Flores dan Laut Sawu. Potensi sumber daya perikanan cukup melimpah dan variatif terdiri dari berbagai jenis ikan, baik pelagis maupun demersal yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, kombong, layang, tembang, teri, cendro, julung-julung, ikan terbang, kakap, kerapu, lenjam, baronang, cucut, pari, lobster, kepiting, teripang, rumput laut serta berbagai jenis kerang-kerangan.

Rencana pola ruang kawasan dan budidaya potensi sumber daya alam dalam wilayah Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk peta pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

Peta di atas menampilkan rencana pola ruang Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Peta ini berfungsi sebagai panduan spasial dalam mengarahkan pemanfaatan ruang darat dan perairan di seluruh wilayah administratif Kabupaten Lembata secara berkelanjutan.

Klasifikasi Zona Pemanfaatan Ruang, dibagi ke dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu:

1. Kawasan Lindung, termasuk:
 - ✚ Hutan lindung;
 - ✚ Kawasan sempadan pantai, sungai, dan danau;
 - ✚ Kawasan rawan bencana;
 - ✚ Kawasan perlindungan setempat dan kawasan konservasi perairan.
2. Kawasan Budidaya, meliputi:
 - ✚ Kawasan permukiman (perkotaan dan perdesaan);
 - ✚ Kawasan pertanian pangan dan hortikultura;
 - ✚ Kawasan perkebunan;
 - ✚ Kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
 - ✚ Kawasan pertambangan dan energi;
 - ✚ Kawasan industri, pariwisata, dan perdagangan;
 - ✚ Kawasan peruntukan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan peta di atas, wilayah tengah dan selatan Lembata didominasi oleh kawasan lindung dan hutan, yang perlu dijaga dari alih fungsi lahan demi menjaga keseimbangan ekologis. Wilayah pesisir utara dan barat diarahkan sebagai kawasan budidaya dan permukiman, mengingat aksesibilitas yang lebih baik dan topografi yang lebih datar. Selain itu, adanya alokasi khusus untuk pengembangan kawasan pariwisata dan perikanan terutama di wilayah pesisir, selaras dengan potensi sumber daya alam laut yang besar.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan 2 (dua) aspek pembatas dalam pelaksanaan pembangunan. Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam. Daya tampung lingkungan hidup adalah batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya seperti limbah.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana termuat di dalam KLHS RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata

No	Jenis Daya Dukung Dan Daya Tampung	Kategori*		Total
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Daya dukung air berdasarkan sistem grid	84.236,93	42.573,61	126.810,54

No	Jenis Daya Dukung Dan Daya Tampung	Luasan (HA) dan Kategori					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
2	JLH Penyedia Air Bersih (Ha)	37.225,69	25.365,48	56.092,27	7.197,15	929,96	126.810,54
3	JLH Penyediaan Serat	15.961,46	85.330,79	15.602,56	3.962,02	5.953,72	126.810,54
4	JLH Penyedia Energi	2.440,90	19.485,84	14.069,28	90.814,52	0,00	126.810,54
5	JLH Penyedia Sumber Daya Genetika	4.265,90	45.114,04	67.820,49	6.634,23	2.975,87	126.810,54
6	JLH Pengaturan Iklim	6.706,16	23.738,81	49.304,78	31.943,95	15.116,84	126.810,54
7	JLH Pengaturan Tata Air dan Banjir	16.032,00	7.931,84	12.090,46	38.999,45	51.756,79	126.810,54
8	JLH Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam	10.505,15	31.520,01	10.717,37	38.705,43	35.362,58	126.810,54
9	JLH Pengaturan Pemurnian Air	15.588,55	20.606,48	30.886,68	56.784,32	2.944,51	126.810,54
10	JLH Pengaturan Pemurnian Air Limbah	1.447,62	27.965,82	87.243,86	4.674,30	5.389,61	126.721,21
11	JLH Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	15.669,63	6.584,40	49.805,24	11.445,49	43.216,44	126.721,21
12	JLH Pengaturan Penyerbukan Alami	11.510,16	18.069,40	11.806,68	76.371,11	9.053,19	126.810,54
13	JLH Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit	11.510,16	18.069,40	11.806,68	76.371,11	9.053,19	126.810,54
14	JLH Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	49.772,28	55.871,37	6.406,86	10.979,48	3.780,55	126.810,54
15	JLH Budaya Rekreasi dan Ekoturisme	3.071,38	8.293,63	12.631,06	33.951,67	68.862,79	126.810,54
16	JLH Budaya Estetika	0,00	12.360,93	19.491,57	9.877,86	85.080,18	126.810,54

No	Jenis Daya Dukung Dan Daya Tampung	Luasan (HA) dan Kategori					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
17	JLH Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	16.137,00	31.914,25	69.991,73	4.417,44	4.350,13	126.810,54
18	JLH Pendukung Siklus Hara	8.962,88	39.304,14	68.627,79	3.668,64	6.247,09	126.810,54
19	JLH Pendukung Produksi Primer	1.355,10	22.661,41	29.758,22	67.297,51	5.738,30	126.810,54
20	JLH Pendukung Biodiversitas	8.296,67	18.891,01	9.661,85	10.551,33	79.409,68	126.810,54

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Lembata berdasarkan sistem grid menunjukkan adanya tekanan ekologis yang signifikan terhadap ketersediaan sumber daya alam, khususnya daya dukung air. Total luas wilayah yang dianalisis sebesar 126.810,54 hektar, terdiri atas 2 (dua) kategori kondisi lingkungan, yakni belum terlampaui dan telah terlampaui. Wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui mencakup luas 84.236,93 hektar, atau sekitar 66,4% dari total wilayah. Hal ini berarti sebagian besar wilayah Kabupaten Lembata masih memiliki kapasitas lingkungan yang memadai dalam menyediakan air sesuai kebutuhan ekosistem dan aktivitas manusia. Namun demikian, terdapat area seluas 42.573,61 hektar (sekitar 33,6%) yang dikategorikan daya dukung air telah terlampaui. Hal ini berarti kawasan ini telah mengalami tekanan melebihi kapasitas alaminya untuk menyediakan air bersih, akibat eksploitasi sumber daya, degradasi lahan, atau perubahan tata guna lahan yang tidak seimbang.

Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan daya dukung antar wilayah, serta mengindikasikan potensi risiko terhadap keberlanjutan lingkungan, terutama dalam konteks penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Jika tidak ditangani secara bijak, kondisi ini dapat memperburuk kerentanan terhadap bencana ekologis seperti kekeringan, gagal panen, dan krisis air bersih.

Adapun hasil daya dukung lahan pertanian "Odum, Howard dan Issard" Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Hasil Daya Dukung Lahan Pertanian "Odum, Howard dan Issard" Kabupaten Lembata Tahun 2023

Kecamatan	Luas Lahan yang ditanami (Ha)	Jumlah Pendu Duk	X (Lp/ Pd)	Produk tivitas (Ton)	KFM (2600 Kalori/ Hari/ Jiwa)	To tal	Keterangan
Nagawutung	1.844,00	10.410	0,177	1437,48	265	1	Mampu berswasembada
Wulandoni	2.775,00	9.157	0,303	1788,60	265	2	Mampu berswasembada
Atadei	3.059,00	7.734	0,396	3577,47	265	5	Mampu berswasembada

Kecamatan	Luas Lahan yang ditanami (Ha)	Jumlah Penduduk	X (Lp/ Pd)	Produktivitas (Ton)	KFM (2600 Kalori/ Hari/ Jiwa)	Total	Keterangan
Ile Ape	2.125,00	13.495	0,157	617,79	265	0	Tidak Mampu berswasembada
Ile Ape Timur	1.252,00	6.047	0,207	1127,00	265	1	Mampu berswasembada
Lebatukan	1.744,50	10.025	0,174	1687,94	265	1	Mampu berswasembada
Nubatukan	1.605,80	41.696	0,039	650,19	265	0	Tidak Mampu berswasembada
Omesuri	1.335,00	19.465	0,069	450,26	265	0	Tidak Mampu berswasembada
Buyasuri	1.520,00	21.777	0,070	476,02	265	0	Tidak Mampu berswasembada

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Lembata, 2023

Analisis daya dukung lahan pertanian Kabupaten Lembata menggunakan metode Odum, Howard, dan Issard menunjukkan variasi kemampuan kecamatan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya (kemandirian pangan). Indikator utama yang digunakan adalah rasio antara luas lahan yang ditanami, jumlah penduduk, dan produktivitas hasil pertanian, dibandingkan dengan Kebutuhan Fisiologis Minimum (KFM) sebesar 265 kg per kapita per tahun, setara 2.600 kalori/hari.

Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan daya dukung lahan antar kecamatan. Kecamatan dengan penduduk tinggi cenderung memiliki lahan pertanian terbatas atau produktivitas rendah. Hal ini menuntut adanya:

- ✚ Redistribusi program pangan dan intervensi teknologi pertanian di wilayah defisit.
- ✚ Diversifikasi tanaman pangan dan pengembangan sumber pangan lokal alternatif (seperti sorgum, ubi, dan porang).
- ✚ Perencanaan infrastruktur irigasi dan peningkatan produktivitas di wilayah yang berpotensi tapi belum optimal.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan menggambarkan kondisi kemandirian pangan yang didukung oleh ketahanan energi dan ketahan air yang saling berkaitan untuk menjamin keberlanjutan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan dan dilaksanakan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*). Aspek ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP), prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, konsumsi listrik per kapita (daya terpasang dan jumlah pelanggan listrik) dan penduduk berakses air minum.

A. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah atau negara mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri, melalui optimalisasi sumber daya lokal yang dimiliki, dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.

Konsep ini tidak hanya menyangkut kemampuan produksi pangan yang cukup dalam jumlah, tetapi juga mencakup keberlanjutan produksi, ketahanan terhadap gejolak eksternal, serta kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan secara mudah dan berkelanjutan. Kemandirian pangan diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan dengan 9 (sembilan) sub aspek. IKP dikategorikan sedang apabila nilai IKP berada pada 65,96-74,40 dan dikategorikan tinggi bila IKP >74,40. Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lembata berdasarkan Buku Indeks Ketahanan Pangan yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan (Angka)	80,94	92,12	79,42	81,38	81,69
Keterjangkauan (Angka)	56,15	56,81	58,46	65,68	65,54
Pemanfaatan (Angka)	62,63	64,36	64,05	62,20	64,85
Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	66,18	70,43	66,98	69,00	70,11

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/ Bapanas 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan secara keseluruhan mengalami fluktuasi, namun menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap. Pada indikator Ketersediaan Pangan menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dan dikategorikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Lembata memadai akan tetapi didominasi berasal dari luar daerah sedangkan dalam daerah masih terdapat ketidakstabilan dalam produksi dan ketersediaan pangan yang dapat disebabkan oleh faktor iklim, bencana alam, serta belum optimalnya pengelolaan produksi pangan.

Indikator Keterjangkauan Pangan mengalami tren peningkatan yang positif dan signifikan namun berada dalam kategori sedang. Hal ini mencerminkan perlunya perbaikan akses masyarakat terhadap pangan yang dipengaruhi oleh peningkatan daya beli maupun perbaikan dalam distribusi pangan, meskipun masih tergolong moderat.

Indikator Pemanfaatan Pangan menunjukkan pola peningkatan yang lambat tetapi relatif stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan moderat dalam kualitas konsumsi pangan yang mencakup aspek gizi, kebersihan, dan keragaman pangan, tetapi masih perlu upaya lebih besar untuk mencapai tingkat yang ideal antara lain melalui peningkatan kesadaran dan edukasi tentang konsumsi pangan bergizi, aman, dan beragam kepada masyarakat.

Indikator lainnya yang digunakan dalam mengukur kemandirian pangan adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) yang merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kerawanan pangan di suatu wilayah.

PoU menunjukkan persentase populasi yang mengonsumsi energi makanan di bawah kebutuhan minimum harian untuk menjalani hidup sehat dan aktif, yang secara nasional ditetapkan sebesar 2.150 kkal/kapita/hari. Data capaian PoU di Kabupaten Lembata belum dapat diukur karena belum/tidak tersedia data dimaksud dalam 5 (lima) tahun terakhir namun menjadi data target kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan. Adapun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Provinsi NTT sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan PoU NTT (%)	13,12	11,84	13,74	14,98	12,49

Sumber : BPS Indonesia, Tahun 2024

Data PoU Provinsi NTT dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara umum masih berada dalam kategori cukup tinggi, yang mencerminkan kerentanan konsumsi pangan masyarakat terhadap berbagai faktor seperti produksi, distribusi, daya beli, dan pola konsumsi yang masih fluktuatif.

Adanya fluktuasi PoU ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di NTT belum stabil, dan masih sangat rentan terhadap dinamika ekonomi, iklim, serta distribusi logistik. Tingginya angka PoU secara konsisten di atas 10% mengindikasikan perlunya:

- ✚ Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam dan bergizi, termasuk penguatan komoditas pangan alternatif seperti jagung, ubi, dan porang;
- ✚ Pembangunan infrastruktur distribusi pangan dan pasar, khususnya di daerah terpencil dan rawan;
- ✚ Intervensi edukasi gizi dan program penguatan konsumsi rumah tangga, untuk memastikan kecukupan energi bukan hanya dari sisi ketersediaan tetapi juga dari sisi pemanfaatan dan pola makan.

B. Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan energi serta penghematan energi. Kabupaten Lembata memiliki potensi selain energi listrik juga energi panas bumi di Desa Watuwawer Kecamatan Atadei yang telah memiliki kelayakan untuk dieksplorasi dalam upaya memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Lembata dan beberapa kabupaten disekitarnya.

Kondisi ketahanan energi di Kabupaten Lembata diukur dengan indikator daya terpasang dan jumlah pelanggan listrik sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan Listrik
Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Daya terpasang (KW)	7.799	9.527	10.993	10.880	10.907
Jumlah Pelanggan Listrik (pelanggan)	33.774	36.525	38.832	40.874	42.917

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2024

Ketersediaan dan pemanfaatan energi listrik merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat ketahanan energi dan aksesibilitas infrastruktur dasar di suatu daerah. Ketahanan energi yang baik berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi dan mendorong investasi. Data daya terpasang dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lembata selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, baik dari sisi kapasitas instalasi maupun jumlah rumah tangga atau entitas yang menikmati layanan listrik.

Total kapasitas pembangkit Listrik yang disuplai ke pelanggan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020-2022, meskipun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 dan Kembali meningkat tipis pada tahun 2024. Peningkatan daya pasang ini, mencerminkan adanya upaya pemerintah dan PLN dalam memperluas kapasitas pelayanan listrik, meskipun masih menghadapi tantangan distribusi dan keberlanjutan energi terutama di wilayah terpencil.

Daya terpasang sambungan listrik di Kabupaten Lembata menunjukkan kemajuan positif dalam elektrifikasi, baik dari segi kapasitas pembangkitan (*supply*) maupun cakupan layanan (*demand*). Meskipun demikian, masih terdapat Desa Dulir dan 3 (tiga) dusun yakni Dusun Liangbonok di Desa Wailolong Kecamatan Omesuri, Dusun Wade Desa Balurebong dan Dusun Bobu Desa Atakowa di Kecamatan Lebatukan yang belum sepenuhnya teraliri listrik.

C. Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Kabupaten Lembata memiliki potensi ketersediaan air permukaan yang didominasi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun air tanah. DAS ini sangat diperlukan untuk dasar penetapan strategi pengembangan sumber air bersih bagi rumah tangga di setiap kecamatan dan daya dukung untuk pertanian yang berkelanjutan. Kondisi ketahanan air dapat diketahui melalui luasan daerah aliran sungai yang tersebar di Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lembata

No	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
1	DAS Waikomo-Waipukang	14.884
2	DAS Teba (Waiteba)	7.476
3	DAS Maa-Waibajar-Waijarang	7.512
4	DAS Kima	6.347

No	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
5	DAS Keratawuwur	5.411
6	DAS Kimakamak-Waibelen	5.256
7	DAS Mea Belalarang	5,06
8	DAS Wailolong	4.908
9	DAS Atawuwur	3.562
10	DAS Kodohorang Teolor	3.113
11	DAS Wutun	2.450
12	DAS Suarlaleng	2.298
13	DAS Tapobaran-Nuhanera	1.974
14	DAS Loang-Belate	1.865
15	DAS Woilema	1.824
16	DAS Baobolak	1.521
17	DAS Riang	1.491
18	DAS Tebukloyo-Lewotukan	1.457

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Data di atas menunjukkan Kabupaten Lembata memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di seluruh wilayah dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung kebutuhan air masyarakat. Total cakupan DAS ini mencerminkan ketersediaan air permukaan sebagai potensi sumber daya air bagi rumah tangga, pertanian, dan konservasi lingkungan.

Dari total tersebut, DAS Waikomo–Waipukang merupakan DAS terbesar di Kabupaten Lembata, dengan luas mencapai 14.884 hektar, dan menjadi salah satu DAS utama dalam menopang kebutuhan air di pusat ibu kota kabupaten, yakni Kecamatan Nubatukan. DAS ini memiliki fungsi vital dalam suplai air bersih, irigasi, dan pengendalian banjir musiman.

Meskipun Kabupaten Lembata memiliki sebaran DAS yang cukup banyak, distribusinya tidak merata. Beberapa wilayah mengalami defisit air pada musim kemarau karena DAS tidak mampu menyimpan air secara optimal, antara lain akibat kerusakan penutup lahan (*land cover*), alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, dan minimnya infrastruktur konservasi air seperti embung dan bendungan kecil.

Ketahanan air juga dapat dilihat dari sebaran sumber mata air. Sumber mata air adalah aliran air tanah yang muncul dipermukaan tanah secara alami, yang disebabkan oleh terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat dan keluar dari batuan. Pada Umumnya mata air muncul di daerah kaki perbukitan atau bagian lereng, lembah perbukitan dan di daerah dataran. Terdapat 28 mata air yang berada di Kabupaten Lembata yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Adapun mata air terluas terdapat di Kecamatan Omesuri dengan Mata Air Wae Mereng dengan luas 3.830,12 Ha. Nama mata air dan luasnya menurut kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Data Mata Air di Kabupaten Lembata

Kecamatan	Nama Mata Air	Luas (Ha)
Kecamatan Atadei	Mata Air Wai Nedan	1.432,58
	Mata Air Wai Ular	1.432,58

Kecamatan	Nama Mata Air	Luas (Ha)
Kecamatan Buyasuri	Mata Air Wai Pae	233,43
	Mata Air Wei Botan 1	571,96
Kecamatan Lebatukan	Mata Air Wai Urang	1.286,85
Kecamatan Nagawutung	Mata Air Senarapuk	394,98
	Wai K	539,72
Kecamatan Nubatukan	Mata Air Platin	1.340,87
	Mata Air Wai Golo	927,77
	Mata Air Waisnorai	3.552,75
	Mata Wai Onggolok	3.552,75
	Mata Wai Wui	1.536,39
	Wai Blani	3.552,75
	Wai Bur	3.552,75
	Wai Kabelo	395,01
	Wai Karat	3.552,75
	Wai Kerit	3.552,75
	Wai Platin	1.340,87
Kecamatan Omesuri	Mata Air Wae Mareng	3.830,12
	Mata Air Wae Wolang	905,23
	Mata Air Wai Lain	903,75
	Mata Air Wei Werung	159,32
Kecamatan Wulandoni	Mata Air Napangmaung	1.258,25
	Mata Air Waisnorong	1.258,25
	Wai Matan I	672,80
	Wai Matan II	672,80
	Wai Or	733,48
	Wai Sia	733,48
Total		43.876,99

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Data lain yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan air adalah Cekungan Air Tanah (CAT) dan formasi hidrologi akuifer. Cekungan air tanah adalah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung, menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia. Kabupaten Lembata terdapat 5 (lima) CAT dengan luasnya sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata

No.	Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	CAT Iliwatulolo	54.982	43,54
2	CAT Lewoleba	53.060	42,03
3	CAT Wairiang	5.799	4,59
4	CAT Wapoe	9.737	7,71
5	CAT Balaurik	2.688	2,13
Jumlah		126.266	100

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029

Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa sebagian besar potensi air tanah terkonsentrasi hanya pada 2 (dua) cekungan utama, yaitu CAT Iliwatulolo dan CAT Lewoleba yang secara keseluruhan mencakup sekitar 85,57% dari total luas CAT. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan distribusi

sumber daya air tanah antar wilayah, dengan risiko eksploitasi yang lebih tinggi terjadi pada kedua cekungan tersebut. Ketergantungan yang tinggi pada CAT Iliwatulolo dan Lewoleba berimplikasi pada potensi ancaman krisis air, terutama jika aktivitas ekstraksi air tidak dikontrol secara ketat. Kondisi geografis Lembata sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap intrusi air laut semakin mempertegas pentingnya manajemen yang bijaksana dan berkelanjutan.

Di sisi lain, 3 (tiga) CAT minoritas lainnya, yaitu CAT Wairiang, CAT Wapoe, dan CAT Balaurik memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan air pada situasi darurat, khususnya jika terjadi gangguan pada 2 (dua) cekungan utama. Untuk memastikan pengelolaan sumber daya air tanah secara optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Lembata, diharapkan penetapan kawasan konservasi dan perlindungan daerah kawasan air dilakukan reboisasi dan penghijauan, menetapkan batas maksimal pengambilan air (*safe yield*), dan pembangunan sistem *real-time* terhadap eksploitasi dan kondisi air tanah guna menghindari eksploitasi berlebihan serta deteksi dini penurunan kualitas air tanah. Dengan demikian, maka mampu menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air tanah secara berkelanjutan serta mengantisipasi berbagai risiko lingkungan yang mungkin timbul di masa depan.

Formasi hidrologi akuifer juga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ketahanan air sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Formasi Hidrologi Akuifer di Kabupaten Lembata

No.	Akuifer	Luas (Ha)	Presentase (%)
1.	Penyebaran Luas	2.558	2,03
2.	Produktifitas Kecil	13.758	10,90
3.	Produktifitas Kecil Berarti	53.135	42,08
4.	Produktifitas Sedang	19.459	15,41
5.	Produktifitas Tidak Menerus	2.636	2,09
6.	Produktifitas Kelurusan Beragam	34.720	27,49
Jumlah		126.266	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Tahun 2022

Formasi hidrologi akuifer wilayah ini didominasi oleh kategori Produktivitas Kecil Berarti, diikuti oleh kategori Produktivitas Kelurusan Beragam serta Produktivitas Sedang. Ketiga kategori ini menguasai sekitar 84,98% dari total wilayah formasi akuifer. Dua kategori lainnya, yaitu Penyebaran Luas (2,03%) dan Produktivitas Tidak Menerus (2,09%) hanya mencakup luasan yang kecil, yang menandakan bahwa daerah ini memiliki kapasitas akuifer yang terbatas dalam menyediakan air secara kontinu untuk kebutuhan yang besar.

Dominasi kategori akuifer dengan produktivitas “kecil berarti” mengindikasikan bahwa Kabupaten Lembata menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air, terutama jika terjadi peningkatan permintaan akibat pertumbuhan populasi, aktivitas ekonomi, dan perubahan iklim. Di sisi lain, kehadiran akuifer dengan produktivitas

sedang hingga kelurusan beragam masih memungkinkan adanya pemanfaatan air tanah secara terkontrol untuk keperluan yang terencana secara baik.

Kondisi ketahanan air juga diukur dengan penduduk berakses air minum. Sumber air minum di Kabupaten Lembata khususnya di kota Lewoleba disuplai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mempunyai aktivitas dalam penampungan, penjernihan, dan penyaluran air bersih kepada rumah tangga, perusahaan, atau pengguna komersial lainnya. Data penduduk berakses air minum di Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Berakses Air Minum (%)	64,93	71,31	70,25	73,08	78,11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Akses terhadap air minum layak merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi bagian dari pemenuhan hak dasar penduduk. Data Kabupaten Lembata selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak.

Meskipun tren menunjukkan peningkatan, masih ada sekitar 21,89% penduduk pada tahun 2024 yang belum memiliki akses terhadap air minum layak. Kondisi ini banyak ditemukan di desa-desa terpencil, wilayah dengan topografi sulit (perbukitan terjal), serta kawasan yang belum terjangkau sistem PDAM atau jaringan distribusi air gravitasi. Akses air minum yang rendah berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama risiko penyakit berbasis air (*waterborne diseases*), produktivitas dan waktu terutama perempuan dan anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh air. Ketahanan pangan dan sanitasi, dan air bersih menjadi elemen dasar bagi kebersihan lingkungan dan konsumsi.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas pada suatu daerah berkontribusi pada kualitas hidup, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian ekosistem. Potensi lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Lembata dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara lestari. Kondisi lingkungan hidup berkualitas diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, persentase penanganan sampah, dan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah.

IKLH merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas dan keberlanjutan lingkungan di suatu wilayah. IKLH terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air

(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKLH Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKA (%)	NA	NA	50,00	53,33	53,33
IKU (%)	NA	95,01	95,16	95,94	95,32
IKL (5%)	NA	57,83	57,83	59,22	59,74
IKLH (%)	NA	51,15	70,01	71,88	71,74
Rating	NA	Sedang	Baik	Baik	Baik

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Lembata berada dalam kategori sedang, dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber air, meskipun pencemaran domestik dan aktivitas pertanian masih menjadi tantangan utama. Kualitas udara di Kabupaten Lembata konsisten berada pada kategori sangat baik. Hal ini sejalan dengan minimnya aktivitas industri besar, penggunaan energi terbarukan secara terbatas, serta tutupan vegetasi alami yang relatif masih terjaga. Indeks kualitas lahan tergolong sedang, dengan peningkatan stabil setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lahan, meskipun konversi hutan untuk permukiman dan lahan pertanian masih memberi tekanan terhadap ekosistem daratan.

Nilai IKLH Kabupaten Lembata berada dalam kategori “Baik”, dan menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, hal tersebut masih dalam margin wajar dan tidak memengaruhi kategori rating. Tren positif IKLH menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata telah berhasil menjaga kualitas lingkungannya melalui kebijakan pengelolaan air, perlindungan kawasan lindung, serta minimnya pencemaran udara. Namun, tantangan masih terdapat pada aspek kualitas air dan kualitas lahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Lingkungan hidup berkualitas juga ditandai dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%)	90,19	91,88	88,41	87,36	88,61

Sumber: BPS Lembata Kabupaten dan Provinsi NTT, Tahun 2024

Akses terhadap layanan sanitasi layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup, kesehatan lingkungan, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Kabupaten Lembata, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan tren fluktuatif selama periode 5 (lima) tahun terakhir.

Walaupun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi tergolong cukup baik, menunjukkan adanya kerentanan dalam keberlanjutan infrastruktur sanitasi, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan keterbatasan akses layanan dasar. Sanitasi yang tidak layak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan, penurunan kualitas air tanah akibat kontaminasi limbah domestik dan meningkatnya beban biaya kesehatan masyarakat.

Indikator lainnya adalah penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Penanganan Sampah Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jaktranas (%)	72,00	74,00	73,00	72,00	71,00
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Ton/Tahun)	14,88	14,83	15,17	15,11	15,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Pengelolaan sampah merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Di Kabupaten Lembata, data jumlah sampah yang tertangani setiap tahun menunjukkan adanya tren peningkatan yang moderat selama periode 2021–2024 akan tetapi persentase penanganan relatif menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh volume timbunan sampah setiap tahun meningkat tidak diikuti dengan penanganan yang baik. Sebagian besar masyarakat, terutama di pedesaan atau wilayah terpencil, masih belum mendapatkan layanan pengelolaan sampah secara terorganisir, dan kemungkinan besar masih melakukan pembakaran sampah, pembuangan ke alam terbuka, atau penanganan mandiri lainnya. Implikasinya adalah tingkat penanganan sampah belum sebanding dengan volume timbunan, berisiko menyebabkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan penurunan estetika wilayah. Cakupan layanan pengumpulan sampah yang rendah mengindikasikan perlunya sarana dan prasarana investasi mulai dari proses pengumpulan sampah sampai pada pengelolaan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), serta penguatan kelembagaan dinas kebersihan.

Indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah merupakan alat ukur untuk memastikan keseimbangan penggunaan ruang untuk tujuan pembangunan ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati dalam setiap kebijakan sektor. Adapun Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Lembata disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	NA	NA	NA	NA	NA

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah belum dapat dilakukan pengukuran karena belum tersedia data, baik di Kabupaten Lembata maupun di Provinsi NTT dalam 5 (lima) tahun terakhir namun menjadi data target kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Lembata memiliki potensi bencana alam yang cukup besar seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, kekeringan, kebakaran lahan, banjir, abrasi, dan longsor. Kondisi kebencanaan di Kabupaten Lembata dapat diukur dengan menggunakan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat potensi ancaman bencana dan kerentanannya terhadap masyarakat, lingkungan, serta infrastruktur di suatu wilayah. Skor IRB dihitung berdasarkan kombinasi antara bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) suatu daerah. IRB dikategorikan tinggi bila skor di atas 144 (kelas 3) dan kategori sedang dengan skor 13-144 (kelas 2). IKD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi dan pulih dari bencana dengan memitigasi risiko, beradaptasi terhadap kondisi, meminimalkan dampak serta pulih secara sosial, ekonomi dan lingkungan setelah bencana terjadi. Data IRB dan IKD Kabupaten Lembata berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB) (angka)	149,50	149,50	135,27	123,81	126,22
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (angka)	NA	NA	0,47	0,50	0,42

Sumber Data: Buku IRBI - BNPB, 2024

Berdasarkan data IRB di atas, Kabupaten Lembata berhasil keluar dari kategori risiko tinggi sejak tahun 2022, namun tetap berada dalam kondisi “sedang” yang menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2023 Kabupaten Lembata memiliki 40 jenis bencana dari 46 jenis bencana nasional. Faktor yang berpengaruh terhadap risiko dominan di Kabupaten Lembata adalah letusan gunung api Ile Lewotolok, gempa bumi dan tsunami sebagai daerah kepulauan di zona sesar aktif, dan bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, abrasi pantai, longsor, dan erosi yang terjadi di wilayah perbukitan dengan kemiringan >40%.

Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Lembata, yaitu: a) Kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Wulandoni; b) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni; c) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri; d) Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi yang terdapat di seluruh Kecamatan; e) Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Kecamatan, dan Kecamatan Omesuri; f) Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Buyasuri dan Kecamatan Nubatukan; g) Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni; Naga Wutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni;; dan h) Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan.

Oleh karena itu daerah dan masyarakatnya harus tangguh bencana, memiliki kemampuan untuk bertahan, pulih dan beradaptasi juga mampu melakukan perbaikan terhadap kondisi bencana. Bencana tidak saja menimbulkan kerugian baik nyawa maupun harta benda lainnya tetapi juga menimbulkan kerusakan infrastruktur sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional dan daerah.

Indikator lain yang digunakan adalah penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang belum tersedia data capaian penurunan setiap tahunnya di Kabupaten Lembata. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Lembata terus berupaya melakukan berbagai kegiatan terutama penerapan ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan pemerintah,

masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan/LSM dan akademisi untuk menurunkan intensitas emisi GRK.

7. Demografi

Demografi merupakan gambaran karakteristik penduduk di suatu daerah berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan keberadaan masyarakat adat. Gambaran demografi di Kabupaten Lembata dapat diketahui melalui indikator perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pertahun yaitu angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu, tingkat kepadatan penduduk yaitu ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, dan rasio penduduk yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan penyusunan kebijakan sosial-ekonomi daerah. Data Demografi selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19 Data Demografi Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	135.930	137.471	138.706	141.391	143,345
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,39	1,48	1,57	1,40	1,38
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	107,34	107,00	110,4	111,65	113,19
Rasio Penduduk (%)	93,00	92,00	92,94	93,73	94,10

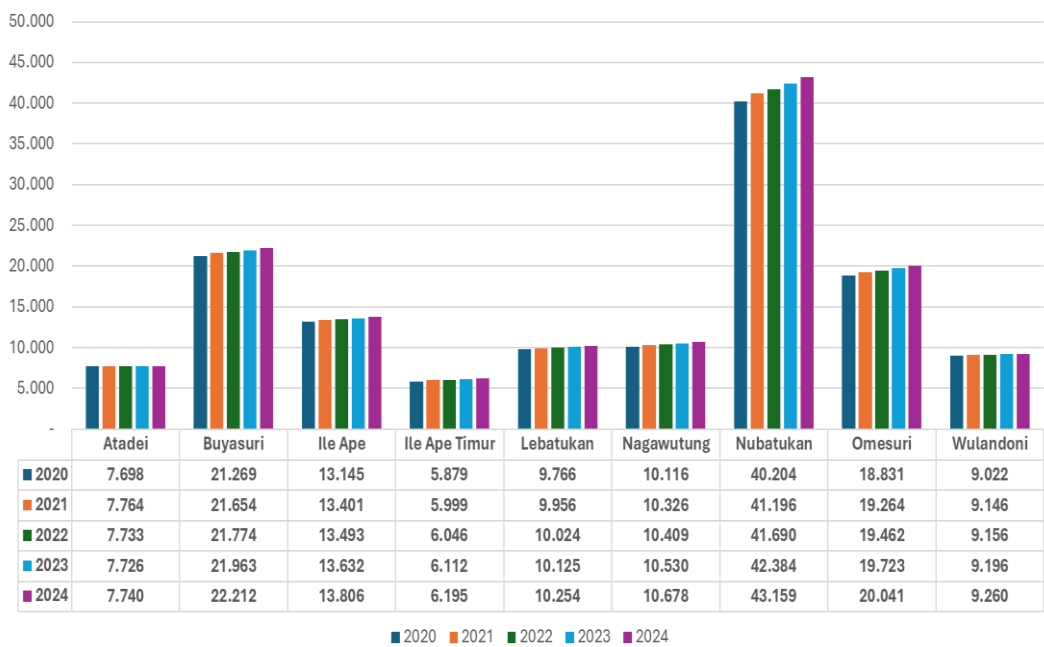
Sumber: BPS Kabupaten Lembata, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Lembata setiap tahun mengalami tren peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya tren pertumbuhan populasi yang stabil, yang dapat berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja, dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan persentase pertambahan penduduk setiap tahun relatif terkendali yang dapat mencerminkan keberhasilan program pengendalian penduduk atau penurunan angka kelahiran secara bertahap. Kepadatan penduduk meningkat secara perlahan, namun masih dalam kategori rendah hingga sedang secara nasional. Konsentrasi penduduk tertinggi umumnya berada di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Nubatukan, sementara daerah perbukitan dan pesisir cenderung memiliki kepadatan lebih rendah. Sedangkan rasio penduduk menunjukkan peningkatan rasio ini mencerminkan keseimbangan struktur gender yang cenderung membaik dan mendekati angka ideal.

Pertumbuhan penduduk yang stabil memberikan peluang bagi peningkatan produktivitas daerah, namun juga menuntut penyediaan infrastruktur dasar dan layanan publik yang merata. Pemerintah daerah perlu memperhatikan penyebaran penduduk, agar tidak terjadi

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Rasio penduduk yang seimbang menunjukkan kondisi sosial yang stabil, namun tetap diperlukan perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak. Pertumbuhan penduduk per kecamatan disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7 Grafik Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lembata mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, walaupun laju pertumbuhannya bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata secara umum mengalami pertumbuhan demografi yang stabil, namun distribusi penduduk tidak merata. Beberapa kecamatan seperti Nubatukan dan Omesuri menunjukkan konsentrasi yang tinggi, sementara kecamatan lain seperti Ile Ape Timur dan Atadei tetap tergolong jarang penduduk. Wilayah dengan penduduk besar seperti Nubatukan, Buyasuri, dan Omesuri memerlukan perhatian lebih dalam penyediaan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sementara itu, kecamatan dengan penduduk rendah berpotensi dikembangkan melalui peningkatan aksesibilitas, program padat karya, dan penguatan sektor pertanian atau wisata.

Kepadatan penduduk merupakan indikator penting dalam mengukur distribusi penduduk terhadap luas wilayah, yang berdampak langsung pada perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur. Data kepadatan penduduk Kabupaten Lembata menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lembata
Tahun 2022-2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Tahun		
	2022	2023	2024
Nagawutung	56,1	56,7	59,5
Wulandoni	75,4	75,72	76,25
Atadei	51,4	51,36	51,46
Ile Ape	139,3	140,74	142,54
Ile Ape Timur	158	159,75	161,92
Lebatukan	41,4	41,86	42,39
Nubatukan	251,7	255,88	260,56
Omesuri	120,2	121,81	123,78
Buyasuri	208,8	210,66	213,04
LEMBATA	110,4	111,65	113,19

Sumber : BPS Lembata Tahun 2024

Data kepadatan penduduk Kabupaten Lembata menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Adanya peningkatan kepadatan penduduk dari setiap tahun di Kabupaten Lembata mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang stabil di sebagian besar wilayah kabupaten, meskipun laju pertumbuhannya bervariasi antar kecamatan. Setiap kecamatan menunjukkan peningkatan kepadatan dari 2022 ke 2024, meskipun dalam skala yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan demografi yang merata, serta potensi perpindahan penduduk antar kecamatan.

Kondisi demografi juga mencakup semua karakteristik penduduk termasuk di dalamnya etnik dan budaya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Tahun 2023, terdapat 23 jumlah wilayah adat dengan status teregistrasi, 11 terverifikasi, 5 (lima) tersertifikasi dan 31 dalam status pengakuan yang berasal dari 7 (tujuh) kabupaten/kota tidak termasuk Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata sampai hari ini belum memiliki sebuah produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Lembata dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat di Kabupaten Lembata memiliki 2 (dua) suku, yaitu Suku Lamaholot yang menghuni wilayah Lembata bagian tengah sampai ke bagian barat, dan Suku Edang yang menghuni wilayah Lembata bagian timur. Masyarakat Lembata menjalani serta meyakini terkait dengan hukum adat atau kebiasaan yang telah diwariskan para leluhur.

Adapun data proyeksi penduduk Kabupaten Lembata menurut kecamatan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.21 Proyeksi Penduduk Kabupaten Lembata
Tahun 2024-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Kabupaten Lembata				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Atadei	7.757	7.775	7.792	7.810	7.827
2	Buyasuri	22.478	22.747	23.020	23.295	23.574
3	Ile Ape	13.992	14.181	14.372	14.565	14.762
4	Ile Ape Timur	6.285	6.375	6.466	6.559	6.653
5	Lebatukan	10.391	10.531	10.672	10.815	10.960
6	Nagawutung	10.836	10.996	11.159	11.324	11.492
7	Nubatukan	43.992	44.841	45.706	46.589	47.488
8	Omesuri	20.381	20.727	21.079	21.437	21.801
9	Wulandoni	9.329	9.399	9.469	9.540	9.611
	Total	145.442	147.572	149.735	151.934	154.167

Sumber : BPS Kabupaten Lembata, 2024

Proyeksi penduduk merupakan alat penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Jumlah penduduk Kabupaten Lembata diperkirakan mengalami peningkatan dari 143.345 jiwa pada tahun 2024 menjadi 154.167 jiwa pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi sebesar $\pm 7,5\%$ dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengelolaan ruang wilayah. Tren peningkatan pertumbuhan penduduk ini menunjukkan pertumbuhan demografi yang moderat dan stabil, yang perlu didukung dengan peningkatan pelayanan dasar di wilayah tersebut. Peningkatan proyaksi penduduk ini, tetap menuntut perhatian pada pengembangan desa dan infrastruktur lokal agar tidak terjadi kesenjangan wilayah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menggambarkan kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani, rohani dan sosial. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata mencakup kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, dan beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.

1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi menggambarkan kondisi karakteristik kesejahteraan masyarakat dari prospektif ekonomi. Kondisi kesejahteraan ekonomi diukur pencapaiannya melalui indikator ekonomi makro daerah yaitu laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, PDRB per kapita, pengeluaran per kapita, tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saling berkaitan. Satu indikator berpengaruh kepada indikator lainnya dan berkontribusi terhadap kondisi yang dicapai provinsi maupun nasional.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi penting yang mencerminkan perubahan kinerja ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dikatakan ideal apabila laju pertumbuhannya berada pada 5-7%. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Lembata	NTT	Nasional
2020	-0,35	-0,84	-2,07
2021	1,44	2,52	3,70
2022	2,56	3,05	5,31
2023	2,46	3,52	5,05
2024	3,34*	3,73	5,03

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024
Ket * Angka Sementara, pengukuran di Bulan Maret tahun berjalan

Tabel di atas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata tumbuh secara positif dan stabil pasca pandemi, tetapi pertumbuhannya masih lebih lambat dibanding provinsi dan nasional. Struktur ekonomi Lembata yang masih dominan pada sektor primer (pertanian, perikanan, kehutanan) menjadi salah satu faktor lambatnya laju pertumbuhan. Rendahnya kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan, pariwisata) juga menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga diketahui melalui struktur ekonomi yang diukur dengan distribusi persentase kontribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Adapun distribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.23 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Sektor Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.49	35,69	36,76	37,19	37,05
2	Pertambangan dan Penggalian	0,46	0,45	0,46	0,47	0,48
3	Industri Pengolahan	0,21	0,20	0,21	0,22	0,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03
6	Konstruksi	6,83	7,20	7,17	7,39	7,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,02	7,30	7,68	7,94	8,16
8	Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,32	2,41	2,41	2,52

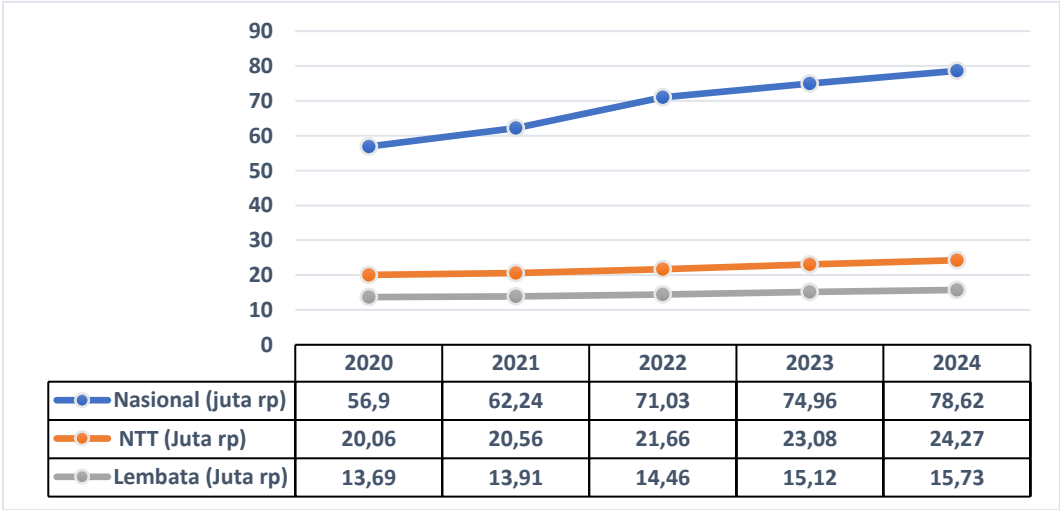
No	Sektor Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,19	0,21	0,21	0,22
10	Informasi dan Komunikasi	6,71	6,89	6,85	6,71	6,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,43	0,45	0,46	0,45	0,47
12	<i>Real Estate</i>	1,46	1,42	1,49	1,42	1,40
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,93	28,06	26,88	26,42	26,43
15	Jasa Pendidikan	7,25	7,11	6,80	6,57	6,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,65	1,74	1,66	1,65	1,71
17	Jasa Lainnya	0,85	0,81	0,79	0,77	0,73

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Lembata selama periode 2020 hingga 2024 masih didominasi oleh sektor primer khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan aktivitas ekonomi berbasis lahan dan sektor pemerintahan, sementara kontribusi sektor sekunder dan tersier masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan ketergantungan terhadap alam dan anggaran pemerintah, serta rendahnya produktivitas sektor industri dan jasa. Dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan ke sektor tersier.

B. PDRB Per Kapita

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu daerah adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita (pendapatan per kapita per tahun) mencerminkan tingkat rata-rata pendapatan atau *output* ekonomi yang dihasilkan per individu di suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin tinggi pula daya beli, kesejahteraan ekonomi, dan kapasitas fiskal suatu daerah. PDRB per kapita Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini. Gambar 2.8 PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata , NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024



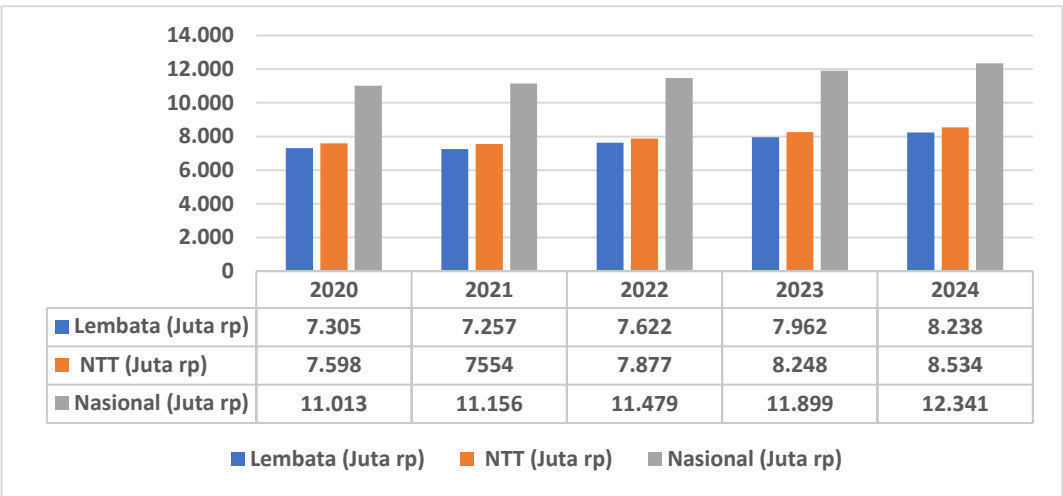
Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan pendapatan per kapita per tahun Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional mengalami peningkatan akan tetapi capaian Kabupaten Lembata masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Lembata belum cukup cepat untuk mengejar ketertinggalan, terutama dari sisi produktivitas individu. Struktur ekonomi yang masih dominan pada sektor primer (pertanian dan perikanan) menyebabkan rendahnya nilai tambah per kapita. Keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan rendahnya kapasitas industri lokal juga menjadi faktor pembatas peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat.

C. Pengeluaran Per Kapita

Indikator pengeluaran per kapita merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM. Pengeluaran per kapita digunakan untuk mengukur rata-rata pengeluaran individu dalam setahun di suatu wilayah. Kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lembata , NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tingkat pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Lembata mengalami tren peningkatan yang moderat, mencerminkan adanya perbaikan daya beli dan konsumsi rumah tangga secara perlahan. Pengeluaran per kapita merupakan ukuran penting yang mencerminkan rata-rata kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok seperti pangan maupun kebutuhan nonpokok seperti pendidikan, transportasi, dan rekreasi.

Perbandingan angka pendapatan per kapita antara Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional, menunjukkan bahwa pengeluaran per-kapita Lembata hanya sekitar 66,8% dari rata-rata nasional, serta masih berada di bawah rerata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Lembata belum sejajar dengan wilayah lain, dan memerlukan intervensi yang lebih kuat melalui penguatan sektor ekonomi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.

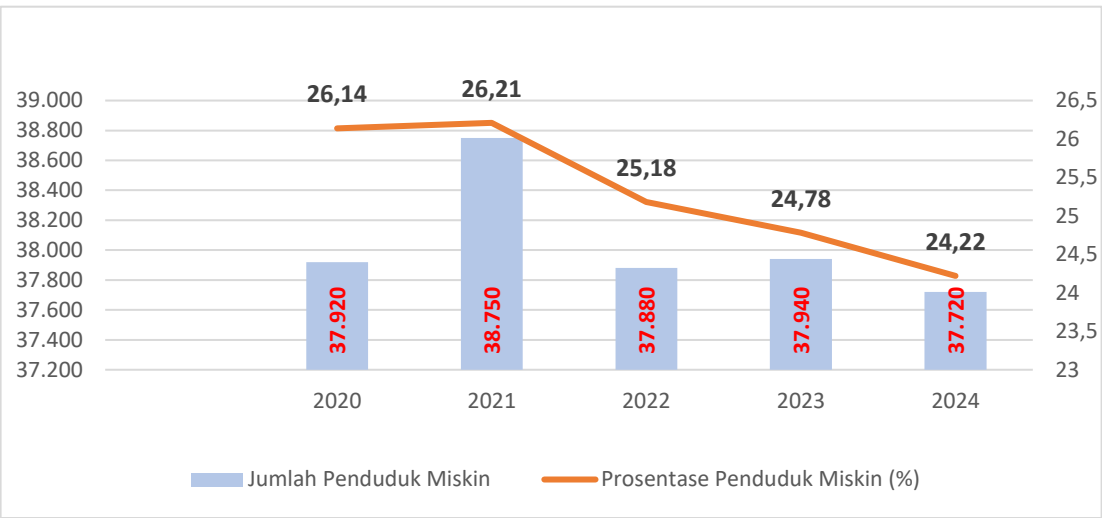
Meskipun terjadi peningkatan pengeluaran per kapita di Lembata dalam 5 (lima) tahun terakhir, kesenjangan daya beli antar wilayah masih cukup mencolok. Kenaikan konsumsi belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yang berarti perlunya penguatan ekonomi rumah tangga di tingkat lokal agar pertumbuhan lebih inklusif dan merata.

D. Kemiskinan

Kondisi kemiskinan diukur melalui indikator angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan. Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya dalam satu wilayah. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama 1 (satu) bulan.

Data capaian angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.10 Kemiskinan Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lembata menunjukkan tren penurunan secara bertahap, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun dari segi persentase terhadap total populasi. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Meski ada kemajuan, angka kemiskinan di Lembata masih cukup tinggi, di mana 1 (satu) dari setiap 4 (empat) penduduk masih hidup dalam garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan peluang ekonomi masih menjadi hambatan signifikan dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun di Kabupaten Lembata merupakan indikator positif dari perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, tingginya persentase penduduk miskin di atas 24% menunjukkan bahwa kemiskinan masih merupakan isu sentral pembangunan daerah yang memerlukan pendekatan komprehensif, lintas sektor, dan berbasis wilayah.

Adapun perbandingan capaian angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan garis kemiskinan antara Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, dan nasional tahun 2020-2024 disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.24 Kemiskinan Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Kemiskinan (%)		
	Lembata	NTT	Nasional
2020	26,14	21,21	10,19
2021	26,21	20,44	9,71
2022	25,18	20,23	9,57
2023	24,78	19,96*	9,36*
2024	24,22	19,02	8,57

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Ket * Angka Sementara, pengukuran di Bulan Maret tahun berjalan

Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Lembata secara konsisten jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi NTT dan nasional. Grafik dan data menunjukkan bahwa setiap tahun, lebih dari seperempat penduduk Lembata hidup di bawah garis kemiskinan, sementara rata-rata provinsi dan nasional berada pada tingkat yang lebih rendah dan cenderung terus menurun.

Kemiskinan di Lembata menurun dari 26,14% menjadi 24,22% dalam 5 (lima) tahun, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan NTT dan nasional. Laju penurunan kemiskinan di Lembata lebih lambat dibanding wilayah lain sehingga perlu upaya ekstra dan strategis khusus, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah ini. Kesenjangan sosial masih menjadi tantangan utama, dengan lebih dari satu dari empat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, perbandingan jumlah penduduk miskin antara Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	Lembata	NTT	Nasional
2020	37.920	1.173.530	26.424.020*
2021	38.750	1.146.280	27.542.770*
2022	37.880	1.149.170	26.161.160*
2023	37.940	1.141.110*	25.898.550*
2024	37.720	1.107.940	24.054.720

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Ket * Angka Sementara, pengukuran di Bulan Maret tahun berjalan

Berdasarkan data di atas, maka Kabupaten Lembata belum berhasil secara signifikan dalam menekan jumlah penduduk miskin selama periode 2020–2024. Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Lembata menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan belum efektif dalam menciptakan penurunan yang stabil dan konsisten. Apalagi jika dibandingkan dengan tren penurunan di tingkat Provinsi NTT maupun nasional, pencapaian Kabupaten Lembata masih sangat lambat dan tertinggal.

Beberapa faktor penyebab tingginya angka kemiskinannya di Kabupaten Lembata antara lain: struktur ekonomi yang rentan karena dominasi sektor primer, keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya peluang kerja formal, rendahnya produktivitas ekonomi, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Demikian pula perbandingan garis kemiskinan antara Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26 Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)		
	Lembata	NTT	Nasional
2020	388.577	403.005	458.947
2021	421.901	415.116	485.168
2022	464.542	460.823	535.547
2023	508.575	507.203	550.458*
2024	517.948	527.275	595.242

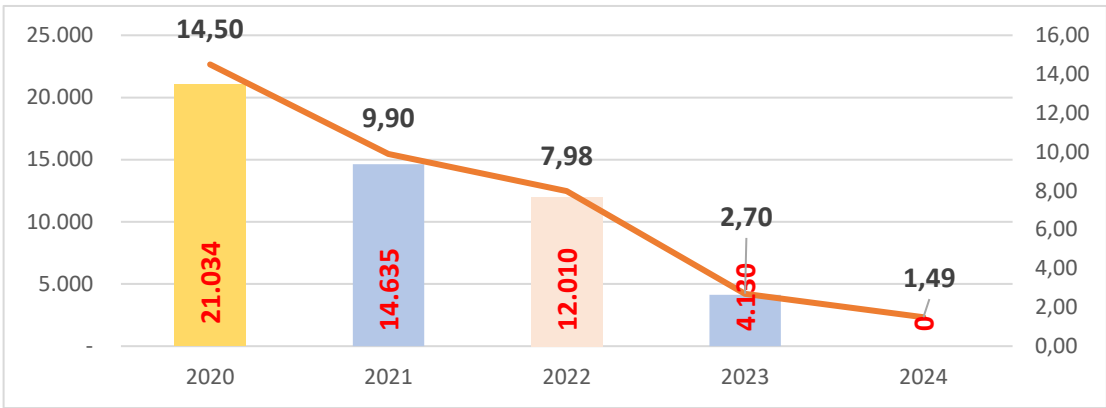
Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Ket * Angka Sementara, pengukuran di Bulan Maret tahun berjalan

Berdasarkan data tersebut, maka garis kemiskinan Kabupaten Lembata terus meningkat secara konsisten selama periode 2020–2024, meskipun secara absolut lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dan nasional. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan peningkatan biaya hidup dan inflasi kebutuhan dasar yang dapat berkontribusi pada sulitnya mengurangi angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Lembata. Masih rendahnya garis kemiskinan di Kabupaten Lembata dibandingkan tingkat nasional mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik konsumsi, aksesibilitas produk pokok, serta tingkat kesejahteraan yang berbeda antara Lembata, Provinsi NTT, dan Indonesia secara keseluruhan.

Capaian penurunan kemiskinan juga diukur melalui indikator angka kemiskinan ekstrem yang merupakan persentase penduduk miskin ekstrem terhadap jumlah penduduk seluruhnya dalam satu wilayah. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau memiliki pendapatan kurang dari Rp322.170 per kapita per bulan. Kemiskinan ekstrem merupakan salah satu indikator strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi daerah. Capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lembata Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Lembata dan Kemeko PMK, Tahun 2024

Adapun perbandingan capaian angka kemiskinan ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem antara Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, dan nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.27 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2021-2024

Tahun	Angka Kemiskinan Ekstrem (%)		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2021	9,90	6,44	4,00
2022	7,98	6,56	1,74
2023	2,70	3,93	1,12*
2024	1,49	2,82	0,83*

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia, Kemeko PMK Tahun 2024

Ket * Angka Sementara, pengukuran di Bulan Maret tahun berjalan

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata dalam 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Capaian penurunan ini bahkan jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata Provinsi NTT dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan ekstrem yang signifikan di Lembata dapat dikaitkan dengan beberapa faktor kunci, antara lain:

- ✚ Optimalisasi program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, bantuan pangan, dan subsidi;
- ✚ Program padat karya tunai desa yang menyerap tenaga kerja lokal;
- ✚ Peningkatan akses layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan;
- ✚ Dukungan pemberdayaan ekonomi produktif berbasis usaha mikro;
- ✚ Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Namun demikian, meskipun capaian penurunan signifikan, tetap ada tantangan besar dalam menjaga kesinambungan pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia miskin, rumah tangga tanpa penghasilan tetap, serta keluarga dengan keterbatasan akses pelayanan publik.

Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin ekstrem antara Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem		
	Kab. Lembata	Prov. NTT	Nasional
2020	21.034	608.900	10.448.120
2021	14.640	358.951	5.800.045
2022	12.010	370.456	5.590.724
2023	4.130	224.943	3.101.264
2024	2.320	Belum publikasi	3.560.000*

Sumber: BPS Kabupaten Lembata dan Kemenko PMK, 2024

Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem merupakan salah satu capaian penting pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Lembata dalam 5 (lima) tahun terakhir. Data menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan, bahkan jauh melebihi penurunan rata-rata nasional dan provinsi. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan dukungan pemerintah pusat.

Selain itu, terdapat data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Lembata *by name by address* yang merupakan data 40% penduduk Lembata dengan tingkat kesejahteraan terendah. Data P3KE terdiri dari desil 1-4, dimana seluruh desil 1 merupakan rumah tangga miskin/sangat miskin sedangkan hampir seluruh desil 2 sampai 4 merupakan rumah tangga hampir miskin / rentan miskin. Penentuan tingkatan desil berdasarkan indikator pekerjaan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala keluarga, bangunan rumah (atap, lantai, dinding), sumber air minum, fasilitas buang air besar (jamban dan septik tank). Data rekapitulasi P3KE sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29 Rekapitulasi Data P3KE Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	KEPALA KELUARGA PER DESIL				INDIVIDU PER DESIL				TOTAL KK	TOTAL INDIVIDU
		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Atadei	588	302	325	312	2.950	1.161	969	780	1.527	5.860
2	Buyasuri	2.558	845	752	600	12.624	2.898	2.083	1.419	4.755	19.024
3	Ile Ape	754	484	497	523	3.787	1.944	1.597	1.489	2.258	8.817
4	Ile Ape Timur	510	233	214	210	2.349	807	653	530	1.167	4.339
5	Lebatu kan	726	346	307	308	3.682	1.351	1.010	899	1.687	6.942
6	Nagawu tung	742	392	390	322	3.762	1.577	1.245	907	1.846	7.491
7	Nubatu kan	800	584	702	860	4.494	2.812	3.083	3.336	2.946	13.725
8I	Omesuri	2.081	725	600	591	10.275	2.569	1.794	1.451	3.997	16.089
9	Wulan doni	770	344	406	339	3.818	1.335	1.273	947	1.859	7.373
	TOTAL	9.529	4.255	4.193	4.065	47.741	16.454	13.707	11.758	22.042	89.660

Sumber : Kementerian Koordinator PMK, 2024

Berdasarkan tabel di atas data P3KE pada Kecamatan Buyasuri dan Omesuri merupakan kecamatan dengan jumlah keluarga maupun individu miskin ekstrem tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Berdasarkan data P3KE juga diketahui bahwa jumlah kepala keluarga dengan mata pencaharian petani dan nelayan sebanyak 18.166 KK (82,4%) terdiri dari petani sebanyak 17.194 KK (78%) dan nelayan 972 KK (4,4%). Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kecamatan dengan kemiskinan ekstrem tinggi dan tepat sasaran kepada kepala keluarga dengan mata pencaharian petani dan nelayan.

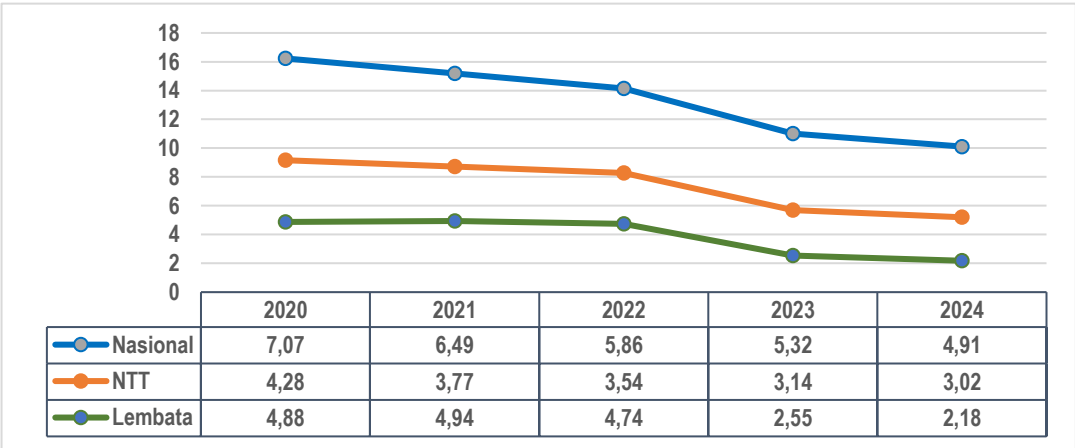
Penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem di Lembata dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci, antara lain: optimalisasi intervensi bantuan sosial tunai, bantuan pangan, subsidi energi, dan bantuan pendidikan, pelaksanaan program padat karya tunai desa yang meningkatkan serapan tenaga kerja di tingkat lokal, penyediaan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang semakin membaik, dan pendekatan pemberdayaan ekonomi produktif skala mikro berbasis rumah tangga.

Secara keseluruhan, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lembata perlu adanya kebijakan pemerintah mencakup komitmen pemerintah; keterpaduan program, anggaran dan sasaran; dan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan melalui strategi khusus berupa penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan memperhatikan prinsip-prinsip meliputi keterpaduan dan sinergi (komplementaris program), pendekatan multidimensi (memperhatikan kesetaraan gender, lanjut usia, disabilitas, kelompok rentan), tepat sasaran, koordinasi dan kerjasama multipihak, informatif, pemantauan dan pengendalian. Peningkatan koordinasi dilakukan melalui wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten. TKPK bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Salah satu fungsi TKPK adalah penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sesuai periodisasi RPJMD sebagai penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang memuat profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas dan penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) sebagai penjabaran dari RPKD.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Perbandingan kondisi pengangguran terbuka antara Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020- 2024

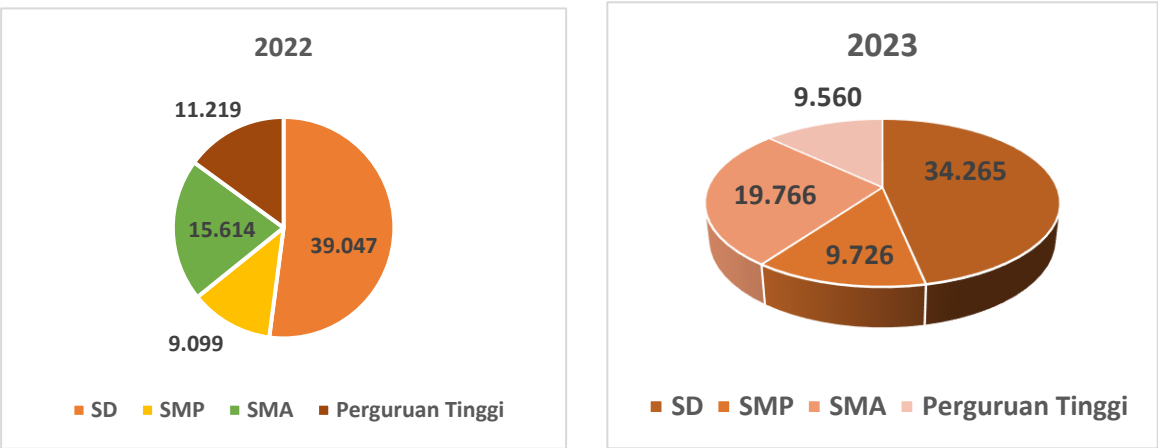


Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan, namun penurunan paling tajam dan impresif terjadi di Kabupaten Lembata. Untuk menjaga dan meningkatkan tren positif penurunan TPT di Kabupaten Lembata, maka perlu mempertahankan momentum penurunan dengan fokus pada sektor strategis yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan penguatan sektor unggulan.

TPT Kabupaten Lembata menunjukkan Penduduk Yang Bekerja (PYB) di Kabupaten Lembata masih didominasi oleh *unskilled labor* (pekerja tidak terampil) atau pekerja yang berpendidikan maksimum setingkat Sekolah Dasar disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13 Penduduk Yang Bekerja (PYB) Kabupaten Lembata Tahun 2022-2023



Sumber : BPS Kabupaten Lembata 2023

Berdasarkan data gambar di atas, Penduduk yang Bekerja (PYB) Kabupaten Lembata, terlihat distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

- ✚ Penurunan PYB berpendidikan SD dan SMP mengalami penurunan yang menunjukkan adanya pergeseran struktur tenaga kerja, terutama dari segmen pendidikan rendah (SD) menuju segmen yang lebih tinggi (SMP);
- ✚ Peningkatan PYB berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan signifikan. Hal ini mengindikasikan mulai terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal menengah dan tinggi sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Secara umum, terdapat pergesan positif struktur tenaga kerja di Kabupaten Lembata, yaitu dari dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah menuju tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi.

F. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi yang menggambarkan ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini antara 0-1. Semakin mendekati angka 0, distribusi pendapatan semakin merata; semakin mendekati angka 1, semakin tinggi ketimpangan pendapatannya. Jika Indeks Gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan maksimal, jika 0 maka ketimpangan tidak terjadi. Ketimpangan tinggi jika nilai koefisien rasio gininya 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,3-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30. Adapun perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30 Indeks Gini Kabupaten Lembata, NTT, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Gini (point)		
	Lembata	NTT	Nasional
2020	0,387	0,356	0,385
2021	0,430	0,339	0,381
2022	0,366	0,340	0,381
2023	0,303	0,340	0,388*
2024	0,316*	0,316	0,381

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan indeks gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional berada pada kelompok ketimpangan sedang. Indeks gini dengan kategori sedang di Kabupaten Lembata memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan termasuk pembangunan ekonomi yang kurang merata. Berdasarkan data tersebut, mengalami tren menurun signifikan di Kabupaten Lembata. Penurunan ini, mengindikasikan peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Ketimpangan di Lembata cenderung menurun dan membaik, bahkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan NTT dan Nasional pada tahun 2023–2024. Perbandingan dengan Provinsi NTT dan Nasional, Indeks Gini Lembata pada tahun 2021 tercatat sebagai yang tertinggi (0,430), jauh di atas Provinsi NTT (0,339) dan Nasional (0,381). Namun, perbaikan tajam

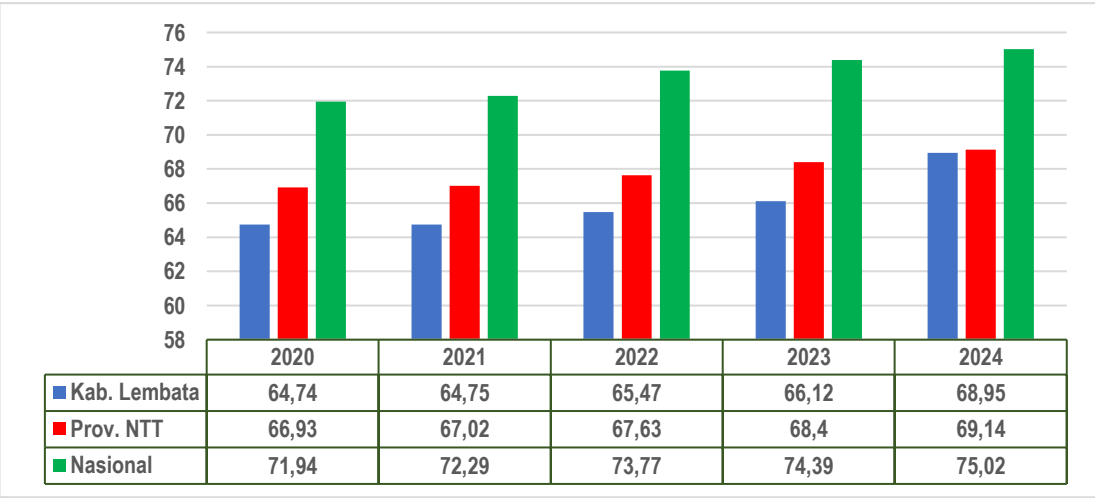
terjadi sejak 2022, membuat ketimpangan di Lembata pada 2023–2024 menjadi yang terendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal ini merupakan pencapaian positif yang menunjukkan keberhasilan kebijakan redistribusi pendapatan atau program pembangunan ekonomi di Kabupaten Lembata.

Penurunan signifikan Indeks Gini di Lembata dalam beberapa tahun terakhir merupakan pencapaian positif, namun perlu memastikan bahwa tren tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Fluktuasi tajam pada Indeks Gini, menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Lembata masih rentan terhadap perubahan struktural yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan redistribusi pendapatan untuk mengetahui kebijakan mana yang efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Lembata. Risiko munculnya kembali ketimpangan yang tinggi jika kebijakan redistribusi pendapatan atau pemerataan pembangunan tidak berkelanjutan.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk) yang diukur dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak. Klasifikasi IPM berada pada rentang 0-100. IPM dikatakan sangat tinggi bila >80, tinggi apabila berada pada skor 70-80, sedang apabila 60-70 dan rendah apabila <60. Perbandingan IPM antara Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14 IPM Lembata, NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan IPM Kabupaten Lembata, NTT, dan nasional mengalami tren meningkat. Peningkatan ini terjadi secara konsisten pada IPM Kabupaten Lembata terutama pada periode 2023–2024 dengan lonjakan IPM mencapai 2,83 poin dalam 1 (satu)

tahun. Meskipun IPM Kabupaten Lembata secara konsisten masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTT dan Nasional dengan kategori “sedang” namun gap atau selisih dengan Provinsi NTT cenderung mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan manusia di Lembata berjalan lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi.

Peningkatan IPM yang signifikan di Kabupaten Lembata merupakan sinyal positif tentang efektivitas kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Namun masih rendahnya IPM Kabupaten Lembata dibanding provinsi dan nasional menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Adanya percepatan pembangunan di tahun terakhir (2023–2024) perlu dikaji lebih lanjut mengenai program-program pembangunan apa saja yang secara nyata telah memberikan dampak positif signifikan. Risiko keberlanjutan peningkatan IPM harus diantisipasi agar lonjakan yang telah terjadi dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

2. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua menggambarkan kondisi kesehatan yang mencakup semua penduduk pada seluruh siklus hidup sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Kesehatan untuk semua masyarakat diukur pencapaiannya melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Keluarga Sehat (IKS), prevalensi stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, dan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Capaian indikator kesehatan Kabupaten Lembata adalah sebagai berikut:

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan penduduk di suatu wilayah, dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan, nutrisi, dan gaya hidup masyarakat. Capaian UHH Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31 Usia Harapan Hidup Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (tahun)	66,07	67,20	67,52	67,87	73,35

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Tahun 2024

Peningkatan Stabil UHH terjadi secara konsisten selama periode ini, dengan rata-rata kenaikan per tahun sekitar 0,5 tahun. Lonjakan menunjukkan adanya peningkatan kenaikan luar biasa yang perlu dicermati lebih lanjut, baik dari sisi faktor-faktor penyebab maupun keberlanjutannya di masa depan. Lonjakan ini kemungkinan besar berkaitan dengan perbaikan signifikan dalam bidang kesehatan

masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan, gizi masyarakat, atau kebijakan pemerintah daerah yang berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan dan sosial ekonomi penduduk.

Peningkatan tajam UHH tahun 2024 adalah pencapaian luar biasa yang perlu dipahami secara mendalam, terutama mengenai faktor penyebab spesifik yang berkontribusi besar terhadap peningkatan ini. Keberlanjutan kenaikan UHH menjadi tantangan utama, mengingat kenaikan drastis dalam waktu singkat dapat bersifat situasional atau temporer jika tidak diiringi kebijakan yang berkelanjutan. Fokus kebijakan kesehatan publik yang efektif selama 2020–2024 perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, mengingat dampak positif nyata yang telah dicapai. Potensi munculnya kesenjangan akses pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan harus tetap diwaspadai, agar kenaikan UHH dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lembata.

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat secara komprehensif. IKS mengukur berbagai aspek kesehatan rumah tangga, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat, akses layanan kesehatan dasar, gizi keluarga, dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Nilai IKS adalah 0-1 %. Nilai IKS <0,5 dikategorikan keluarga tidak sehat, nilai IKS 0,5-0,8 dikategorikan keluarga pra sehat dan nilai IKS >0,8 dikategorikan keluarga sehat. Data IKS Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat (angka)	0,14	0,16	0,17	0,19	0,19

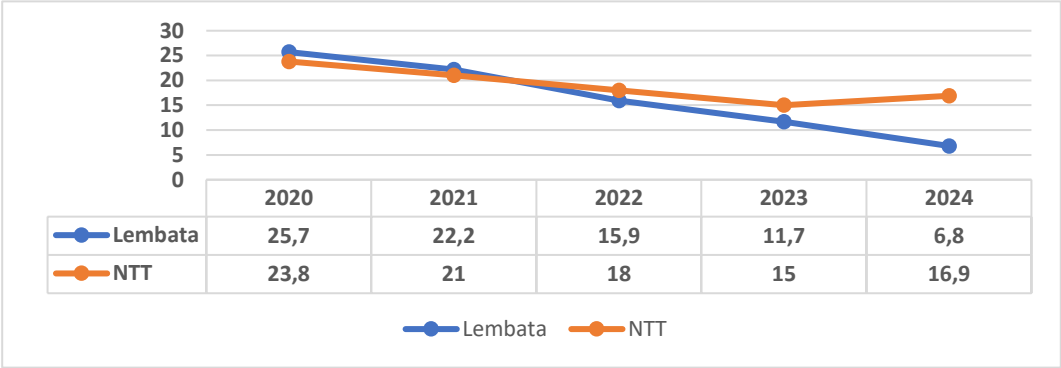
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan data indeks keluarga sehat Kabupaten Lembata dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, menunjukkan adanya peningkatan bertahap pada nilai Indeks Keluarga Sehat. Meskipun peningkatannya relatif kecil, tren ini menandakan adanya upaya perbaikan sistem kesehatan keluarga di daerah. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lembata menunjukkan tren perbaikan secara bertahap selama periode 2020–2024. Meskipun masih berada pada tingkat rendah, pencapaian ini menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem kesehatan keluarga di masa mendatang. Melalui penguatan layanan primer, intervensi gizi, perbaikan sanitasi, dan edukasi keluarga, diharapkan kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Lembata dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

C. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, yang terjadi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, dan produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, prevalensi stunting menjadi salah satu indikator penting kesehatan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia. Data stunting Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.15 Prevalensi Stunting Kabupaten Lembata dan NTT Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Data di atas menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Lembata setiap tahunnya mengalami penurunan signifikan, dalam 3 (tiga) tahun terdapat penurunan lebih dari 15 poin persen dan lebih cepat dari rata-rata Provinsi NTT (yang secara nasional merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting tinggi), pencapaian Lembata sangat baik. Percepatan penurunan terjadi konsisten setiap tahun terjadi penurunan signifikan, bukan sekadar fluktuasi. Hal ini mengindikasikan kebijakan dan intervensi pemerintah serta partisipasi masyarakat berjalan efektif.

Keberhasilan program intervensi penurunan signifikan stunting menandakan intervensi lintas sektor (kesehatan, pangan, air bersih, sanitasi, edukasi gizi, dan pelayanan ibu-anak) berjalan baik. Setelah penurunan tajam, tantangan berikutnya adalah mempertahankan capaian rendah ini serta mempercepat penurunan agar mencapai angka <5% (kategori baik oleh WHO). Pencegahan stunting baru, harus mulai bergeser dari sekadar penanganan kasus menjadi pencegahan stunting baru, mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga anak balita. Potensi ketimpangan wilayah dapat menyembunyikan desa/kelurahan dengan angka stunting masih tinggi sehingga perlu pemetaan mikro dan intervensi lebih terarah.

D. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mutu sistem kesehatan daerah secara keseluruhan. Data AKI Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33 Angka Kematian Ibu Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu (angka)	247,0/ 100.000	154,0/ 100.000	0	165,65/ 100.000	149,48/ 100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, BPS Lembata Tahun 2024

Data di atas menunjukkan angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Lembata dalam 5 (lima) tahun terakhir, memperlihatkan tren fluktuatif pada AKI, meskipun secara umum menunjukkan kecenderungan penurunan dibandingkan awal periode tahun 2020 sebesar 247 per 100.000 kelahiran hidup dan capaian tahun 2024 sebesar 149 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun angka kematian ibu di Kabupaten Lembata secara umum mengalami tren penurunan dibandingkan 2020, fluktuasi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan pelayanan kesehatan ibu masih cukup kompleks. Oleh karena itu, penguatan sistem kesehatan primer, perbaikan sistem rujukan, peningkatan edukasi keluarga, serta dukungan lintas sektor merupakan kunci strategis untuk menekan angka kematian ibu secara lebih signifikan dan berkelanjutan.

E. Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) dan *Wasting* pada Anak Balita

Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita adalah persentase anak balita yang mengalami berat badan kurang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk usianya. Sedangkan *wasting* adalah kondisi seseorang anak balita yang mengalami berat badan yang rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Data kekurangan gizi (*underweight* dan *wasting*) di Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Prevalensi Kekurangan Gizi dan *Wasting*
Kabupaten Lembata Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	7,47	13,84	12,00	10,00	15,81
Jumlah Balita Gizi Buruk (<i>Wasting</i>)	924	1.023	168	79	625

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, BPS Provinsi NTT Tahun 2024

Kekurangan gizi pada anak balita, baik dalam bentuk *underweight* (berat badan kurang) maupun *wasting* (gizi buruk/kurus berat), merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di Kabupaten Lembata. Permasalahan gizi berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan generasi masa depan, tingkat produktivitas masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia daerah. Selama periode 2020–2024, data menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam baik dalam prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) maupun jumlah kasus *wasting* (gizi buruk).

Permasalahan kekurangan gizi di Kabupaten Lembata masih menjadi tantangan serius meskipun beberapa capaian positif telah diraih. Lonjakan kembali kasus *underweight* dan *wasting* di tahun 2024 menjadi alarm penting bahwa penanganan gizi perlu dikelola secara lebih terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Intervensi gizi tidak hanya berbicara soal layanan kesehatan, tetapi juga mencakup perbaikan ketahanan pangan, edukasi keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, dan sinergi lintas sektor.

F. Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk secara merata dan berkeadilan. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	74,85	65,86	81,78	94,06	97,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Tahun 2024

Data di atas menunjukkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lembata Kabupaten Lembata menunjukkan tren peningkatan jumlah kepesertaan JKN secara signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada awal pandemi. Meski demikian, upaya keberlanjutan peningkatan kepesertaan harus disertai dengan penguatan mutu layanan kesehatan, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta penguatan sistem pembiayaan jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan adaptif.

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Kualitas pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah. Pendidikan berkualitas yang merata menggambarkan kondisi masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan berkualitas yang merata diukur pencapaiannya melalui indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi dan numerasi, indeks pembangunan literasi masyarakat dan indeks literasi digital masyarakat. Capaian pendidikan berkualitas yang merata Kabupaten Lembata selama periode 2020–2024, terlihat adanya perbaikan secara perlahan pada beberapa indikator utama pendidikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.36 Capaian Pendidikan Berkualitas Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,22	8,23	8,25	8,26	8,27
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,43	12,45	12,46	12,47
Angka Literasi SMP (%)	NA	NA	55,66	58,97	68,81
Angka Literasi SD (%)	NA	NA	55,97	69,59	65,42
Angka Numerasi SMP (%)	NA	NA	33,65	52,16	63,52
Angka Numerasi SD (%)	NA	NA	32,36	54,27	56,59
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (angka)	57,35	40,59	NA	67,81	73,42
Indeks Literasi Digital Masyarakat (angka)	NA	NA	36,83	36,65	45,75

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Indonesia, Dinas Pendidikan Lembata, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Lembata mengalami peningkatan bertahap sebesar 0,05 tahun selama 5 (lima) tahun. Rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa secara umum penduduk Kabupaten Lembata baru menempuh pendidikan hingga jenjang SMP sederajat. Peningkatan HLS menunjukkan adanya peluang peningkatan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun pertumbuhan HLS yang cenderung stagnan menandakan masih adanya tantangan keberlanjutan pendidikan dari jenjang dasar ke menengah atas dan perguruan tinggi.

Peningkatan literasi dan numerasi menunjukkan hasil positif dari berbagai intervensi pendidikan dasar, termasuk program Merdeka Belajar dan penguatan pembelajaran berbasis kompetensi. Namun, capaian numerasi masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian literasi, baik di tingkat SD maupun SMP. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus pada penguatan penguasaan matematika dasar. Indeks ini mencerminkan perbaikan akses, fasilitas, dan kegiatan literasi masyarakat pasca pandemi. Kenaikan signifikan menunjukkan keberhasilan program pemulihan pembelajaran, penyediaan sarana literasi, serta keterlibatan masyarakat dalam aktivitas literasi nonformal.

Capaian pendidikan berkualitas di Kabupaten Lembata menunjukkan arah kemajuan yang positif, khususnya dalam peningkatan literasi dan numerasi. Meski demikian, upaya percepatan penguatan mutu pembelajaran dasar, penguatan kompetensi guru, serta pemerataan akses pendidikan berkualitas harus terus menjadi prioritas utama dalam pengembangan SDM daerah menuju Lembata cerdas.

Data di atas menunjukkan IPLM Kabupaten Lembata 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat yang merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: pemerataan

layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan anggota perpustakaan mengalami peningkatan. Literasi yang tinggi meningkatkan kualitas SDM, daya saing dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tabel di atas juga menunjukkan capaian literasi digital masyarakat Kabupaten Lembata mengalami fluktuatif cenderung meningkat setiap tahunnya namun masih dalam kategori rendah. Hal ini berarti bahwa kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan komunikasi secara umum semakin baik namun belum optimal. Terdapat 4 (empat) pilar dalam mengukur indeks ini yaitu: infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan dengan rentang nilai 0-100. Nilai <30,88 kategori sangat rendah, nilai 30,88-36,27 kategori rendah, nilai 36,28-47,06 kategori cukup dan nilai 47,07-52,47 kategori tinggi serta >52,47 kategori sangat tinggi.

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik dan menciptakan sistem jaminan sosial yang mampu melindungi kelompok pekerja dari berbagai risiko sosial ekonomi, baik dalam situasi normal maupun saat krisis. Capaian perlindungan sosial yang adaptif Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37 Capaian Perlindungan Sosial yang Adaptif
Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	39,00	37,00	49,50	55,00	53,00
Proporsi Peserta Program Jamsostek (%)	NA	51,38	72,76	67,27	90,94

Sumber: BPS Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Dinas Nakertrans Lembata, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dalam Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Capaian perlindungan sosial yang adaptif di Kabupaten Lembata dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya tren positif pada perluasan cakupan Jamsostek, meskipun masih menghadapi tantangan besar terutama dalam menjangkau pekerja informal dan penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas Kabupaten Lembata sebanyak 589 orang baik disabilitas fisik maupun mental yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan. Dengan penguatan kebijakan kolaboratif dan pengarusutamaan perlindungan sosial yang inklusif, Kabupaten Lembata dapat memperluas jangkauan jaminan sosialnya secara lebih berkeadilan dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi.

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju merupakan 2 (dua) fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan harmonis. Kerukunan umat beragama menggambarkan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan kebudayaan untuk memperkuat karakter dan identitas daerah.

Kondisi beragama maslahat dan berkebudayaan maju diukur pencapaiannya melalui indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Nilai IKUB dikategorikan sangat tinggi bila berada pada kisaran 80-100, tinggi bila berada pada 61-80, nilai 41-60 dikategorikan sedang dan Nilai 21-40 kategori rendah. Capaian beragama, maslahat dan berkebudayaan maju Kabupaten Lembata belum dapat diukur karena belum/tidak tersedia data dimaksud dalam 5 (lima) tahun terakhir namun menjadi data target kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan. Data yang disajikan ini adalah data capaian Provinsi NTT yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38 Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan NTT (%)	48,93	48,18	50,70	53,04	54,69*
Indeks Pembangunan Kebudayaan NTT Dimensi Warisan Budaya (%)	35,32	39,88	38,99	40,95	42,50*
Indeks Kerukunan Umat Beragama NTT (%)	NA	72,39	73,09	76,02	74,47

Sumber: BPS Provinsi NTT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Tahun 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) NTT menunjukkan kondisi pembangunan kebudayaan yang berada pada tingkat menengah bawah. Peningkatan dari 52,83% ke 54,69% mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam pengelolaan dan pelestarian budaya daerah, tetapi masih sangat terbuka ruang penguatan. Pembangunan kebudayaan di NTT mencakup aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan budaya lokal, penguatan literasi budaya, serta dukungan kelembagaan budaya.

Indeks Kerukunan Umat Beragama NTT berada pada level sangat baik, di atas angka 70% secara konsisten. Puncak kerukunan terjadi di tahun 2023, lalu sedikit menurun pada 2024, namun tetap dalam kategori baik. Stabilitas kerukunan ini mencerminkan kuatnya modal sosial masyarakat NTT dalam menjaga harmoni lintas agama, budaya, dan etnis.

Secara umum, stabilitas kerukunan dan penguatan kebudayaan di Provinsi NTT selama 2020–2024 memberikan fondasi sosial penting

bagi kesinambungan pembangunan daerah. Namun untuk mempercepat peningkatan indeks pembangunan kebudayaan, perlu didorong sinergi lintas sektor, inovasi program pelestarian budaya, serta penguatan literasi generasi muda yang berbasis kearifan lokal dan nilai multikulturalisme.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif menggambarkan kondisi peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif diukur pencapaiannya melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Kualitas Keluarga (IKK) serta Indeks Perlindungan Anak (IPA). Capaian indikator keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif Kabupaten Lembata dan NTT disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39 Capaian Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Kabupaten Lembata dan NTT Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender Lembata (%)	91,29	91,24	91,45	91,61	91,70
Indeks Ketimpangan Gender Lembata (%)	0,713	0,723	0,740	0,778	0,747
Indeks Pembangunan Keluarga Lembata (iBangga)	NA	46,56	54,59	59,01	62,24
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) NTT (%)	64,57	67,62	71,74	72,46	belum publikasi
Indeks Pembangunan Pemuda NTT (%)	52,17	52,83	54,33	55,30	belum publikasi
Indeks Perlindungan Anak Lembata (angka)	NA	52,95	50,40	54,86	belum publikasi

Sumber : Dinas P2PA, SosP2KB Kab. Lembata, SIGA-KemenPPPA, Siperindu-BKKBN, BPS Lembata, BPS Provinsi NTT, BPS Indonesia, Tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun berfokus pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Tabel di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lembata mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan kesetaraan gender menunjukkan adanya kemajuan bertahap dalam beberapa indikator kunci, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Nilai IPG mendekati 100% menunjukkan kesenjangan gender dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara agregat mulai

mengecil. Meskipun demikian, peningkatan IPG yang masih lambat mengindikasikan bahwa kesenjangan kesempatan kerja dan pengambilan keputusan masih menjadi tantangan.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Lembata mengalami penurunan yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengurangan ketimpangan gender di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan politik, pendidikan, serta partisipasi angkatan kerja. Nilai IKG berada pada kisaran 0-1. Semakin kecil angka IKG, semakin kecil ketimpangan gender yang terjadi.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lembata menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan berada pada kategori cukup baik (berkembang). Hal ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat baik pada dimensi kemandirian, ketentraman, dan kebahagiaan keluarga.

Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT menunjukkan perbaikan signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir dan berada pada kategori 2. Hal ini berarti kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dikategorikan “cukup responsif gender dan hak anak”. Peningkatan kualitas keluarga berkaitan erat dengan stabilitas keluarga, pengasuhan anak, kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan sejumlah intervensi di bidang program keluarga berencana, penguatan ketahanan keluarga, dan peningkatan pelayanan dasar. Rentang nilai indeks dari 0-100, apabila <50 dikategorikan kurang responsif gender dan hak anak, apabila 50-70 dikategorikan cukup responsif gender dan hak anak dan apabila > 75 dikategorikan responsif gender dan hak anak.

Adapun Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT meskipun ada kenaikan, IPP masih tergolong moderat. Angka ini menunjukkan bahwa kapasitas, partisipasi, dan kontribusi pemuda dalam pembangunan masih perlu diperkuat, baik dari sisi pendidikan, keterampilan kerja, hingga peran sosial-politik. IPP disusun berdasarkan 5 (lima) domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

Data Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Lembata menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam perlindungan anak sehingga rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Keterbatasan kesempatan pemberdayaan pemuda dalam wirausaha produktif. Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penguatan ketahanan keluarga secara holistik. Data Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggunakan 5 (lima) indikator yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

Secara umum, capaian pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Lembata dan Provinsi NTT menunjukkan arah positif. Namun ke depan, dibutuhkan komitmen penguatan kebijakan berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan berbasis data yang lebih adaptif agar upaya penguatan kualitas SDM di Kabupaten Lembata dan NTT benar-benar inklusif, setara, dan berkelanjutan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia menggambarkan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Daya saing SDM Kabupaten Lembata diukur pencapaiannya melalui indikator angka ketergantungan. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (usia muda <15 tahun dan usia tua ≥65 tahun) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang ditanggung penduduk usia produktif. Data Angka Ketergantungan Kabupaten Lembata Tahun 2020–2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40 Angka Ketergantungan Kabupaten Lembata
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan (%)	67,60	58,50	67,44	66,28	65,48

Sumber BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan angka ketergantungan di Kabupaten Lembata berfluktuatif dan tren cenderung menurun secara bertahap. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika kependudukan yang bergejolak, baik dalam struktur usia muda, tua, maupun usia produktif. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan proporsi penduduk usia produktif dibanding nonproduktif, meskipun relatif perlahan. Tantangan beban penduduk usia produktif masih tergolong cukup tinggi, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 65–68 penduduk nonproduktif. Kondisi ini mencerminkan beban ekonomi yang cukup besar bagi penduduk usia produktif di Lembata.

Tingginya angka ketergantungan selama periode analisis menunjukkan bahwa penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi cukup besar, sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Fluktuasi angka ketergantungan tahun 2020–2022 menunjukkan adanya perubahan drastis pada komposisi usia penduduk, yang mungkin disebabkan oleh migrasi, perubahan angka kelahiran, angka kematian, atau perubahan kebijakan. Pentingnya optimalisasi bonus demografi, menunjukkan potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan jika penduduk usia produktif dipersiapkan dengan baik. Untuk itu, perlu kebijakan antisipatif jangka panjang dalam pengendalian pertumbuhan

penduduk, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Aspek ini menggambarkan peran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat sektor ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi ilmu pengetahuan, inovasi, dan produktivitas ekonomi diukur pencapaiannya melalui indikator rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum, rasio kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan indeks inovasi daerah. Capaian ilmu pengetahuan, inovasi, dan produktivitas ekonomi Kabupaten Lembata disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.41 Capaian Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,21	0,20	0,21	0,22	0,23
Nilai Tukar Petani	95,93	102,69	95,61	98,46	101,43
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,19	0,19	0,21	0,21	0,22
Rasio Kewirausahaan (%)	2,82	3,25	5,65	5,62	5,60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,95	68,24	71,89	77,49	83,53
Indeks Inovasi Daerah (angka)	NA	NA	NA	37,7 (inovatif)	38,26 (inovatif)
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21
Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara (angka)	3	-	153	346	1.068
Jumlah Tamu Wisatawan Domestik / Nusantara (angka)	9.334	3.913	12.496	14.497	36.831

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2025

Pembangunan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi menjadi pilar penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Kabupaten Lembata menunjukkan dinamika perkembangan yang bertahap selama periode 2020–2024, meskipun secara umum kontribusi sektor-sektor produktif dan inovatif masih relatif kecil dalam struktur PDRB. Namun terdapat sinyal positif dari peningkatan kewirausahaan, pariwisata, serta partisipasi angkatan kerja. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat kecil dan stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lokal masih belum berkembang optimal yang berdampak juga pada nilai tukar petani yang juga relatif stagnan dan rendah.

Perkembangan struktur PDRB sektor produktif untuk penyediaan akomodasi, dan makan minum masih sangat kecil dan stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi hasil pertanian,

perikanan, dan sumber daya alam lokal masih belum berkembang optimal. Terdapat pertumbuhan perlahan yang menunjukkan mulai pulihnya sektor usaha kuliner, restoran, penginapan, dan hotel pasca pandemi, seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata masih rendah, namun menunjukkan arah positif yang stabil sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik manca negara maupun domestik/nusantara. Untuk meningkatkan kontribusi pariwisata maka pemerintah perlu berupaya mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata unggulan berbasis kemitraan, promosi pariwisata, dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Peningkatan produktivitas ekonomi, inovasi, dan sektor kewirausahaan di Kabupaten Lembata menunjukkan potensi besar sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah. Dengan mempercepat industrialisasi berbasis lokal, memperkuat inovasi, serta membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif, Lembata dapat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sudah relatif tinggi, namun data lain menunjukkan angkatan kerja masih didominasi oleh pekerja yang tidak memiliki keterampilan/ *skill* serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki posisi tawar yang tinggi di bursa kerja.

Produktivitas ekonomi juga diukur dengan Indeks Inovasi Daerah. Indeks ini digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat inovasi di suatu daerah yang didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Indeks inovasi daerah Kabupaten Lembata baru mulai diukur pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan kategori capaian “inovatif” namun tetap perlu melakukan akselerasi layanan-layanan yang inovatif dan terpadu. Nilai indeks dengan rentang 0-100 terdiri dari nilai 0,01-34,99 kategori kurang inovatif, nilai 35-60 kategori inovatif dan nilai 60,01-100 kategori sangat inovatif.

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam transformasi ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Capaian penerapan ekonomi hijau Kabupaten Lembata disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42 Capaian Penerapan Ekonomi Hijau Tahun 2020-2024

PILAR	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,88	4,94	4,94	2,55	2,18
	Tingkat Kemiskinan (%)	26,14	26,21	25,18	24,78	24,22

PILAR	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Usia Harapan Hidup (tahun)	66,07	67,20	67,52	67,87	73,35
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,22	8,23	8,25	8,26	8,27
Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,35	1,44	2,60	2,46	3,34*
	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	66,18	70,43	66,98	69,00	70,11
	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah) (angka)	7.305	7.257	7.622	7.962	8.238
	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (angka)	34,49	35,69	36,76	37,19	37,05
Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)	NA	NA	70,01	71,88	71,74
	Indeks Risiko Bencana (angka)	154,25	149,61	135,27	123,81	126,22

Sumber : BPS Lembata, 2024

Data capaian Kabupaten Lembata selama 2020–2024 menunjukkan adanya perbaikan di sebagian besar indikator pilar sosial, ekonomi, maupun lingkungan, walaupun masih menghadapi tantangan serius dalam beberapa aspek struktural.

Data capaian penerapan Ekonomi Hijau pada Pilar Sosial, untuk Tingkat Penangguran Terbuka, menunjukkan penurunan tajam dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor informal, UMKM, pertanian, dan pariwisata. Capaian penerapan tingkat kemiskinan, walaupun terjadi penurunan bertahap, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih hidup pada garis kemiskinan atau rentan miskin. Untuk capaian Usia Harapan Hidup, (UHH) mengalami lonjakan yang signifikan mencerminkan adanya peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan sanitasi, dan keberhasilan program kesehatan masyarakat. Sedangkan Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah relatif lambat, mengindikasikan masih adanya keterbatasan akses pendidikan menengah dan tinggi.

Data capaian penerapan Ekonomi Hijau pada Pilar Ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi, terdapat pemulihan ekonomi yang cukup baik pasca *pandemi*, meskipun masih di bawah rerata nasional. Kinerja ketahanan pangan menunjukkan penguatan yang stabil, sejalan dengan upaya penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan lokal. Untuk sektor pengeluaran per kapita, mencerminkan adanya peningkatan daya beli masyarakat secara bertahap. Sedangkan kontribusi sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian Lembata, namun belum banyak didukung oleh hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

Data capaian penerapan Ekonomi Hijau pada Pilar Lingkungan, untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat peningkatan

signifikan dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup, hasil dari perbaikan pengelolaan limbah, konservasi lahan, dan pengurangan pencemaran. Sedangkan pada Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan yang menunjukkan adanya penguatan mitigasi risiko bencana, meskipun Kabupaten Lembata masih sangat rentan terhadap bencana geologi dan hidrometeorologi.

Perjalanan penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Lembata selama 2020–2024 memperlihatkan adanya kemajuan awal yang cukup menjanjikan, terutama dalam penguatan sosial ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun ke depan, keberhasilan pembangunan ekonomi hijau sangat bergantung pada keberanian melakukan transformasi struktural, inovasi kebijakan, penguatan kapasitas daerah, dan kolaborasi lintas sektor secara serius dan terencana.

Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Kabupaten Lembata belum dapat dianalisis. IBEI merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam sektor ekonomi biru. Indeks Ekonomi Biru terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sektor ekonomi biru serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut.

4. Transformasi Digital

Transformasi digital menggambarkan kondisi pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Transformasi digital diukur pencapaiannya melalui indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu komponen penting dalam mempercepat transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, peningkatan produktivitas ekonomi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di era Revolusi Industri 4.0. Nilai IP-TIK dikategorikan sangat rendah bila berada pada 0-2,5. Kategori rendah dengan nilai 2,51-5. Kategori sedang dengan nilai 5,01-7,5, dan kategori tinggi bila berada pada nilai 7,51-10. IP-TIK Kabupaten Lembata belum dapat diukur karena belum/tidak tersedia data dimaksud dalam 5 (lima) tahun terakhir namun menjadi data target kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan. Data yang disajikan berikut ini adalah capaian IP TIK Provinsi NTT yang secara bertahap menunjukkan adanya peningkatan. Capaian pembangunan TIK Provinsi NTT selama periode 2020–2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43 Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi NTT (angka)	4,49	5,00	5,13	5,33	5,33

Sumber : BPS Provisni NTT Tahun 2024

Peningkatan indeks pada data di atas, menunjukkan adanya perkembangan positif dalam infrastruktur jaringan, akses masyarakat terhadap TIK di NTT, serta peningkatan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi. Angka indeks yang masih relatif moderat menandakan bahwa penetrasi TIK di NTT masih menghadapi keterbatasan, khususnya di wilayah terpencil, perdesaan, dan kepulauan. Kenaikan signifikan pada periode 2020–2023 mencerminkan hasil dari berbagai program prioritas nasional, seperti pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah *blankspot*, perluasan jaringan internet desa, serta program literasi digital.

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi NTT, meskipun menunjukkan progres positif dalam 5 (lima) tahun terakhir, namun tantangan infrastruktur, literasi digital, dan pemerataan akses masih cukup besar. Penguatan komitmen kebijakan, investasi infrastruktur TIK yang lebih agresif, dan penguatan SDM digital berpotensi mempercepat lompatan transformasi digital yang dapat memperkuat daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif di Provinsi NTT.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global berperan dalam mendorong produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rangka pasok global. Kondisi integrasi ekonomi domestik dan global diukur pencapaiannya melalui indikator rasio PDRB perdagangan besar dan eceran. Indikator rasio PDRB perdagangan besar dan eceran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor barang dan jasa dan nilai investasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Perdagangan Besar Dan Eceran (%)	7,02	7,30	7,68	7,94	8,16
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	27,66	28,39	28,09	28,77	27,84
Eksport Barang dan Jasa	-51,10	-49,92	-48,55	-48,02	-47,76
Nilai Investasi (juta Rp)	329	71	133,5	169,4	35,6

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan rasio PDRB perdagangan besar tumbuh stabil, perannya dalam struktur ekonomi daerah semakin penting, dan menjadi motor integrasi ekonomi domestik. Pada sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), porsi investasi dalam perekonomian Lembata relatif tinggi, menunjukkan adanya pembangunan aset tetap (seperti infrastruktur, peralatan, gedung), walau pertumbuhannya stagnan. Hal ini baik, namun diperlukan upaya akselerasi agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan pada sektor ekspor barang dan jasa Kabupaten Lembata masih sangat bergantung pada impor barang dan jasa dari luar (defisit perdagangan), sehingga integrasi global masih didominasi peran konsumsi barang dan jasa luar daerah/luar negeri, bukan ekspor. Namun, perlahan defisitnya menurun, menunjukkan adanya sedikit peningkatan kemampuan ekspor.

Pertumbuhan perdagangan lokal mengalami peningkatan dalam memberikan kontribusi terhadap perdagangan besar dan eceran sehingga perlu didorong agar memberi efek pengganda (*multiplier effect*) yang lebih kuat terhadap UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil lain. Stabilitas PMTB harus didorong agar investasi betul-betul menghasilkan produktivitas sektor riil, bukan hanya pada pembangunan aset fisik yang kurang berdampak terhadap ekspor dan kemandirian ekonomi. Nilai ekspor yang masih negatif menunjukkan struktur ekonomi yang konsumtif dan rentan terhadap tekanan eksternal. Lembata perlu mendorong penciptaan produk/jasa unggulan berorientasi ekspor berbasis sumber daya lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata).

Nilai investasi menunjukkan penurunan yang signifikan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kabupaten Lembata memiliki potensi sumber daya yang memadai namun minat investor untuk menanamkan modal relatif kecil karena dukungan infrastruktur yang kurang memadai, peluang bisnis masih rendah maupun sektor industri yang belum berkembang.

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Aspek ini menggambarkan kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan. Penguatan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merupakan strategi penting dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Lembata. Capaian perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata.

A. Capaian Infrastruktur Jalan Perkotaan dan Perdesaan

Capaian Infrastruktur Jalan Perkotaan dan Perdesaan yang menjadi pusat pertumbuhan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45 Capaian Infrastruktur Jalan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (baik dan sedang) (angka)	30,71	35,71	42,21	52,03	52,67
Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Pekerjaan Umum	NA	NA	NA	70,13	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah 2025

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama periode 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Hal ini yang menandakan adanya akselerasi pembangunan atau perbaikan jalan secara masif dalam kurun waktu tersebut. Peningkatan kualitas jalan ini membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat. Jalan yang baik memperlancar arus barang dan jasa, meningkatkan mobilitas penduduk, serta memudahkan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar. Hal ini secara tidak langsung juga akan menurunkan biaya logistik, memperluas peluang ekonomi, dan mengurangi disparitas antara perkotaan dan perdesaan. Kemajuan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun pondasi ekonomi yang lebih kokoh dan inklusif.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur pekerjaan umum baru diukur pada tahun 2023 dan secara umum memiliki mutu pelayanan cukup baik, namun dari aspek mutu kinerja terutama pada unsur penanganan pengaduan dengan kategori “tidak baik”.

Namun demikian, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, proporsi jalan baik yang sudah di atas 50% memang menggembirakan, tetapi masih ada hampir separuh jaringan jalan yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama untuk wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, menjadi tantangan tersendiri agar manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan secara merata. Kedua, ketiadaan data mengenai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sepanjang 2020–2022 dan 2024 menunjukkan masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis persepsi masyarakat, padahal masukan dari pengguna layanan publik sangat penting untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Melihat dinamika tersebut, ke depan Pemerintah Kabupaten Lembata diharapkan tidak hanya melanjutkan pembangunan dan perbaikan jalan, tetapi juga segera meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Kolaborasi lintas sektor, pemeliharaan rutin jalan, serta integrasi pembangunan jalan dengan sentra ekonomi masyarakat perlu menjadi prioritas strategis. Dengan demikian, infrastruktur yang berkualitas dapat menjadi motor

penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten Lembata.

B. Capaian Infrastruktur Permukiman dan Akses Kelembagaan Desa

Capaian Infrastuktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan yang menjadi pusat pertumbuhan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46 Capaian Permukiman dan Akses Kelembagaan Desa Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak , Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	84,23	84,36	84,49	84,78	84,92
Persentase desa mandiri (%)	NA	NA	NA	0,69	0,69
Persentase desa maju (%)	2,083	2.778	3,472	6,94	11,81
Persentase desa berkembang (%)	29,167	40,972	47,222	52,78	54,86
Bumdes aktif (1 desa 1 Bumdes)	29	29	29	29	48

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas PMD, BPS NTT, Tahun 2024

Secara umum, terjadi penurunan proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak. Hal ini menjadi sinyal peringatan bahwa upaya peningkatan kualitas perumahan rakyat, termasuk sanitasi, air bersih, dan konstruksi rumah tahan bencana, perlu diperkuat secara sistematis. Pada indikator Perkembangan Status Desa, terjadi pergeseran desa dari status berkembang ke maju, meskipun jumlah desa mandiri masih sangat kecil. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek pelayanan dasar, ekonomi desa, dan ketahanan sosial, namun akselerasi transformasi desa menuju kemandirian masih sangat dibutuhkan.

Capaian pembangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Lembata menunjukkan adanya perbaikan bertahap pada infrastruktur dan status perkembangan desa. Namun, akselerasi transformasi desa menuju desa mandiri dan penguatan peran kota sebagai pusat pertumbuhan regional memerlukan reformasi kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal, tata kelola yang baik, serta penguatan kolaborasi multipihak yang sistematis.

7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro menggambarkan kesinambungan fiskal serta menjaga stabilitas moneter dan keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Kondisi stabilitas ekonomi makro diukur melalui indikator tingkat inflasi diperoleh dari pendekatan data Kabupaten Sikka sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47 Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Inflasi (Sikka) (%)	2,24	0,34	1,08	3,57	1,12

Sumber : BPS Sikka, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan tingkat inflasi yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Laju Inflasi diperoleh dari pendekatan data Kabupaten Sikka karena BPS Lembata tidak melakukan Survei Harga Konsumen. Data di atas menunjukkan tingkat inflasi di Kabupaten Sikka berfluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini berarti bahwa stabilitas harga barang dan jasa secara umum dapat dikendalikan sehingga mengurangi beban konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan tetapi inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan ada masalah pada daya beli masyarakat atau pasokan yang berlebihan. Tingkat inflasi dikategorikan ringan apabila <10% kategori sedang apabila berada pada rentang 10-30, serta berat apabila 30- 100 dan >100 dikategorikan hiperinflasi.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pembangunan tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif dan akuntabel yang didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, mematuhi kerangka hukum, regulasi yang adaptif, serta birokrasi yang profesional merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah.

Aspek ini diukur pencapaiannya melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indikator Indeks Pelayan Publik (IPP), Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), Otonomi Fiskal Daerah dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif Kabupaten Lembata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48 Capaian Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (angka)	NA	NA	43,53 "C"	34,53 "C"	52,83 "CC"
Indeks Pelayan Publik (angka)	NA	NA	NA	NA	3,33 Baik
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	48,91 "C"	NA	50,95 "CC"	51,08 "CC"	60,09 "B"
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka)	NA	NA	1,67 (kurang)	2,15 (cukup)	2,42 (cukup)
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	NA	NA	NA	NA	2,52 (cukup)
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,298	0,401	1,449	0,884	0,756
Otonomi Fiskal Daerah	7,24	6,52	7,15	7,76	4,71

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Sekretariat Daerah dan Bapenda Kabupaten Lembata Tahun 2024

Data capaian Kabupaten Lembata selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya kemajuan awal dan komitmen dalam upaya mempercepat tercapainya birokrasi yang profesional, pemerintahan digital yang efektif, dan regulasi yang adaptif serta kemandirian keuangan daerah meskipun masih menghadapi banyak tantangan struktural. Untuk itu diperlukan strategi penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, serta kolaborasi lintas sektor secara konsisten.

Indeks Reformasi Birokrasi sempat mengalami fluktuasi cukup signifikan. Setelah penurunan di 2023, ada perbaikan di 2024. Kinerja reformasi birokrasi menunjukkan bahwa pembenahan manajemen kinerja, kelembagaan, pelayanan publik, pengawasan internal, dan budaya birokrasi berintegritas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Penilaian IRB menggunakan skala 0-100 dimana nilai 0-30 nilai D kategori sangat kurang, >30-50 nilai C kategori kurang, >50-60 nilai C kategori cukup, >60-70 nilai B kategori Baik, >70-80 nilai BB kategori sangat baik,>80-100 nilai A memuaskan dan >100 nilai AA kategori sangat memuaskan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) membantu menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta membantu upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. IPP dinilai berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan komunikasi serta inovasi pelayanan. Nilai IPP berskala 1-5. IPP Kabupaten Lembata baru mulai diukur/ dinilai pada Tahun 2024 dengan hasil “Baik dengan Catatan”. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Lembata kepada masyarakat semakin efektif dan efisien.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024 dari C (kurang) menjadi B (baik). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP “baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terjadi peningkatan skor SPBE dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dari kategori

“kurang” menjadi “cukup”. Hal ini menunjukkan awal dari proses digitalisasi pemerintahan daerah, termasuk dalam pelayanan administrasi publik, sistem keuangan daerah, hingga pengelolaan data. Namun SPBE masih belum optimal, terutama pada aspek integrasi antar sistem, interoperabilitas data, keamanan siber, dan kualitas pelayanan digital ke masyarakat. Penilaian SPBE menggunakan skala 0-5, dimana nilai <1,8 kategori kurang, 1,81-<2,6 kategori cukup. 2,6-<3,5 kategori baik. 3,5-<4,2 kategori sangat baik dan 4,2-5 kategori memuaskan.

Sedangkan data Indeks Pembangunan Statistik di Kabupaten Lembata baru dapat diukur pada tahun 2024 dengan kategori capaian “cukup” ini menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral maupun satu data Indonesia berada pada level memadai, data yang dihasilkan mudah diakses, akurat, relevan namun memerlukan peningkatan dan perbaikan terutama dalam cakupan, frekuensi dan aksesibilitas untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Data di atas menunjukkan indeks/rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten Lembata berfluktuatif namun berada pada kategori rendah pada tahun 2022 dan menurun menjadi sangat rendah pada tahun 2023 dan 2024. Kapasitas fiskal yang rendah/sangat rendah menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik terbatas dan daerah sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. PAD yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk mencapai IKFD yang lebih baik.

Otonomi fiskal daerah diperoleh dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan dari pemerintah Kabupaten Lembata. Data di atas menunjukkan otonomi fiskal daerah Kabupaten Lembata tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan mengalami penurunan di Tahun 2024. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki kapasitas fiskal daerah yang rendah dan memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini juga menjelaskan bahwa peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata untuk dapat mengoptimalkan sumber daya dan aktivitas ekonomi yang ada masih kurang sehingga pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah.

Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan hasil terbaik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti bahwa laporan keuangan telah menyajikan

secara wajar posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Aspek ini menggambarkan kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, kepastian, bermanfaat dan berlandaskan Hak Asasi Manusia dan terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Aspek ini diukur pencapaiannya melalui indikator Indeks Reformasi Hukum, persentase penegakan Perda, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan indeks ketentraman dan ketertiban disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.49 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh Dan Demokrasi Substansial Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum (angka)	NA	NA	NA	D	76,02
Indeks Demokrasi Indonesia (NTT) (%)	NA	73,42	77,83	77,39	belum publikasi
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (angka)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Sekretariat Daerah, Satpol PP Kabupaten Lembata , BPS NTT Tahun 2024,

Tabel di atas menunjukkan capaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2023 dikategorikan sangat buruk karena tidak dilakukan oupload data diaplikasi. Sedangkan ditahun 2024 mencapai angka sebesar 76,02 hal ini menunjukkan adanya upaya awal dalam penataan regulasi daerah yang lebih responsif dan harmonis. Reformasi hukum mulai diarahkan untuk menyederhanakan regulasi daerah, memperbaiki kualitas produk hukum, serta memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun, karena ini data awal (baru tersedia tahun 2024), proses reformasi hukum di daerah masih memerlukan penguatan kelembagaan, dan sumber daya aparatur.

Indeks Demokrasi Indonesia (NTT), berada di level cukup baik, dan bahkan cenderung meningkat pada 2022. Indeks di atas 70 menunjukkan kualitas demokrasi yang relatif substansial di tingkat provinsi. Indeks Demokrasi Indonesia untuk NTT menunjukkan kualitas berdemokrasi yang sudah cukup matang, namun butuh upaya lebih untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi publik, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat kabupaten.

Sedangkan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak tersedia data karena merupakan indikator baru, namun menjadi data target kinerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Aspek ini menggambarkan ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antar negara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

Aspek ini diukur pencapaiannya melalui indikator indeks daya saing daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator komprehensif yang mengukur kemampuan suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta ekosistem inovasi. Kategori nilai IDSD adalah nilai 0-2,5 kategori sedang, nilai 2,5-4 kategori tinggi dan nilai 4-5 kategori sangat tinggi. Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Lembata dan Provinsi NTT disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Lembata dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD Lembata	Skor IDSD NTT
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12		
2022	-	2,78	2,81	1,78	3,62	2,82	3,81	2,6	1,75	0,08	5	0,89	-	3,20
2023	3,74	1,78	3,69	3,12	3,65	3,12	3,77	3,2	0,91	3,16	-	1,21	-	3,42
2024	4,37	2,86	4,13	3,61	3,58	3,93	3,39	3,14	2,59	3,17	-	1,57	-	3,41

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, tampak bahwa skor IDSD Kabupaten Lembata menunjukkan peningkatan yang konsisten selama 3 (tiga) tahun terakhir. Peningkatan skor IDSD ini sejalan dengan perbaikan pada berbagai pilar utama penyusun daya saing daerah. Pilar-pilar seperti lingkungan pendukung, sumber daya manusia, ekosistem inovasi, dan pasar menunjukkan pertumbuhan skor yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023–2024. Perbaikan skor ini mengindikasikan semakin baiknya fondasi struktural pembangunan daerah, baik dari sisi kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur, maupun kemudahan berinovasi dan berusaha di Lembata.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa pilar dengan nilai yang relatif rendah, seperti pilar-pilar yang terkait pasar yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam memperkuat dinamika pasar lokal maupun akses pasar yang lebih luas. Begitu juga pada beberapa pilar lainnya yang skornya masih belum maksimal dan memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara umum daya saing daerah mengalami kemajuan, masih diperlukan upaya-upaya terfokus untuk meningkatkan seluruh aspek penunjang daya saing secara merata.

Secara keseluruhan, tren perbaikan IDSD di Kabupaten Lembata dalam 3 (tiga) tahun terakhir merupakan sinyal positif atas efektivitas kebijakan pembangunan yang telah diterapkan. Namun,

untuk menjaga momentum peningkatan daya saing tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata perlu memperkuat sektor-sektor yang masih lemah, meningkatkan kualitas SDM, mendorong inovasi, memperbaiki akses pasar, serta memastikan ekosistem bisnis yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, daya saing daerah tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lembata.

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Aspek ini menggambarkan kinerja urusan pemerintah daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Capaian IKK diukur berdasarkan persentase capaian masing-masing indikator terhadap target indikator pada tahun pengukuran yang juga telah menggambarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 29 jenis pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan yaitu 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) sosial. Capaian IKK Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	102,17	SPM
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	89,1	SPM
3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89,84	SPM
4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	SPM
5	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,39	Bukan SPM
6	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Bukan SPM
7	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	SPM
8	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,5	SPM

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
9	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,3	SPM
10	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,02	SPM
11	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,97	SPM
12	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,9	SPM
13	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,26	SPM
14	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,3	SPM
15	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	104,12	SPM
16	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	116,45	SPM
17	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	89,21	SPM
18	Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,36	SPM
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	2,77	Bukan SPM
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	7,85	Bukan SPM
21	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	2,13	Bukan SPM
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	79,39	SPM
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	SPM
24	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	52,66	Bukan SPM
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	Bukan SPM
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Bukan SPM
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	SPM
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	SPM
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	Bukan SPM
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	15,08	Bukan SPM
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	84,85	Bukan SPM
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	SPM
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Bukan SPM
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	SPM
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	SPM
36	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	SPM
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	SPM
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	34,16	Bukan SPM

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
39	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	10,17	SPM
40	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Bukan SPM
41	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	40	Bukan SPM
42	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,3	Bukan SPM
43	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1.593.467.754,96	Bukan SPM
44	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	47,25	Bukan SPM
45	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	27,96	Bukan SPM
46	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,53	Bukan SPM
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	Bukan SPM
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	22,1	Bukan SPM
48	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0	Bukan SPM
49	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Bukan SPM
50	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	7,89	Bukan SPM
51	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	Bukan SPM
52	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	33,4	Bukan SPM
53	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk Masyarakat	0	Bukan SPM

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
54	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Bukan SPM
55	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	71,74	Bukan SPM
56	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	2,08	Bukan SPM
57	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	Bukan SPM
58	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,99	Bukan SPM
59	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	27,33	Bukan SPM
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	87,9	Bukan SPM
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	Bukan SPM
62	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	20	Bukan SPM
63	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	9,21	Bukan SPM
64	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,69	Bukan SPM
65	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	45,95	Bukan SPM
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	21,49	Bukan SPM
67	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	23,8	Bukan SPM
68	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,15	Bukan SPM
69	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	66,67	Bukan SPM
70	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	38,46	Bukan SPM
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	97,98	Bukan SPM

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
		informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		
72	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	78,95	Bukan SPM
73	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	87,3	Bukan SPM
74	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-78,97	Bukan SPM
75	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,94	Bukan SPM
76	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,16	Bukan SPM
77	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	1	Bukan SPM
78	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Bukan SPM
79	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Bukan SPM
80	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Bukan SPM
81	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Bukan SPM
82	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	55,65	Bukan SPM
83	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	73,42	Bukan SPM
84	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	65	Bukan SPM
85	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Bukan SPM
86	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	85,4	Bukan SPM
87	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	208,67	Bukan SPM
88	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	146,41	Bukan SPM
89	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	1,43	Bukan SPM

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
90	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,22	Bukan SPM
91	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,76	Bukan SPM
92	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	322,87	Bukan SPM
93	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-12,1	Bukan SPM
94	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	90	Bukan SPM
95	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,11	Bukan SPM
96	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	7,93	Bukan SPM
97	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	9,73	Bukan SPM
98	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	Bukan SPM
99	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Bukan SPM
100	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Bukan SPM
101	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	Bukan SPM
102	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	20	Bukan SPM
103	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Bukan SPM
104	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15,59	Bukan SPM
105	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	3,56	Bukan SPM
106	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	Bukan SPM

No	Urusan	IKK Outcome	% Capaian IKK Tahun 2024	Ket
107	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1	Bukan SPM
108	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	63,02	Bukan SPM
109	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	4	Bukan SPM
110	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bukan SPM
111	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	Bukan SPM
112	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	13,18	Bukan SPM
113	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-45,57	Bukan SPM
114	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	62,46	Bukan SPM
115	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,96	Bukan SPM
116	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,94	Bukan SPM
117	Manajemen Keuangan	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,14	Bukan SPM
118	Manajemen Keuangan	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	46	Bukan SPM
119	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	2	Bukan SPM
120	Manajemen Keuangan	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	1,44	Bukan SPM
121	Manajemen Keuangan	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	83,33	Bukan SPM

Sumber : LPPD Kabupaten Lembata, 2024

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Lembata Tahun 2024 menunjukkan gambaran yang relatif baik pada beberapa aspek dasar pembangunan, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) tercapai lebih dari 100 persen, sedangkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama berada di atas 89 persen. Tingginya capaian ini menandakan bahwa

akses pendidikan dasar di Lembata sudah menjangkau sebagian besar anak usia sekolah, meskipun masih ada ruang perbaikan untuk memastikan seluruh anak usia wajib belajar benar-benar bersekolah dan mengurangi potensi anak putus sekolah.

Di sektor kesehatan, capaian indikator juga menunjukkan hasil sangat baik. Hampir seluruh indikator layanan kesehatan dasar, seperti cakupan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan skrining kesehatan untuk kelompok usia tertentu, mencapai angka 100 persen atau lebih. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan primer di Lembata yang cukup efektif. Bahkan, penanganan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes melitus juga menunjukkan angka pelayanan di atas target. Namun, beberapa tantangan tetap ada, misalnya dalam penanganan penyakit menular seperti TBC dan HIV, di mana cakupannya masih di bawah 100 persen.

Pada aspek infrastruktur dasar, terlihat bahwa akses air minum layak, pengolahan air limbah, serta kemantapan jalan telah menunjukkan kemajuan berarti. Akses air minum sudah menjangkau hampir 80 persen rumah tangga dan seluruh rumah tangga sudah memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Namun, rasio luas kawasan rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian masih sangat rendah, begitu pula cakupan irigasi pertanian yang baru melayani 2,13 persen dari luas irigasi yang ada. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya akselerasi pembangunan infrastruktur pengendalian bencana dan irigasi agar lebih merata dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Di bidang sosial, perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak dan lansia terlantar masih perlu diperkuat, karena capaian pemenuhan kebutuhan dasarnya baru sekitar 10 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda untuk memperluas cakupan layanan sosial ke kelompok rentan. Indikator lain seperti penanganan bencana dan ketertiban umum telah menunjukkan capaian sangat baik dengan penyelesaian hampir semua kasus pengaduan, penegakan Perda, dan penanggulangan bencana secara tepat waktu.

Beberapa tantangan lain yang masih dihadapi di antaranya adalah rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, masih terbatasnya peningkatan status desa mandiri, serta realisasi investasi yang masih negatif. Di sisi lain, pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi sudah berjalan optimal, namun penggunaan teknologi informasi untuk layanan publik dan transparansi anggaran masih perlu ditingkatkan, sebagaimana tampak pada rendahnya persentase layanan *online* dan informasi pelayanan di *website* Pemda.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja kunci Kabupaten Lembata Tahun 2024 sudah cukup baik pada urusan pelayanan dasar, namun masih memerlukan perhatian khusus untuk urusan nondasar seperti penguatan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal. Ke depan, penguatan tata kelola,

pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk mempercepat perbaikan pada aspek-aspek yang masih tertinggal.

Capaian indikator kinerja kunci Tahun 2024 di atas menggunakan pendasaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga selanjutnya penetapan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029 dan analisis capaiannya menggunakan pendasaran SIPD pemuktahiran sebagaimana termuat di dalam Bab IV.2.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), gambaran keuangan daerah menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang realistis dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap kondisi keuangan daerah dibutuhkan untuk melihat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, analisis keuangan daerah dalam RPJMD setidaknya perlu mencakup dua hal utama: (1) kinerja keuangan di masa lalu, dan (2) kerangka pendanaan ke depan. Kedua aspek ini memberikan dasar yang kuat untuk menyusun strategi keuangan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu merupakan langkah strategis untuk menilai seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan Kabupaten Lembata dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan mengkaji secara komprehensif tren dan pola pengelolaan fiskal selama 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Daerah dapat melihat hal mana saja yang sudah berjalan baik, tantangan yang masih dihadapi, serta peluang perbaikan untuk perencanaan keuangan di masa depan.

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta neraca daerah selama beberapa tahun terakhir. Melalui analisis ini, bisa dinilai sejauh mana kemampuan Kabupaten Lembata dalam mengelola berbagai sumber pendapatan, menggunakan belanja untuk program-program yang tepat sasaran, serta mengatur aset dan kewajiban daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap analisis pendapatan, belanja, pembiayaan, dan neraca daerah untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

1. Analisis Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu: (1) pendapatan asli daerah, (2) pendapatan tranfer, (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah menjadi penting, karena pendapatan daerah

merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan utama menganalisis kinerja pendapatan adalah mengidentifikasi tren pertumbuhan, pola fluktuasi serta potensi yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan kapasitas fiskal daerah. Temuan dari analisis ini menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan yang lebih strategis dan terarah, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah. Dengan memahami dinamika dan kontribusi masing-masing sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan penganggaran yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Adapun kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lembata selama periode 2020-2024 digambarkan melalui perkembangan realisasi pendapatan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	Pendapatan Daerah	841,195,830,477.96	786,646,026,698.47	802,899,281,163.20	856,274,777,873.94	857,318,481,537.67	0.48
4.1	Pendapatan Asli Daerah	44,244,016,164.15	38,138,079,160.47	41,605,946,911.20	49,448,432,847.94	30,486,515,366.67	(8.89)
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	8,784,242,700.00	10,010,621,852.00	12,537,250,436.00	13,365,296,117.00	9,632,455,789.59	2.33
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	18,961,481,905.00	14,979,864,145.00	20,687,364,582.00	19,866,492,014.00	14,475,227,444.00	(6.53)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4,974,433,766.49	4,837,043,529.00	2,474,364,950.00	4,321,556,278.00	2,131,463,061.00	(19.09)
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,523,857,792.66	8,310,549,634.47	5,906,966,943.20	11,895,088,438.94	4,247,369,072.08	(22.08)
4.2	Pendapatan Transfer	762,825,458,318.81	731,703,335,938.00	727,806,014,320.00	798,979,243,048.00	820,368,582,963.00	1.83
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747,803,499,973.00	718,490,891,887.00	711,302,997,004.00	779,327,559,646.00	797,501,327,728.00	1.62
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15,021,958,345.81	13,212,444,051.00	16,503,017,316.00	19,651,683,402.00	22,867,255,235.00	11.08
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	34,126,355,995.00	16,804,611,600.00	33,487,319,932.00	7,847,101,978.00	6,463,383,208.00	(34.03)
4.3.01	Pendapatan Hibah	34,126,355,995.00	16,804,611,600.00	13.324.179.000	250.000.000	0,00	(34.03)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	20,163,140,932.00	7,597,101,978.00	6,463,383,208.00	(38.62)

Sumber: BKAD, Bapenda Kabupaten Lembata, Tahun 2025

Tabel kinerja pendapatan daerah menggambarkan bahwa selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 total pendapatan daerah Kabupaten Lembata menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung meningkat, dari Rp.841,2 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.857,3 miliar pada tahun 2024. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan per tahun hanya sebesar 0,48%, yang mencerminkan stagnasi dan keterbatasan dalam perluasan kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tren penurunan rata-rata sebesar -8,89% per tahun dari Rp.44,2 miliar di tahun 2020 menjadi Rp.30,5 miliar di tahun 2024. Penurunan ini menggambarkan menurunnya kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya secara rinci dapat dijelaskan bahwa Hasil Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata 2,33% per tahun, dari Rp.8,8 miliar menjadi Rp.9,6 miliar. Meskipun bertumbuh, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong kecil. Hasil Retribusi Daerah turun dengan rata-rata -6,53% per tahun, dari Rp.18,9 miliar menjadi Rp.14,5 miliar. Hal ini menunjukkan penurunan efektivitas pemungutan retribusi atau potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencatat penurunan signifikan masing-masing sebesar -19,09% dan -22,08% per tahun, yang mengindikasikan lemahnya kontribusi BUMD atau entitas Pemda lainnya, serta potensi pendapatan lainnya yang tidak berkembang.

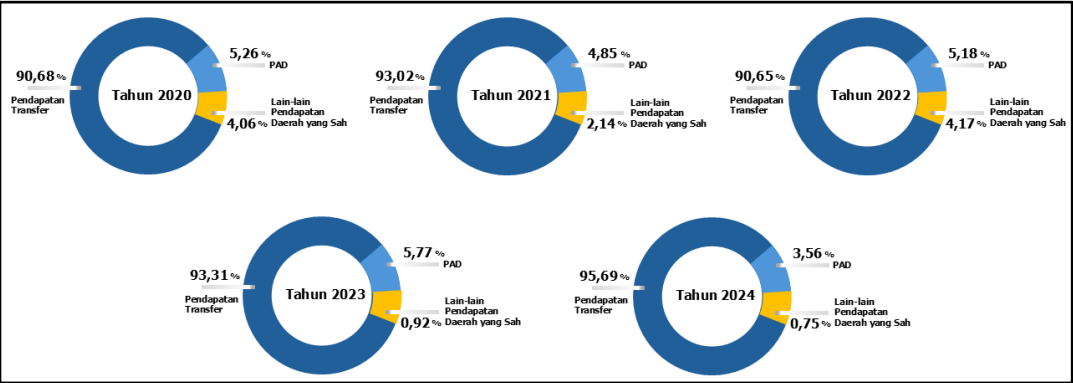
Pendapatan transfer sebagai komponen yang dominan tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,83% per tahun, dari Rp.762,8 miliar pada 2020 menjadi Rp.820,4 miliar pada 2024. Transfer dari Pemerintah Pusat tetap menjadi sumber utama dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,62% per tahun. Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan signifikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,08% per tahun, meskipun nilainya jauh lebih kecil dibanding transfer pusat.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -34,03% per tahun, yang semula Rp.34,1 miliar pada 2020, menurun menjadi hanya Rp.6,46 miliar pada 2024. Penurunan ini hampir sepenuhnya berasal dari pendapatan hibah, yang pada 2024 berada pada titik terendah, meskipun telah berkontribusi cukup besar di awal periode.

Berdasarkan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lembata selama 5 (lima) tahun terakhir, penting untuk memahami kontribusi dari masing-masing komponen terhadap total pendapatan daerah.

Meskipun total pendapatan cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Gambaran kontribusi masing-masing komponen terhadap total pendapatan daerah disajikan dalam bentuk grafik pada gambar berikut ini.

Gambar 2.16 Komposisi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD, Bapenda Kabupaten Lembata Tahun 2025, Data Terolah.

Grafik di atas, menggambarkan bahwa konponen pendapatan daerah Kabupaten Lembata sangat didominasi oleh Pendapatan Transfer. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kontribusi pendapatan transfer berada di atas 90%, bahkan pada tahun 2024 mencapai persentase tertinggi 95,69% dari total pendapatan daerah. Artinya, lebih dari sembilan puluh persen pembiayaan daerah sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

Kontribusi PAD mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 5,26%, menjadi 3,56% pada tahun 2024. Hal ini tidak hanya mencerminkan penurunan nominal PAD, sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel sebelumnya, tetapi juga mengindikasikan penurunan bobot strategis PAD dalam struktur APBD. Artinya, meskipun transfer naik, PAD tidak berhasil mengimbangi kenaikan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam penguatan kapasitas pendapatan daerah. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga cenderung menurun dari 4,06% pada tahun 2020 menjadi 0,75% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendapatan daerah Kabupaten Lembata belum optimal dan masih bergantung pada satu komponen pendapatan yakni pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, grafik tersebut mempertegas bahwa tantangan utama Kabupaten Lembata bukan sekadar pada besar kecilnya nominal PAD, tetapi pada ketimpangan struktur pendapatan yang sangat tinggi. Ketimpangan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mulai serius memperluas basis pendapatan mandiri, memperkuat institusi pengelola pajak dan retribusi, serta mendorong BUMD agar lebih produktif dan berkontribusi nyata dalam pembiayaan daerah.

2. Analisis Belanja

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penyusunan RPJMD, evaluasi belanja daerah selama periode 2020–2024 bertujuan untuk mengidentifikasi pola distribusi belanja, proporsi antar jenis belanja, serta kecenderungan alokasi terhadap fungsi-fungsi strategis

pemerintahan. Penilaian ini juga menjadi dasar dalam menilai keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal, serta melihat konsistensi belanja terhadap prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Dengan memahami tren dan struktur belanja selama periode sebelumnya, pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan belanja jangka menengah yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berbasis pada hasil.

Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Realisasi Belanja di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun
		2020	2021	2022	2023	2024	
5	Belanja	843,824,447,890.22	800,320,564,906.03	920,219,183,786.00	916,418,691,945.66	826,670,685,838.95	(0.51)
5.1	Belanja Operasi	487,908,188,218.05	480,889,361,566.66	501,183,224,645.00	532,253,536,050.66	570,355,753,999.21	3.98
5.1.01	Belanja Pegawai	285,106,829,493.00	302,508,861,983.00	301,481,512,135.12	319,860,846,716.86	355,839,140,584.21	5.70
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200,497,771,545.05	166,260,128,776.14	180,563,002,888.88	183,388,657,617.80	155,916,396,246.00	(6.09)
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	5,200,346,251.00	10,285,874,506.00	11,566,232,871.00	55.12
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000,000.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	1,997,212,180.00	4,521,940,207.52	5,045,863,370.00	12,211,157,210.00	37,253,866,298.00	107.82
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	306,375,000.00	7,598,430,600.00	8,892,500,000.00	6,507,000,000.00	9,266,118,000.00	134.51
5.2	Belanja Modal	160,535,891,652.17	127,420,364,842.37	249,758,102,523.00	209,277,904,107.00	77,495,925,681.74	(16.65)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	972,440,522.00	1,654,743,000.00	3,917,953,074.00	0.00	0.00	(103.47)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,474,987,343.05	20,099,069,382.53	22,654,556,480.00	23,918,466,677.00	25,194,744,259.00	(10.62)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,257,464,388.12	36,428,364,408.00	20,611,697,456.00	25,455,873,108.00	20,056,183,928.74	(24.66)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	40,787,866,548.00	64,032,970,721.38	200,252,654,512.00	158,149,508,850.00	29,180,797,208.00	(8.03)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,043,132,851.00	5,205,217,330.46	2,321,241,001.00	1,754,055,472.00	3,064,200,286.00	(34.88)
5.3	Belanja Tidak Terduga	12,511,101,004.00	11,410,303,837.00	94,710,807.00	350,221,378.00	957,097,223.00	(47.41)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12,511,101,004.00	11,410,303,837.00	94,710,807.00	350,221,378.00	957,097,223.00	(47.41)
5.4	Belanja Transfer	182,869,267,016.00	180,600,534,660.00	169,183,145,811.00	174,537,030,410.00	177,861,908,935.00	(0.69)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,647,596,966.00	2,774,572,460.00	1,092,000,000.00	3,423,196,348.00	3,351,905,735.00	6.07
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	180,221,670,050.00	177,825,962,200.00	168,091,145,811.00	171,113,834,062.00	174,510,003,200.00	(0.80)

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata, 2025 (Data Terolah)

Berdasarkan tabel di atas, total belanja daerah Kabupaten Lembata selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada tahun 2024. Belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp.916,4 miliar, sedangkan pada tahun 2024 tercatat menurun menjadi Rp.826,7 miliar, menghasilkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,51% per tahun. Penurunan ini patut dicermati mengingat belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Apabila dicermati lagi maka, belanja operasi menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 3,98% per tahun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai dan belanja barang/jasa, yang masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,7% dan 6,1% per tahun. Selain itu, belanja hibah dan bantuan sosial mengalami kenaikan yang cukup tinggi, dengan pertumbuhan masing-masing mencapai lebih dari 100% per tahun. Kenaikan pada komponen ini dapat mencerminkan respon terhadap kebutuhan pendanaan program-program prioritas berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada. Sebaliknya, belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dengan kontraksi rata-rata sebesar -16,65% per tahun. Hampir semua sub komponennya mengalami penurunan, termasuk belanja infrastruktur jalan, gedung, dan alat berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi belanja pembangunan fisik semakin mengecil dan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam struktur belanja.

Secara umum, pola belanja ini menunjukkan bahwa struktur pengeluaran daerah selama periode ini masih didominasi oleh belanja operasi, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini bukan hanya mencerminkan peningkatan belanja pegawai, tetapi juga peningkatan belanja barang dan jasa yang mencerminkan kebutuhan pendukung penyelenggaraan layanan publik di berbagai sektor. Meski demikian, proporsi belanja yang diarahkan untuk investasi pembangunan fisik melalui belanja modal justru menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan berkurangnya ruang fiskal untuk mendorong penguatan infrastruktur dan aset daerah yang berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, kinerja belanja selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa penguatan tata kelola belanja daerah masih menjadi agenda penting, terutama untuk menciptakan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja fisik pembangunan. Selanjutnya untuk 5 (lima tahun) ke depan, kebijakan belanja perlu lebih diarahkan untuk mendukung transformasi pelayanan publik, peningkatan produktivitas daerah, dan pencapaian sasaran pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memahami sejauh mana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan secara strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran. Pembiayaan daerah pada dasarnya mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mengatur arus kas dan menutup defisit, baik melalui pemanfaatan sisa lebih anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman, maupun penyertaan modal. Oleh karena itu, analisis kinerja pembiayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena dapat menunjukkan sejauh mana daerah mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan ke depan.

Adapun realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54 Realisasi Pembiayaan Daerah 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	23,966,994,726.96	21,338,377,314.70	217,899,900,493.80	95,603,495,210.52	12,724,723,244.95
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	23,966,994,726.96	21,338,377,314.70	5,327,806,337.14	95,580,407,571.00	12,720,528,244.95
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	212,564,908,020.66	0.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah			7,186,136.00	23,087,639.52	4,195,000.00
	Jumlah	23,966,994,726.96	21,338,377,314.70	217,899,900,493.80	95,603,495,210.52	12,724,723,244.95
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	22,744,273,712.00	31,866,410,568.00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	20,244,273,712.00	30,366,410,568.00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	22,744,273,712.00	31,866,410,568.00
	Pembiayaan Netto	23,966,994,726.96	18,838,377,314.70	212,899,900,493.80	72,859,221,498.52	(19,141,687,323.05)

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Lembata menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Komponen utama dalam penerimaan pembiayaan didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang mencerminkan efisiensi belanja atau ketidakterserapan anggaran pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pembiayaan daerah meningkat hingga Rp.217,90 miliar, terutama karena adanya pinjaman daerah sebesar Rp.212,56 miliar. Kondisi ini menunjukkan perubahan pendekatan keuangan daerah yang sebelumnya hanya mengandalkan SiLPA. Namun sejak 2023, pengeluaran pembiayaan mulai naik karena kewajiban membayar cicilan pokok utang, yang pada 2024 mencapai Rp.30,37 miliar dari total pengeluaran pembiayaan Rp31,87 miliar. Artinya, pinjaman yang diperoleh pada tahun 2022 mulai menimbulkan kewajiban fiskal yang harus dibayar secara nyata di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, arah pengeluaran pembiayaan daerah mengalami pergeseran, dari semula difokuskan pada kegiatan investasi fiskal seperti penyertaan modal, kini lebih banyak terserap untuk kewajiban jangka menengah akibat penerapan skema pinjaman. Dalam jangka menengah, struktur pengeluaran pembiayaan seperti ini cukup menyulitkan karena kewajiban pembayaran utang akan mempengaruhi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah. Jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan perencanaan pembiayaan yang terukur, maka kemampuan daerah untuk membiayai program prioritas pembangunan akan terhambat.

Oleh karena itu, arah kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah perlu difokuskan pada 2 (dua) hal utama, yakni pertama menjaga disiplin fiskal melalui pembatasan pengeluaran pembiayaan yang bersifat tidak produktif atau berisiko menimbulkan beban utang jangka panjang; dan kedua, memastikan bahwa setiap pengeluaran pembiayaan khususnya yang bersumber dari pinjaman diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang terukur, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang sebanding dengan biaya fiskal yang dikeluarkan. Dengan pendekatan ini, stabilitas fiskal daerah dapat dijaga tanpa mengorbankan keberlanjutan pembangunan.

Adapun kinerja keuangan daerah Kabupaten Lembata sejak Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55 Kinerja (Realisasi) APBD Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Pendapatan Daerah	841,195,830,477.96	786,646,026,698.47	802,899,281,163.20	856,274,777,873.94	857,318,481,537.67
4.1	Pendapatan Asli Daerah	44,244,016,164.15	38,138,079,160.47	41,605,946,911.20	49,448,432,847.94	30,486,515,366.67
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	8,784,242,700.00	10,010,621,852.00	12,537,250,436.00	13,365,296,117.00	9,632,455,789.59
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	18,961,481,905.00	14,979,864,145.00	20,687,364,582.00	19,866,492,014.00	14,475,227,444.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4,974,433,766.49	4,837,043,529.00	2,474,364,950.00	4,321,556,278.00	2,131,463,061.00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,523,857,792.66	8,310,549,634.47	5,906,966,943.20	11,895,088,438.94	4,247,369,072.08
4.2	Pendapatan Transfer	762,825,458,318.81	731,703,335,938.00	727,806,014,320.00	798,979,243,048.00	820,368,582,963.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747,803,499,973.00	718,490,891,887.00	711,302,997,004.00	779,327,559,646.00	797,501,327,728.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15,021,958,345.81	13,212,444,051.00	16,503,017,316.00	19,651,683,402.00	22,867,255,235.00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	34,126,355,995.00	16,804,611,600.00	33,487,319,932.00	7,847,101,978.00	6,463,383,208.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	34,126,355,995.00	16,804,611,600.00	13.324.179.000	250.000.000	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	20,163,140,932.00	7,597,101,978.00	6,463,383,208.00
5	Belanja	843,824,447,890.22	800,320,564,906.03	920,219,183,786.00	916,418,691,945.66	826,670,685,838.95
5.1	Belanja Operasi	487,908,188,218.05	480,889,361,566.66	501,183,224,645.00	532,253,536,050.66	570,355,753,999.21
5.1.01	Belanja Pegawai	285,106,829,493.00	302,508,861,983.00	301,481,512,135.12	319,860,846,716.86	355,839,140,584.21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200,497,771,545.05	166,260,128,776.14	180,563,002,888.88	183,388,657,617.80	155,916,396,246.00
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	5,200,346,251.00	10,285,874,506.00	11,566,232,871.00
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	1,997,212,180.00	4,521,940,207.52	5,045,863,370.00	12,211,157,210.00	37,253,866,298.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	306,375,000.00	7,598,430,600.00	8,892,500,000.00	6,507,000,000.00	9,266,118,000.00
5.2	Belanja Modal	160,535,891,652.17	127,420,364,842.37	249,758,102,523.00	209,277,904,107.00	77,495,925,681.74
5.2.01	Belanja Modal Tanah	972,440,522.00	1,654,743,000.00	3,917,953,074.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,474,987,343.05	20,099,069,382.53	22,654,556,480.00	23,918,466,677.00	25,194,744,259.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62,257,464,388.12	36,428,364,408.00	20,611,697,456.00	25,455,873,108.00	20,056,183,928.74
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	40,787,866,548.00	64,032,970,721.38	200,252,654,512.00	158,149,508,850.00	29,180,797,208.00

No	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,043,132,851.00	5,205,217,330.46	2,321,241,001.00	1,754,055,472.00	3,064,200,286.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	12,511,101,004.00	11,410,303,837.00	94,710,807.00	350,221,378.00	957,097,223.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12,511,101,004.00	11,410,303,837.00	94,710,807.00	350,221,378.00	957,097,223.00
5.4	Belanja Transfer	182,869,267,016.00	180,600,534,660.00	169,183,145,811.00	174,537,030,410.00	177,861,908,935.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,647,596,966.00	2,774,572,460.00	1,092,000,000.00	3,423,196,348.00	3,351,905,735.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	180,221,670,050.00	177,825,962,200.00	168,091,145,811.00	171,113,834,062.00	174,510,003,200.00
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	23,966,994,726.96	21,338,377,314.70	217,899,900,493.80	95,603,495,210.52	12,724,723,244.95
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	23,966,994,726.96	21,338,377,314.70	5,327,806,337.14	95,580,407,571.00	12,720,528,244.95
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	212,564,908,020.66	0.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0.00	0.00	7,186,136.00	23,087,639.52	4,195,000.00
	Jumlah	23,966,994,726.96	21,338,377,314.70	217,899,900,493.80	95,603,495,210.52	12,724,723,244.95
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	22,744,273,712.00	31,866,410,568.00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	20,244,273,712.00	30,366,410,568.00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	22,744,273,712.00	31,866,410,568.00
	Pembiayaan Netto	23,966,994,726.96	18,838,377,314.70	212,899,900,493.80	72,859,221,498.52	-19,141,687,323.05

Sumber: BKAD, Bapenda Kab Lembata Tahun 2025

4. Neraca Daerah

Neraca daerah mencerminkan gambaran aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Analisis neraca penting untuk memahami kondisi keuangan daerah secara menyeluruh, termasuk kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Komponen utama dalam neraca daerah meliputi aset daerah, baik aset lancar maupun aset tetap, serta kewajiban yang mencakup utang dan kewajiban lainnya. Selain itu, neraca juga mencerminkan ekuitas daerah yang menggambarkan akumulasi sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah.

Melalui penyajian neraca daerah, dapat diketahui bagaimana pengelolaan aset dan kewajiban daerah serta sejauh mana keseimbangan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Adapun posisi neraca daerah sejak Tahun Anggaran 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.56 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Aset	1,467,563,333,793.79	1,538,368,708,880.94	1,758,627,858,368.41	1,822,215,415,798.68	1,766,708,819,145.30	4.75
Aset Lancar	53,197,057,466.26	38,892,509,671.87	118,366,287,285.96	34,831,410,314.49	47,918,288,511.36	(2.58)
Investasi Jangka Panjang	45,363,752,662.00	46,986,122,391.00	51,223,811,314.00	61,103,182,147.00	62,722,318,770.00	8.44
Aset tetap	1,342,263,916,425.34	1,431,647,101,063.61	1,564,030,082,551.45	1,671,583,741,947.10	1,617,787,599,774.91	4.78
Properti Investasi	0.00	0.00	0.00	6,574,394,779.00	6,451,222,861.00	(1.87)
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Lainnya	26,738,607,240.19	20,842,975,754.46	25,007,677,217.00	48,122,686,611.09	31,829,389,228.03	4.45
Jumlah Aset	1,467,563,333,793.79	1,538,368,708,880.94	1,758,627,858,368.41	1,822,215,415,798.68	1,766,708,819,145.30	4.75
Kewajiban	45,048,552,644.81	44,011,076,345.89	230,473,227,273.30	211,388,568,279.68	173,384,957,361.92	40.07
Ekuitas	1,422,514,781,148.98	1,494,357,632,535.05	1,528,154,631,095.11	1,610,826,847,519.00	1,593,323,861,783.38	2.88
Jumlah Kewajiban + Ekuitas	1,467,563,333,793.79	1,538,368,708,880.94	1,758,627,858,368.41	1,822,215,415,798.68	1,766,708,819,145.30	4.75

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata, 2024

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, total aset Pemerintah Kabupaten Lembata mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,75% per tahun, meningkat dari Rp.1,46 triliun pada 2020 menjadi Rp.1,77 triliun pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan nilai kekayaan daerah yang secara umum dapat memperkuat posisi fiskal jangka menengah, khususnya dari sisi kemampuan pembiayaan pembangunan dan penjaminan belanja daerah. Kontributor utama dalam pertumbuhan aset adalah aset tetap, yang setiap tahunnya mendominasi struktur neraca, dengan rata-rata pertumbuhan 4,78%. Aset tetap ini mencakup infrastruktur, bangunan, tanah, dan barang milik daerah lainnya dan menjadi bukti bahwa pembangunan fisik tetap berjalan dan tercatat secara akuntabel dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang memang menekankan penguatan layanan dasar dan konektivitas wilayah.

Meskipun total aset daerah Kabupaten Lembata mengalami peningkatan setiap tahunnya, terdapat dinamika dalam struktur neraca yang perlu dicermati secara khusus. Salah satu catatan penting adalah menurunnya nilai aset lancar selama periode 2020–2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar –2,58% per tahun. Aset lancar mencerminkan kas dan setara kas yang dapat digunakan dalam waktu dekat. Penurunan ini dapat mengindikasikan terbatasnya likuiditas jangka pendek pemerintah daerah, yang berpotensi memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban mendesak atau membiayai belanja operasional secara cepat.

Selain itu, kewajiban daerah mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022, dari Rp44,01 miliar menjadi Rp230,47 miliar. Peningkatan ini berkaitan erat dengan kebijakan pengambilan pinjaman daerah yang terealisasi pada tahun tersebut. Meskipun nilai kewajiban menunjukkan penurunan pada 2023 dan 2024, beban keuangan daerah tetap perlu menjadi perhatian, mengingat rata-rata pertumbuhan kewajiban selama 5 (lima) tahun mencapai 40,07% per tahun. Hal ini menandakan adanya komitmen pembayaran jangka menengah yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak membebani APBD di masa mendatang.

Di sisi lain, ekuitas daerah memperlihatkan tren positif, yang mencerminkan peningkatan aset bersih setelah dikurangi kewajiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan posisi keuangan daerah masih dalam kondisi aman. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan ketersediaan kas dan beban utang yang harus dibayar dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah selama pelaksanaan RPJMD. Karena itu, diperlukan pengelolaan aset dan utang yang baik dan terencana, sehingga program pembangunan jangka menengah dapat berjalan lancar tanpa terhambat masalah keuangan.

2.2.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target

pembangunan nasional. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kerangka ini mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Melalui proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang realistis, kerangka ini menjadi landasan strategis dalam menyusun strategi pembiayaan yang rasional dan terukur, sekaligus memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

A. Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah dalam perencanaan jangka menengah, merupakan estimasi menyeluruh terhadap potensi penerimaan daerah dalam periode jangka menengah. Proyeksi ini memerlukan analisis terhadap berbagai variabel yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Penyusunan proyeksi ini mempertimbangkan tiga dimensi utama yaitu: Pertama, dinamika kebijakan di tingkat nasional yang mencakup arah kebijakan fiskal pemerintah pusat dan regulasi terkait mekanisme transfer dana ke daerah. Perubahan dalam kebijakan desentralisasi fiskal, formula dana alokasi umum, maupun kriteria dana alokasi khusus akan berimplikasi langsung terhadap struktur penerimaan daerah. Kedua, asumsi makroekonomi yang meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, dan pergerakan nilai tukar rupiah. Variabel-variabel makroekonomi ini memiliki korelasi dengan kinerja perekonomian daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Ketiga, inisiatif strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Hal ini mencakup eksplorasi potensi pendapatan baru, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan daerah, peningkatan efektivitas pemungutan retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta. Ketiga faktor tersebut kemudian diintegrasikan dalam menganalisis rata-rata pertumbuhan dari setiap komponen pendapatan daerah. Melalui pendekatan ini, dapat diperoleh proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencerminkan tren realistis berdasarkan kinerja masa lalu dan potensi ke depan. Adapun proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lembata untuk periode 2026-2030, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.57 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline (2024)	Tahun (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	Pendapatan Daerah						
4.1	Pendapatan Asli Daerah	30,538,328,644	38,830,536,603.00	47,864,839,807.00	50,200,185,397.00	52,560,206,647.00	55,086,207,393.00
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	9,592,391,032	14,623,277,916.00	16,105,314,207.00	16,982,535,652.00	17,938,983,924.00	18,974,540,180.00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	14,484,799,132	19,612,463,855.00	27,225,919,660.00	28,587,215,643.00	29,871,610,165.00	31,168,321,790.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,131,463,061	3,048,722,165	3,201,158,273	3,521,274,100	3,697,337,805	3,882,204,695
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,329,675,419	1,546,072,667	1,332,447,667.00	1,109,160,002.00	1,052,274,753.00	1,061,140,728.00
4.2	Pendapatan Transfer	814,212,693,687	838,027,537,507	838,027,537,507	838,027,537,507	838,027,537,507	838,027,537,507
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	792,169,679,850	820,455,063,000	820,455,063,000	820,455,063,000	820,455,063,000	820,455,063,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,043,013,837	17,572,474,507	17,572,474,507	17,572,474,507	17,572,474,507	17,572,474,507
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,792,840,468	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,792,840,468	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000
	Jumlah Pendapatan	851,543,862,799	884,666,264,110	893,700,567,314.00	896,035,912,904.00	898,395,934,154.00	900,921,934,900.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, BKAD Kabupaten Lembata 2025

Berdasarkan tabel proyeksi pendapatan daerah, maka pengelolaan pendapatan Kabupaten Lembata periode 2026-2030 difokuskan pada:

1) Optimalisasi Pendapatan Daerah

Hasil proyeksi menunjukkan PAD mengalami kenaikan dari 2024 sampai 2030 sehingga perlu melakukan langkah-langkah mendukung pencapaian PAD ini di antaranya meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui perbaikan basis data dan penegakan hukum, peningkatan efektivitas retribusi dengan penyesuaian tarif sesuai kemampuan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD;

2) Penguatan Pengelolaan Dana Transfer

Apabila dilihat, pendapatan transfer relatif stabil dikisaran Rp 814 sampai Rp838 miliar, pengelolaannya diperkuat melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, alokasi yang lebih strategis untuk investasi infrastruktur produktif, dan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan ketepatan waktu dan sasaran penyaluran;

3) Diversifikasi Sumber Pendapatan

Mempertimbangkan keterbatasan sumber PAD maka, dikembangkan alternatif pendapatan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, optimalisasi program CSR, dan eksplorasi potensi sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai karakteristik daerah.

4) Transformasi Digital Sistem Pendapatan

Implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan melalui sistem pembayaran *online* terintegrasi, transparansi pengelolaan keuangan berbasis data *real-time*, dan kemudahan akses layanan bagi wajib pajak dan retribusi;

5) Pengembangan Ekosistem Investasi

Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui promosi potensi ekonomi unggulan daerah, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta percepatan pelayanan administrasi;

6) Penguatan Kapasitas Institusi

Mengembangkan kapasitas aparatur melalui reorientasi budaya kerja berbasis kinerja, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi.

Keenam point tersebut di atas diharapkan dapat mendukung pencapaian pertumbuhan total pendapatan daerah dari Rp 851,5 miliar (2024) menjadi Rp 896,0 miliar (2030) dengan tetap menjaga

keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Belanja

Sebagai bagian dari perencanaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, analisis proyeksi belanja daerah menjadi penting untuk memastikan kebijakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lembata agar terarah dan berkelanjutan. Proyeksi belanja ini menggambarkan arah kebijakan fiskal daerah dalam jangka menengah serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Proyeksi ini dibangun berdasarkan 3 (tiga) faktor utama yaitu asumsi indikator makroekonomi, kebijakan pembiayaan daerah, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi belanja pendidikan, gaji, dan tunjangan. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar perhitungan rata-rata pertumbuhan kebutuhan wajib mengikat, yang kemudian menghasilkan kerangka pertumbuhan pengeluaran sebagai acuan penyusunan kebijakan penganggaran daerah yang efektif dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah serta mendukung pembangunan nasional. Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Lembata tahun 2026-2030 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.58 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030

Uraian	Baseline (2024)	Tahun (Rupiah)				
		2026	2027	2028	2029	2030
Belanja						
Belanja Operasi	544,784,895,022.21	643,952,191,394.00	651,024,529,244.00	655,428,767,294.00	657,788,788,544.00	658,887,667,664.00
Belanja Pegawai	353,916,167,033	453,731,970,571.00	459,329,127,099.00	455,329,127,099.00	455,329,127,099.00	465,329,127,099.00
Belanja Barang dan Jasa	140,563,212,240	179,373,553,341.00	182,810,700,017.00	181,170,308,137.00	179,498,890,018.00	190,032,067,603.00
Belanja Bunga	11,566,232,871	7,395,662,198.00	5,433,696,844.00	3,478,326,774.00	1,509,766,143.00	75,467,678.00
Belanja Subsidi	514,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	28,959,164,878	611,005,284.00	611,005,284.00	12,611,005,284.00	18,611,005,284.00	611,005,284.00
Belanja Bantuan Sosial	9,266,118,000	2,840,000,000	2,840,000,000	2,840,000,000	2,840,000,000	2,840,000,000
Belanja Modal	73,609,285,219	37,942,298,254	39,904,263,608	37,835,371,148	37,835,371,148	62,037,300,700
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,889,062,234	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,056,193,929	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29,180,797,208	25,655,546,106.00	27,617,511,460.00	25,548,619,000.00	25,548,619,000.00	49,750,548,552.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,483,231,848	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00
Belanja Tidak Terduga	977,343,343	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431
Belanja Tidak Terduga	977,343,343	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431

Uraian	Baseline (2024)	Tahun (Rupiah)				
		2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Transfer	177,862,202,817.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00
Belanja Bagi Hasil	3,351,905,735	4,101,488,363	4,101,488,363	4,101,488,363	4,101,488,363	4,101,488,363
Belanja Bantuan Keuangan	174,510,297,082	164,174,419,100	164,174,419,100	164,174,419,100	164,174,419,100	164,174,419,100
Jumlah Belanja	797,233,726,401	851,799,853,542	860,834,156,746	863,169,502,336	865,529,523,586	890,830,332,258

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata, 2025

Berdasarkan proyeksi belanja ini, maka secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- 1) Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terdigitalisasi untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi pencapaian visi-misi daerah. Pendekatan ini mengutamakan hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- 2) Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi untuk menghindari duplikasi program dan memastikan keselarasan antara rencana strategis dengan implementasi di lapangan. Sistem ini akan mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dan meningkatkan konsistensi pencapaian target RPJMD;
- 3) Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Investasi pada SDM ini menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas;
- 4) Penguatan peran pemerintah desa dan kecamatan sebagai garda terdepan pembangunan melalui optimalisasi penyaluran dana transfer, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan tingkat bawah, pendampingan teknis yang intensif, dan penguatan koordinasi vertikal sesuai regulasi yang berlaku;
- 5) Implementasi kebijakan alokasi belanja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi, perkembangan teknologi, dan tantangan global, sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan anggaran.

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lembata periode 2026-2030 dirancang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian regional, nasional, dan global serta mematuhi regulasi keuangan daerah terkini. Total belanja daerah diproyeksikan tumbuh dari Rp851,8 miliar di tahun menjadi Rp890,83 miliar di tahun 2023, yang dikelola melalui empat klasifikasi belanja strategis.

1) Belanja Operasi.

Komponen terbesar adalah belanja pegawai yang dialokasikan secara proporsional mulai Rp453,3 miliar di tahun 2026 hingga Rp465,32 miliar di tahun 2030 dengan fokus peningkatan kinerja ASN. Belanja barang dan jasa ditingkatkan bertahap dari Rp179,37 miliar menjadi Rp190,03 miliar untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong ekonomi daerah. Belanja bunga dikelola efisien dengan penurunan signifikan dari Rp7,39 miliar di tahun 2026 menjadi Rp75,46 juta di tahun 2030 untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Belanja hibah dialokasikan Rp611 juta pada 2026-2027 untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk pembiayaan Pilkada 2028-2029. Belanja bantuan sosial ditetapkan Rp2,84 miliar per tahun untuk program rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan

masyarakat, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana;

2) Belanja Modal

Investasi infrastruktur ditingkatkan dari Rp37,94 miliar di 2026 menjadi Rp62,03 miliar tahun 2030, dengan prioritas pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang tumbuh dari Rp25,65 miliar menjadi Rp49,75 miliar untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah;

3) Belanja Tidak Terduga

Dialokasikan Rp1,62 miliar per tahun sebagai antisipasi keadaan darurat, bencana alam, dan kebutuhan mendesak lainnya, dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel;

4) Belanja Transfer

Ditetapkan konsisten Rp168,27 miliar per tahun, terdiri dari belanja bagi hasil Rp4,10 miliar dan bantuan keuangan Rp164,17 miliar untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, disertai penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana transfer.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD. Proyeksi pembiayaan daerah didasarkan pada 2 (dua) kebijakan utama, yaitu penyelesaian kewajiban daerah dan efisiensi belanja serta peningkatan pendapatan. Kedua aspek ini berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan saldo kas daerah serta kewajiban kepada pihak ketiga yang masih tertunda hingga akhir tahun.

Tabel proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Lembata untuk periode 2026-2030 menunjukkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi ini mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, penyertaan modal daerah, serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Adapun proyeksi pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59 Tabel Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline (2024)	Tahun (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
6	Pembiayaan						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	12,719,502,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12,715,307,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4,195,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12,719,502,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	31,866,410,568.00	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	10,091,602,642.0
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	30,366,410,568	30,366,410,568	30,366,410,568	30,366,410,568	30,366,410,568	7,591,602,642
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31,866,410,568.00	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	10,091,602,642.0
	Pembiayaan Neto	(19,146,908,141.00)	(32,866,410,568.00)	(32,866,410,568.00)	(32,866,410,568.00)	(32,866,410,568.00)	(10,091,602,642.00)

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata, 2025

Secara umum, kebijakan pembiayaan di Kabupaten Lembata dirancang untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Kebijakan ini disusun berdasarkan analisis kondisi keuangan daerah saat ini dan proyeksi kebutuhan pembangunan untuk periode 2025-2030.

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

- (a) Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Lembata diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah;
- (b) Pada *baseline* tahun 2024, SiLPA Kabupaten Lembata tercatat sebesar Rp12.715.307.427. Untuk tahun 2026-2030, proyeksi SiLPA direncanakan tidak ada (Rp0), dengan asumsi bahwa proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih baik serta sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran secara efektif dan efisien;
- (c) Terkait pinjaman daerah, pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp4.195.000, namun untuk tahun 2026-2030 tidak diproyeksikan adanya penerimaan pinjaman baru. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan beban pembayaran pokok utang dan bunga yang masih harus dibayarkan hingga tahun 2028. Pemerintah Kabupaten Lembata mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*) dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari dampak negatif bagi keuangan daerah di masa mendatang;
- (d) Total penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp12.719.502.427 dan diproyeksikan menjadi Rp0 pada tahun 2026-2030. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- (a) Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Lembata difokuskan pada 2 (dua) komponen utama, yaitu penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (b) Penyertaan modal daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1.500.000.000 pada tahun 2024 menjadi konsisten sebesar Rp2.500.000.000 per tahun selama periode 2026-2030. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lembata, serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik;

- (c) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo diproyeksikan stabil sebesar Rp30.366.410.568 per tahun untuk periode 2026-2029, namun mengalami penurunan signifikan menjadi Rp7.591.602.642 pada tahun 2030. Hal ini mengindikasikan sebagian besar kewajiban utang daerah akan terselesaikan menjelang akhir periode perencanaan, yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang semakin membaik;
- (d) Total pengeluaran pembiayaan diproyeksikan stabil sebesar Rp32.866.410.568 per tahun sepanjang 2026-2029, kemudian menurun signifikan menjadi Rp10.091.602.642 pada tahun 2030. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam pengurangan beban kewajiban finansial jangka panjang;
- (e) Pembiayaan neto Kabupaten Lembata diproyeksikan mengalami defisit konsisten sebesar Rp32.866.410.568 setiap tahun dalam periode 2026-2029, yang kemudian berkurang menjadi Rp10.091.602.642 pada tahun 2030. Defisit ini terjadi karena dalam perencanaan keuangan daerah, pemerintah tidak memproyeksikan adanya penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk tahun-tahun tersebut. Ketiadaan proyeksi SiLPA ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penganggaran, mengingat SiLPA merupakan komponen yang tidak dapat dipastikan jumlahnya pada tahap perencanaan karena bergantung pada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Selanjutnya, agar pemangku kepentingan dapat memahami arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan diimplementasikan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029, berikut disajikan postur APBD Tahun Anggaran 2026-2030 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.60 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline (2024)	Tahun (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	Pendapatan Daerah						
4.1	Pendapatan Asli Daerah	30,538,328,644	38,830,536,603.00	47,864,839,807.00	50,200,185,397.00	52,560,206,647.00	55,086,207,393.00
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	9,592,391,032	14,623,277,916.00	16,105,314,207.00	16,982,535,652.00	17,938,983,924.00	18,974,540,180.00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	14,484,799,132	19,612,463,855.00	27,225,919,660.00	28,587,215,643.00	29,871,610,165.00	31,168,321,790.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,131,463,061	3,048,722,165	3,201,158,273	3,521,274,100	3,697,337,805	3,882,204,695
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,329,675,419	1,546,072,667	1,332,447,667.00	1,109,160,002.00	1,052,274,753.00	1,061,140,728.00
4.2	Pendapatan Transfer	814,212,693,687	838,027,537,507	838,027,537,507	838,027,537,507	838,027,537,507	838,027,537,507
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	792,169,679,850	820,455,063,000	820,455,063,000	820,455,063,000	820,455,063,000	820,455,063,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,043,013,837	17,572,474,507	17,572,474,507	17,572,474,507	17,572,474,507	17,572,474,507
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,792,840,468	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,792,840,468	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000	7,808,190,000
	Jumlah Pendapatan	851,543,862,799	884,666,264,110	893,700,567,314.00	896,035,912,904.00	898,395,934,154.00	900,921,934,900.00
5	Belanja						
5.1	Belanja Operasi	544,784,895,022.21	643,952,191,394.00	651,024,529,244.00	655,428,767,294.00	657,788,788,544.00	658,887,667,664.00
5.1.01	Belanja Pegawai	353,916,167,033	453,731,970,571.00	459,329,127,099.00	455,329,127,099.00	455,329,127,099.00	465,329,127,099.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140,563,212,240	179,373,553,341.00	182,810,700,017.00	181,170,308,137.00	179,498,890,018.00	190,032,067,603.00

No	Uraian	Baseline (2024)	Tahun (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
5.1.03	Belanja Bunga	11,566,232,871	7,395,662,198.00	5,433,696,844.00	3,478,326,774.00	1,509,766,143.00	75,467,678.00
5.1.04	Belanja Subsidi	514,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	28,959,164,878	611,005,284.00	611,005,284.00	12,611,005,284.00	18,611,005,284.00	611,005,284.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9,266,118,000	2,840,000,000	2,840,000,000	2,840,000,000	2,840,000,000	2,840,000,000
5.2	Belanja Modal	73,609,285,219	37,942,298,254	39,904,263,608	37,835,371,148	37,835,371,148	62,037,300,700
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,889,062,234	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00	8,440,721,421.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,056,193,929	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00	1,856,511,689.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29,180,797,208	25,655,546,106.00	27,617,511,460.00	25,548,619,000.00	25,548,619,000.00	49,750,548,552.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,483,231,848	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00	1,989,519,038.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	977,343,343	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	977,343,343	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431	1,629,456,431
5.4	Belanja Transfer	177,862,202,817.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,351,905,735	4,101,488,363	4,101,488,363	4,101,488,363	4,101,488,363	4,101,488,363
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174,510,297,082	164,174,419,100	164,174,419,100	164,174,419,100	164,174,419,100	164,174,419,100
	Jumlah Belanja	797,233,726,401	851,799,853,542	860,834,156,746	863,169,502,336	865,529,523,586	890,830,332,258
	Total Surplus/(Defisit)	54,310,136,398.07	32,866,410,568.00	32,866,410,568.00	32,866,410,568.00	32,866,410,568.00	10,091,602,642.00
6	Pembiayaan						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	12,719,502,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	Baseline (2024)	Tahun (Rupiah)				
			2026	2027	2028	2029	2030
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12,715,307,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4,195,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12,719,502,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	31,866,410,568.00	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	10,091,602,642.0
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	30,366,410,568	30,366,410,568	30,366,410,568	30,366,410,568	30,366,410,568	7,591,602,642
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31,866,410,568.00	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	32,866,410,568.0	10,091,602,642.0
	Pembiayaan Neto	(19,146,908,141.00)	(32,866,410,568.00)	(32,866,410,568.00)	(32,866,410,568.00)	(32,866,410,568.00)	(10,091,602,642.00)

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata, Tahun 2025

2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung dan ke dalam pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang nilainya didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kebutuhan dana wajib dan mengikat serta prioritas utama ini harus dihitung karena wajib diselenggarakan karena beberapa alasan yakni (1) menyangkut pelayanan mendasar yang wajib dilakukan karena diamanatkan oleh Undang-Undang, (2) menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan. Kapasitas riil ini kemudian dialokasikan dalam prioritas pertama, kedua dan ketiga.

Sejak implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, klasifikasi belanja langsung dan tidak langsung sudah tidak berlaku. Kerangka pendanaan saat ini menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dalam konteks ini, pendanaan dialokasikan berdasarkan 3 (tiga) tingkat prioritas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi belanja terbaru, yakni: prioritas pertama mencakup belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar, meliputi seluruh belanja pegawai, belanja bunga untuk pembayaran utang, belanja transfer seperti dana desa dan bagi hasil, komponen belanja barang/jasa untuk operasional rutin perkantoran, dan belanja bantuan sosial yang diwajibkan Undang-Undang. Prioritas kedua dialokasikan untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah, yang mencakup belanja modal untuk program unggulan dan prioritas, belanja barang/jasa untuk program strategis, serta belanja hibah untuk program khusus yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Prioritas ketiga dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, meliputi sisa belanja modal untuk urusan pilihan, sisa belanja barang/jasa untuk kegiatan penunjang, dan belanja tidak terduga sebagai antisipasi keadaan darurat. Dalam konteks manajemen fiskal daerah, terdapat klasifikasi belanja yang memiliki

karakteristik khusus yang berbeda dari belanja operasional regular. Belanja bunga, Belanja Tak Terduga (BTT), belanja transfer diadministrasikan melalui Badan Keuangan Daerah.

Melalui kerangka pendanaan ini, Kabupaten Lembata dapat mengelola alokasi anggaran secara sistematis dan terstruktur, memastikan kebutuhan wajib terpenuhi terlebih dahulu sebelum mengalokasikan dana untuk program pembangunan dan urusan pemerintahan lainnya. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perhitungan kebutuhan belanja, pengeluaran pembiayaan daerah, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan daerah, dan prioritas pendanaan sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.61 Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja	648,034,762,337.00	651,669,953,511.00	657,714,583,441.00	661,746,022,810.00	652,311,724,345.00
Belanja Operasi	479,758,854,874.00	483,394,046,048.00	489,438,675,978.00	493,470,115,347.00	484,035,816,882.00
Belanja Pegawai	453,731,970,571.00	459,329,127,099.00	455,329,127,099.00	455,329,127,099.00	465,329,127,099.00
Gaji dan Tunjangan ASN	342,816,623,342.00	348,413,779,870.00	348,413,779,870.00	348,413,779,870.00	348,413,779,870.00
Tambahan Penghasilan ASN	99,044,851,851.00	99,044,851,851.00	95,044,851,851.00	95,044,851,851.00	105,044,851,851.00
Belanja Gaji & Tunjangan DPRD	11,238,224,390.00	11,238,224,390.00	11,238,224,390.00	11,238,224,390.00	11,238,224,390.00
Belanja Gaji & Tunjangan KDH/WKDH	178,058,232	178,058,232	178,058,232	178,058,232	178,058,232
Belanja Penerimaan LainnyaPimpinan DPRD & KDH/WKDH	454,212,756	454,212,756	454,212,756	454,212,756	454,212,756
Belanja Barang dan Jasa	18,020,216,821	18,020,216,821	18,020,216,821	18,020,216,821	18,020,216,821
Belanja Rekening Tagihan Air	336,776,500.00	336,776,500.00	336,776,500.00	336,776,500.00	336,776,500.00
Belanja Rekening Tagihan Listrik	2,812,559,926.00	2,812,559,926.00	2,812,559,926.00	2,812,559,926.00	2,812,559,926.00
Belanja Rekening Tagihan Internet	1,812,004,932.00	1,812,004,932.00	1,812,004,932.00	1,812,004,932.00	1,812,004,932.00
Belanja Sewa Gedung Kantor	147,126,040.00	147,126,040.00	147,126,040.00	147,126,040.00	147,126,040.00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Dinas	583,601,443.00	583,601,443.00	583,601,443.00	583,601,443.00	583,601,443.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kades & Perangkat Desa	1,359,198,380.00	1,359,198,380.00	1,359,198,380.00	1,359,198,380.00	1,359,198,380.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU & BP Kelas 3	3,911,745,600.00	3,911,745,600.00	3,911,745,600.00	3,911,745,600.00	3,911,745,600.00
Belanja Jasa Pelayanan Medis Puskesmas & RSUD (40% dari klaim BPJS)	7,057,204,000.00	7,057,204,000.00	7,057,204,000.00	7,057,204,000.00	7,057,204,000.00

Uraian	Proyeksi				2030
	2026	2027	2028	2029	
Belanja Bunga	7,395,662,198.00	5,433,696,844.00	3,478,326,774.00	1,509,766,143.00	75,467,678.00
Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN	7,208,791,356.00	5,303,003,862.00	3,408,493,140.00	1,491,428,880.00	75,467,678.00
Belanja Jasa pelaksanaan transaksi Keuangan	186,870,842.00	130,692,982.00	69,833,634.00	18,337,263.00	0.00
Hibah	611,005,284.00	611,005,284.00	12,611,005,284.00	18,611,005,284.00	611,005,284.00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	611,005,284.00	611,005,284.00	611,005,284.00	611,005,284.00	611,005,284.00
Belanja Hibah Pilkada	0.00	0.00	12,000,000,000.00	18,000,000,000.00	0.00
Belanja Transfer	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00	168,275,907,463.00
ADD	51,827,491,100.00	51,827,491,100.00	51,827,491,100.00	51,827,491,100.00	51,827,491,100.00
Dana Desa	112,346,928,000.00	112,346,928,000.00	112,346,928,000.00	112,346,928,000.00	112,346,928,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	4,101,488,363.00	4,101,488,363.00	4,101,488,363.00	4,101,488,363.00	4,101,488,363.00
Pengeluaran Pembiayaan	32,866,410,568.00	32,866,410,568.00	32,866,410,568.00	32,866,410,568.00	10,091,602,642.00
Penyertaan Modal Daerah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	30,366,410,568.00	30,366,410,568.00	30,366,410,568.00	30,366,410,568.00	7,591,602,642.00
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	680,901,172,905.00	684,536,364,079.00	690,580,994,009.00	694,612,433,378.00	662,403,326,987.00

Sumber: BKAD dan Bapenda Kabupaten Lembata, 2025

Tabel 2.62 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata

Aian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	884,666,264,110.00	893,700,567,314.00	896,035,912,904.00	898,395,934,154.00	900,921,934,900.00
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sisa Lebih Riil Anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan	884,666,264,110.00	893,700,567,314.00	896,035,912,904.00	898,395,934,154.00	900,921,934,900.00
Di Kurangi					
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	680,901,172,905.00	684,536,364,079.00	690,580,994,009.00	694,612,433,378.00	662,403,326,987.00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	203,765,091,205.00	209,164,203,235.00	205,454,918,895.00	203,783,500,776.00	238,518,607,913.00

Sumber: BKAD dan Dinas Pendapatan Kabupaten Lembata, 2025

Tabel 2.63 Prioritas Pendanaan*)

Uraian	Proyeksi Tahun (Rupiah)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Prioritas I	648.034.762.337	651.669.953.511	657.714.583.441	661.746.022.810	652.311.724.345
Prioritas II	178.859.168.880	181.930.634.320	175.660.938.732	171.173.068.240	202.810.077.766
Prioritas III	24.905.922.325	27.233.568.914	29.793.980.162	32.610.432.535	35.708.530.146
Total	851.799.853.542	860.834.156.746	863.169.502.336	865.529.523.586	890.830.332.258

Sumber: BKAD, Kabupaten Lembata 2025 *)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan diidentifikasi dari rumusan gambaran umum kondisi daerah dan gambaran keuangan daerah, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan merupakan permasalahan yang dominan.

Permasalahan pembangunan digambarkan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

1. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan peran strategis daerah belum dikelola secara optimal

Kabupaten Lembata memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai daerah kepulauan dengan dominasi morfologi berbukit dan perbukitan terjal dibandingkan dengan dataran rendah yang relatif datar. Kabupaten Lembata memiliki posisi strategis karena terletak di antara 2 (dua) kabupaten kepulauan yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor, serta menjadi bagian dari posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara. Kondisi ini belum dikelola secara optimal untuk membangun kerjasama antar daerah, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan rantai pasok regional, peningkatan aksesibilitas wilayah, dan pengembangan infrastruktur. Penyebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah pesisir utara dan wilayah dataran rendah, sementara daerah perbukitan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya cenderung berpenduduk jarang. Laju pertumbuhan penduduk Lembata stabil per tahun, namun angka ketergantungan masih cukup tinggi, artinya beban ekonomi penduduk usia produktif sangat besar. Proyeksi penduduk menunjukkan lonjakan signifikan, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan dasar dan infrastruktur, dikhawatirkan akan menimbulkan tekanan besar terhadap ekosistem dan sistem pelayanan publik.

2) Potensi daerah belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal

Struktur ekonomi Lembata sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun demikian, potensi lahan produktif pertanian tidak tersebar merata. Beberapa kecamatan memiliki surplus produksi pangan, sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Nubatukan, Buyasuri, dan Omesuri justru mengalami defisit lahan. Potensi laut sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan

nelayan. Sumber daya hutan produksi, peternakan, hortikultura, tambang, dan energi baru (panas bumi) juga belum dikembangkan maksimal. Ancaman utama adalah konversi lahan, degradasi hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang belum sepenuhnya berprinsip keberlanjutan, sehingga memicu risiko lingkungan dan menurunkan daya saing jangka panjang.

3) *Daya dukung dan daya tampung pada penyediaan air bersih dan lahan terbatas.*

Permasalahan utama pada aspek ini adalah mulai terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya untuk air bersih dan lahan, akibat eksploitasi, konversi lahan, dan degradasi penutup lahan. Sebaran cekungan air tanah sangat tidak merata, dengan ketergantungan yang tinggi pada 2 (dua) cekungan air tanah utama, sehingga jika terjadi eksploitasi berlebih, potensi krisis air, dan penurunan kualitas lingkungan semakin besar. Infrastruktur konservasi (seperti embung dan reboisasi) masih minim, memperparah risiko kekeringan di musim kemarau panjang. Pengelolaan limbah dan sanitasi belum memadai karena memiliki akses sanitasi layak, dan cakupan layanan sampah perkotaan sangat rendah.

4) *Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan masih rendah*

Ketahanan pangan di Lembata cenderung fluktuatif, dengan sebagian besar kecamatan masih belum mampu swasembada. Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dan risiko gagal panen akibat variabilitas iklim menjadi masalah utama. Beberapa wilayah mengalami defisit air pada musim kemarau karena daerah aliran sungai tidak mampu menyimpan air secara optimal, antara lain akibat kerusakan penutup lahan (*land cover*), alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian, dan minimnya infrastruktur konservasi air seperti embung dan bendungan kecil. Akses air minum layak mengalami peningkatan, namun masih ada penduduk yang belum terlayani air minum layak, terutama di desa-desa terpencil dan daerah perbukitan. Ketahanan energi menunjukkan kemajuan elektrifikasi, meski masih terdapat desa/daerah yang belum teraliri listrik, dan potensi panas bumi belum dioptimalkan pemanfaatannya. Keterkaitan antara pangan, air, dan energi (FEW Nexus) sangat kuat, sehingga gangguan pada salah satu aspek dapat berdampak sistemik pada ketahanan hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

5) *Lingkungan hidup berkualitas masih rendah*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Lembata berada pada kategori “Baik”, tetapi kualitas air dan lahan masih menengah dan fluktuatif. Tekanan utama terhadap kualitas lingkungan adalah pencemaran air domestik, alih fungsi lahan, deforestasi, dan limbah pertanian. Pengelolaan

keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Akses rumah layak huni dan permukiman sehat pun masih rendah yang beresiko pada meningkatkan penyakit berbasis lingkungan. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, dapat menurunkan produktivitas, kualitas hidup, dan daya tarik investasi daerah.

6) *Tingginya potensi bencana daerah*

Kabupaten Lembata termasuk daerah yang memiliki potensi bencana dengan tingkat risiko bencana sangat tinggi di NTT, baik akibat faktor geologi (letusan gunung api, gempa, tsunami) maupun hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan, abrasi). Indeks Risiko Bencana memang turun dalam lima tahun terakhir, tetapi risiko laten tetap besar, terutama di kawasan perbukitan terjal, pesisir, dan daerah sekitar gunung api. Infrastruktur proteksi banjir dan abrasi masih minim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum sistemik, serta pemulihan pascabencana sering lambat. Perubahan iklim memperparah siklus kekeringan-banjir, mengganggu pola tanam, dan suplai air bersih, sehingga perlu pendekatan pembangunan berbasis resiliensi dan adaptif pada tiap lini.

7) *Kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata*

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata stabil, namun kepadatan dan distribusinya cenderung tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di perkotaan (Lewoleba Kecamatan Nubatukan) dan penurunan di desa-desa perbukitan atau terpencil. Angka ketergantungan cukup tinggi, menandakan beban ekonomi yang berat pada usia produktif. Rasio gender mulai membaik, tetapi kelompok rentan (anak, lansia, perempuan, disabilitas) masih membutuhkan perlindungan khusus. Jika tidak diimbangi pemerataan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal, ketimpangan wilayah dan sosial akan semakin lebar, memperbesar risiko kemiskinan dan pengangguran terbuka.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

8) *Tingkat kesejahteraan ekonomi masih rendah*

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lembata masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTT dan nasional. Struktur ekonomi Lembata masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan jasa masih sangat terbatas. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan laju penurunan kemiskinan berjalan lambat. Di sisi lain, pengeluaran per kapita, daya beli, dan akses terhadap peluang ekonomi formal juga masih terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan signifikan.

9) *Derajat kesehatan masyarakat masih rendah*

Derajat kesehatan masyarakat Lembata masih menghadapi banyak tantangan. Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) memang mengalami peningkatan, tetapi prevalensi stunting dan kekurangan gizi pada balita masih cukup tinggi dan fluktuatif. Cakupan layanan kesehatan dasar memang meningkat, namun masih terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama terkait akses air bersih, sanitasi, serta fasilitas kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi masih berfluktuasi, dan masih banyak keluarga yang belum menikmati pelayanan kesehatan berkualitas secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas juga belum optimal, serta masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular akibat perilaku hidup sehat yang belum membudaya.

10) *Kualitas pendidikan masih rendah dan belum merata*

Kualitas pendidikan di Kabupaten Lembata masih tergolong rendah dan belum merata di seluruh wilayah. Rata-rata lama sekolah sebagian besar masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Harapan lama sekolah memang meningkat, tetapi capaian literasi dan numerasi, terutama di sekolah dasar dan menengah, masih jauh dari target nasional. Terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, serta keterbatasan jumlah guru berkualifikasi dan fasilitas pendukung pembelajaran. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas SDM Lembata dan memperlambat proses akselerasi pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi.

11) *Perlindungan sosial yang kurang adaptif*

Perlindungan sosial di Kabupaten Lembata dinilai masih kurang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan bencana. Jangkauan program jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang meningkat pesat, namun pelaksanaan perlindungan sosial lainnya, seperti Jamsostek untuk pekerja informal, masih rendah cakupannya. Perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana belum optimal dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal atau adaptif terhadap kondisi krisis (misalnya saat pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi). Ketersediaan data, sistem pendataan, dan mekanisme penyaluran bantuan juga belum terintegrasi secara efektif.

12) *Pembangunan kebudayaan masih rendah*

Indeks Pembangunan Kebudayaan, yang menjadi tolak ukur kemajuan kebudayaan dan pelestarian tradisi, masih berada pada tingkat menengah bawah. Berbagai ekspresi budaya lokal, kesenian, serta praktik tradisi masih belum

terintegrasi secara optimal dalam program pembangunan. Dukungan terhadap lembaga kebudayaan, perlindungan warisan budaya, serta promosi nilai-nilai luhur daerah juga masih terbatas. Sedangkan kerukunan umat beragama secara umum terjaga dengan baik. Penguatan literasi budaya dan multikulturalisme di kalangan generasi muda perlu lebih didorong untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

13) *Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan kepemudaan dan masyarakat inklusif masih rendah*

Indeks Pembangunan Gender di Lembata menunjukkan tren positif, namun ketimpangan gender dalam berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik) masih cukup nyata. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga berkualitas dan pembangunan kepemudaan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk tingginya angka pernikahan usia dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keterbatasan akses perempuan dan pemuda pada peluang ekonomi dan kepemimpinan. Indeks ketimpangan gender memang menurun, namun perlu upaya sistemik untuk memastikan perempuan, anak, dan kelompok marginal lain mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Program inklusi sosial untuk penyandang disabilitas, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya juga masih terbatas cakupannya.

3. Aspek Daya Saing Daerah

14) *Daya saing sumber daya manusia masih rendah*

Kabupaten Lembata menghadapi tantangan serius dalam aspek daya saing sumber daya manusia. Beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif di Lembata masih sangat tinggi. Kondisi ini menekan kapasitas ekonomi dan sosial daerah, sebab pendapatan dan hasil produksi yang dihasilkan oleh kelompok usia produktif harus dibagi untuk menanggung beban kelompok usia tidak produktif yang tinggi. Selain itu, sebagian besar penduduk usia produktif belum memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas yang memadai untuk menopang ekonomi daerah secara optimal. Mayoritas angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP, sementara akses terhadap pendidikan menengah, vokasi, dan pendidikan tinggi masih terbatas. Program pengembangan keterampilan kerja dan kewirausahaan juga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Akibatnya, banyak penduduk usia produktif terjebak pada pekerjaan informal, pertanian tradisional, atau sektor ekonomi berupah rendah. Kondisi ini menimbulkan siklus ketergantungan dan memperlambat peningkatan daya saing daerah.

15) *Ilmu pengetahuan dan inovasi belum optimal mendukung produktivitas ekonomi*

Produktivitas ekonomi di Kabupaten Lembata masih sangat didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan lambat dan sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan cuaca, dan bencana alam. Minimnya inovasi dan adopsi ilmu pengetahuan di sektor produktif menyebabkan hasil produksi belum memiliki nilai tambah yang signifikan. Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya alam belum berkembang, sehingga produk-produk unggulan Lembata banyak dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Ekosistem inovasi daerah, termasuk kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, dan perguruan tinggi, belum berjalan optimal. Akibatnya, peluang pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, kreativitas, dan diversifikasi produk lokal belum dapat diwujudkan secara maksimal.

16) *Transformasi ekonomi hijau dan biru belum diterapkan secara optimal*

Transformasi ke arah ekonomi hijau (berbasis pertanian berkelanjutan, konservasi hutan, pengelolaan sampah terpadu) dan ekonomi biru (pemanfaatan potensi laut yang ramah lingkungan, pengembangan wisata bahari) masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi dalam kebijakan daerah. Aktivitas ekonomi yang masih mengandalkan eksploitasi sumber daya alam tradisional berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan jangka panjang. Upaya konservasi, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penguatan ekonomi sirkular masih minim. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut belum menjadi gerakan kolektif.

17) *Transformasi digital belum diterapkan secara optimal*

Transformasi digital di Kabupaten Lembata masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi infrastruktur, akses, penggunaan, maupun keterampilan digital masyarakat. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di NTT sendiri masih berada di level menengah bawah, dan Lembata sebagai wilayah kepulauan menghadapi hambatan lebih besar, seperti keterbatasan jaringan internet di desa terpencil, kurangnya perangkat digital, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, pelajar, maupun aparat pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, pendidikan, pemasaran produk UMKM, dan inovasi sosial masih terbatas. Sebagian besar layanan publik belum terdigitalisasi secara penuh, dan integrasi sistem data lintas perangkat daerah belum berjalan. Di tingkat rumah tangga, pemanfaatan internet dan perangkat digital lebih banyak bersifat

konsumtif, belum produktif. Tanpa akselerasi pembangunan TIK (jaringan, perangkat, SDM digital), Kabupaten Lembata akan semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi regional dan nasional.

18) *Integrasi ekonomi domestik dan global masih terbatas*

Konektivitas ekonomi Lembata dengan wilayah lain di Indonesia masih bersifat terbatas, baik karena posisi geografis kepulauan maupun keterbatasan moda transportasi dan logistik. Ekspor produk unggulan Lembata masih sangat minim, bahkan defisit neraca perdagangan barang dan jasa dengan luar daerah masih terjadi hampir setiap tahun. Kegiatan perdagangan besar, ekspor langsung, atau rantai pasok global belum berkembang. Produk lokal umumnya dipasarkan melalui perantara di wilayah provinsi atau luar pulau. Hal ini menyebabkan nilai tambah ekonomi Lembata sangat kecil dan masyarakat hanya memperoleh bagian kecil dari rantai nilai komoditas. Ketiadaan pelabuhan ekspor modern, keterbatasan fasilitas pendingin (*cold storage*), dan akses pembiayaan ekspor menjadi hambatan besar integrasi ekonomi global.

19) *Ketersediaan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang belum optimal*

Ketersediaan infrastruktur perkotaan dan perdesaan belum optimal, menyebabkan hasil produksi dari desa sulit dipasarkan secara efisien di kota atau luar daerah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik memang meningkat, namun secara keseluruhan masih relatif rendah sehingga distribusi barang dan jasa terhambat, terutama di musim hujan atau di wilayah perbukitan. Akses rumah tangga terhadap hunian layak pun masih rendah, menandakan belum optimalnya program perumahan rakyat. Persentase desa mandiri sangat kecil dan mayoritas desa masih berstatus berkembang atau tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa strategi transformasi desa ke arah desa mandiri dan penguatan pusat pertumbuhan baru belum berjalan efektif.

20) *Stabilitas ekonomi makro belum berjalan optimal*

Fluktuasi harga kebutuhan dasar seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan bakar masih sering terjadi, terutama saat musim paceklik atau ketika ada gangguan distribusi dari luar daerah. Hal ini sangat berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta sering kali menjadi pemicu inflasi musiman. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga sangat rendah yang mengakibatkan transfer pusat masih sangat tinggi, dan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas pembangunan secara mandiri sangat terbatas. Kapasitas fiskal rendah ini juga membatasi ruang gerak inovasi kebijakan, serta menyulitkan akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

4. Aspek Pelayanan Umum

- 21) *Belum optimalnya pelaksanaan prinsip tata kelola yang berintegritas dan adaptif*

Hambatan utama terletak pada belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dan keterbatasan kapasitas birokrasi dalam mengelola urusan pemerintahan secara responsif, terbuka, dan inovatif. Indikator objektif dapat dilihat dari beberapa capaian indeks utama, seperti Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Reformasi Birokrasi (RB), dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Ketiganya masih menunjukkan skor yang relatif rendah jika dibandingkan dengan target nasional maupun rata-rata provinsi. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan belum menyeluruh dan integratif. Banyak layanan publik yang belum terdigitalisasi, sehingga masyarakat masih dihadapkan pada proses birokrasi yang panjang, lamban, dan rawan praktik maladministrasi. Keterbatasan kompetensi ASN, kurangnya budaya kerja profesional, serta lemahnya sistem *reward and punishment* menyebabkan perubahan perilaku birokrasi berjalan lambat. Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah masih rendah, terutama untuk layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan bantuan sosial, hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial.

- 22) *Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial belum berjalan efektif*

Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Lembata masih tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya angka kasus kriminalitas yang tercatat dan ditangani aparat penegak hukum setempat. Beberapa jenis tindak kriminal, seperti pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran lalu lintas, dan konflik lahan, masih sering terjadi setiap tahun. Tidak semua kasus tersebut dapat dituntaskan secara cepat dan adil. Selain itu, akses masyarakat khususnya kelompok rentan (perempuan, anak, dan masyarakat adat) terhadap bantuan hukum dan perlindungan masih terbatas. Lemahnya literasi hukum dan terbatasnya advokasi menjadi kendala utama dalam menciptakan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Keamanan Lembata relatif terjaga, tetapi masih rentan terhadap peredaran narkoba, penyelundupan, hingga konflik horizontal akibat sengketa lahan atau perbedaan kepentingan. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat dalam proses politik memang meningkat, namun belum sepenuhnya mencerminkan substansi demokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan HAM.

23) *Masih rendahnya daya saing daerah*

Kabupaten Lembata hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam aspek ini, yang tercermin dari rendahnya daya saing investasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Daya saing investasi yang rendah terlihat dari minimnya minat investasi asing maupun domestik, terbatasnya kemudahan perizinan, dan belum optimalnya promosi potensi daerah. Investor masih menghadapi kendala infrastruktur, perizinan yang belum efisien, serta keterbatasan insentif. Daya saing SDM pun masih tergolong rendah, sebagaimana diuraikan pada aspek sebelumnya: tingkat pendidikan rata-rata masih di bawah nasional, penguasaan keterampilan teknologi terbatas, dan produktivitas kerja rendah. Infrastruktur pendukung, baik fisik (jalan, pelabuhan, listrik) maupun digital (internet dan TIK) belum memenuhi standar untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis industri maupun pariwisata. Kondisi ini menjadikan posisi Lembata kurang kompetitif dalam bersaing dengan daerah lain di NTT maupun kawasan timur Indonesia. Ketahanan pertahanan dan diplomasi daerah pun menjadi terbatas, karena tidak didukung oleh kekuatan ekonomi dan teknologi yang cukup.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategi diidentifikasi sesuai lingkungan dinamis yaitu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Isu strategis juga dirumuskan dari kesimpulan permasalahan dan sesuai potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

1. Isu Strategis Global

Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Namun demikian pada awal tahun 2020, dunia dilanda *shock* pandemi *covid-19* sehingga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian global termasuk Indonesia. Melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Akan tetapi secara umum dalam periode tahun 2025-2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor utama yaitu:

- 1) Geopolitik dan geoekonomi
Konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina serta Israel-Timur Tengah berdampak luas terhadap keamanan, rantai pasok global, dan stabilitas ekonomi dunia. Negara-negara penghasil komoditas utama terganggu produksinya; harga pangan, pupuk, dan energi dunia naik, dan negara berkembang seperti Indonesia turut terdampak melalui inflasi, penurunan daya beli, dan ketidakpastian pasokan.
- 2) Pelemahan ekonomi China
Sebagai mitra dagang utama bagi banyak negara berkembang, melemahnya pertumbuhan ekonomi China menyebabkan penurunan permintaan ekspor dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Harga komoditas terutama bahan baku dan hasil pertanian menjadi fluktuatif di daerah seperti Lembata yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer menjadi sangat rentan terhadap gejolak ini.
- 3) Perubahan iklim dan bencana global
Dunia memasuki fase darurat iklim: cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan bencana alam semakin sering terjadi. Produksi pangan dunia terancam, biaya ekonomi akibat kerusakan lingkungan melonjak, dan negara-negara di kawasan tropis serta kepulauan (seperti Lembata) menghadapi ancaman yang semakin nyata terhadap ketahanan air, pangan, dan hunian.
- 4) Kebijakan proteksionisme dan tren SDGs
Amerika Serikat dan sejumlah negara mulai mengedepankan kebijakan proteksionisme, seperti kenaikan tarif impor dan persyaratan lingkungan untuk produk ekspor. Di sisi lain, agenda SDGs mendorong dunia untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak dasar, dan transisi menuju energi terbarukan. Pemerintah daerah dituntut beradaptasi agar pembangunan tetap relevan dengan tren global dan tidak tertinggal dalam capaian SDGs.
Dampak terhadap Kabupaten Lembata sebagai wilayah kepulauan yang sensitif terhadap perubahan harga global dan guncangan iklim, Lembata harus mengantisipasi ancaman ketahanan pangan dan air, peningkatan risiko bencana, serta kebutuhan adaptasi ekonomi lokal terhadap perubahan pasar ekspor-impor. Upaya kolaborasi internasional, adaptasi teknologi ramah lingkungan, penguatan resiliensi masyarakat, dan transformasi ekonomi hijau-biru harus diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan daerah.

2. Isu Strategis Nasional

Di tingkat nasional, agenda pembangunan Indonesia pada 2025–2029 diarahkan pada transformasi struktural di seluruh sektor. Isu-isu strategis utama yang perlu dijadikan acuan di daerah, termasuk Lembata, adalah:

- 1) **Transformasi Sosial**
Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial menjadi prasyarat utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan disparitas akses, kualitas layanan, dan ketimpangan antar daerah masih lebar. Lembata perlu berinovasi untuk memastikan masyarakat di pelosok juga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.
- 2) **Transformasi Ekonomi**
Kebijakan nasional mendorong hilirisasi SDA, peningkatan nilai tambah, serta penguatan riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja. Bagi Lembata, ini berarti mempercepat transformasi dari ekonomi berbasis bahan mentah ke industri pengolahan, digitalisasi UMKM, serta penguatan ekosistem inovasi lokal yang berbasis potensi unggulan daerah.
- 3) **Transformasi Tata Kelola**
Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, penataan kelembagaan yang kolaboratif dan efektif, serta peningkatan kualitas ASN menjadi prioritas. Daerah didorong mengakselerasi pelayanan publik digital, simplifikasi regulasi, dan penguatan tata kelola berbasis data.
- 4) **Supremasi Hukum dan Stabilitas Nasional**
Penegakan hukum yang adil, penguatan pertahanan kawasan, serta diplomasi daerah menjadi perhatian. Lembata, yang berbatasan dengan jalur laut strategis dan pulau-pulau luar, harus memperkuat pengawasan wilayah, pengelolaan perbatasan, serta sinergi penegakan hukum.
- 5) **Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi**
Pemerintah nasional mendorong perlindungan budaya lokal, pelestarian lingkungan, serta pembangunan yang berwawasan ekologi. Lembata wajib mengarusutamakan pelestarian kearifan lokal, penguatan budaya, serta pembangunan berkelanjutan di segala sektor.

Dampak terhadap Kabupaten Lembata, yaitu perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan program pembangunan daerah agar selaras dengan prioritas nasional. Transformasi di bidang ekonomi, pelayanan dasar, dan tata kelola pemerintahan perlu diakselerasi agar tidak tertinggal dari daerah lain, dan agar manfaat pembangunan benar-benar terasa hingga ke desa-desa terpencil.

3. Isu Strategis Provinsi NTT

NTT menetapkan beberapa agenda strategis dalam upaya mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia Timur:

- 1) **Peningkatan Kualitas Hidup dan Transformasi Sosial**
Isu peningkatan kualitas hidup manusia NTT sangat mendesak, mengingat masih tingginya angka kemiskinan, prevalensi stunting, dan rendahnya kualitas pendidikan. Bagi Lembata,

sinergi dengan program provinsi dalam menekan kemiskinan dan meningkatkan IPM sangat krusial.

- 2) Transformasi Ekonomi dan Pusat Pertumbuhan Baru
NTT mendorong hilirisasi sektor primer (pertanian, perikanan) dan pengembangan kawasan pariwisata serta ekonomi kreatif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Lembata harus mengambil peran dalam klaster ekonomi regional ini, dengan penguatan destinasi wisata dan pengolahan hasil laut.
 - 3) Energi Baru Terbarukan dan Ketahanan Ekonomi
Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti panas bumi di Atadei, adalah peluang yang belum optimal digarap Lembata. Selain itu, upaya menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal perlu ditingkatkan agar daerah lebih mandiri secara keuangan.
 - 4) Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
Penguatan efektivitas dan profesionalisme birokrasi, termasuk peningkatan kualitas ASN dan pelayanan publik berbasis digital, menjadi agenda besar NTT. Lembata dituntut untuk mengejar standar provinsi, memperkuat kinerja birokrasi dan inovasi layanan.
 - 5) Ketahanan Sosial-Budaya dan Ekologi
Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam menjadi tuntutan. Upaya pelestarian budaya, lingkungan hidup, serta perlindungan kelompok rentan harus terintegrasi dalam strategi pembangunan daerah.
4. Isu Strategis berdasarkan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Pelungkupan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 adalah:
- 1) Tingginya angka kemiskinan;
 - 2) Sistem perlindungan sosial yang masih rendah;
 - 3) Sistem tata kelola pemerintah yang belum optimal;
 - 4) Akses ke layanan dasar masyarakat yang rendah;
 - 5) Tingginya risiko bencana dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 6) Pertumbuhan ekonomi wilayah yang belum optimal.

5. Isu Strategis Kabupaten Lembata

Isu strategis Kabupaten Lembata diidentifikasi dari permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu Provinsi NTT dan dirumuskan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum sebagai berikut:

A. Aspek Geografi dan Demografi

1) Kerjasama dan integrasi regional

Letak strategis Lembata di jalur TOL Laut-Udara dan berbatasan dengan wilayah sentra pertumbuhan menuntut penguatan peran sebagai simpul ekonomi kawasan. Isu ini terkait kebutuhan pembangunan konektivitas antar wilayah,

pengembangan kawasan pelabuhan, dan integrasi rantai pasok regional.

2) *Penguatan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati*

Lembata menghadapi tantangan penurunan kualitas air, degradasi kawasan hulu, serta ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan penguatan sistem informasi lingkungan sangat krusial agar pembangunan tidak merusak ekosistem.

3) *Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan*

Ketahanan energi dan air masih rendah. Akses listrik belum merata, potensi panas bumi belum dimanfaatkan optimal, dan krisis air bersih kerap terjadi di musim kemarau. Di sektor pangan, produktivitas pertanian masih rendah dan distribusi pangan belum merata.

4) *Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim*

Risiko bencana alam tinggi terutama letusan gunung api, tsunami, banjir, kekeringan. Isu Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menuntut kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali, beradaptasi dan berkembang setelah terkena dampak bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu diperlukan penguatan sistem peringatan dini, tata ruang berbasis mitigasi risiko, dan program adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

5) *Transformasi ekonomi primer dan hilirisasi*

Perlu diversifikasi ekonomi lokal dari sektor primer ke hilirisasi dan jasa agar kesejahteraan merata. Penanganan kemiskinan, perluasan akses ekonomi formal, serta pemberdayaan masyarakat marginal menjadi hal yang prioritas.

6) *Akses dan kualitas pelayanan dasar*

Isu kesehatan dan pendidikan belum merata, kualitas rendah, dan akses belum optimal di desa terpencil. Digitalisasi sektor pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, dan perlindungan kelompok rentan menjadi agenda prioritas.

7) *Keluarga, gender, pemuda dan inklusi*

Ketahanan dan kualitas keluarga, perlindungan anak, serta kesetaraan gender dan pembangunan kepemudaan masih lemah. Keluarga perlu diperkuat sebagai institusi utama perlindungan anak dan pembentukan karakter.

C. Aspek Daya Saing Daerah

8) *Diversifikasi ekonomi dan daya saing investasi*

Ekonomi masih dominan sektor primer. Daya saing investasi rendah karena infrastruktur belum memadai, perizinan belum efisien, dan SDM masih terbatas. Oleh karena itu, perlu transformasi menuju sektor pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

- 9) *Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan digitalisasi*
 Infrastruktur TIK, literasi digital, dan inovasi daerah masih terbatas. Oleh karena itu perlu upaya digitalisasi layanan publik dan pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi harus dipercepat agar tidak tertinggal dalam kompetisi regional.
- 10) *Penguatan infrastruktur handal dan merata*
 Jaringan jalan, air bersih, sanitasi, dan hunian layak masih jauh dari memadai. Konektivitas desa-kota dan pembangunan desa mandiri menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan wilayah.

D. Aspek Pelayanan Umum

- 11) *Reformasi birokrasi dan inovasi layanan publik*
 Birokrasi lamban, layanan publik belum optimal, dan digitalisasi masih terbatas. Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas ASN, dan pemanfaatan inovasi berbasis teknologi mutlak diperlukan.
- 12) *Kemandirian keuangan daerah*
 Kapasitas fiskal daerah rendah, ketergantungan pada transfer pusat tinggi. Penguatan PAD, tata kelola aset, dan inovasi pembiayaan pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Pemetaan permasalahan daerah dan isu strategis daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 64 Pemetaan Permasalahan, Isu Strategis yang akan diatasi melalui Misi Pembangunan

Permasalahan Pokok	Isu Strategis Daerah	Akan diatasi dengan Misi
Posisi dan peran strategis daerah belum dikelola secara optimal	Kerjasama dan integrasi regional	I. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar
Potensi daerah belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal		
Tingkat kesejahteraan ekonomi masih rendah	Transformasi ekonomi primer dan hilirisasi Diversifikasi ekonomi dan daya saing investasi	
Transformasi ekonomi hijau dan biru belum diterapkan secara optimal		
Ilmu pengetahuan dan inovasi belum optimal mendukung produktivitas ekonomi	Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan digitalisasi	
Derajat kesehatan masyarakat masih rendah	Akses dan kualitas pelayanan dasar	II. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif
Kualitas pendidikan masih rendah dan belum merata		
Perlindungan Sosial yang kurang adaptif		
Daya saing sumber daya mausia masih rendah		

Permasalahan Pokok	Isu Strategis Daerah	Akan diatasi dengan Misi
Stabilitas ekonomi makro belum berjalan optimal Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial belum berjalan efektif		III. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib
Ketersediaan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang belum optimal Transformasi digital belum diterapkan secara optimal Integrasi ekonomi domestik dan global masih terbatas	Penguatan infrastruktur yang handal dan merata	IV. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata
Kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata		
Daya dukung dan daya tampung pada penyediaan air bersih dan lahan terbatas Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan masih rendah	Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	
Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan kepemudaan dan masyarakat inklusif masih rendah Pembangunan kebudayaan masih rendah	Keluarga, gender, pemuda, dan inklusi	V. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya
Lingkungan Hidup Berkualitas masih rendah	Penguatan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	V. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya
Tingginya potensi bencana daerah	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	
Belum Optimalnya pelaksanaan prinsip Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif Masih rendahnya daya saing daerah	Reformasi birokrasi dan inovasi layanan publik Kemandirian keuangan daerah	VI. Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara Good And Clean Governance untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1.1. Visi dan Misi

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun, sedangkan misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Lembata yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan keselarasan visi dan misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029.

Adapun Visi RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.



Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 program kerja.

Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dicapai melalui 8 (delapan) misi (Asta Cita) yang dituangkan menjadi prioritas nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (SEHAT);
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS);
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA);
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).

Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 adalah “Taan Tou Menuju Kabupaten Lembata Maju dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan SDM berkualitas, berakhlak mulia, dan berbudaya;
- 2) Membangun ekonomi Lembata yang maju, tangguh, dan berdaya saing;
- 3) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif, dan adaptif;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Lembata yang adil, aman, dan tertib;
- 5) Pembangunan inklusif dan berkelanjutan dan berketahanan sosial budaya dan ekologi;
- 6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;
- 7) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan visi RPJPD tersebut, ditetapkan sasaran dan target Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Sasaran dan Target Visi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045

	Sasaran Visi	Indikator Visi	Baseline 2024	Target 2025	Target 2045
1.	Pendapatan per kapita Kabupaten Lembata meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita propinsi dan nasional	a. PDRB Per Kapita (Rp Juta)	15,73	16,89-17,36	40,00-50,00
		b. Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,22	0,30-0,35	2,00-3,00
		c. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan(%)	0,23	0,31-0,36	2,00-3,00
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	24,22	23,62-23,67	17,00-18,00
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,316	0,310-0,313	0,200-0,257
3.	Daya saing daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,16	3,20-3,22	3,90-4,45
4.	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Manusia	68,95	69,16-69,24	73,43-75,00
5.	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	71,74	72,18-72,23	81,00-82,02

Visi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu :

LEMBATA MAJU, LESTARI, DAN BERDAYA SAING

Visi pembangunan tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- a) **LEMBATA MAJU** adalah Lembata yang mampu mengembangkan kekuatan ekonomi, sosial, dan politik sebagai fondasi yang kuat untuk menjadi kabupaten *mandiri, inovatif, dan adil* dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
- Mandiri* : Kabupaten Lembata yang mandiri bersifat multidimensi, yaitu mandiri secara ekonomi, mandiri secara politik (ukuran otonomi urusan dan otonomi fiskal), mandiri secara pangan, mandiri secara budaya (keunikan dan ketangguhan budaya serta etos kerja tinggi), dan mandiri secara demografis (pertumbuhan penduduk dan mutu sumber daya manusia).
- Mandiri juga menggambarkan kemampuan mengelola potensi dan sumber daya lokal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keuletan dan ketangguhan, kemampuan

mengembangkan kekuatan ekonomi, sosial, dan politik dalam menghadapi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan, dan tantangan pembangunan.

Inovatif : Sumber daya manusia Kabupaten Lembata yang berkualitas, berilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menciptakan inovasi dalam berbagai sektor, dan mampu menghasilkan produk-produk dan layanan yang memiliki daya saing tinggi.

Adil : Masyarakat Lembata dapat menikmati keadilan dalam berbagai aspek antara lain pendidikan, kesehatan, layanan publik, kesempatan kerja, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

- b) **LEMBATA LESTARI** adalah Lembata yang mampu mewujudkan pembangunan yang memberikan dampak positif dan seimbang dalam aspek lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola (*Environment, social, and governance* atau ESG), juga mampu mewujudkan lima pilar SDGs yaitu Manusia (*People*), Planet (*planet*), Kemakmuran (*prosperity*), Kedamaian (*peace*), dan Kemitraan (*partnership*). Hal ini berarti pembangunan di Kabupaten Lembata akan memberikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) tanpa mengurangi kesempatan dan hak generasi mendatang.
- c) **LEMBATA BERDAYA SAING** adalah Lembata yang mampu mengelola berbagai sumber daya dan menciptakan inovasi dalam berbagai sektor untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah, daya saing iklim investasi, daya saing sumber daya manusia, daya saing infrastruktur wilayah, dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, responsif berbasis teknologi serta layanan untuk mampu menghasilkan produk dan layanan yang memiliki daya saing tinggi.

Adapun sasaran, indikator, dan target visi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 guna mendukung capaian sasaran visi Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dan sasaran visi Nasional Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Sasaran, Indikator dan Target Visi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

	Sasaran Visi	Indikator Visi	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
1.	Pendapatan per kapita Kabupaten Lembata meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita propinsi dan nasional	a. PDRB Per Kapita (Rp Juta)	15,73	16,89-17,36	21,51-23,89
		b. Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,22	0,30-0,35	0,64-0,88

	Sasaran Visi	Indikator Visi	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
		c. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan(%)	0,23	0,31-0,36	0,65-0,89
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	24,22	23,62-23,67	21,22-21,46
		b. Rasio Gini (Indeks)	0,316	0,310-0,313	0,288-0,302
3.	Daya saing daerah meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,16	3,20-3,22	3,34-3,47
4.	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	Indeks Pembangunan Manusia	68,95	69,16-69,24	70,02-70,39
5.	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	71,74	72,18-72,23	73,94-74,19

Untuk mewujudkan Visi Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif;
3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib;
4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata;
5. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya;
6. Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good And Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.

Penjelasan dari 6 (enam) Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar

Misi ini berfokus pada penguatan pondasi transformasi ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah. Misi ini mencakup pemenuhan pangan, pengelolaan pertanian dan perikanan pola kawasan terintegrasi terutama pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi dan percepatan peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, industri, pariwisata, usaha mikro kecil-menengah, ekonomi kreatif dan digital serta ekspansi pasar. Pada misi ini pemerintah

daerah juga mendorong kerjasama produsen dengan Usaha Mikro dengan mendorong pihak ketiga/lembaga dalam rangka memperkuat rantai pasok ekonomi hulu hilir termasuk intervensi pemerintah dalam mengkover produk-produk/hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan dan kerjasama antar daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi ini berfokus pada penguatan fondasi transformasi sosial sektor pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat. Misi ini mencakup pemenuhan layanan dasar pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan layanan dasar kesehatan, peningkatan mutu kesehatan, peningkatan kompetensi dan pemerataan penyebaran tenaga pendidik, kependidikan, dan tenaga kesehatan serta pemenuhan layanan dasar dan peningkatan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.

3. Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib

Misi ini berfokus pada penguatan supremasi hukum dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro daerah sebagai landasan transformasi pembangunan. Misi ini mencakup peningkatan penegakan hukum terutama penegakan peraturan daerah, peningkatan kapabilitas lembaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini masyarakat, wawasan kebangsaan dan peningkatan penanganan bencana serta pengendalian inflasi untuk stabilitas ekonomi makro.

4. Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata

Misi ini berfokus pada peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas. Misi ini mencakup infrastruktur strategis dasar untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan jasa meliputi infrastruktur jalan, listrik, air minum layak, air baku berkelanjutan, transportasi, komunikasi dan informatika, sanitasi layak, ketahanan energi dan ketahanan pangan serta perumahan dan permukiman yang layak.

5. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya

Misi ini berfokus pada pembangunan yang inklusif sebagai landasan transformasi yang mencakup peningkatan peran serta masyarakat, perempuan, pemuda dan keluarga serta anak dalam pembangunan; pembangunan kebudayaan untuk meningkatkan

indeks pembangunan kebudayaan berupa ekspresi budaya, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, gender serta ekonomi budaya yang memiliki kekhasan; resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana; peningkatan lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi keanekaragaman hayati Lembata dalam pembangunan serta peran serta masyarakat dalam pola hidup yang berprespektif lingkungan.

6. Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good And Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif

Misi ini difokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan inovatif.

Misi ini mencakup kelembagaan tepat fungsi, peningkatan SDM aparatur yang cerdas, kompeten, berakhlak, inovatif, kreatif, transparan, peningkatan pelayanan publik prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi Lembata Maju, Lestari, dan Berdaya Saing Tahun 2025-2029 dengan 6 (enam) Misi Pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan 8 (delapan) Tema Pembangunan sebagai pedoman kerja utama yang mencerminkan pembangunan lintas sektor sebagai berikut:

Tema 1 Lembata Mandiri, yaitu: Lembata yang mandiri secara ekonomi, mampu mengelola potensi sumber daya lokal dari hulu sampai hilir;

Tema 2 Lembata *Smart*, yaitu: Lembata yang SDM masyarakatnya cerdas dan berdaya saing;

Tema 3 Lembata Sehat, yaitu: Lembata yang Masyarakatnya sehat dan berbudaya hidup sehat;

Tema 4 Lembata Tertata, yaitu: Lembata yang mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk mewujudkan ruang daerah yang mandiri, produktif dan lestari dan penyediaan infrastruktur berkualitas dan merata;

Tema 5 Lembata Subur, yaitu: Lembata yang masyarakatnya berbudaya hidup ramah lingkungan;

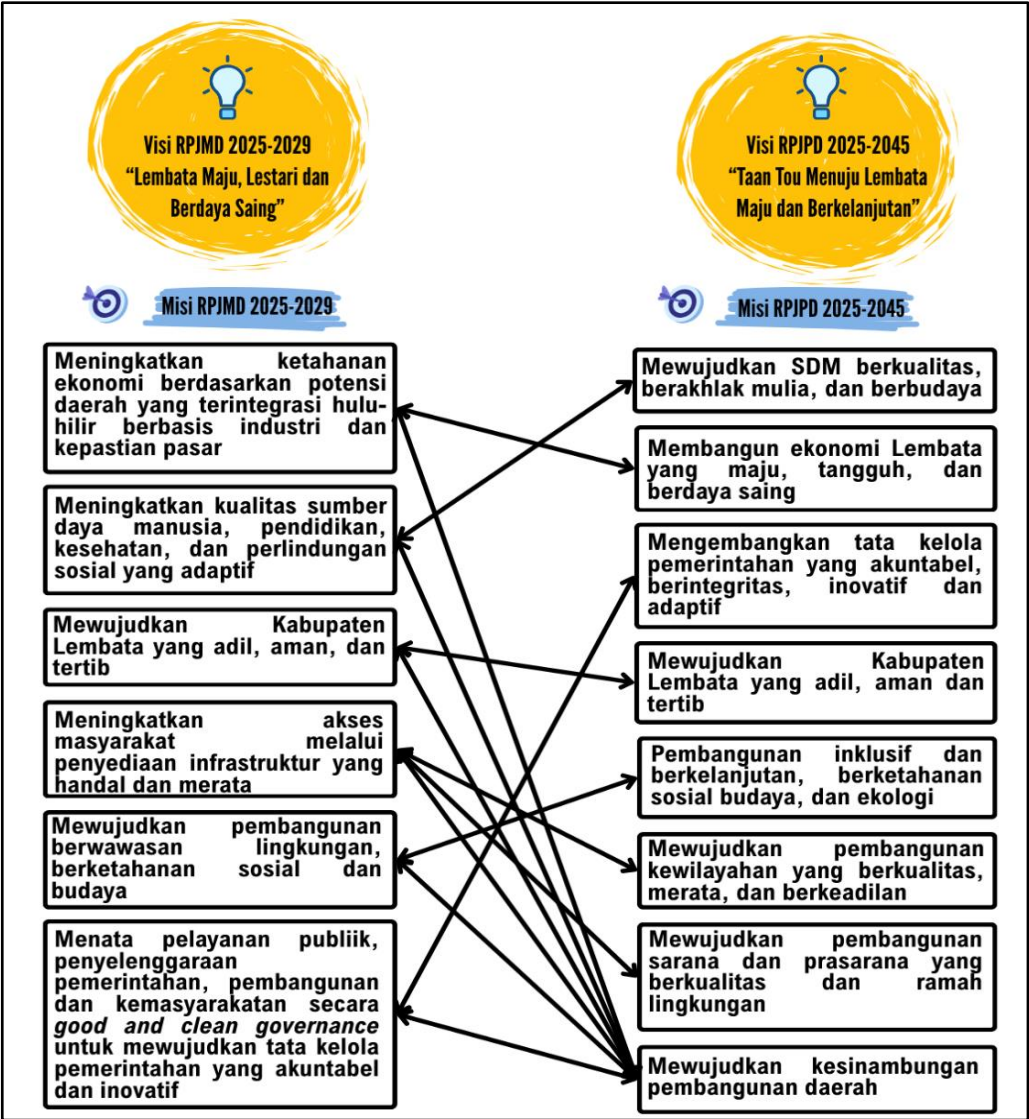
Tema 6 Lembata Unik, yaitu: Lembata yang masyarakatnya memiliki kekhasan ketahanan sosial budaya dan ekologi;

Tema 7 Lembata Sejahtera, yaitu: Lembata yang masyarakatnya memiliki kehidupan yang layak dari seluruh aspek kehidupan, aman, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan;

Tema 8 Lembata Prima, yaitu: Pemerintahan Lembata yang prima dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

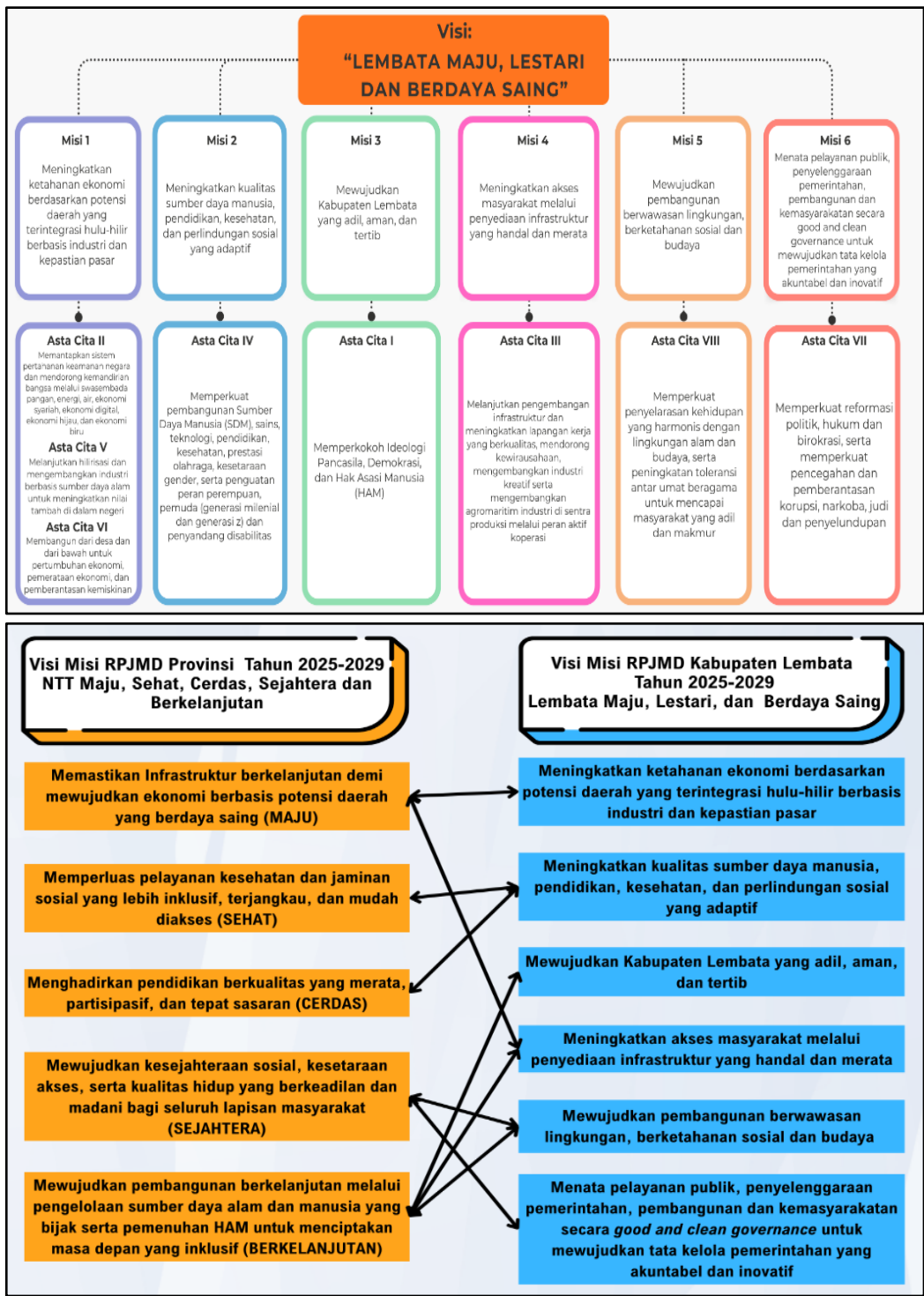
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3. 1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045



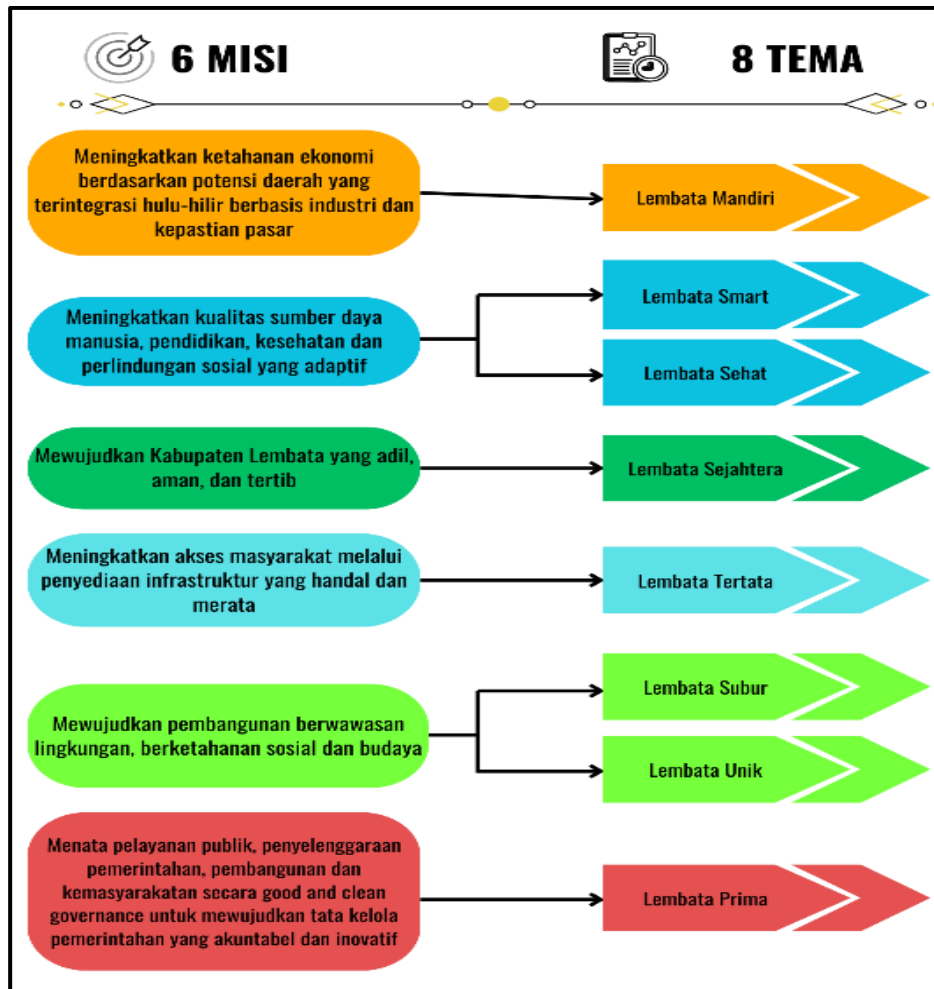
Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lembata dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3. 2 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lembata dan Asta Cita RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029



Berdasarkan 6 (enam) Misi dan 8 (delapan) Tema Pembangunan Daerah, maka dilakukan pemetaan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3. 3 Pemetaan Misi dan Tema Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029



Guna mewujudkan Visi Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing, maka Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 diperkuat oleh 20 Prioritas Unggulan dalam *Tagline* Nelayan-Tani-Ternak (NTT) yang merupakan langkah-langkah konkret sebagai peta jalan (road map) yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mempercepat perubahan dan mendukung pencapaian target pembangunan juga sebagai motor penggerak perubahan nyata di tengah masyarakat.

20 Prioritas Unggulan #Nelayan-Tani-Ternak (NTT) sebagai berikut :

1. Penyediaan Infrastruktur pertanian, perkebunan dan peternakan.
 Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:
 - a. Ekspansi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan baik lahan kering maupun lahan basah berupa percontaan sawah, percontaan sawah/ perombakan pematang sawah di Waikomo untuk mendukung indeks pertanaman 200 ke 300 dan pembajakan lahan;
 - b. Melakukan redistribusi lahan dan sertifikasi lahan untuk menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan tanah/lahan pertanian;

- c. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani menuju kantong produksi;
 - d. Pembangunan jalan usaha tani menuju Gunung Uyelewun sebagai akses pembuka ekonomi hijau kawasan pegunungan mendorong pertanian Lestari, ekowisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan;
 - e. Pembangunan bendungan, sumur bor, dan fasilitas pendukung;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan irigasi pertanian baik primer, sekunder dan tersier.
2. Penyediaan sarana produksi pertanian, penanganan pasca panen dan alat dan mesin pertanian mendukung ekonomi kerakyatan. Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk:
- a. Menjamin ketersediaan dan akses pupuk, benih/bibit unggul dan pestisida (herbisida dan insektisida) yang ramah lingkungan serta penyediaan obat hewan ternak dan pakan ternak termasuk subsidi sarana produksi pertanian (saprodi) dan sarana produksi peternakan (sapronek);
 - b. Penyediaan/pemeliharaan/modifikasi alat dan mesin pertanian;
 - c. Menjamin penanganan pasca panen yang berkualitas untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani;
 - d. Membangun kerjasama kemitraan dan fasilitasi penyediaan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman baik dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dengan masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga keuangan (bank).
3. Pengembangan klaster pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan wilayah dengan pola kemitraan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir sehingga dapat dikembangkan agrobisnis, agro industri dan agro wisata untuk menciptakan daya saing daerah. Prioritas unggulan ini akan dijelaskan lebih detail pada sub bagian arah pengembangan wilayah.
4. Penyediaan jaminan pemasaran komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan (pengembangan Bukit Hog dan Bukit Ruminansia)
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada ekspansi pasar melalui pola terintegrasi dan kebijakan afirmasi pengembangan Bukit Hog dan Bukit Ruminansia ternak besar dan ternak kecil sekaligus menjadikannya area wisata alam/agro wisata meliputi:
- a. Penyediaan sarana dan prasarana berupa penyediaan lahan, Pembangunan kandang dan pagar, penyediaan fasilitas pendukung berupa air dan listrik, penyediaan sarana produksi peternakan/sapronek (ternak, pakan, obat-obatan);
 - b. Fasilitasi penyediaan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/hibah/pinjaman

- termasuk penyediaan barang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain baik dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dengan masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga keuangan (bank)
- c. Membangun kemitraan melalui pengaturan tata niaga;
 - d. Penguatan tim lalu lintas ternak;
 - e. Mengembangkan pemasaran berbasis teknologi digitalisasi termasuk melalui konten aplikasi;
 - f. Pengembangan padang penggembalaan ternak ruminansia dalam rangka pemberdayaan dan demonstrasi plot (demplot) sebagai sarana pembelajaran/sekolah lapang.
5. Hilirisasi komoditas unggulan daerah dan sumber daya alam.
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada pengembangan industri komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian masyarakat dengan mendorong terintegrasinya pembangunan hulu-hilir, membangun kemitraan dengan pihak ketiga/lembaga, akademisi, desa (BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih), dunia usaha dan kerjasama antar daerah dalam mendorong peningkatan investasi, perluasan jangkaun promosi, guna mendukung penyerapan tenaga kerja yang memadai serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prioritas ini mencakup:
- a. Pengembangan industri pakan ternak;
 - b. Pembangunan industri garam dan garam konsumsi;
 - c. Pembangunan pabrik es;
 - d. Pembangunan industri pengolahan pangan lokal beras Porang;
 - e. Pembangunan industri pengolahan tepung ikan;
 - f. Pembangunan pabrik air mineral.
6. Pengembangan *Food Estate* lahan kering terintegrasi Botani (Bobu-Tanjung Leur-Tobotani) dengan pola desa transit.
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada pengembangan kawasan sentra produksi pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di sepanjang kawasan terintegrasi Klaster Botani untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah maupun luar daerah, menjadikan desa transit sebagai titik pertumbuhan menuju desa mandiri.
7. Pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan).
Prioritas Unggulan ini sebagai salah satu upaya agar para nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi tepat kebutuhan dengan harga terjangkau, sehingga dapat menekan biaya produksi.
8. Penguatan Usaha Mikro sektor unggulan dan koperasi
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada penguatan usaha mikro dan koperasi yang bergerak di bidang pertanian, perikanan dan nonagro mencakup:
- a. Pengolahan dan pemasaran komoditi: pangan dan pangan lokal (jagung, kacang-kacangan, porang), perkebunan (mente, kemiri, kopi), peternakan (ayam pedaging, ayam petelur, ayam

- beku, sapi dan babi), perikanan (olahan ikan basah dan ikan kering);
- b. Pengolahan, pemasaran dan ekonomi kreatif (kain tenun, anyaman, kriya, kerajinan tangan, cendramata);
 - c. Pelaksanaan sayembara motif tenun ikat khas Lembata;
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro melalui pelatihan, magang, studi banding;
 - e. Penyediaan mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan;
 - f. Penyediaan bahan baku yang memadai;
 - g. Desain dan kemasan;
 - h. Membangun kerjasama kemitraan dan fasilitasi penyediaan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/ hibah/ pinjaman baik dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dengan masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga keuangan (bank);
 - i. Pembangunan pusat oleh-oleh khas Lembata;
 - j. Pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih untuk membangun ekonomi desa/kelurahan yang kuat dan mandiri;
 - k. Pendampingan dan pembinaan secara berkala.
9. Penguatan sektor pendukung pariwisata.
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada pengembangan pariwisata melalui:
- a. Penguatan sektor pendukung dan melibatkan swasta untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. Promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event daerah, keikutsertaan pada *event* antar daerah dan promosi digital;
 - c. Sinergi pengembangan desa wisata dan pelaku usaha pariwisata;
 - d. Pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif;
 - e. Pembangunan ruang kreatif kota;
 - f. Pembangunan sarana prasarana pariwisata milik daerah berorientasi lingkungan dan tangguh bencana;
 - g. Penguatan/pembangunan situs-situs budaya sebagai wujud penghormatan sejarah dan leluhur mendukung tonggak baru pengembangan pariwisata budaya lokal.
10. Penyediaan Laboratorium Kesehatan Hewan dalam Mendukung Lalu lintas Ternak.
Prioritas Unggulan ini difokuskan menyediakan laboratorium kesehatan hewan beserta fasilitas pendukung, menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjamin kualitas hewan/ternak yang diekspor ke luar daerah, menjamin kesehatan masyarakat veteriner, serta meningkatkan PAD dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan.

11. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus mendukung pengawasan perairan laut.

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa pengadaan kapal nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan (rumponisasi), *cool box* dan *cold storage*;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa pembangunan tambak ikan, pengadaan benih/bibit, pakan ikan untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar, rumput laut, tripang dll;
 - c. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah;
 - d. Peningkatan kapasitas nelayan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pembangunan industri garam dan pengembangan garam curah;
 - f. Optimalisasi Tempat Pendaratan Ikan (TPI).
12. Penguatan cadangan pangan daerah melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)
Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam daerah dengan meningkatkan produksi pangan dan menjamin stabilitas harga barang pokok melalui:
 - a. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah di sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berupa bantuan, subsidi harga beras, jagung, dan pasar murah bekerjasama dengan Perum Bulog maupun produsen/penghasil dengan sasaran terutama kepada masyarakat menengah ke bawah;
 - c. Pelaksanaan Program SPHP komoditi bawang merah melalui kegiatan penanganan pasca panen dan pemasaran.
 13. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan mendukung IPM

Prioritas Unggulan ini difokuskan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan formal dan non formal baik pada sekolah milik pemerintah maupun swasta;
- b. Pemberian bantuan hibah ke sekolah-sekolah dan bantuan sosial perlengkapan sekolah kepada peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya;
- c. Kerjasama pelayanan transportasi bagi siswa terutama di daerah terpencil;
- d. Membangun kerjasama penyelenggaraan perguruan tinggi;
- e. Fasilitasi pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda;
- f. Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pendidikan;

- g. Peningkatan kompetensi dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan baik pada sekolah pemerintah maupun swasta;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (bangunan Gedung beserta fasilitasnya, alat Kesehatan, dan obat-obatan);
 - i. Peningkatan SDM tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitas;
 - j. Penyebaran tenaga kesehatan baik pada rumah sakit pemerintah maupun swasta;
 - k. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan bantuan belajar/beasiswa bagi dokter umum maupun spesialis;
 - l. Peningkatan status rumah sakit;
 - m. Pelatihan tenaga fungsional teknis pada berbagai bidang
14. Pengembangan pertanian organik mendukung Lembata Sehat menuju Lembata Emas 2045
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:
- a. Penyediaan pangan sehat dan bergizi untuk pasien;
 - b. Kerjasama mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan zero stunting menuju Lembata Emas 2045 serta masyarakat umumnya;
 - c. Penyediaan lahan dan fasilitas pendukung pertanian organik dengan memanfaatkan lahan tidur dan lahan masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana produksi pertanian organik (benih/bibit bermutu, pupuk organik dan obat-obatan organik);
 - e. Menjamin pemasaran pertanian organik.
15. Pembangunan ketenagakerjaan dalam mendukung inovasi pemuda wirausaha mandiri.
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif melalui pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten dalam meningkatkan nilai tawar di pasar kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Prioritas ini mencakup:
- a. Fasilitasi Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berusaha baik oleh pemerintah maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga diklat yang berkompeten termasuk BLK Karitas Peduli dan BLK swasta lainnya sebagai wadah inkubator wirausaha;
 - c. Fasilitasi bantuan modal usaha bagi para pencari kerja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan / berkompeten termasuk kepada para purna migran (#BAPAK SENANG MAMA SENANG#);

- d. Fasilitasi penyediaan lahan pertanian dan bantuan alat dan mesin pertanian bagi petani buruh migran (#LAHAN MIGRAN#);
 - e. Fasilitasi penyediaan jaminan sosial tenaga kerja dan atau asuransi tenaga kerja yang rentan bekerja di sektor riil sebagai nelayan, tani, ternak, dan buruh termasuk penangkap ikan paus dan pengiris tuak;
 - f. Pengembangan sistem pendataan tenaga kerja berbasis digital, layanan keimigrasian dan kerjasama dengan pihak bank untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kerja ke luar negeri serta fasilitasi pemulangan migran daerah yang meninggal maupun mengalami deportasi.
16. Perlindungan perempuan dan anak serta pembangunan kepemudaan dan olahraga
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:
- a. Optimalisasi Pos Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (PPTPA);
 - b. Pelaksanaan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan bina keluarga remaja generasi berencana (GenRe), serta Bina Keluarga Balita holistik integratif;
 - c. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Pembinaan keluarga baru melalui kerjasama dengan pihak keagamaan;
 - e. Pembangunan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) beserta fasilitas pendukung;
 - f. Pemberdayaan perempuan
 - g. Pembangunan pemuda dan olahraga berupa penyediaan sarana dan prasarana olahraga termasuk pembangunan stadion penyangga;
 - h. Peningkatan sumber daya manusia olahraga;
 - i. Pelaksanaan turnamen olahraga dalam daerah maupun keikutsertaan pada turnamen luar daerah.
17. Peningkatan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, adil dan merata melalui tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang profesional, partisipatif, dan berkeadilan
Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:
- a. Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi lintas sektor dan pemangku kepentingan secara periodik maupun insidentil guna menangani masalah sosial, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Optimalisasi peran forum-forum antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komite Inteligen Daerah (Kominda);
 - c. Mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat;
 - d. Reformasi birokrasi pada 8 area perubahan mencakup penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Kabupaten Lembata termasuk pembentukan bidang pemakaman dan

- kebersihan kota, penataan SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan kualitas pelayanan publik;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - f. Pemekaran dan penataan kecamatan dan desa/kelurahan.
18. Penataan Kota dan Persampahan.
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada
- a. Pengaturan moda transportasi kota melalui kerjasama dengan pihak ketiga termasuk angkutan umum dalam kota;
 - b. Pengaturan dan penguatan terminal dalam kota;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan taman kota/taman publik/ruang kreatif kota;
 - d. Penataan kawasan kumuh, penataan drainase kota, pembangunan kolam retensi, normalisasi DAS/Kanal/Cekdam, biopori;
 - e. Pemeliharaan jalan dalam kota;
 - f. Pengembangan ruang terbuka hijau;
 - g. Pengadaan lampu jalan;
 - h. Penataan dan pengelolaan persampahan meliputi tata kelola, pengadaan sarana prasarana serta sumber daya manusia.
19. Penyediaan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar sekaligus mendukung akses pasar antar wilayah.
- Prioritas Unggulan ini difokuskan pada:
- a. Ketersediaan infrastruktur strategis jalan terutama ke kantong produksi, ke kawasan wisata, ke fasilitas umum, penanganan segmen-segmen kritis, jalur evakuasi pada zona merah dan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap ruas-ruas jalan kabupaten;
 - b. Peningkatan jangkauan listrik terutama pada desa maupun dusun yang belum mendapatkan akses listrik;
 - c. Menjamin ketersediaan air baku dan air bersih yang layak, aman dan terjangkau;
 - d. Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah;
 - f. Penyediaan sanitasi layak dan aman;
 - g. Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara;
 - i. Pembangunan pelabuhan rakyat Subak Wutun yang menghubungkan Lembata, Solor dan Adonara serta pelabuhan rakyat Leur yang menghubungkan Lembata dan Pantar Alor;
 - j. Penyediaan sarana transportasi darat pantai selatan (Tobotani-Lodoblong-Lewoleba);
 - k. Kerjasama untuk pembukaan jalur baru ekspedisi Lewoleba-Makasar, Lewoleba-Surabaya dan kerja sama kapal cepat Lewoleba-Kupang PP;
 - l. Peningkatan jaringan telekomunikasi dan informasi;

- m. Kerjasama penguatan jaringan seluler dengan telkomsel;
 - n. Kerjasama pemerintah dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan media massa;
 - o. Pembangunan/peningkatan/penataan pasar daerah maupun pasar rakyat;
 - p. Optimalisasi dan revitalisasi pasar daerah maupun pasar rakyat dengan pembentukan badan pengelola pasar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi wilayah, mendorong investasi dan kerjasama daerah;
 - q. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
20. Ekologi berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan air

Prioritas Unggulan ini difokuskan pada perlindungan lingkungan dan sumber daya alam mencakup:

- a. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pengembangan tanaman hortikultura di Uyelewun, Ile Ape dan dataran tinggi lainnya serta pengembangan terumbu karang dan bakau untuk menjadikan Lembata sebagai pusat karbon;
- b. Pelaksanaan konservasi, pembangunan cekdam, restorasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan serta pembangunan embung resapan dengan melibatkan masyarakat, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Penanaman barisan hijau Malapari sepanjang jalan utama, rumah penduduk dan lahan desa (satu desa satu hektar) untuk menyerap karbon guna mengatasi isu pemanasan global;
- d. Pelaksanaan inovasi #tebang satu tanam empat# untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan;
- e. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- f. Pengembangan lingkungan berbasis kearifan lokal (muro dan duan);
- g. Pengembangan sumber daya genetik lokal pola tanaman sisip.

3.1.2. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan kawasan strategis wilayah menekankan pada pusat pertumbuhan, kebijakan pola ruang dan kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah.

A. Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan didasarkan pada hirarki sistem pusat permukiman dengan model segitiga kutub pertumbuhan, yaitu Lewoleba di sisi utara, Wulandoni di selatan, dan Balauring di sisi timur Kabupaten Lembata sebagai penjabaran dari perwujudan pusat permukiman perkotaan dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Lembata yang didukung dengan pusat pelayanan lingkungan yang terpusat pada setiap ibu kota kecamatan lainnya, sebagai berikut:

1. Kawasan perkotaan Lewoleba sebagai ibukota Kabupaten Lembata merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam hierarki sistem pusat permukiman memiliki peran sebagai pusat

pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kabupaten yang selain melayani wilayah Kecamatan Nubatukan juga melayani seluruh wilayah dalam Kabupaten Lembata.

2. Kawasan perkotaan Wulandoni dan Balauring merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dalam hierarki sistem pusat permukiman di Kabupaten Lembata yang berperan selain melayani wilayah kecamatannya juga melayani sebagian wilayah kecamatan yaitu:
 - ❖ Kawasan perkotaan Wulandoni melayani wilayah dalam Kecamatan Wulandoni juga melayani sebagian wilayah Kecamatan Atadei, sebagian wilayah Kecamatan Nubatukan, dan sebagian wilayah Kecamatan Nagawutung.
 - ❖ Kawasan perkotaan Balauring melayani wilayah dalam Kecamatan Omesuri juga berperan melayani Kecamatan Buyasuri.
3. Peran ketiga kawasan perkotaan di atas juga didukung oleh Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu PPL Loang, PPL Hadakewa, PPL Waipukang, PPL Lamau, PPL Kalikasa, dan PPL Wairiang.

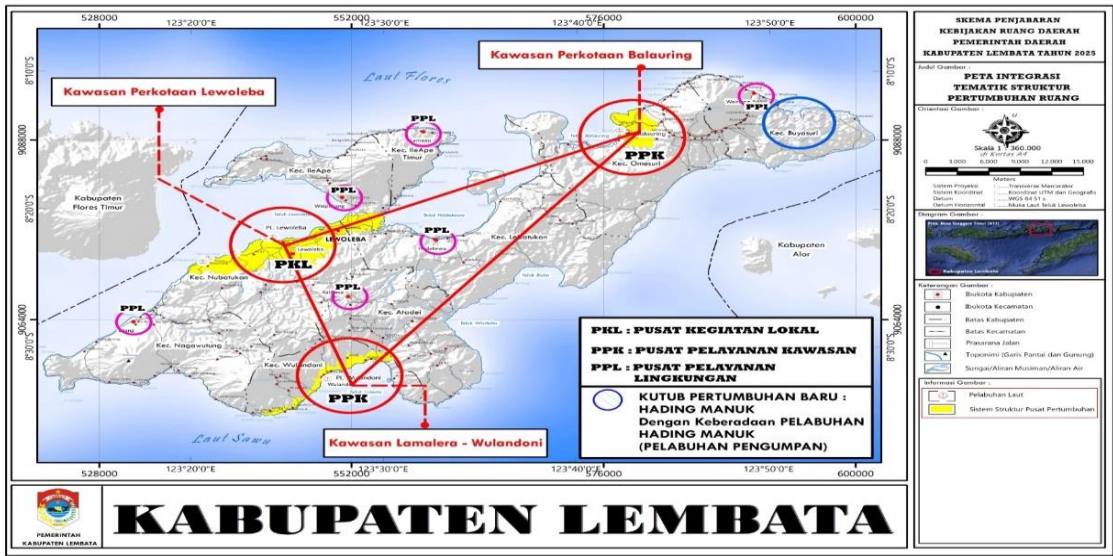
Kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Lembata juga mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui model kluster kawasan strategis di Kabupaten Lembata, meliputi (1) Kawasan Perkotaan Lewoleba, (2) kawasan Mingar – Waijarang – Tapobali, (3) Kawasan Lamalera, (4) Kawasan Kalikasa – Lerek, dan (5) Kawasan Bobu – Tanjung Leur – Tobotani.

Adapun Kebijakan pertumbuhan ruang Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meng-*integrasi*-kan 3 (tiga) Pusat Struktur Pertumbuhan Lewoleba – Balauring – Wulandoni.
- b. Menjadi Pusat Distribusi Pertumbuhan sektor dan mobilisasi Ekonomi dari 6 (enam) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- c. Menjadi *OUTLET* dengan ketersediaan Pelabuhan Laut Lewoleba sebagai pelabuhan pengumpul; dan Pelabuhan Balauring dan Wulandoni sebagai pelabuhan pengumpan.
- d. Rencana Pusat pertumbuhan Baru Hading Manuk dan sekitarnya, dengan mengintegrasikan Keberadaan Pelabuhan Hading Manuk, sebagai pelabuhan pengumpan dalam konektivitas pertumbuhan terhadap Kabupaten Alor.

Peta segitiga Kutub Pertumbuhan di Kabupaten Lembata sebagaimana disajikan dalam bentuk peta pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 4 Segitiga Kutub Pertumbuhan di Kabupaten Lembata
Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042



B. Kebijakan Pola Ruang

Arahan kebijakan rencana pola ruang yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.

Selain 2 (dua) kelompok pola ruang tersebut di atas, kebijakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Lembata juga mengatur kebijakan *holding zone* dan kawasan pertampalan yang diatur dalam ketentuan khusus RTRW.

- 1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lembata tahun 2023-2042 mencapai 52.226 hektar atau sebesar 41,18% dari luas Kabupaten Lembata. Rincian kawasan lindung tersebut di atas terdiri dari:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan lindung ini berupa kawasan hutan lindung dengan luas 46.504 hektar atau sebesar 36,67% dari luas Kabupaten Lembata yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam kawasan hutan tersebut di atas, terdapat areal seluas 193 hektar yang direcanakan sebagai *holding zone* dengan pemanfaatan ruangnya berupa kawasan permukiman perdesaan dimana kawasan ini perlu didorong upaya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi permukiman perdesaan, yang terdapat di Kecamatan Atadei, Kecamatan Lebatukan, dan Kecamatan Nagawutung. Selain rencana *holding zone* tersebut, penyelesaian permasalahan terhadap kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berada di dalam kawasan hutan berupa kegiatan pertanian/perkebunan dan infrastruktur perlu dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, baik berupa perubahan peruntukan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, maupun mekanisme perhutanan sosial.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan lindung berupa kawasan perlindungan setempat seluas 3.716 hektar atau sebesar 2,93 % dari luas Lembata, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan mata air yang tersebar di seluruh kecamatan.

c. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi ini berupa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu kawasan suaka pulau kecil, seluas 509 hektar atau sebesar 0,40 % dari luas Kabupaten Lembata dimaksudkan untuk melindungi pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Lembata terhadap pemanfaatan ruang/kegiatan yang bersifat merusak atau berdampak negatif. Adapun pulau-pulau kecil tersebut adalah Pulau Komba seluas 505,48 hektar yang terletak di Kecamatan Omesuri; Pulau Suanggi seluas 2,87 hektar berada di Kecamatan Nagawutung; Pulau Karang Wa'toya seluas 0,30 hektar dan Pulau Karang Pahang Waq seluas 0,37 hektar yang terletak di Kecamatan Buyasuri, serta Pulau Tirer yang terletak di Kecamatan Wulandoni.

d. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebagai kawasan lindung seluas 1.497 hektar atau sebesar 1,18 % dari luas Kabupaten Lembata yang terletak di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri.

2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam rangka perwujudan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang guna pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah, arahan peruntukan untuk kawasan budidaya sebagaimana RTRW Kabupaten Lembata sebagai berikut:

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lembata adalah berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas 605 hektar atau sebesar 0,48% dari luas Kabupaten Lembata yang terdapat di Kecamatan Buyasuri.

b. Kawasan Pertanian

Alokasi ruang kawasan pertanian dalam RTRW Kabupaten Lembata terdiri atas:

- 1) Kawasan tanaman pangan seluas 9.019 hektar atau sebesar 7,11% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Atadei, Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Wulandoni;
- 2) Kawasan hortikultura seluas 267 hektar atau sebesar 0,21% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan;
- 3) Kawasan perkebunan seluas 57.759 hektar atau sebesar 45,55% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di seluruh kecamatan;
- 4) Kawasan peternakan, seluas 153 hektar atau sebesar 0,12% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nagawutung, Kecamatan Nubatukan dan Kecamatan Omesuri.

c. Kawasan Pergaraman

Untuk mendukung pemanfaatan potensi budidaya garam di Kabupaten Lembata dialokasikan lahan seluas 77 hektar atau sebesar 0,06% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Ile Ape Timur, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nagawutung, Kecamatan Nubatukan dan Kecamatan Wulandoni.

d. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Lembata berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 18 hektar atau sebesar 0,014 % dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Omesuri.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Alokasi ruang kawasan peruntukan industri adalah seluas 11 hektar atau sebesar 0,009% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan.

f. Kawasan Pariwisata

Alokasi ruang kawasan pariwisata adalah seluas 1.014 hektar atau sebesar 0,80% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Nubatukan.

g. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman sebagaimana RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042 terdiri atas:

- 1) Kawasan permukiman perkotaan seluas 2.540 hektar atau sebesar 2% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan dan Kecamatan Nubatukan; dan

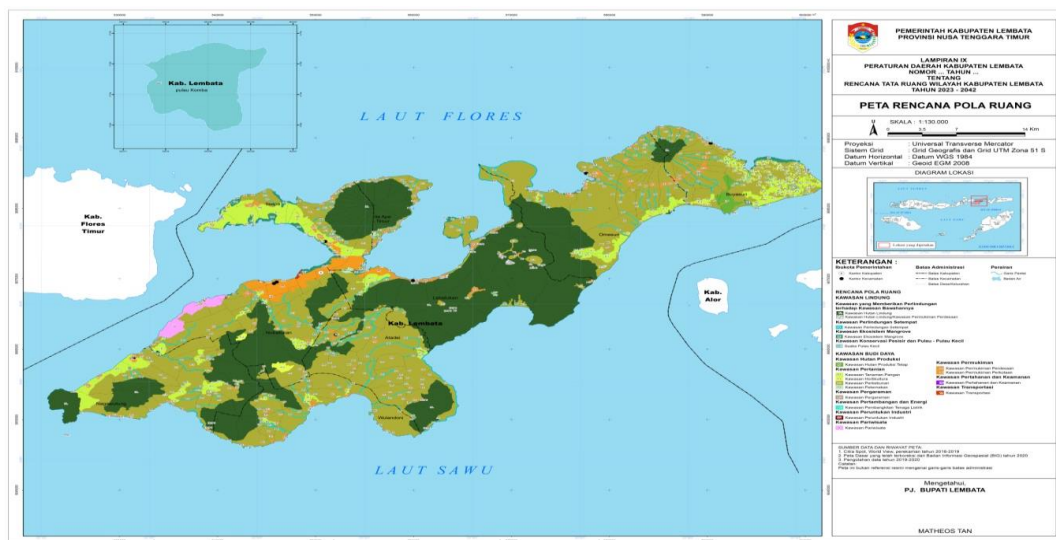
- 2) Kawasan permukiman perdesaan seluas 3.033 hektar atau sebesar 2,39% dari luas Kabupaten Lembata yang berada di seluruh kecamatan.
- h. Kawasan Transportasi

Merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, udara dan laut. Alokasi ruang kawasan transportasi adalah seluas 60 hektar atau sebesar 0,05% dari luas Kabupaten Lembata berupa areal pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, terminal khusus, terminal dan bandar udara yang berada di Kecamatan Nubatukan dan Kecamatan Wulandoni.
 - i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Alokasi ruang kawasan pertahanan keamanan adalah areal perkantoran bagi TNI dan POLRI seluas 16 hektar atau sebesar 0,01 hektar dari luas Kabupaten Lembata yang berada di Kecamatan Atadei, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Wulandoni.

Adapun rencana pola ruang Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk peta pda gambar berikut ini.

Gambar 3. 5 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lembata



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

C. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah

Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah di Kabupaten Lembata sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042.

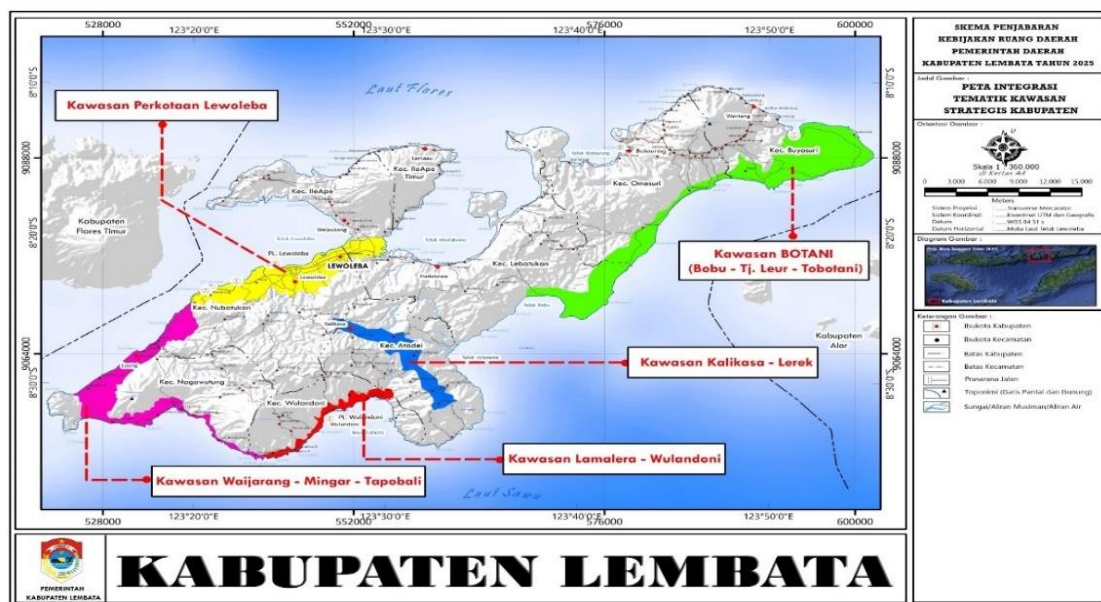
a. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah

Kawasan strategis ini dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sudut pandang kepentingan sosial yaitu:

1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi meliputi:
 - a) Kawasan Kalikasa – Lerek di Kecamatan Atadei;
 - b) Kawasan Botani (Bobu – Tanjung Leur – Tobotani) di Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Omesuri, dan Kecamatan Buyasuri;
 - c) Kawasan Perkotaan Lewoleba yang berada di Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, dan Kecamatan Nubatukan;
 - d) Kawasan Waijarang – Mingar – Tapobali yang berada di Kecamatan Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, dan Kecamatan Wulandoni.
2. Kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya yaitu Kawasan Lamalera di Kecamatan Wulandoni.

Peta kawasan strategis provinsi di daerah Kabupaten Lembata disajikan dalam bentuk peta pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 6 Kawasan Strategi Provinsi di Daerah Kabupaten Lembata



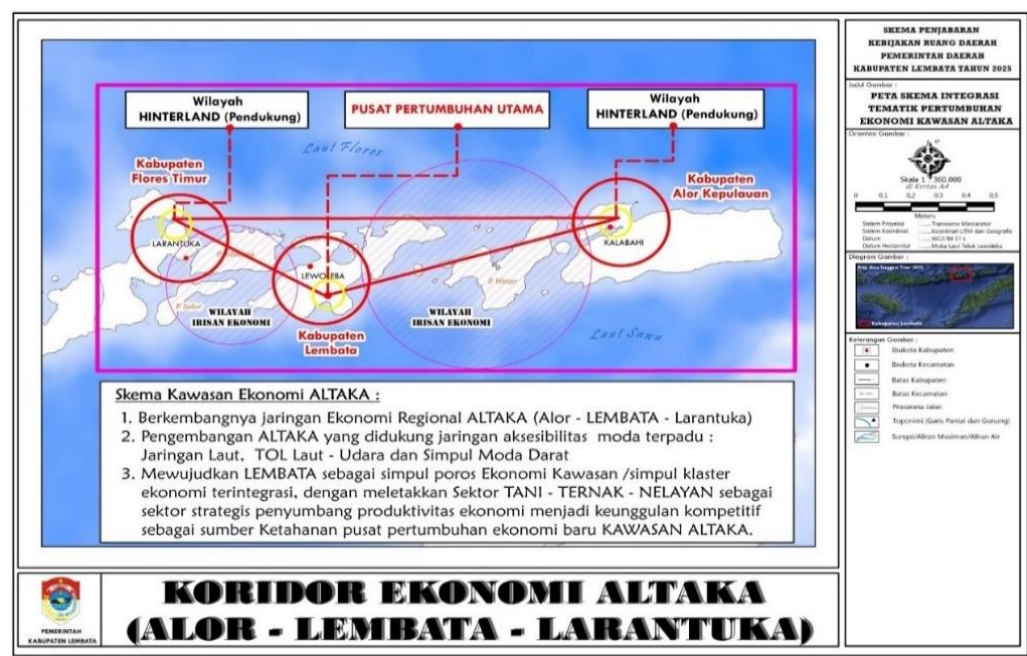
Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

b. Skema Pertumbuhan Ekonomi Regional

Untuk menjamin terwujudnya pengembangan ekonomi kewilayahan dan berdaya ungkit regional yang didukung oleh letak geografis-geoekonomi maka basis ekonomi wilayah yang menopang kekuatan Lembata sebagai simpul poros ekonomi kawasan/simpul kluster ekonomi terintegrasi dilakukan melalui pengembangan kawasan ekonomi ALTAKA (Alor-Lembata-Larantuka), pengembangan ekonomi strategis utara-utara meliputi Lembata-Flores-Wakatobi-Makasar-Surabaya, pengembangan ekonomi strategis selatan-selatan meliputi Lembata-Kupang-Timor Leste sebagai zona ekspor untuk ekspansi pasar terutama dalam bingkai tani-ternak-nelayan. Peta

kawasan ekonomi ALTAKA disajikan dalam bentuk peta pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 7 Peta Kawasan Ekonomi Altaka



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 223-2042

c. Kawasan Strategis Daerah

Penetapan kawasan strategis daerah sebagai tematik integrasi kebijakan sektoral dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah pola kawasan yang diintegrasikan dengan kebijakan sektoral dan pembangunan ekonomi pedesaan pola desa transit menuju desa mandiri dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029. Kebijakan sektoral dan pembangunan ekonomi pedesaan pola desa transit dilaksanakan melalui pengembangan kluster berbasis potensi lokal dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif yang terintegrasi hulu hilir menciptakan rantai pasok, sekaligus memperkuat kecamatan sebagai koordinator terdepan. Kawasan strategis daerah dibagi ke dalam 9 (sembilan) kluster yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan sebagai berikut:

1) Klaster *Food Estate* Terintegrasi Bobu-Tobotani.

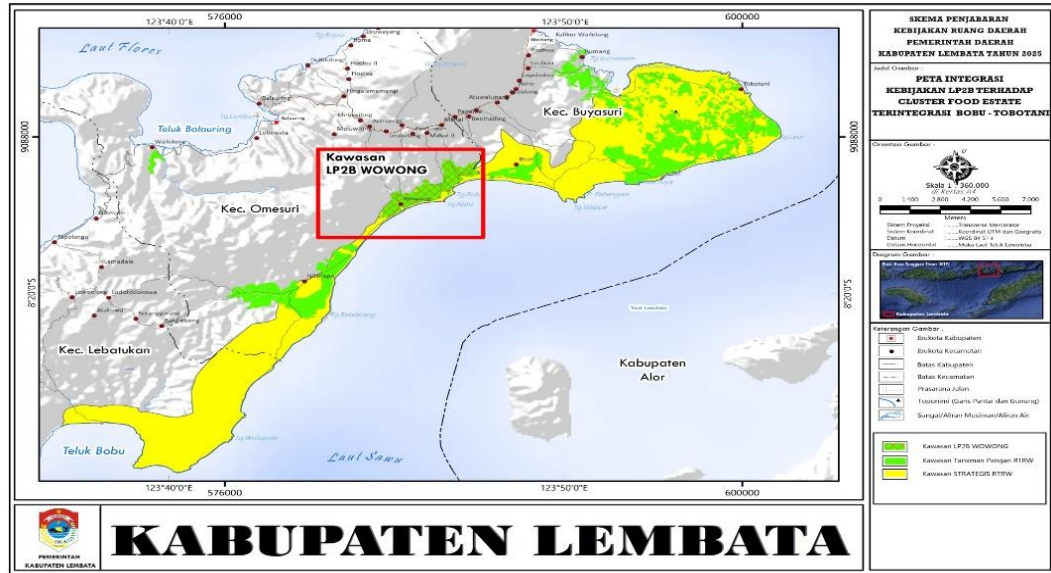
Food estate lahan kering dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan daerah pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mengoptimalkan dan mengintegrasikan semua potensi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan yang ada dalam kawasan Bobu Tobotani dari hulu-hilir meliputi:

- Kawasan Bobu-Atanila: peternakan (sapi, kambing) dan industri garam;
- Kawasan Atanila-Wowong-Angar Laleng: jagung industri dan jeruk Kedang;
- Kawasan Bean: pembibitan jagung hibrida/komposit;

- Kawasan Apen-Tanjung Leur-Tobotani: garam, kambing, sapi dan kuda.

Peta Tematik Integrasi *Cluster Food Estate* Terintegrasi Bobu-Tobotani dalam Kebijakan LP2B disajikan dalam bentuk peta pada gambar berikut ini.

Gambar 3. 8 Peta Tematik Integrasi Cluster Food Estate Terintegrasi Bobu-Tobotani dalam Kebijakan LP2B



Sumber: RTRW Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042

- 2) Klaster Merdeka-Tanahtereket: tanaman pangan jagung pulut di Desa Merdeka-Baopana-Lamatuka/Tanahtereket;
- 3) Klaster Waowala-Tanjungtuak: peternakan sapi, kambing dan domba; tanaman pangan jagung, kacang hijau industri dan jenis tanaman pangan organik lokal sehat lainnya;
- 4) Klaster JATENG (Jalan Tengah): pertanian hortikultura kentang, wortel, bawang, porang, jahe dan jenis lainnya;
- 5) Klaster Kalikasa- Lerek: buah-buahan (alpukat), kacang tanah, dan kopi;
- 6) Klaster Perkotaan Lewoleba (peternakan Bukit Hog), ternak unggas, pangan lokal dan lainnya Usaha Mikro dan laboratorium peternakan;
- 7) Klaster Nuhanera-Lewolein-Tanjungbaja-Balauring: peternakan sapi dan kambing, perikanan, pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi Balauring;
- 8) Klaster Waijarang-Mingar-Tapobali: Peternakan (bukit ruminansia), industri pakan ternak, pabrik es, bendungan estuari (Wai Ma) dan industri tepung ikan;
- 9) Klaster Lamalera-Wulandoni: pariwisata.

Peta tematik integrasi kebijakan sektoral terhadap penetapan kawasan strategis daerah yang memuat 9 (sembilan) kluster disajikan dalam bentuk peta pada gambar berikut ini.

Visi, 6 (enam) misi, 8 (delapan) kondisi dan 20 agenda prioritas RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dicapai dengan mengintegrasikan dan mensinergikan 3 (tiga) pilar utama pembangunan yang menekankan prinsip keberlanjutan/lestari yaitu Lingkungan (*environmental*), Sosial (*social*) dan Tata Kelola (*governance*) atau ESG yang juga telah selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .

1. LINGKUNGAN (*environmental*)

2. SOSIAL (*social*)

Pilar ini menekankan pada dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan menjadi fondasi bagi peningkatan daya saing daerah. Pilar ini mencakup 4 (empat) standar yaitu ketenagakerjaan dan lingkungan kerja; keberagaman, kesetaraan, inklusi dan akses; kepentingan sosial dan warisan budaya;

3. TATA KELOLA (*governance*)
Pilar ini menekankan pada dimensi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih mencakup 2 (dua) standar yaitu kepemimpinan dan tata kelola dan risiko dan pengendalian.

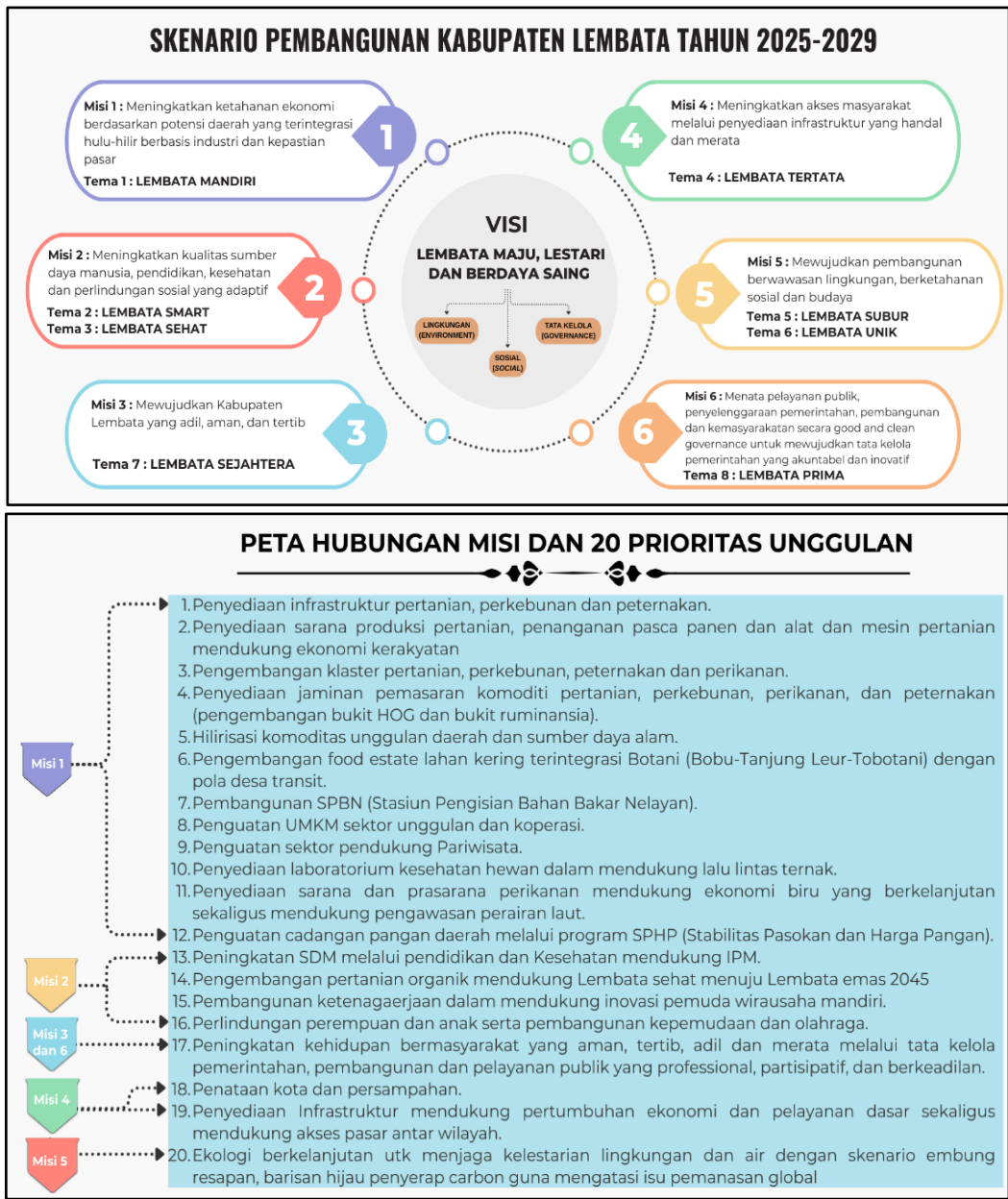
Penjabaran 3 (tiga) pilar pembangunan ESG ke dalam 10 (sepuluh) standar ESG sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3. 10 Sepuluh Standar ESG



Berdasarkan 3 (tiga) pilar pembangunan tersebut maka skenario pembangunan menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing Tahun 2025-2029 menekankan dimensi pembangunan berkelanjutan mencakup pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan ekonomi wilayah dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai *leading* sektor yang berorientasi pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) secara berkualitas dengan fokus pada keterpaduan sektor ekonomi, kelestarian lingkungan dan pembangunan infrastruktur strategis; dimensi sosial mencakup penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing, serta dimensi tata kelola dan pelayanan. Skenario pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3. 11 Skenario Pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 Berdasarkan Pendekatan ESG

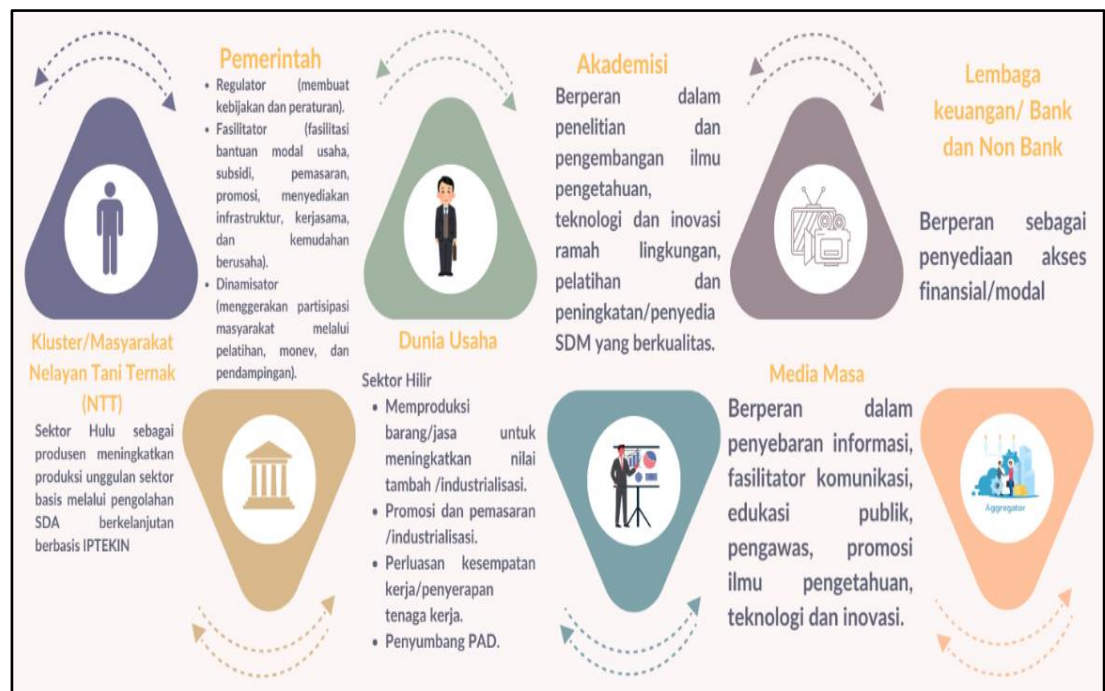


Skenario pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 menitikberatkan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menekankan pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai leading sektor untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat maka pembangunan di Kabupaten Lembata diarahkan kepada pembangunan sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier yang terintegrasi dan saling mendukung, dimana pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier begitupun sebaliknya.

Grand design pembangunan ekonomi berkelanjutan Tahun 2025-2029 meliputi pengelolaan berbagai potensi daerah yang terintegrasi dari hulu hilir berbasis industri dan menjamin kepastian pasar melibatkan pemangku kepentingan terdiri dari pelaku utama masyarakat (nelayan-tani-ternak), pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan media masa serta kerjasama dengan lembaga keuangan

untuk penyediaan modal usaha sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3. 12 Heksahelix Integrasi Hulu-Hilir Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan



3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD, untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah yang sedang dihadapi juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan RPJMD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029, sedangkan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcomes* dan meng-cascade/menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas dengan catatan menghindari *cascade* indikator. Tujuan dan sasaran sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode

berkenaan dan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Misi I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri dan Kepastian Pasar

Untuk mendukung terwujudnya Misi I, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah:

Tujuan 1 : Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor berbasis potensi daerah;
- 2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
- 3) Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas;
- 4) Meningkatnya kemandirian desa.

Misi II: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

Untuk mendukung terwujudnya Misi II, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah:

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Tujuan 3: Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dengan sasaran: Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif.

Misi III: Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib

Untuk mendukung terwujudnya Misi III, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan 4: Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan tertib dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kerukunan beragama dan demokrasi.

Misi IV: Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata

Untuk mendukung terwujudnya Misi IV, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan 5: Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan.

Misi V: Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya

Untuk mendukung terwujudnya Misi V, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan 6: Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas;

Tujuan 7: Menurunnya risiko bencana dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

Tujuan 8: Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;
- 2) Meningkatnya pelestarian warisan budaya.

Misi VI: Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara *Good and Clean Governance* untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.

Untuk mendukung terwujudnya Misi VI, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Tujuan 9: Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada Layanan.

Adapun indikator dan target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Visi : Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing											
Misi I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar											
Tema 1 : Lembata Mandiri											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 1-12											
T.1	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,34	3,51-3,56	3,69-3,78	3,86-4,01	4,04-4,23	4,21-4,45	4,39-4,67
			Pendapatan perkapita	Juta Rp	15,73	16,89-17,36	18,04-18,99	19,20-20,63	20,35-22,26	21,51-23,89	22,66-25,52
			Indeks Gini	Angka	0,316	0,310-0,313	0,305-0,310	0,299-0,308	0,294-0,305	0,288-0,302	0,283-0,299
			Tingkat Inflasi	Persen	1,12	1,10-1,11	1,08-1,09	1,07-1,08	1,05-1,07	1,03-1,06	1,01-1,04
S.1	Meningkatnya nilai tambah sektor - sektor berbasis potensi daerah	1	Rasioi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,23	0,31-0,36	0,40-0,49	0,48-0,63	0,57-0,76	0,65-0,89	0,74-1,02
		2	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen	0,22	0,30-0,35	0,39-0,48	0,47-0,62	0,56-0,75	0,64-0,88	0,73-1,01
		3	Rasio PDRB perdagangan besar dan eceran	Persen	8,16	8,34-8,39	8,53-8,62	8,71-8,85	8,89-9,08	9,07-9,31	9,26-9,54
S.2	Meningkatnya ketahanan pangan dearah	4	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,11	71,06-71,53	72,00-72,96	72,95-74,38	73,90-75,80	74,85-77,23	75,79-78,65
S.3	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan	5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	83,53	83,79-83,84	84,06-84,15	84,32-84,45	84,59-84,76	84,85-85,07	85,11-85,38
		6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,18	2,15-2,12	2,12-2,07	2,08-2,01	2,05-1,96	2,02-1,90	1,99-1,84

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
S.4	Meningkatnya kemandirian desa	7	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,69	1,39	1,39-2,08	2,08-2,78	2,08-2,78	2,78-3,47	3,04-3,80
Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif											
Tema 2 Lembata Smart											
Tema 3 : Lembata Sehat											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 13-16											
T.2	Meningkatnya kualitas SDM pendidikan dan kesehatan		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,95	69,16-69,24	69,38-69,53	69,59-69,81	69,80-70,10	70,02-70,39	70,23-70,68
S.5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,42-8,45	8,58-8,63	8,73-8,80	8,89-8,98	9,04-9,16	9,19-9,34
		9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,50	12,54	12,58	12,62	12,66	12,70
S.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,35	73,57-73,67	73,79-73,98	74,01-74,30	74,24-74,62	74,46-74,93	74,68-75,25
		11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	97,90	98,00	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50
		12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	7,9	7,61-7,57	7,32-7,24	7,02-6,90	6,73-6,57	6,44-6,24	6,15-5,91
		13	Angka Kematian Ibu	/100.000 kelahiran hidup	6	5,71	5,43	5,14	4,86	4,57	4,29
T.3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif		Tingkat Kemiskinan	Persen	24,22	23,62-23,67	23,02-23,12	22,42-22,56	21,82-22,01	21,22-21,46	20,62-20,91
S.7	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	14	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,49	1,25-1,45	1,10-1,25	0,80-1,00	0,70-0,80	0,60-0,70	0,50-0,60
		15	Proporsi Peserta Program Jamsostek	Persen	53	55,24	57,48	59,71	61,95	64,19	66,43

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Misi III : Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib											
Tema 7 : Lembata Sejahtera											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.4	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan tertib		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	Persen	NA	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
S.8	Meningkatnya penyelenggaraan trantibumlinmas, kerukunan beragama dan demokrasi	16	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	NA	37	38	39	40	41	42
		17	Indeks Demokrasi Indonesia Lembata	Angka	71,39	71,45	71,56	71,92	72,23	72,57	72,76
		18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	74,47	75,43-75,45	76,39-76,44	77,35-77,42	78,31-78,41	79,27-79,39	80,23-80,38
Misi IV : Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata											
Tema 4 : Lembata Tertata											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 18-19											
T.5	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	70,13	72,00	74,45	75,00	75,75	76,00	76,75
S.9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan	19	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Angka	2,86	2,89-2,91	2,93-2,95	2,97-2,99	3,01-3,03	3,05-3,07	3,09-3,11
		20	Rasio konektivitas	Persen	0,23	0,27	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya											
Tema 5 : Lembata Subur											
Tema 6 : Lembata Unik											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 20											
T.6	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	NA	0,10-0,11	0,12-0,13	0,14-0,16	0,16-0,19	0,18-0,22	0,20-0,24
S.10	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,74	72,18-72,23	72,62-72,72	73,06-73,21	73,50-73,70	73,94-74,19	74,39-74,68
T.7	Menurunnya resiko bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	126,22	122,5-124,97	118,96-123,72	115,33-122,47	111,70-121,23	108,07-119,98	104,44-118,73
S.11	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	22	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54
T.8	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	53,04	53,61-53,85	54,18-54,66	54,75-55,46	55,32-56,27	55,89-57,08	56,46-57,89
S.12	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	62,24	63,00-63,50	64,00-65,00	65,50-66,00	67,00-67,50	68,00-68,50	69,50-70,00

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
		24	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,7	91,86-91,90	92,01-92,11	92,17-92,31	92,33-92,52	92,49-92,72	92,64-92,93
		25	Indeks Perlindungan Anak	Angka	54,86	55,13	55,41	55,68	55,96	56,23	56,51
S.13	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	26	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Angka	42,50	42,93	43,35	43,78	44,20	44,63	45,05
Misi VI : Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Secara Good and Clean Governance untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.											
Tema 8 : Lembata Prima											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.9	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	52,83	60,4	64,25	67,38	69,89	71,7	73,8
S.14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	27	Nilai RB General	Angka	46,63	50,00	55,45	58,36	60,64	61,65	62,80
		28	Nilai RB Tematik	Angka	6,20	7,00	8,80	9,02	9,25	10,05	11,00
		29	Otonomi Fiskal Daerah	Persen	4,71	4,96-5,06	5,21-5,40	5,47-5,75	5,72-6,10	5,97-6,45	6,22-6,79
		30	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,756	0,848	0,939	1,031	1,122	1,214	1,306

Keselarasan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Keselarasan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

RPJPD KABUPATEN LEMBATA 2025-2045				RPJMD KABUPATEN LEMBATA 2025-2029						
Agenda Transformasi	No	Misi	Sasaran Pokok		Misi		Tujuan		Sasaran	
Transformasi Sosial	1	Mewujudkan SDM Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Berbudaya;	1	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
			2	Mewujudkan derajat kesehatan untuk semua					2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
			3	Mewujudkan perlindungan sosial yang adaptif			2	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	3	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif
Transformasi Ekonomi	2	Membangun Ekonomi Lembata Yang Maju, Tangguh dan Berdaya Saing;	4	Mewujudkan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	2	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar	3	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	4	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan berbasis potensi daerah
			5	Mewujudkan penerapan ekonomi hijau					5	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
			6	Mewujudkan transformasi digital					6	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas
			7	Mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan global					7	Meningkatnya kemandirian desa
			8	Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi						
Transformasi Tata Kelola	3	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas, Inovatif dan Adaptif	9	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	3	Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara <i>Good and Clean Governance</i> untuk	4	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan

RPJPD KABUPATEN LEMBATA 2025-2045				RPJMD KABUPATEN LEMBATA 2025-2029						
Agenda Transformasi	N o	Misi	Sasaran Pokok		Misi		Tujuan		Sasaran	
						Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif				
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4	Mewujudkan Stabilitas Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib	10	Mewujudkan kepatuhan hukum, keamanan dan demokrasi	4	Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib	5	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan tertib	9	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan Masyarakat, kerukunan beragama, dan demokrasi
			11	Mewujudkan perekonomian yang maju melalui pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi						
			12	Mewujudkan ketangguhan diplomasi dan berdaya gentar Kawasan						
Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	5	Pembangunan Inklusif, Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;	13	Mewujudkan beragama maslahat dan berkebudayaan maju	5	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya	6	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	10	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak
			14	Mewujudkan Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan Masyarakat inklusif					11	Meningkatnya pelestarian warisan budaya
			15	Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas			7	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup	12	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
			16	Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			8	Menurunnya risiko bencana	13	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

RPJPD KABUPATEN LEMBATA 2025-2045				RPJMD KABUPATEN LEMBATA 2025-2029						
Agenda Transformasi	No	Misi	Sasaran Pokok		Misi		Tujuan		Sasaran	
			1	Mewujudkan Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	4	Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata	9	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan	14	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan
Implementasi Transformasi	6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas, Merata dan Berkeadilan								
	7	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan								
	8	Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan Daerah								

Tabel 3.5 Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029		RPJMN 2025-2029
Tujuan		Prioritas Pembangunan Nasional
1	Meningkatnya kualitas SDM pendidikan dan kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	
3	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan industri sektor unggulan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
4	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
5	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram, dan tertib	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
6	Meningkatnya Keseimbangan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
7	Menurunnya risiko bencana	Makmur
8	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	
9	Terwujudnya pembangunan infrastruktur antar wilayah yang merata	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Tabel 3.6 Keselarasan Tujuan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lembata		RPJMN 2025-2029	
Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan	1	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
		2	Terwujudnya kesehatan untuk semua
		3	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
		4	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
2	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan
		6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau
		7	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)
		8	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)
		9	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
		10	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
		11	Pariwisata
		12	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
		13	Menguatnya iplek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja
		14	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
		15	Melwujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
		16	Fluktuasi Inflasi dari sisi domestik dipengaruhi oleh fluktuasi harga bergejolak yang secara historis nampak pada periode 2020-2023. Kondisi tersebut dipengaruhi permasalahan struktural inflasi di Indonesia yang banyak terjadi dari sisi hulu dan sifatnya multisektor (pasokan, teknologi manajemen pasca Panen, Infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta data kualitas data).

RPJMD Kabupaten Lembata		RPJMN 2025-2029	
Tujuan		Sasaran	
		17	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
		18	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
		19	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
3	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	20	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
		21	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
		22	Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkat(an kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan
4	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan tertib	23	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
		24	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
		25	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak momihak sorta sistem Politik yang tungsional
5	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	26	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		27	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
		28	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan & berdaya Berolahraga di Masyarakat
7	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup	29	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
8	Menurunnya risiko bencana		
9	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan	30	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Tabel 3.7 Keselarasan Sasaran RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lembata		RPJMN 2025-2029	
Sasaran		Sasaran	
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Terwujudnya kesehatan untuk semua
3	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	3	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
4	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan berbasis potensi daerah	4	Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
		5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan
		6	Menguatnya iplek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja
		7	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
		8	Pariwisata
		9	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
		10	Fluktuasi Inflasi dari sisi domestik dipengaruhi oleh fluktuasi harga bergejolak yang secara historis nampak pada periode 2020-2023. Kondisi tersebut dipengaruhi permasalahan struktural inflasi di Indonesia yang banyak terjadi dari sisi hulu dan sifatnya multisektor (pasokan, teknologi manajemen pasca Panen, Infrastruktur perdagangan dan distribusi, serta dan kualitas data).
		11	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
5	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	12	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau
		13	Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW nexus)
6	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas	14	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas
7	Meningkatnya kemandirian desa	15	Melwujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

RPJMD Kabupaten Lembata		RPJMN 2025-2029	
Sasaran		Sasaran	
8	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	16	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
		17	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		18	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
		19	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
		20	Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen Pembangunan
9	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kerukunan beragama dan demokrasi	21	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
		22	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
		23	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
		24	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak momihak sorta sistem Politik yang tungsional
10	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	25	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju
11	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	26	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
		27	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan & berdaya Berolahraga di Masyarakat
12	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	28	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
13	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim		
14	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan	29	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 maka pemerintah daerah perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan RPJMD yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, sinkron dan konsisten untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dimaksud. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Pentahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penyajian lokus pembangunan kabupaten dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Penentuan strategi pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan, lingkungan dinamis, potensi daerah dan isu-isu strategis daerah maupun visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan 1 (satu) sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Strategi RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Misi/Tujuan		Sasaran		Strategi	
MISI I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar					
T.1	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	S.1	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan berbasis potensi daerah	1	Peningkatan produksi, produktivitas dan Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang terintegrasi hulu-hilir

Misi/Tujuan		Sasaran		Strategi	
				2	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata unggul dan berkelanjutan
				3	Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga barang dan penguatan kelembagaan pengendalian inflasi
				4	Pengembangan pasar, akses pasar dan sistem pemasaran dan perdagangan yang terintegrasi
		S.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	5	Peningkatan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya air berkelanjutan
		S.3	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas	6	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan koperasi
		S.4	Meningkatnya kemandirian desa	7	Peningkatan kemandirian desa dan penguatan kelembagaan ekonomi produktif desa
		MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif			
T.2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan	S.5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarat	8	Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan
		S.6	Meningkatnya derajat pendidikan masyarat	9	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah Kesehatan
T.3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	S.7	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	10	Peningkatan perluasan program perlindungan sosial yang inklusi

Misi/Tujuan		Sasaran		Strategi	
MISI III : Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib					
T.4	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan tertib	S.8	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kerukunan beragama, dan demokrasi	11	Penguatan penegakan hukum dan masyarakat sipil dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta peningkatan kualitas demokrasi dan wawasan kebangsaan
				12	Penguatan moderasi beragama dan Pencegahan konflik berdimensi agama
MISI IV : Meningkatkan Akses Masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata					
T.5	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan	S.9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis tata ruang	13	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, penataan kota, dan pemukiman yang layak
MISI V : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya					
T.6	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup	S.10	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	14	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan daya dukung jasa lingkungan hidup melalui tindakan preventif, enanggulan dan pemulihan kualitas lingkungan secara berkala
T.7	Menurunnya risiko bencana	S.11	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	15	Penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim
T.8	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	S.12	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	16	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan, pengarusutamaan gender dan mengoptimalkan peran serta pemuda, perempuan dan anak dalam pembangunan
				17	Peningkatan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Misi/Tujuan		Sasaran		Strategi	
		S.13	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	18	Membangun kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan
MISI VI : Menata Pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan secara <i>good and clean governance</i> untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif					
T.9	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	S.14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	19	Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik prima yang transparan, akuntabel dan inovatif berbasis teknologi, informasi dan komunikasi serta peningkatan kemampuan fiskal daerah

Sedangkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Arah kebijakan dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan lebih dari 1 (satu) tahunan. Namun yang terpenting adalah penekanan fokus atau tema atau prioritas setiap tahun selama periode RPJMD dalam setiap tahapannya memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program-program pembangunan daerah. Keselarasan antara arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan misi dan strategi pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan ketahanan ekonomi berdasarkan potensi daerah yang terintegrasi hulu-hilir berbasis industri, dan kepastian pasar	1	Peningkatan produksi, produktivitas dan Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang terintegrasi hulu-hilir	*	Pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan pola kawasan (bukit hog dan bukit ruminansia) baik pada lahan milik pemerintah maupun lahan milik masyarakat;
				*	Peningkatan penyediaan sarana pertanian meliputi ketersediaan benih/bibit tanaman, ternak, pupuk dan pestisida ramah lingkungan, pakan ternak dan obat-obatan ternak, penyediaan/pemeliharaan /modifikasi alat dan mesin pertanian serta penanganan pasca panen;
				*	Subsidi sarana produksi pertanian (saprodi) dan sarana produksi peternakan (saprotrak) untuk memperkuat ekosistem pertanian dan peternakan lokal secara menyeluruh;
				*	Peningkatan penyediaan prasarana produksi pertanian melalui pengelolaan lahan dan air berkelanjutan dan fasilitas penunjang pertanian termasuk jalan pertanian/Jalan Usaha Tani menuju kantong produksi dan kawasan ekonomi hijau;
				*	Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan komoditas unggulan daerah berbasis industri lokal dan penerapan ekosistem halal;
				*	Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
				*	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa pengadaan kapal nelayan dan alat tangkap ramah lingkungan (rumponisasi), cool box dan cold storage, optimalisasi tempat pendaratan ikan dan pembangunan SPBN;
				*	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berupa Pembangunan tambak ikan, pengadaan benih/bibit, pakan ikan untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar, rumput laut, tripang dll)
				*	Pengembangan/penataan kampung nelayan
				*	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah;
				*	Peningkatan kapasitas tani, nelayan dan ternak dan kelembagaannya melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sekolah lapang, demonstrasi plot, magang dan studi banding;
				*	Pengembangan pertanian organik (sayur-sayuran, buah-buahan) mendukung program Makan Bergizi Gratis, makan-minum pasien dan zero stunting;

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
				*	Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam;
				*	Peningkatan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan pola desa transit pada 9 kluster sebagai kawasan sentra produksi terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna meliputi Klaster <i>Food Estate</i> Terintegrasi Bobu-Tobotani, klaster Merdeka-Tanahteraket, Klaster Waowala-Tanjung Tuak, Klaster Jalan Tengah, Kluster Kalikasa-Lerek, Kluster Perkotaan Lewoleba, Kluster Nuhanera-Lewolein, Kluster Waijarang-Mingar-Tapobali dan Kluster Lamalera-Wulandoni-Posiwatu;
				*	Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dan kerjasama antar daerah dalam mendorong peningkatan investasi di sektor ekonomi melalui peningkatan kemudahan berinvestasi, perluasan jangkaun promosi, peningkatan kepuasan pelayanan serta perizinan berusaha berbasis digital (OSS);
				*	Membangun kerjasama kemitraan dan fasilitasi penyediaan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk bantuan sosial/hibah/pinjaman baik dilakukan oleh pemerintah, kerjasama dengan masyarakat maupun kerjasama dengan lembaga keuangan (bank);
				*	Kerjasama pemerintah, pihak ketiga/pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, pemerintah desa dan masyarakat (nelayan, tani, ternak) dalam rantai pasok pembangunan dan pemberdayaan ekonomi sektor basis
		2	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata unggul dan berkelanjutan	*	Peningkatan pengembangan daya tarik wisata, destinasi dan industri pariwisata unggul berwawasan lingkungan dan tangguh bencana dengan konsep 7 A yang melibatkan kerjasama dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak/stakeholders untuk berkolaborasi;
				*	Peningkatan sumber daya pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif
				*	Pengembangan ekonomi kreatif ;
				*	Pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan pada berbagai event dan promosi digital;
				*	Pembangunan dan pemanfaatan ruang kreatif kota;
			*	Optimalisasi pemanfaatan taman kota dan taman publik ;	
			*	Sinergi pengembangan desa wisata dan pelaku uisaha pariwisata;	
			*	Penguatan/pembangunan situs-situs budaya mendukung tonggak baru pengembangan pariwisata budaya lokal.	

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
		3	Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga barang dan penguatan kelembagaan pengendalian inflasi	*	Pengendalian ketersediaan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi pangan dalam daerah melalui gerakan menanam, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pelaksanaan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) berupa bantuan, subsidi harga pangan terutama untuk beras, jagung, bawang merah, dan pasar murah bekerjasama dengan Perum Bulog maupun produsen/penghasil dengan sasaran terutama kepada masyarakat menengah ke bawah;
				*	Peningkatan koordinasi melalui optimalisasi kelembagaan pengendalian inflasi daerah;
				*	Peningkatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan serta pelaksanaan inspeksi mendadak, pelaksanaan tera dan tera ulang.
		4	Pengembangan pasar, akses pasar dan sistem pemasaran dan perdagangan yang terintegrasi	*	Peningkatan ekspansi pasar dengan pola terintegrasi rantai pasok/rantai nilai;
				*	Peningkatan promosi dan kerjasama kemitraan;
				*	Peningkatan tertib niaga termasuk pengaturan tata niaga, kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, dan perlindungan konsumen;
				*	Peningkatan kualitas sarana perdagangan (revitalisasi pasar);
				*	Pengembangan digitalisasi pemasaran dan perdagangan baik dalam daerah maupun antar wilayah.
		5	Peningkatan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya air berkelanjutan	*	Pemenuhan infrastruktur pengelolaan sumber daya air mendukung kemandirian pangan;
				*	Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat berkelanjutan dari produksi dalam negeri melalui pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mencapai ketahanan dan kemandirian pangan;
				*	Penyediaan cadangan pangan pemerintah, dan cadangan pangan masyarakat melalui ketersediaan lumbung pangan;
				*	Peningkatan diversifikasi pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan peningkatan penanganan kerawanan pangan.
		6	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha mikro, kecil dan koperasi	*	Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi baik diselenggarakan dengan kerjasama penyelenggaraan pendidikan vokasi, Fasilitasi penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah, kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berusaha baik oleh pemerintah maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga diklat yang berkompeten;

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
				*	Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui fasilitasi penyediaan jaminan sosial tenaga kerja/asuransi tenaga kerja pada umumnya dan yang rentan bekerja di sektor riil khususnya sebagai nelayan, tani, ternak, dan buruh;
				*	Pelatihan/penyuluhan, penyelenggaraan sekolah lapang, demonstrasi plot/demplot, magang, dan studi banding;
				*	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, pengembangan usaha melalui penyediaan mesin, peralatan, dan bahan baku yang memadai serta pemasaran;
				*	Fasilitasi kemitraan usaha mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan mutu produk, promosi dan pemasaran serta desain dan teknologi usaha mikro, kecil dan koperasi umumnya serta koperasi desa merah putih untuk menumbuhkan wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja.
		7	Peningkatan kemandirian desa dan penguatan kelembagaan ekonomi produktif desa	*	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
				*	Pembangunan dan pertumbuhan desa model kluster tematik mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar;
				*	Peningkatan kerjasama antar desa;
				*	Penguatan sosial-budaya dan lingkungan desa;
				*	Penguatan ekonomi sebagai penggerak utama dalam rantai pasok ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
				*	Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa melalui Bumdes dan koperasi desa merah putih untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa;
				*	Penguatan kapasitas BUMD untuk mendorong perekonomian masyarakat yang terintegrasi dan bersinergi antara desa dan kota.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang adaptif	8	Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan	*	Peningkatan manajemen satuan pendidikan dan kualitas layanan pendidikan;
				*	Peningkatan kompetensi dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang merata baik pada sekolah pemerintah maupun swasta;
				*	Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal sesuai standar;
				*	Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan;
				*	Pemberian bantuan hibah ke sekolah-sekolah dan bantuan sosial perlengkapan sekolah kepada peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan kelompok rentan lainnya;
				*	Fasilitasi pemberian bantuan beasiswa, ijin belajar, dan bantuan keuangan bagi mahasiswa;

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
				*	Pengembangan anak usia dini holistik-integratif baik milik pemerintah maupun swasta;
				*	Fasilitasi penyelenggaraan sekolah unggul garuda dan sekolah rakyat;
				*	Fasilitasi kerjasama penyelenggaraan perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi;
				*	Fasilitasi dan kerjasama penyediaan makan bergizi gratis bagi anak usia sekolah;
				*	Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikan dasar dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum dan manajemen sekolah;
				*	Peningkatan literasi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana literasi dan upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat;
				*	Kerjasama pemerintah, pihak ketiga, akademisi, dan desa dalam peningkatan kualitas pendidikan.
		9	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan	*	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar meliputi fasilitas kesehatan/rumah sakit dan puskesmas, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang sehat ;
				*	Peningkatan pelayanan keehatan masyarakat terhadap penyakit menular maupun tidak menular
				*	Peningkatan status/akreditasi pelayanan kesehatan;
				*	Meningkatkan pemenuhan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan baik kualitas maupun kuantitas baik pada fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
				*	Membangun kerjasama bantuan belajar/beasiswa bagi dokter;
				*	Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas, dan LSM dalam penyelesaian masalah kesehatan;
				*	Menjamin kesehatan bagi seluruh penduduk melalui peningkatan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai UHC.
		10	Peningkatan perluasan program perlindungan sosial yang inklusi	*	Penguatan data terpadu, sistem dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
				*	Peningkatan sinergitas perlindungan sosial antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, desa dan organisasi kemasyarakatan
				*	Perlindungan, pemenuhan hak, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial terutama para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, kaum rentan, dan marginal lainnya;
				*	Penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui fasilitas jaminan sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat rentan/miskin, migran korban tindak kekerasan, dan korban bencana;

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
				*	Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan penduduk miskin dan penurunan wilayah kantong kemiskinan yang dilakukan dengan prinsip tepat sasaran, keterpaduan dan kerjasama multi pihak
				*	Fasilitasi penyelenggaraan sekolah rakyat bagi anak usia sekolah dari keluarga rentan.
3	Mewujudkan kabupaten lembata yang adil, aman dan tertib	11	Penguatan penegakan hukum dan masyarakat sipil dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta peningkatan kualitas demokrasi dan wawasan kebangsaan	*	Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum;
				*	Peningkatan kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini masyarakat, wawasan kebangsaan melalui optimalisasi peran forum-forum kemasyarakatan;
				*	Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna menangani masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram;
				*	Penguatan pendidikan politik, peran serta masyarakat, dan partai politik dalam berdemokrasi.
		12	Penguatan moderasi beragama, dan pencegahan konflik berdimensi agama		Optimalisasi peran para pemangku kepentingan dalam forum-forum antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komite Inteligen Daerah (Kominda) melalui pelaksanaan koordinasi secara periodik maupun insidentil;
					Peningkatan pemahaman dan toleransi beragama;
					Fasilitasi pembangunan/perbaikan tempat-tempat ibadah baik dalam bentuk hibah/bantuan berupa uang maupun barang;
					Peningkatan penyelenggaran kemasyarakatan dalam rangka pembinaan/pembangunan mental spritual melalui fasilitasi peran organisasi kemsayarakatan.
4	Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan merata	13	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, penataan kota, dan pemukiman yang layak	*	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan terutama ke kantong produksi, ke kawasan wisata dan ke fasilitas umum,
				*	Penanganan segmen-segmen kritis ruas jalan, jalur evakuasi pada zona merah, dan pemeliharaan rutin dan berkala pada ruas-ruas jalan kabupaten dalam rangka mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban logistik dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan jasa;
				*	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat antara lain melalui pengaturan moda transportasi kota melalui kerjasama dengan pihak ketiga termasuk angkutan umum dalam kota dan penguatan terminal kota, dan pengadaan lampu jalan;

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
				*	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut antara lain pembangunan pelabuhan rakyat untuk menghubungkan Kabupaten Lembata-Flores Timur dan Alor dan kerjasama untuk pembukaan jalur baru ekspedisi Lewoleba-Makasar, Lewoleba Surabaya dan kerja sama kapal cepat Lewoleba-Kupang PP;
				*	Fasilitasi kerjasama penyediaan sarana dan prasarana perhubungan udara;
				*	Peningkatan kerjasama penguatan jaringan telekomunikasi dan informasi dengan telkomsel maupun kerjasama pemerintah dengan radio RRI , dan media masa ;
				*	Peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
				*	Menjamin ketersediaan air baku dan air bersih yang layak, aman dan terjangkau;
				*	Pembangunan dan perbaikan rumah layak huni serta penyediaan sanitasi layak dan aman terutama bagi masyarakat rentan/miskin, korban bencana dan terkena realokasi akibat program pemerintah;
				*	Fasilitasi pelaksanaan program nasional 3 juta rumah sesuai kewenangan daerah
				*	Penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum pada kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
				*	Fasilitasi kerjasama peningkatan jangkauan listrik terutama pada desa maupun dusun yang belum mendapatkan akses listrik;
				*	Pembangunan dan peningkatan drainase kota, pembangunan kolam retensi dan normalisasi DAS/Kanal/Cek Dam;
				*	Pemenuhan infrastruktur pengelolaan sumber daya air dan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan abrasi pantai
				*	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
				*	Kerjasama pemerintah, pihak ketiga, akademisi, desa, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur dasar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
				*	Optimalisasi keanekaragaman sumber daya hayati untuk mewujudkan kesejahteraan;
5	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, berketahanan sosial dan budaya	14	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan daya dukung jasa lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan secara berkala	*	Peningkatan peran serta masyarakat, pihak ketiga, akademisi, dan pemerintah desa dalam konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
				*	Penataan, pengembangan, dan pengendalian kualitas lingkungan hidup berbasis kearifan lokal;
				*	Pelaksanaan konservasi, restorasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan serta pembangunan embung resapan;
				*	Penanaman barisan hijau Malapari sepanjang jalan utama, rumah penduduk dan lahan desa (satu desa satu hektar) untuk menyerap karbon guna mengatasi isu pemanasan global;

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
				*	Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pengembangan tanaman hortikultura;
				*	Pelaksanaan inovasi #tebang satu tanam empat# untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan;
				*	Pengembangan sumber daya genetik lokal pola tanaman sisip;
				*	Pengembangan ruang terbuka hijau;
				*	Penataan dan pengelolaan persampahan meliputi tata kelola, pengadaan sarana prasarana pendukung serta sumber daya manusia.
		15	Penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	*	Memperkuat budaya sadar bencana dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsip dan adaptif menghadapi bencana;
				*	Peningkatan penanganan bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana;
				*	Membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim.
		16	Membangun kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan	*	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan kesenian tradisional;
				*	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan;
				*	Penguatan/pembangunan situs-situs budaya mendukung tonggak baru pengembangan pariwisata budaya lokal;
		17	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan, pengarusutamaan gender dan mengoptimalkan peran serta pemuda, perempuan dan anak dalam pembangunan	*	Optimalisasi Pos Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (PPTPA);
				*	Pelaksanaan pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan bina keluarga remaja generasi berencana (GenRe);
				*	Bina Keluarga Balita holistik integratif;
				*	Pembangunan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) beserta fasilitas pendukung;
				*	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan, pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran perkawinan dini dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
				*	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembangunan;
				*	Meningkatkan infrastruktur olahraga, partisipasi masyarakat dalam olahraga dan SDM olahraga;

Misi		Strategi		Arah Kebijakan	
				*	Pembangunan pemuda dan olahraga berupa penyediaan sarana dan prasarana olahraga termasuk pembangunan stadion penyangga;
				*	Peningkatan sumber daya manusia olahraga;
				*	Pelaksanaan turnamen olahraga dalam daerah maupun keikutsertaan pada turnamen luar daerah;
				*	Peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan.
		18	Peningkatan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	*	Sosialisasi, pendataan dan penyusunan kebijakan keluarga berkualitas
				*	Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
				*	Pembinaan keluarga baru melalui kerjasama dengan pihak keagamaan;
				*	Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
6	Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Secara <i>Good and Clean Governance</i> untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.	19	Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik prima yang transparan, akuntabel dan inovatif berbasis teknologi, informasi dan komunikasi serta peningkatan kemampuan fiskal daerah	*	Penataan organisasi dan ta laksana yang tepat fungsi;
				*	Pemekaran dan penataan kecamatan dan desa;
				*	Mengembangkan SDM aparatur yang berkompeten, ber-AKHLAK dan inovatif;
				*	Peningkatan kualitas dan efektivitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian pembangunan melalui pembinaan, pendampingan dan asistensi;
				*	Peningkatan peran riset dan inovasi daerah dalam pembangunan;
				*	Peningkatan kepuasan layanan pemerintah kepada masyarakat;
				*	Penguatan pelayanan hukum kepada masyarakat
				*	Ekstensifikasi dan Intensifikasi PAD melalui optimalisasi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, kerjasama pemanfaatan kekayaan dan aset daerah, pengembangan sumber-sumber pendapatan alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digitalisasi dan modernisasi sistem pendapatan;
				*	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;
				*	Kepastian kepemilikan tanah milik pemerintah
				*	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informastika dan kolaborasi;
				*	Peningkatan integrasi penyelenggaraan sistem statistik daerah dan nasional;
				*	Pemenuhan hak setiap warga atas Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
					Peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kepemimpinan kepala daerah.

Pentahapan prioritas pembangunan tahunan RPJMD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Prioritas Pembangunan Tahunan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2026-2030

No	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Tema: Pembangunan SDM dan pemerintahan yang efektif sebagai landasan transformasi pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing	Tema: Pemantapan pembangunan SDM dan pemerintahan yang efektif untuk percepatan pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing	Tema: Pembangunan ekonomi berkelanjutan, berketahanan sosial budaya dan infrastruktur yang handal dan merata untuk penguatan landasan transformasi menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing	Tema: Pembangunan ekonomi berkelanjutan, berketahanan sosial budaya dan infrastruktur yang handal dan merata untuk penguatan transformasi menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing	Tema: Pemantapan pembangunan ekonomi berkelanjutan, berketahanan sosial budaya dan infrastruktur yang handal dan merata menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing
	Prioritas:	Prioritas:	Prioritas:	Prioritas:	Prioritas:
1	Pembangunan Ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah	Pembangunan Ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah	Pembangunan Ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah	Pembangunan Ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah	Pembangunan Ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi daerah
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan merata	Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan merata	Pembangunan berketahanan sosial budaya melalui peningkatan peran serta masyarakat, perempuan, pemuda dan keluarga serta anak dalam pembangunan	Pembangunan berketahanan sosial budaya melalui peningkatan peran serta masyarakat, perempuan, pemuda dan keluarga serta anak dalam pembangunan	Pembangunan berketahanan sosial budaya melalui peningkatan peran serta masyarakat, perempuan, pemuda dan keluarga serta anak dalam pembangunan

No	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif untuk pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan inovatif	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif untuk pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan inovatif	Pengembangan Infrastruktur yang handal dan merata melalui infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi serta pembangunan kewilayahan	Pengembangan Infrastruktur yang handal dan merata melalui infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi serta pembangunan kewilayahan	Pengembangan Infrastruktur yang handal dan merata melalui infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi serta pembangunan kewilayahan

3.2.2 Program Prioritas Daerah

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional, maka ditetapkan Program Prioritas Daerah sekaligus mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Adapun Program Strategis Nasional terdiri dari:

- PSN 1. Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sekolah rakyat dan pembangunan rumah;
- PSN 2. Ketahanan pangan dengan kegiatan pengadaan gabah/beras dan penyaluran cadangan beras pemerintah;
- PSN 3. Kesehatan untuk semua dengan kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional dan Makan Bergizi Gratis;
- PSN 4. Perluasan akses pendidikan dengan kegiatan revitalisasi pendidikan dasar;
- PSN 5. Pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan pengendalian inflasi, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan kemudahan perzinan di Daerah.

Adapun penetapan program prioritas daerah, dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
Visi : Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing											
Misi I : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Terintegrasi Hulu-Hilir Berbasis Industri, dan Kepastian Pasar											
Tema 1 : Lembata Mandiri											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 1-12											
T.1	Meningkatnya produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	S.1	Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor unggulan berbasis potensi daerah	1	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina, didampingi dan difasilitasi	1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1 dan 5
				2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	2	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	2	Pengembangan UMKM	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1 dan 5
				3	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3	Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura, Produksi Komoditas peternakan, dan Produksi perkebunan	3	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1
				4	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	4	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	4	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1
				5	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				6	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	6	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	6	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan	PSN 1
				7	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7	Persentase peningkatan nilai tambah produk perikanan	7	Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Perikanan	PSN 1
				8	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	8	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	8	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PSN 1
				9	Meningkatnya jangkaun pemasaran pariwisata	9	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	9	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PSN 1
				10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh ijin sesuai ketentuan	10	Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PSN 5
				11	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaku usaha	11	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka usaha.	11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PSN 5
				12	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	12	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	12	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				13	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	19	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	13	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 1
				14	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penggunaan alat UTPP sesuai ketentuan	14	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	14	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5
		S.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	15	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	15	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir, persentase peningkatan perlindungan kawasan dari Abrasi Pantai dan Banjir Rob, Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	15	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1 dan 2
				16	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	16	Persentase Cadangan pangan	16	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1 dan 2

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				17	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	17	Skor Pola Pangan Harapan	17	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertanian dan Ketahanan Pangan	PSN 1 dan 2
		S.3	Terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas	18	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	18	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	18	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PSN 1
				19	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	19	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	19	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PSN 5
		S.4	Meningkatnya kemandirian desa	20	Meningkatnya Desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	20	Persentase Fasilitas Kerja Sama	20	Peningkatan Kerjasama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PSN 1
Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif											
Tema 2 : Lembata Smart dan Tema 3 : Lembata Sehat											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 13-16											
T.2	Meningkatnya sumber daya manusia pendidikan dan kesehatan	S.5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	21	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	21	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	21	Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	PSN 1 dan 4
							Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD				
							Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP				

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				22	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	22	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan	22	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	PSN 4
				23	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan gerakan budaya gemar membaca	23	Persentase Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	23	Pembinaan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	PSN 4
		S.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	24	Meningkatnya Kualitas Layanan Dasar Ibu, Anak, Usia Produktif dan Usia Lanjut	24	Rata rata Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir (BBLR), pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan usia lanjut	24	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	PSN 1 dan 3

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				25	Meningkatnya Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	25	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	25	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	PSN 3
T.3	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	S.7	Meningkatnya layanan dasar perlindungan sosial yang adaptif	26	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	26	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	26	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 3
				27	Meningkatnya rehabilitasi sosial	27	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	27	Rehabilitasi Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 1
				28	Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	28	Pemberdayaan Sosial	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				29	Persentase Peselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) pada tahun anggaran	29	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	29	Hubungan Industrial	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PSN 1
Misi III : Mewujudkan Kabupaten Lembata yang Adil, Aman dan Tertib											
Tema 7 : Lembata Sejahtera											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.4	Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan tertib	S.8	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kerukunan beragama dan demokrasi	30	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat serta meningkatnya kapasitas SDM PPNS	30	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya, Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas, Persentase cakupan perlindungan masyarakat	30	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	-
				31	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	31	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	31	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				32	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	32	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	32	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	-
				33	Meningkatnya etika dan budaya politik	33	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	33	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
Misi IV Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur yang Handal dan Merata											
Tema 4 : Lembata Tertata											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 18-19											
T.5	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berkelanjutan	S.9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas yang berkualitas dan berkelanjutan	34	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	34	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	34	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1 dan 2
						Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi pantai dan banjir Rob					

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
							Persentase luas layanan irigasi multikomoditas				
				35	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	35	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani baik melalui jaringan perpipaan maupun bukaan jaringan perpipaan	35	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				36	Meningkatnya layanan persampahan regional	36	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	36	Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
				37	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	37	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik layak dan aman)	37	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				38	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	38	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	38	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
				39	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	39	Tingkat kemantapan jalan	39	Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PSN 1
				40	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	40	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	40	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				41	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	41	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	41	Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
							Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
				42	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	42	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	42	Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
				43	Terpeliharanya kualitas kawasan permukiman	43	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani	43	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1
				44	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	44	Persentasi Permukiman yang suda Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	44	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PSN 1

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				45	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	45	Konektivitas Darat	45	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	PSN 1
							Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota				
							Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten				
				46	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Laut	46	Konektivitas Laut	46	Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	PSN 1
Misi V Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Berketahanan Sosial dan Budaya											
Tema 5 : Lembata Unik dan Tema 6 : Lembata Subur											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 20											
T.6	Meningkatnya keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup	S.10	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	47	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	47	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	47	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup	-
				48	Menurunnya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	48	Indeks kualitas air	48	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-
							Indeks Kualitas Udara				

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				49	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	49	Persentase RTH	49	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup	-
				50	Meningkatnya tata kelola persampahan	50	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	50	Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	-
T.7	Menurunnya risiko bencana	S.11	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	51	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	51	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	51	Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PSN 1
T.8	Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya	S.12	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	52	Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	52	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	52	Pengembangan Kebudayaan	Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	-
		S.13	Meningkatnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	53	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	53	Persentase keluarga yang mendapatkan akses pada layanan berbasis kesetaraan gender	53	Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
				54	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di tingkat daerah	54	Persentase perangkat daerah yang menerapkan PUG melalui strategi perencanaan dan penganggaran responsif gender	54	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				55	Meningkatnya proses fasilitasi potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda	55	Persentase Peningkatan Kemandirian, Penguatan Karakter, dan Kontribusi Pemuda Terhadap Pembangunan	55	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	-
				56	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	56	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	56	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
Misi VI Menata Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara <i>Good and Clean Governance</i> untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif.											
Tema 8 : Lembaga Primer											
Tagline Nelayan-Tani-Ternak, Prioritas Unggulan 17											
T.9	Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	S.14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	57	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	57	Indeks Kematangan Organisasi	57	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah	PSN 1
							Persentase peningkatan Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik				
							Indeks Pelayanan Publik (%)				

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
						Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (%)					
						Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (%)					
				58	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	58 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	58	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-
						Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)					
						Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD					
				59	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59 Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah		Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA				
				60	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	60	Persentase Cakupan kepemilikan akte kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun	60	Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil	PSN 1
							Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan				
							Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
							Persentase akte perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				

Tujuan		Sasaran		Outcome		Indikator Outcome		Program Prioritas		PDPJ	Pemetaan PSN
				61	Meningkatnya Tatakelola Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	61	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	61	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah	-
					Meningkatnya Tatakelola Anggaran Daerah		Persentase SKPD yang menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan				
					Meningkatnya Tatakelola Perbendaharaan Daerah		Persentase Penurunan SILPA				
				62	Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah	62	Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	62	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	-
				63	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan anggaran, proses dan kewenangan	63	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1	63	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	-
				64	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	64	Indeks SPBE	64	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	-
				65	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	65	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	65	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Komunikasi dan Informatika	-

Penentuan program prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan janji politik Kepala Daerah terpilih Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Integrasi Janji Politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Program Prioritas

PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH			SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
1	Lembata Mandiri	Lembata yang mandiri secara ekonomi, mampu mengelola potensi sumber daya lokal dari hulu sampai hilir	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan UMKM	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan
			Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Perikanan
			Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan Kerjasama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH			SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	Lembata Sehat	Masyarakat Lembata yang sehat dan berbudaya hidup sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
			Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
				Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Lembata Smart	Lembata yang SDM masyarakatnya cerdas dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan
4	Lembata Tertata	Lembata yang mengoptimalkan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk mewujudkan ruang daerah yang mandiri, produktif dan lestari dan penyediaan infrastruktur berkualitas dan merata	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH			SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
5			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Lembata Subur	Lembata yang masyarakatnya berbudaya hidup ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
6	Lembata Unik	Lembata yang masyarakatnya memiliki kekhasan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Budaya
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Budaya
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Lembata Sejahtera	Lembata yang masyarakatnya memiliki kehidupan yang layak dari seluruh aspek kehidupan, aman, bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
8	Lembata Prima	Pemerintahan Lembata yang prima dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH			SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PMDN 90	PERANGKAT DAERAH
			Program Koordinasi Dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah berisi keseluruhan program perangkat daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program dan perangkat daerah penanggungjawab program tahun 2025-2029 hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah untuk pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab kepala daerah periode 2020-2034. Program perangkat daerah berisi keseluruhan program yang terdapat dalam rencana strategis perangkat daerah berdasarkan bidang urusan termasuk program penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab sekretariat perangkat daerah. Program perangkat daerah ini dijadikan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, untuk dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dan indikator program, target dan pagu indikatif program-program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					222.423.900.000,00		224.648.139.000,00		225.232.224.161,00		225.817.827.944,00		226.450.117.863,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					182.673.900.000,00		184.500.639.000,00		184.980.340.661,00		185.461.289.547,00		185.980.581.158,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	182.673.900.000,00	100	184.500.639.000,00	100	184.980.340.661,00	100	185.461.289.547,00	100	185.980.581.158,00	1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					39.084.305.000,00		39.475.190.000,00		39.577.844.600,00		39.680.745.159,00		39.791.705.696,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) PAUD (%)	100	100	100	39.084.305.000,00	100	39.475.190.000,00	100	39.577.844.600,00	100	39.680.745.159,00	100	39.791.705.696,00	1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					5.230.000,00		5.335.000,00		5.337.000,00		5.360.000,00		5.450.000,00	
Meningkatnya Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	100	100	5.230.000,00	100	5.335.000,00	100	5.337.000,00	100	5.360.000,00	100	5.450.000,00	1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					650.000.000,00		656.500.000,00		658.206.900,00		659.918.238,00		661.766.009,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan (%)	100	100	100	650.000.000,00	100	656.500.000,00	100	658.206.900,00	100	659.918.238,00	100	661.766.009,00	1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					5.225.000,00		5.230.000,00		5.245.000,00		5.250.000,00		5.265.000,00	
Meningkatnya usulan ijin satuan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100	100	100	5.225.000,00	100	5.230.000,00	100	5.245.000,00	100	5.250.000,00	100	5.265.000,00	1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					5.240.000,00		5.245.000,00		5.250.000,00		5.265.000,00		5.350.000,00	
Meningkatnya pengembangan bahasa dan sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	100	100	100	5.240.000,00	100	5.245.000,00	100	5.250.000,00	100	5.265.000,00	100	5.350.000,00	1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					161.878.400.000,00		163.357.183.955,00		163.922.076.577,80		164.757.297.366,22		164.790.548.675,46	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					75.009.811.209,00		75.563.091.209,00		75.708.382.537,00		75.854.051.622,00		76.011.333.896,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	19.681.811.209,00	100	19.681.811.209,00	100	19.681.811.209,00	100	19.681.811.209,00	100	19.681.811.209,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	55.328.000.000,00	100	55.881.280.000,00	100	56.026.571.328,00	100	56.172.240.413,00	100	56.329.522.687,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					74.920.488.791,00		75.187.227.746,00		75.596.330.030,80		76.894.139.426,22		76.246.594.187,46	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas layanan dasar ibu, anak, usia produktif dan usia lanjut	Rata rata Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir (BBLR), pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	96,63	100	100	12.379.925.000,00	100	12.520.724.250,00	100	12.975.809.533,00	100	13.017.183.437,00	100	12.943.601.692,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Proporsi Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar (%)	100	100	100	23.853.808.672,00	100	23.860.870.737,00	100	23.598.146.326,00	100	24.477.697.621,00	100	20.828.644.188,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Essensial (%)	100	100	100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN				
	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan (%)	72,72	75	80		85		90		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	7,90	7,57	7,24	9.092.440.000,00	6,90	9.143.364.400,00	6,57	9.247.168.714,00	6,24	9.231.179.975,00	5,91	9.257.027.277,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Underweight (%)	15,8	27,6	27		26,4		25,8		25,2		25		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Wasting (%)	7,5	13,9	13,5		13,2		12,8		12,5		12		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Menurunnya morbiditas	Rata-rata Cakupan Layanan Penyakit Menular (%)	84,6	85	87	5.662.770.000,00	90	5.719.397.700,00	95	5.734.268.134,00	100	5.749.177.231,00	100	5.765.274.926,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rata-rata Cakupan Layanan Penyakit Tidak Menular (%)	84,6	85	87		90		95		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terpenuhnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100	100	100	22.798.991.119,00	100	22.798.991.119,00	100	22.894.083.697,00	100	23.269.065.716,00	100	26.298.991.119,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	1.132.554.000,00	100	1.143.879.540,00	100	1.146.853.626,80	100	1.149.835.446,22	100	1.153.054.985,46	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					8.027.000.000,00		8.657.554.000,00		8.660.644.802,00		8.044.959.640,00		8.560.454.302,00	
Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100	100	100	6.850.000.000,00	100	7.468.784.000,00	100	7.468.784.000,00	100	6.850.000.000,00	100	7.362.148.775,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Terpenuhinya rasio tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga pendukung dan penunjang terhadap populasi	Rata - rata Rasio Tenaga Kesehatan, Tenaga Medis, Tenaga Pendukung dan Penunjang terhadap Populasi sesuai Standar (%)	16,67	20	35	1.177.000.000,00	45	1.188.770.000,00	65	1.191.860.802,00	85	1.194.959.640,00	95	1.198.305.527,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					588.000.000,00		593.880.000,00		595.424.088,00		596.972.191,00		598.643.713,00	
Meningkatnya proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi (%)	45,71	50	65	588.000.000,00	75	593.880.000,00	85	595.424.088,00	95	596.972.191,00	100	598.643.713,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Cakupan Sediaan Alat-Alat Kesehatan (%)	25	35	55		75		85		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Cakupan Sediaan Makanan dan Minuman (%)	0	35	55		75		85		90		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.333.100.000,00		3.355.431.000,00		3.361.295.120,00		3.367.174.487,00		3.373.522.577,00	
Tercapainya pemberdayaan masyarakat bidang kesahatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100	100	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Terselenggaranya layanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	2.233.100.000,00	100	2.255.431.000,00	100	2.261.295.120,00	100	2.267.174.487,00	100	2.273.522.577,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					27.587.100.000,00		26.741.164.000,00		26.410.691.027,00		26.880.398.825,00		26.955.613.175,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.546.400.000,00		5.601.864.000,00		5.616.428.846,00		5.631.031.561,00		5.646.798.450,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.546.400.000,00	100	5.601.864.000,00	100	5.616.428.846,00	100	5.631.031.561,00	100	5.646.798.450,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.250.000.000,00		1.262.500.000,00		1.265.782.500,00		1.269.073.535,00		1.272.626.940,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	2,67	2,67	3,85	1.250.000.000,00	5,03	1.262.500.000,00	6,21	1.265.782.500,00	7,39	1.269.073.535,00	8,57	1.272.626.940,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi Pantai dan Banjir Rob (%)	7,85	7,85	9,05		10,25		11,45		12,65		13,85		1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	2,13	2,13	2,98		3,83		4,68		6,22		6,76		1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.033.800.000,00		6.094.138.000,00		6.109.982.759,00		6.125.868.714,00		6.143.021.146,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani baik melalui Jaringan Perpipaan maupun Bukanan Jaringan Perpipaan (%)	78,11	80,31	82,41	6.033.800.000,00	84,41	6.094.138.000,00	86,71	6.109.982.759,00	88,81	6.125.868.714,00	90,81	6.143.021.146,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (%)	0	0	5,00	1.000.000.000,00	7,50	1.010.000.000,00	8,88	1.012.626.000,00	9,65	1.015.258.828,00	10,78	1.018.101.552,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.138.600.000,00		5.189.986.000,00		5.203.479.964,00		5.217.009.012,00		5.231.616.637,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	56,06	56,54	57,13	5.138.600.000,00	57,85	5.189.986.000,00	58,43	5.203.479.964,00	59,28	5.217.009.012,00	60,20	5.231.616.637,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	26,61	26,61	27,11	1.000.000.000,00	27,36	1.010.000.000,00	27,61	1.012.626.000,00	27,86	1.015.258.828,00	28,16	1.018.101.552,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					250.000.000,00		252.500.000,00		253.156.500,00		253.814.707,00		254.474.625,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	37,89	37,89	47,36	250.000.000,00	47,36	252.500.000,00	50,00	253.156.500,00	55,00	253.814.707,00	60,00	254.474.625,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					6.768.300.000,00		5.714.176.000,00		5.329.032.858,00		5.743.928.343,00		5.760.011.342,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	52,47	52,86	53,88	6.768.300.000,00	54,94	5.714.176.000,00	56,06	5.329.032.858,00	57,35	5.743.928.343,00	58,81	5.760.011.342,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	27,70	27,70	30,20	100.000.000,00	32,70	101.000.000,00	35,20	101.262.600,00	37,70	101.525.883,00	40,20	101.810.155,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah (%)	0,00	9,09	18,18	500.000.000,00	18,18	505.000.000,00	18,18	506.313.000,00	18,18	507.629.414,00	18,18	509.050.776,00	1.03.2.15.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					6.502.800.000,00		6.567.828.000,00		6.584.904.352,00		6.602.025.104,00		6.618.510.774,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.633.900.000,00		2.660.239.000,00		2.667.155.621,00		2.674.090.226,00		2.681.577.679,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.633.900.000,00	100	2.660.239.000,00	100	2.667.155.621,00	100	2.674.090.226,00	100	2.681.577.679,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					732.000.000,00		739.320.000,00		741.242.232,00		743.169.462,00		745.250.336,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1,63	2,72	8,15	732.000.000,00	13,59	739.320.000,00	19,02	741.242.232,00	24,46	743.169.462,00	29,89	745.250.336,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	0,00	0,00	2,48		4,96		7,44		9,92		12,40		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					868.000.000,00		876.680.000,00		878.959.368,00		881.244.662,00		881.712.147,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha di Kabupaten/kota yang Ditangani (%)	0,38	0,38	1,28	868.000.000,00	2,18	876.680.000,00	3,08	878.959.368,00	3,97	881.244.662,00	4,87	881.712.147,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.268.900.000,00		1.281.589.000,00		1.284.921.131,00		1.288.261.926,00		1.291.869.060,00	
Terpeliharanya kualitas kawasan permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani (%)	0,78	1,12	2,14	1.268.900.000,00	3,16	1.281.589.000,00	4,18	1.284.921.131,00	5,20	1.288.261.926,00	6,22	1.291.869.060,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentasi Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0,00	0,00	18,17	1.000.000.000,00	36,34	1.010.000.000,00	54,51	1.012.626.000,00	72,68	1.015.258.828,00	90,85	1.018.101.552,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					8.048.420.001,00		8.128.904.199,00		8.150.039.351,00		8.171.229.453,00		8.194.108.897,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.503.800.000,00		5.558.838.000,00		5.573.290.979,00		5.587.781.536,00		5.603.427.324,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.033.000.000,00	100	2.053.330.000,00	100	2.058.668.658,00	100	2.064.021.197,00	100	2.069.800.456,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.470.800.000,00	100	3.505.508.000,00	100	3.514.622.321,00	100	3.523.760.339,00	100	3.533.626.868,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.401.000.000,00		1.415.010.000,00		1.418.689.026,00		1.422.377.617,00		1.426.360.275,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat serta meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	100	1.401.000.000,00	100	1.415.010.000,00	100	1.418.689.026,00	100	1.422.377.617,00	100	1.426.360.275,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					992.000.001,00		1.001.919.999,00		1.004.524.992,00		1.007.136.757,00		1.009.956.741,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	472.000.000,00	100	487.920.000,00	100	488.524.992,00	100	491.136.757,00	100	493.956.740,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	10	10	340.000.000,00	20	337.000.000,00	20	335.000.000,00	20	335.000.000,00	20	335.000.000,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	10	10	180.000.001,00	20	176.999.999,00	20	181.000.000,00	20	181.000.000,00	20	181.000.001,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					151.620.000,00		153.136.200,00		153.534.354,00		153.933.543,00		154.364.557,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	151.620.000,00	100	153.136.200,00	100	153.534.354,00	100	153.933.543,00	100	154.364.557,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.620.800.000,00		4.667.008.000,00		4.679.142.221,00		4.691.176.349,00		4.704.443.653,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.854.500.000,00		2.883.045.000,00		2.890.540.917,00		2.898.056.323,00		2.906.170.881,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.854.500.000,00	100	2.883.045.000,00	100	2.890.540.917,00	100	2.898.056.323,00	100	2.906.170.881,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					125.700.000,00		126.957.000,00		127.287.088,00		127.618.035,00		127.975.365,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)	90	30	40	125.700.000,00	50	126.957.000,00	60	127.287.088,00	80	127.618.035,00	100	127.975.365,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.631.300,00		50.905.078,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan (%)	80	30	40	50.000.000,00	60	50.500.000,00	70	50.631.300,00	80	50.631.300,00	100	50.905.078,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.040.600.000,00		1.051.006.000,00		1.053.738.616,00		1.056.478.336,00		1.059.436.475,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan serta PMKS lainnya di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	90	30	40	1.040.600.000,00	50	1.051.006.000,00	60	1.053.738.616,00	80	1.056.478.336,00	100	1.059.436.475,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	80	30	40	500.000.000,00	50	505.000.000,00	70	506.313.000,00	80	507.629.414,00	100	509.050.776,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	90	90	50.000.000,00	90	50.500.000,00	90	50.631.300,00	90	50.762.941,00	100	50.905.078,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.465.800.000,00		3.500.458.000,00		3.509.559.190,00		3.518.684.044,00		3.528.536.359,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.891.000.000,00		1.909.910.000,00		1.914.875.766,00		1.919.854.443,00		1.925.230.035,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.891.000.000,00	100	1.909.910.000,00	100	1.914.875.766,00	100	1.919.854.443,00	100	1.925.230.035,00	3.32.2.07.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	83,52	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	3.32.2.07.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.010.400.000,00		1.020.504.000,00		1.023.157.310,00		1.025.817.519,00		1.028.689.808,00	
Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dalam Negeri Hasil Pelatihan Kerja (%)	100	100	100	1.010.400.000,00	100	1.020.504.000,00	100	1.023.157.310,00	100	1.025.817.519,00	100	1.028.689.808,00	3.32.2.07.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dalam Negeri dan Melalui Mekanisme Layanan Antar Lintas Kerja Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	101.000.000,00	100	101.262.600,00	100	101.525.883,00	100	101.810.155,00	3.32.2.07.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					414.400.000,00		418.544.000,00		419.632.214,00		420.723.258,00		421.901.283,00	
Persentase peselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) pada tahun anggaran (%)	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	100	100	100	414.400.000,00	100	418.544.000,00	100	419.632.214,00	100	420.723.258,00	100	421.901.283,00	3.32.2.07.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.378.700.000,00		3.412.587.000,00		3.421.459.726,00		3.430.355.521,00		3.439.960.517,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.753.300.000,00		1.770.833.000,00		1.775.437.166,00		1.780.053.302,00		1.785.037.452,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.753.300.000,00	100	1.770.833.000,00	100	1.775.437.166,00	100	1.780.053.302,00	100	1.785.037.452,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					483.400.000,00		488.234.000,00		489.503.408,00		490.776.117,00		492.150.290,00	
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di tingkat daerah	Persentase PerangkatDdaerah yang Menerapkan PUG melalui Strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (%)	0	0	18	483.400.000,00	18	488.234.000,00	18	489.503.408,00	20	490.776.117,00	23	492.150.290,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					266.400.000,00		269.064.000,00		269.763.566,00		270.464.952,00		271.222.254,00	
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan melalui pencegahan, pelayanan, dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tercatat di Kabupaten/kota (%)	100	100	100	266.400.000,00	100	269.064.000,00	100	269.763.566,00	100	270.464.952,00	100	271.222.254,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					500.000.000,00		505.100.000,00		506.413.260,00		507.729.934,00		509.151.578,00	
Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Akses pada Layanan Berbasis Kesetaraan Gender (%)	0,37	0	0,37	500.000.000,00	0,37	505.100.000,00	0,37	506.413.260,00	0,37	507.729.934,00	0,37	509.151.578,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak dalam Pembangunan Daerah (%)	23	0	23	100.000.000,00	23	101.000.000,00	23	101.262.600,00	23	101.525.883,00	23	101.810.155,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					125.300.000,00		126.553.000,00		126.882.038,00		127.211.931,00		127.568.125,00	
Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui penguatan kelembagaan dan penyediaan layanan yang ramah anak di tingkat daerah	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang Menerapkan Prinsip Pemenuhan Hak Anak (%)	26	10	10	125.300.000,00	10	126.553.000,00	10	126.882.038,00	10	127.211.931,00	10	127.568.125,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					150.300.000,00		151.803.000,00		152.197.688,00		152.593.402,00		153.020.663,00	
Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui pencegahan, layanan, dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah	Persentase penurunan jumlah kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	100	100	100	150.300.000,00	100	151.803.000,00	100	152.197.688,00	100	152.593.402,00	100	153.020.663,00	2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.650.000.000,00		1.666.500.000,00		1.670.832.900,00		1.675.177.066,00		1.679.867.561,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Cadangan Pangan (%)	26,18	26,28	26,38	500.000.000,00	26,48	505.000.000,00	26,58	506.313.000,00	26,68	507.629.414,00	26,78	509.050.776,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	69	70	71	1.000.000.000,00	73	1.010.000.000,00	75	1.012.626.000,00	77	1.015.258.828,00	79	1.018.101.552,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	28,48	27	26	100.000.000,00	24	101.000.000,00	22	101.262.600,00	20	101.525.883,00	18	101.810.155,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	0	20	40	500.000.000,00	60	505.000.000,00	80	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	7,89	7,89	10,53		13,16		15,79		18,42		21,05		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Tanah Pemda yang Tersertifikasi (%)	0	23,17	32,82		42,47		52,12		61,78		71,43		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (%)	0	7,14	14,29		21,43		28,57		35,71		42,86		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					5.063.300.000,00		5.113.933.000,00		5.127.229.226,00		5.140.560.022,00		5.154.953.590,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.283.300.000,00		2.306.133.000,00		2.312.128.946,00		2.318.140.481,00		2.324.631.274,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.283.300.000,00	100	2.306.133.000,00	100	2.312.128.946,00	100	2.318.140.481,00	100	2.324.631.274,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	10	10	20	100.000.000,00	20	101.000.000,00	20	101.262.600,00	20	101.525.883,00	20	101.810.155,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,33	71,20	71,40	500.000.000,00	71,60	505.000.000,00	71,80	506.313.000,00	72,00	507.629.414,00	72,20	509.050.776,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	95,32	90,24	90,44		90,64		90,84		91,04		91,24		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	15	20	20	500.000.000,00	30	505.000.000,00	30	506.313.000,00	30	507.629.414,00	30	509.050.776,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	10	10	10	500.000.000,00	15	505.000.000,00	15	506.313.000,00	20	507.629.414,00	20	509.050.776,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	100	99	98	50.000.000,00	97	50.500.000,00	96	50.631.300,00	95	50.762.941,00	94	50.905.078,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	0	15	20	50.000.000,00	30	50.500.000,00	40	50.631.300,00	50	50.762.941,00	60	50.905.078,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					200.000.000,00		202.000.000,00		202.525.200,00		203.051.766,00		203.620.310,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	5	10	10	200.000.000,00	20	202.000.000,00	30	202.525.200,00	40	203.051.766,00	50	203.620.310,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	15	15	16	50.000.000,00	17	50.500.000,00	18	50.631.300,00	19	50.762.941,00	20	50.905.078,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					780.000.000,00		787.800.000,00		789.848.280,00		791.901.886,00		794.119.211,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	23,27	24	25	780.000.000,00	30	787.800.000,00	35	789.848.280,00	40	791.901.886,00	50	794.119.211,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.857.800.000,00		3.896.378.000,00		3.906.508.582,00		3.916.665.504,00		3.927.632.169,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.971.700.000,00		3.001.417.000,00		3.009.220.684,00		3.017.044.658,00		3.025.492.383,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.971.700.000,00	100	3.001.417.000,00	100	3.009.220.684,00	100	3.017.044.658,00	100	3.025.492.383,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					245.700.000,00		248.157.000,00		248.802.208,00		249.449.094,00		250.147.551,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase cakupan perekaman KTP-EI (%)	99,2	99,4	99,5	245.700.000,00	99,6	248.157.000,00	99,7	248.802.208,00	99,8	249.449.094,00	99,9	250.147.551,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) terhadap Total Perekaman di Daerah (%)	0	30	35		40		45		50		55		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk Anak Usia 0 - Kurang dari 17 Tahun (%)	0	60	65		70		75		80		82		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					540.400.000,00		545.804.000,00		547.223.090,00		548.645.870,00		550.182.079,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran pada Penduduk Usia 0-18 tahun (%)	0	97	97,3	540.400.000,00	97,6	545.804.000,00	98	547.223.090,00	98,3	548.645.870,00	98,5	550.182.079,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Akte Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	0	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan yang Diperlukan OPD sesuai dengan SOP Kerjasama Pemanfaatan Data (%)	50	50	55	50.000.000,00	60	50.500.000,00	65	50.631.300,00	70	50.762.941,00	75	50.905.078,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Penyelesaian Penyusunan Profil Data Kependudukan Berskala Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.332.700.000,00		4.376.027.000,00		4.387.404.670,00		4.398.811.923,00		4.411.128.595,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.582.700.000,00		2.608.527.000,00		2.615.309.170,00		2.622.108.974,00		2.629.450.879,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.582.700.000,00	100	2.608.527.000,00	100	2.615.309.170,00	100	2.622.108.974,00	100	2.629.450.879,00	1.06.2.13.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					100.000.000,00		102.500.000,00		103.156.500,00		103.814.707,00		104.525.388,00	
Meningkatnya fasilitasi penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	0	0	12	100.000.000,00	19	102.500.000,00	25	103.156.500,00	31	103.814.707,00	37	104.525.388,00	1.06.2.13.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					150.000.000,00		154.000.000,00		155.050.400,00		156.103.531,00		157.240.621,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya desa yang melaksanakan Kerjasama antar desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama (%)	0	0	12	150.000.000,00	19	154.000.000,00	25	155.050.400,00	31	156.103.531,00	37	157.240.621,00	1.06.2.13.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					500.000.000,00		501.000.000,00		501.262.600,00		501.525.883,00		501.810.155,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	0	100	100	500.000.000,00	100	501.000.000,00	100	501.262.600,00	100	501.525.883,00	100	501.810.155,00	1.06.2.13.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	0	100	100	1.000.000.000,00	100	1.010.000.000,00	100	1.012.626.000,00	100	1.015.258.828,00	100	1.018.101.552,00	1.06.2.13.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.584.300.000,00		3.620.143.000,00		3.629.555.372,00		3.638.992.216,00		3.649.181.393,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					295.800.000,00		298.758.000,00		299.534.771,00		300.313.561,00		301.154.439,00	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Cakupan Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga (%)	80	30	40	295.800.000,00	50	298.758.000,00	75	299.534.771,00	90	300.313.561,00	100	301.154.439,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.256.900.000,00		2.279.469.000,00		2.285.395.619,00		2.291.337.648,00		2.297.753.393,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%)	80	40	60	2.256.900.000,00	75	2.279.469.000,00	80	2.285.395.619,00	90	2.291.337.648,00	100	2.297.753.393,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.031.600.000,00		1.041.916.000,00		1.044.624.982,00		1.047.341.007,00		1.050.273.561,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	80	30	50	1.031.600.000,00	60	1.041.916.000,00	75	1.044.624.982,00	90	1.047.341.007,00	100	1.050.273.561,00	2.08.2.14.1.06.01.0000 - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.192.700.000,00		5.244.627.000,00		5.258.263.030,00		5.271.934.514,00		5.286.695.930,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.842.700.000,00		3.881.127.000,00		3.891.217.930,00		3.901.335.097,00		3.912.258.835,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.842.700.000,00	100	3.881.127.000,00	100	3.891.217.930,00	100	3.901.335.097,00	100	3.912.258.835,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					850.000.000,00		858.500.000,00		860.732.100,00		862.970.003,00		865.386.319,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (%)	23,80	27,30	30,80	850.000.000,00	32,20	858.500.000,00	34,30	860.732.100,00	35,70	862.970.003,00	37,80	865.386.319,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	36,23	39,97	42,59		45,21		47,83		50,45		53,07		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (%)	0,15	0,15	0,16		0,17		0,18		0,19		0,20		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	11,11	11,11	16,67	500.000.000,00	16,67	505.000.000,00	16,67	506.313.000,00	16,67	507.629.414,00	16,67	509.050.776,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2.943.400.000,00		2.972.834.000,00		2.980.563.368,00		2.988.312.834,00		2.996.680.108,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.243.400.000,00		2.265.834.000,00		2.271.725.168,00		2.277.631.654,00		2.284.009.022,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.243.400.000,00	100	2.265.834.000,00	100	2.271.725.168,00	100	2.277.631.654,00	100	2.284.009.022,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					200.000.000,00		202.000.000,00		202.525.200,00		203.051.766,00		203.620.310,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey) (%)	9	9,5	10	200.000.000,00	15	202.000.000,00	20	202.525.200,00	25	203.051.766,00	30	203.620.310,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	2,42	2,44	2,47	500.000.000,00	2,50	505.000.000,00	2,55	506.313.000,00	2,57	507.629.414,00	2,60	509.050.776,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.725.500.000,00		5.782.755.000,00		5.797.790.163,00		5.812.504.417,00		5.829.140.438,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.000.500.000,00		4.040.505.000,00		4.051.010.313,00		4.061.542.940,00		4.072.915.260,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.000.500.000,00	100	4.040.505.000,00	100	4.051.010.313,00	100	4.061.542.940,00	100	4.072.915.260,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	80,36	12,87	14,04	50.000.000,00	15,20	50.500.000,00	16,37	50.631.300,00	17,54	50.762.941,00	18,71	50.905.078,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	80,36	9,94	11,11	50.000.000,00	12,28	50.500.000,00	13,45	50.631.300,00	14,62	50.762.941,00	15,79	50.905.078,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.269.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	53,57	11,70	17,54	500.000.000,00	23,39	505.000.000,00	29,24	506.313.000,00	35,09	507.269.414,00	40,94	509.050.776,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					125.000.000,00		126.250.000,00		126.578.250,00		126.907.353,00		127.262.694,00	
Meningkatnya produktifitas koperasi	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (%)	53,57	9,94	11,11	125.000.000,00	12,28	126.250.000,00	13,45	126.578.250,00	14,62	126.907.353,00	15,79	127.262.694,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kapasitas Usaha mikro yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	43,29	43,81	44,15	500.000.000,00	47,91	505.000.000,00	49,97	506.313.000,00	53,39	507.629.414,00	56,13	509.050.776,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)	12,65	15,81	17,39	500.000.000,00	18,98	505.000.000,00	20,56	506.313.000,00	22,14	507.629.414,00	23,72	509.050.776,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.914.000.000,00		2.943.140.000,00		2.950.792.164,00		2.958.464.223,00		2.966.747.923,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.744.000.000,00		1.761.440.000,00		1.766.019.744,00		1.770.611.395,00		1.775.569.107,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.744.000.000,00	100	1.761.440.000,00	100	1.766.019.744,00	100	1.770.611.395,00	100	1.775.569.107,00	2.18.2.07.3.32.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					120.000.000,00		121.200.000,00		121.515.120,00		121.831.059,00		122.172.186,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya promosi daerah yang dikembangkan dan diseminasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	121.200.000,00	100	121.515.120,00	100	121.831.059,00	100	122.172.186,00	2.18.2.07.3.32.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Ijin sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	500.000.000,00	100	505.000.000,00	100	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	2.18.2.07.3.32.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pelaku usaha	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	500.000.000,00	100	505.000.000,00	100	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	2.18.2.07.3.32.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya data investasi yang terverikasi dan terkini	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	2.18.2.07.3.32.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					4.850.000.000,00		4.898.500.000,00		4.911.236.100,00		4.924.005.314,00		4.937.792.529,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.000.000.000,00		2.020.000.000,00		2.025.252.000,00		2.030.517.655,00		2.036.203.105,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.020.000.000,00	100	2.025.252.000,00	100	2.030.517.655,00	100	2.036.203.105,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Tata Kelola Keuangan dan Aset, serta Tata Kelola Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya proses fasilitasi potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda	Persentase Peningkatan Kemandirian, Penguatan Karakter, dan Kontribusi Pemuda terhadap Pembangunan (%)	2	3	4	100.000.000,00	5	101.000.000,00	6	101.262.600,00	7	101.525.883,00	8	101.810.155,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.700.000.000,00		2.727.000.000,00		2.734.090.200,00		2.741.198.835,00		2.748.874.191,00	
Meningkatnya pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi olahraga	Presentase Meningkatnya Tata Kelola Olahraga (%)	60	65	70	2.700.000.000,00	75	2.727.000.000,00	80	2.734.090.200,00	85	2.741.198.835,00	90	2.748.874.191,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	30	40	50	50.000.000,00	60	50.500.000,00	70	50.631.300,00	80	50.762.941,00	90	50.905.078,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.413,00		509.050.777,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.413,00		509.050.777,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistk (IPS) (Indeks)	2,52	2,57	2,6	500.000.000,00	2,9	505.000.000,00	3,2	506.313.000,00	3,4	507.629.413,00	3,6	509.050.777,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					70.000.000,00		70.700.000,00		70.883.820,00		71.068.118,00		71.267.109,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					70.000.000,00		70.700.000,00		70.883.820,00		71.068.118,00		71.267.109,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	0	0	1	70.000.000,00	2	70.700.000,00	3	70.883.820,00	4	71.068.118,00	5	71.267.109,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (%)	40	45	50	500.000.000,00	55	505.000.000,00	60	506.313.000,00	65	507.629.414,00	70	509.050.776,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					250.000.000,00		252.500.000,00		253.156.500,00		253.814.707,00		254.525.388,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	252.500.000,00	100	253.156.500,00	100	253.814.707,00	100	254.525.388,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	100	1.001	100	100.000.000,00	100	101.000.000,00	100	101.262.600,00	100	101.525.883,00	100	101.810.155,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					150.000.000,00		151.500.000,00		151.893.900,00		152.288.824,00		152.715.233,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	151.500.000,00	100	151.893.900,00	100	152.288.824,00	100	152.715.233,00	2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		2.22.2.19.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.650.000.000,00		3.686.500.000,00		3.696.084.900,00		3.705.694.721,00		3.716.070.665,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.550.000.000,00		2.575.500.000,00		2.582.196.300,00		2.588.910.010,00		2.596.158.958,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100		2.550.000.000,00		2.575.500.000,00		2.582.196.300,00		2.588.910.010,00		2.596.158.958,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan gerakan budaya gemar membaca	Persentase Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	56,55	57,12	58,10	1.000.000.000,00	59,34	1.010.000.000,00	60,21	1.012.626.000,00	61,87	1.015.258.828,00	62,01	1.018.101.552,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	0	100	100	100.000.000,00	100	101.000.000,00	100	101.262.600,00	100	101.525.883,00	100	101.810.155,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					248.000.000,00		249.980.000,00		251.131.248,00		251.784.189,00		252.489.185,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					98.000.000,00		98.980.000,00		99.237.348,00		99.495.365,00		99.773.952,00	
Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	0	0	100	98.000.000,00	100	98.980.000,00	100	99.237.348,00	100	99.495.365,00	100	99.773.952,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai ANRI	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	0	0	100	100.000.000,00	100	101.000.000,00	100	101.262.600,00	100	101.525.883,00	100	101.810.155,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	0	0	100		100		100		100		100		2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					50.000.000,00		50.000.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya perizinan dan penggunaan arsip kabupaten	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	0	0	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	2.24.2.23.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.100.000.000,00		6.161.000.000,00		6.177.018.600,00		6.193.078.849,00		6.210.419.469,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.000.000.000,00		3.030.000.000,00		3.037.878.000,00		3.045.776.483,00		3.054.304.657,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.000.000.000,00	100	3.030.000.000,00	100	3.037.878.000,00	100	3.045.776.483,00	100	3.054.304.657,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					2.000.000.000,00		2.020.000.000,00		2.025.252.000,00		2.030.517.655,00		2.036.203.105,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	80,00	80,00	80,88	2.000.000.000,00	83,56	2.020.000.000,00	84,00	2.025.252.000,00	84,33	2.030.517.655,00	84,75	2.036.203.105,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	0,4	0,5	0,6	500.000.000,00	0,7	505.000.000,00	0,8	506.313.000,00	0,10	507.629.414,00	0,11	509.050.776,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan Produksi Perikanan (%)	80,4	80,5	81,50	100.000.000,00	84,30	101.000.000,00	84,8	101.262.600,00	84,5	101.525.883,00	84,8	101.810.155,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan (%)	100	100	100	500.000.000,00	100	505.000.000,00	100	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.800.000.000,00		3.838.000.000,00		3.847.978.800,00		3.857.983.545,00		3.868.785.899,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.000.000.000,00		2.020.000.000,00		2.025.252.000,00		2.030.517.655,00		2.036.203.105,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.020.000.000,00	100	2.025.252.000,00	100	2.030.517.655,00	100	2.036.203.105,00	2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					800.000.000,00		808.000.000,00		810.100.800,00		812.207.062,00		814.481.242,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3,33	4,35	5,95	800.000.000,00	6,18	808.000.000,00	6,35	810.100.800,00	6,97	812.207.062,00	7,59	814.481.242,00	2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	0	20	40	500.000.000,00	60	505.000.000,00	80	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					250.000.000,00		252.500.000,00		253.156.500,00		253.814.707,00		254.525.388,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0	19,35	38,71	250.000.000,00	58,06	252.500.000,00	77,42	253.156.500,00	100	253.814.707,00	100	254.525.388,00	2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					250.000.000,00		252.500.000,00		253.156.500,00		253.814.707,00		254.525.388,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0	19,35	38,71	250.000.000,00	58,06	252.500.000,00	77,42	253.156.500,00	100	253.814.707,00	100	254.525.388,00	2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					24.500.000.000,00		24.896.620.000,00		25.511.251.212,00		24.582.942.532,00		25.151.234.771,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.000.000.000,00		15.150.000.000,00		15.189.390.000,00		15.228.882.414,00		15.271.523.285,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	15.000.000.000,00	100	15.150.000.000,00	100	15.189.390.000,00	100	15.228.882.414,00	100	15.271.523.285,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.700.000.000,00		2.727.000.000,00		3.284.090.200,00		3.292.628.835,00		3.801.848.195,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi Tanaman Pangan (Ton)	40.309	41.115	41.937	2.700.000.000,00	42.775	2.727.000.000,00	44.452	3.284.090.200,00	45.341	3.292.628.835,00	47.119	3.801.848.195,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Hortikultura (Ton)	93	95	100		105		110		115		120		3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	176,587	180	200		225		250		275		300		3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Perkebunan (Ton)	4.649	4.741	4.835		5.024		5.310		5.696		5.809		3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					5.150.000.000,00		5.353.000.000,00		5.366.917.800,00		4.386.133.593,00		4.398.414.767,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Proporsi Areal Pertanian Produktif dan Berkelanjutan (%)	38,75	40	41	5.150.000.000,00	42	5.353.000.000,00	43	5.366.917.800,00	44	4.386.133.593,00	45	4.398.414.767,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					600.000.000,00		606.120.000,00		607.695.912,00		609.275.921,00		610.981.894,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatn masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	-12,10	-11	-10	600.000.000,00	-9	606.120.000,00	-7	607.695.912,00	-6	609.275.921,00	-5	610.981.894,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					150.000.000,00		151.500.000,00		151.893.900,00		152.288.824,00		152.175.233,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	50	60	65	150.000.000,00	70	151.500.000,00	75	151.893.900,00	80	152.288.824,00	85	152.175.233,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	0	0	100	100.000.000,00	100	101.000.000,00	100	101.262.600,00	100	101.525.883,00	100	101.810.155,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					800.000.000,00		808.000.000,00		810.000.800,00		812.207.062,00		814.481.242,00	
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kemampuan Kelompok Tani (%)	0	5	5	800.000.000,00	5	808.000.000,00	5	810.000.800,00	5	812.207.062,00	5	814.481.242,00	3.27.2.09.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.050.000.000,00		2.070.500.000,00		2.075.883.300,00		2.081.280.597,00		2.087.108.182,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	100	100	100	500.000.000,00	100	505.000.000,00	100	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.000.000.000,00		1.010.000.000,00		1.012.626.000,00		1.015.258.828,00		1.018.101.552,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	80	80	80	1.000.000.000,00	80	1.010.000.000,00	80	1.012.626.000,00	80	1.015.258.828,00	80	1.018.101.552,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap penggunaan alat UTP sesuai ketentuan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	7,93	8,43	9,58	500.000.000,00	10,15	505.000.000,00	10,73	506.313.000,00	11,11	507.629.414,00	11,49	509.050.776,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.650.000.000,00		1.666.500.000,00		1.620.201.624,00		1.624.414.148,00		1.628.962.508,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.500.000.000,00		1.515.000.000,00		1.468.307.724,00		1.472.125.324,00		1.476.247.275,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Dibina, Didampingi dan Difasilitasi (%)	10,11	11,01	11,62	1.500.000.000,00	13,07	1.515.000.000,00	13,49	1.468.307.724,00	14,36	1.472.125.324,00	15,23	1.476.247.275,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya pengendalian ijin usaha industri kabupaten	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dilakukan oleh Instansi Terkait (%)	24,00	32,00	32,25	100.000.000,00	32,28	101.000.000,00	35,89	101.262.600,00	37,77	101.525.883,00	40,00	101.810.155,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini (%)	12	15	19	50.000.000,00	25	50.500.000,00	32	50.631.300,00	40	50.762.941,00	45	50.905.078,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					57.500.000,00		58.075.000,00		58.225.995,00		58.377.383,00		58.540.839,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					57.500.000,00		58.075.000,00		58.225.995,00		58.377.383,00		58.540.839,00	
Meningkatnya produktivitas transmigran dalam kawasan transmigrasi	Persentase Transmigrasi yang Mendapatkan Pelatihan (%)	100	100	100	57.500.000,00	100	58.075.000,00	100	58.225.995,00	100	58.377.383,00	100	58.540.839,00	3.32.2.07.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					20.597.000.000,00		20.802.970.000,00		20.857.057.722,00		20.911.286.071,00		20.969.837.673,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.600.000.000,00		18.786.000.000,00		18.834.843.600,00		18.883.814.193,00		18.936.688.873,00	
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Indeks Kematangan Organisasi (%)	34,80	36,00	37,00	325.000.000,00	38,00	325.750.000,00	39,00	325.946.950,00	40,00	326.146.690,00	41,00	223.105.793,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Instansi Pemerintah dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik	77,55	77,85	78,00		78,20		78,40		78,60		78,80		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kategori Baik (Nilai)													
	Indeks Pelayanan Publik (%)	3,33	3,50	3,70		3,90		4,10		4,20		4,30		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (%)	41,03	51,28	64,10		76,92		89,74		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	18.275.000.000,00	100	18.460.250.000,00	100	18.508.896.650,00	100	18.557.667.503,00	100	18.713.583.080,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.675.000.000,00		1.691.750.000,00		1.696.148.550,00		1.700.558.536,00		1.705.320.100,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	2,95	3,15	3,35	1.450.000.000,00	3,55	1.466.750.000,00	3,75	1.471.148.550,00	3,95	1.497.500.695,00	4,00	1.500.227.619,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	80	100	100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	90	90	90		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
Meningkatnya kualitas produk hukum	Indeks Reformasi Hukum (%)	76,02	77,00	82,00	225.000.000,00	85,00	225.000.000,00	90,00	225.000.000,00	90,00	203.057.841,00	100	205.092.481,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	100	100	100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					322.000.000,00		325.220.000,00		326.065.572,00		326.913.342,00		327.828.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Nilai)	22,22	22,22	26,67	154.461.585,00	31,11	152.181.889,00	35,56	152.577.562,00	35,56	152.978.841,00	40,00	152.150.865,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (Nilai)	12,00	15,00	15,00		15,00		30,00		30,00		30,00		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) (%)	90,27	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Nilai)	14,62	24,61	25,61		26,61		28,61		29		30		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	80	100	100	167.538.415,00	100	173.038.111,00	100	173.488.010,00	100	173.934.501,00	100	175.677.835,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	80	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					23.610.000.000,00		23.846.100.000,00		23.908.099.860,00		23.970.260.919,00		24.037.377.650,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.640.000.000,00		18.826.400.000,00		18.875.348.640,00		18.924.424.546,00		18.977.412.935,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	18.640.000.000,00	100	18.826.400.000,00	100	18.875.348.640,00	100	18.924.424.546,00	100	18.977.412.935,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					4.970.000.000,00		5.019.700.000,00		5.032.751.220,00		5.045.836.373,00		5.059.964.715,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan serta penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	4.970.000.000,00	100	5.019.700.000,00	100	5.032.751.220,00	100	5.045.836.373,00	100	5.059.964.715,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5.01 - PERENCANAAN					4.819.633.543,00		4.854.221.546,00		4.856.986.323,00		4.869.614.487,00		4.883.249.408,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.671.000.000,00		3.707.710.000,00		3.717.350.046,00		3.727.015.156,00		3.737.450.798,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.671.000.000,00		3.707.710.000,00		3.717.350.046,00		3.727.015.156,00		3.737.450.798,00	5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	0	100	100	500.000.000,00	100	505.000.000,00	100	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (%)	0	100	100		100		100		100		5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	0	100	100		100		100		100		5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					648.633.543,00		641.511.546,00		633.323.277,00		634.969.917,00		636.747.834,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	0	100	100	216.211.181,00	100	213.837.182,00	100	211.107.759,00	100	211.656.639,00	100	212.249.278,00	5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	0	100	100	216.211.181,00	100	213.837.182,00	100	211.107.759,00	100	211.656.639,00	100	212.249.278,00	5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	0	100	100	216.211.181,00	100	213.837.182,00	100	211.107.759,00	100	211.656.639,00	100	212.249.278,00	5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					232.045.000.000,00		234.365.450.000,00		234.974.800.170,00		235.585.734.650,00		236.245.374.707,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.850.000.000,00		51.358.500.000,00		51.492.032.100,00		51.625.911.383,00		51.770.463.935,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	46.380.000.000,00	100	46.843.800.000,00	100	46.965.593.880,00	100	47.087.704.424,00	100	47.219.549.996,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.470.000.000,00	100	4.514.700.000,00	100	4.526.438.220,00	100	4.538.206.959,00	100	4.550.913.939,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					179.800.000.000,00		181.598.000.000,00		182.070.154.800,00		182.543.537.202,00		183.054.659.107,00	
Meningkatnya tatakelola akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu (%)	100	100	100	704.409.928,00	100	709.007.667,00	100	708.430.923,00	100	709.262.148,00	100	711.155.442,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tatakelola anggaran d'aerah	Persentase SKPD yang Menyusun Rencana Anggaran sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	973.277.152,00	100	998.284.500,00	100	996.095.000,00	100	997.942.000,00	100	1.006.479.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tatakelola perbendaharaan daerah	Persentase Penurunan SILPA (%)	100	10	10	178.122.312.920,00	20	179.890.707.833,00	20	180.365.628.877,00	20	180.836.333.054,00	20	181.337.024.665,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					500.000.000,00		505.000.000,00		506.313.000,00		507.629.414,00		509.050.776,00	
Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	Persentase Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu (%)	100	100	100	500.000.000,00	100	505.000.000,00	100	506.313.000,00	100	507.629.414,00	100	509.050.776,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					895.000.000,00		903.950.000,00		906.300.270,00		908.656.651,00		911.200.889,00	
Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	100	100	100	895.000.000,00	100	903.950.000,00	100	906.300.270,00	100	908.656.651,00	100	911.200.889,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.499.974.498,00		5.555.000.001,00		5.574.782.249,00		5.589.395.473,00		5.624.907.195,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.800.000.000,00		3.838.000.000,00		3.847.977.800,00		3.857.983.545,00		3.868.785.899,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.800.000.000,00	100	3.838.000.000,00	100	3.847.977.800,00	100	3.857.983.545,00	100	3.868.785.899,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.699.974.498,00		1.717.000.001,00		1.726.804.449,00		1.731.411.928,00		1.756.121.296,00	
Terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian ASN yang profesional, terstruktur, dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian (%)	87,25	87,59	89,98	1.699.974.498,00	92,44	1.717.000.001,00	94,96	1.726.804.449,00	97,48	1.731.411.928,00	97,48	1.756.121.296,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase ASN yang Meningkatkan Kinerjanya (%)	87,25	87,59	89,98		92,44		94,96		97,48		97,48		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase ASN yang Memiliki SKP dan Dinilai Tiap Periode (%)	87,25	87,59	89,98		92,44		94,96		97,48		97,48		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian ASN yang profesional, terstruktur, dan berkualitas	Persentase Formasi Jabatan yang Terisi Sesuai Kompetensi (%)	87,25	87,59	89,98		92,44		94,96		97,48		97,48		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Jabatan ASN yang Diisi Sesuai Kompetensi (%)	87,25	87,59	89,98		92,44		94,96		97,48		97,48		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Rekomendasi Hukuman Disiplin yang Dijalankan (%)	87,25	87,59	89,98		92,44		94,96		97,48		97,48		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase ASN Pensiun yang Dokumennya Lengkap dan Tepat Waktu (%)	87,25	87,59	89,98		92,44		94,96		97,48		97,48		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (%)	73,03	74,59	75,81		77,20		78,59		79,98		80,00		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase Unsur NSPK yang telah Mencapai Standar (%)	87,25	87,59	89,98		92,44		94,96		97,48		97,48		5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					250.000.000,00		252.500.000,00		253.156.500,00		253.814.707,00		254.525.388,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					150.000.000,00		151.500.000,00		151.893.900,00		152.288.824,00		152.715.233,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kajian Kelitbangan Berbasis Bukti yang Dimanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	0	80	80	150.000.000,00	80	151.500.000,00	80	151.893.900,00	80	152.288.824,00	80	152.715.233,00	5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					100.000.000,00		101.000.000,00		101.262.600,00		101.525.883,00		101.810.155,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	0	80	80	100.000.000,00	80	101.000.000,00	80	101.262.600,00	80	101.525.883,00	80	101.810.155,00	5.01.5.05.5.03.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.030.000.000,00		9.120.300.000,00		9.144.012.780,00		9.167.787.213,00		9.173.457.017,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.300.000.000,00		7.373.000.000,00		7.392.169.800,00		7.411.389.442,00		7.432.141.332,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.300.000.000,00	100	7.373.000.000,00	100	7.392.169.800,00	100	7.411.389.442,00	100	7.432.141.332,00	6.01.5.03.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.500.000.000,00		1.515.000.000,00		1.518.939.000,00		1.522.888.241,00		1.527.152.328,00	
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan anggaran, proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Menindaklajuti Rekomendasi APIP TA. N-1 (%)	100	100	100	1.500.000.000,00	100	1.515.000.000,00	100	1.518.939.000,00	100	1.522.888.241,00	100	1.527.152.328,00	6.01.5.03.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					230.000.000,00		232.300.000,00		232.903.980,00		233.509.530,00		214.163.357,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Mendapat Layanan Pendampingan dan Asistensi	90	90	100	230.000.000,00	100	232.300.000,00	100	232.903.980,00	100	233.509.530,00	100	214.163.357,00	6.01.5.03.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN					28.956.125.500,00		30.745.161.000,00		30.820.259.573,00		30.900.406.012,00		30.986.933.714,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.478.020.000,00		24.202.800.200,00		24.260.387.335,00		24.323.478.120,00		24.391.590.399,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.050.000.000,00	100	2.070.500.000,00	100	2.075.883.300,00	100	2.081.280.597,00	100	2.087.108.182,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEBATUKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.605.000.000,00	100	1.621.050.000,00	100	1.625.264.730,00	100	1.629.490.420,00	100	1.634.052.990,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN OMESURI
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.300.000.000,00	100	2.323.000.000,00	100	2.329.039.800,00	100	2.335.095.303,00	100	2.341.633.570,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN ATADEI
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.795.000.000,00	100	1.812.950.000,00	100	1.817.663.670,00	100	1.822.389.596,00	100	1.827.492.286,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN ILE APE
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.600.000.000,00	100	1.616.000.000,00	100	1.620.201.600,00	100	1.624.414.124,00	100	1.628.962.484,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN WULANDONI
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.600.000.000,00	100	1.616.000.000,00	100	1.620.201.600,00	100	1.624.414.124,00	100	1.628.962.484,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN ILE APE TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Perangkat Daerah (%)													
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.585.000.000,00	100	7.660.850.000,00	100	7.675.428.064,00	100	7.695.397.952,00	100	7.716.951.613,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NUBATUKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.780.020.000,00	100	3.297.820.200,00	100	3.306.394.533,00	100	3.314.991.160,00	100	3.324.273.132,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BUYASURI
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	2.163.000.000,00	100,00	2.184.630.000,00	100,00	2.190.310.038,00	100,00	2.196.004.844,00	100,00	2.202.153.658,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN NAGAWUTUNG
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.385.080.000,00		1.398.930.800,00		1.402.568.020,00		1.406.214.697,00		1.410.152.097,00	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	115.000.000,00	100	116.150.000,00	100	116.451.990,00	100	116.754.765,00	100	117.081.679,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEBATUKAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	110.000.000,00	100	111.100.000,00	100	111.388.860,00	100	111.678.471,00	100	111.991.171,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN ATADEI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100	100	100	110.000.000,00	100	111.100.000,00	100	111.388.860,00	100	111.678.471,00	100	111.991.171,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN ILE APE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pelayanan Publik (%)													
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	121.200.000,00	100	121.515.120,00	100	121.831.059,00	100	122.172.186,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN WULANDONI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	122.000.000,00	100	123.220.000,00	100	123.540.372,00	100	123.861.577,00	100	124.208.389,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN ILE APE TIMUR
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	121.200.000,00	100	121.515.120,00	100	121.831.059,00	100	122.172.186,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN OMESURI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	120.080.000,00	100	121.280.800,00	100	121.596.130,00	100	121.912.280,00	100	122.253.634,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BUYASURI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100,00	100,00	100,00	113.000.000,00	100,00	114.130.000,00	100,00	114.426.738,00	100,00	114.724.248,00	100,00	115.045.475,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN NAGAWUTUNG
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	455.000.000,00	100	459.550.000,00	100	460.744.830,00	100	461.942.767,00	100	463.236.206,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NUBATUKAN
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.743.025.500,00		3.779.930.000,00		3.790.259.118,00		3.800.113.788,00		3.810.754.114,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalm Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN ILE APE TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN ATADEI
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN ILE APE
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN WULANDONI
Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalm Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEBATUKAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN OMESURI
Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	3.343.025.500,00	100	3.376.430.000,00	100	3.385.208.718,00	100	3.394.010.260,00	100	3.403.513.490,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NUBATUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BUYASURI
Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.500.000,00	100,00	50.631.300,00	100,00	50.762.941,00	100,00	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN NAGAWUTUNG
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					450.000.000,00		454.500.000,00		455.681.700,00		456.866.469,00		458.145.702,00	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEBATUKAN
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN ATADEI
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN ILE APE
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN WULANDONI
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN ILE APE TIMUR
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NUBATUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN OMESURI
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BUYASURI
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.500.000,00	100,00	50.631.300,00	100,00	50.762.941,00	100,00	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN NAGAWUTUNG
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					450.000.000,00		454.500.000,00		455.681.700,00		456.866.469,00		458.145.702,00	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEBATUKAN
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN ATA DEI
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN ILE APE
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN WULANDONI
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN ILE APE TIMUR
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN OMESURI
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NUBATUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BUYASURI
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.500.000,00	100,00	50.631.300,00	100,00	50.762.941,00	100,00	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN NAGAWUTUNG
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					450.000.000,00		454.500.000,00		455.681.700,00		456.866.469,00		458.145.700,00	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.076,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEBATUKAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN OMESURI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN ATADEI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN ILE APE
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN WULANDONI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN ILE APE TIMUR
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NUBATUKAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN BUYASURI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina dan Terawasi (%)	100,00	100,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.500.000,00	100,00	50.631.300,00	100,00	50.762.941,00	100,00	50.905.078,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN NAGAWUTUNG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.847.000.000,00		4.895.470.000,00		4.915.862.479,00		5.638.122.458,00		28.049.387.522,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.182.000.000,00		2.203.820.000,00		2.209.549.932,00		2.215.294.762,00		2.221.497.587,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.182.000.000,00	100	2.203.820.000,00	100	2.209.549.932,00	100	2.215.294.762,00	100	2.221.497.587,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					120.000.000,00		121.200.000,00		121.515.120,00		121.831.059,00		122.172.186,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	120.000.000,00	100	121.200.000,00	100	121.515.120,00	100	121.831.059,00	100	122.172.186,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					950.000.000,00		959.500.000,00		961.994.700,00		1.673.971.217,00		24.074.136.658,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	950.000.000,00	100	959.500.000,00	100	961.994.700,00	100	1.673.971.217,00	100	24.074.136.658,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					50.000.000,00		50.500.000,00		50.631.300,00		50.762.941,00		50.905.078,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.500.000,00	100	50.631.300,00	100	50.762.941,00	100	50.905.078,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					520.000.000,00		525.200.000,00		526.568.927,00		527.941.412,00		529.419.648,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	520.000.000,00	100	525.200.000,00	100	526.568.927,00	100	527.941.412,00	100	529.419.648,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.025.000.000,00		1.035.250.000,00		1.045.602.500,00		1.048.321.067,00		1.051.256.365,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	1.025.000.000,00	100	1.035.250.000,00	100	1.045.602.500,00	100	1.048.321.067,00	100	1.051.256.365,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					851.799.853.542,0		860.693.156.701,00		863.169.201.335,80		865.937.986.366,22		890.827.792.155,46	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran, dan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 hingga tahun 2030 perlu ditetapkan kinerja dan indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan dan sasaran yang terseleksi.
- b. Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro daerah dan indikator kinerja kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029 hingga Tahun 2030 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,34	3,51-3,56	3,69-3,78	3,86-4,01	4,04-4,23	4,21-4,45	4,39-4,67
2	Pendapata perkapita	Juta Rp	15,73	16,89-17,36	18,04-18,99	19,20-20,63	20,35-22,26	21,51-23,89	22,66-25,52
3	Indeks Gini	Angka	0,316	0,310-0,313	0,305-0,310	0,299-0,308	0,294-0,305	0,288-0,302	0,283-0,299
4	Tingkat Inflasi	Persen	1,12	1,10-1,11	1,08-1,09	1,07-1,08	1,05-1,07	1,03-1,06	1.01-1,04
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,95	69,16-69,24	69,38-69,53	69,59-69,81	69,80-70,10	70,02-70,39	70,23-70,68
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	24,22	23,62-23,67	23,02-23,12	22,42-22,56	21,82-22,01	21,22-21,46	20,62-20,91
7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	Persen	NA	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	70,13	72,00	74,45	75,00	75,75	76,00	76,75
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	NA	0,10-0,11	0,12-0,13	0,14-0,16	0,16-0,19	0,18-0,22	0,20-0,24
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	126,2	122,5-124,97	118,96-123,72	115,33-122,47	111,70-121,23	108,07-119,98	104,44-118,73
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	53,04	53,61-53,85	54,18-54,66	54,75-55,46	55,32-56,27	55,89-57,08	56,46-57,89
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	52,83	60,4	64,25	67,38	69,89	71,7	73,8

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	70,11	71,06-71,53	72,00-72,96	72,95-74,38	73,90-75,80	74,85-77,23	75,79-78,65
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Persen	12,49	12,33	12,18	12,02	11,86	11,70	11,55
3	Daya Terpasang Listrik	Kwh/kapita	10.907	11.684	12.461	13.238	14.015	14.792	15.569
4	Jumlah Pelanggan Listrik	Pelanggan	42.917	45.203	47.489	49.774	52.060	54.346	56.632
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	78,11	78,68-79,15	79,24-80,19	79,81-81,24	80,37-82,28	80,94-83,32	81,51-84,36
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Angka	71,74	72,18-72,23	72,62-72,72	73,06-73,21	73,50-73,70	73,94-74,19	74,39-74,68
7	Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	56,06	56,54	57,13	57,85	58,43	59,28	60,20
8	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jaktranas	Persen	71,00	70,75	70,5	70,25	70,00	69,75	69,5
9	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	(Ton/Tahun)	15,05	15,09	15,14	15,18	15,22	15,26	15,31
10	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Persen	NA	0,10-0,11	0,12-0,13	0,14-0,16	0,16-0,19	0,18-0,22	0,20-0,24
11	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Angka	126,22	122,5-124,97	118,96-123,72	115,33-122,47	111,70-121,23	108,07-119,98	104,44-118,73
12	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54
13	Jumlah Penduduk	Jiwa	143.345	167.728	184.048	203.000	225.083	250.896	260.000
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,34	3,51-3,56	3,69-3,78	3,86-4,01	4,04-4,23	4,21-4,45	4,39-4,67
2	PDRB Perkapita	Rp juta	15,73	16,89-17,36	18,04-18,99	19,20-20,63	20,35-22,26	21,51-23,89	22,66-25,52
3	Pengeluaran per Kapita	Rp juta	8.238	8,425	8,650	8,875	9,100	9,325	9,550
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	24,22	23,62-23,67	23,02-23,12	22,42-22,56	21,82-22,01	21,22-21,46	20,62-20,91
5	Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,49	1,25-1,45	1,10-1,25	0,80-1,00	0,70-0,80	0,60-0,70	0,50-0,60
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,18	2,15-2,12	2,12-2,07	2,08-2,01	2,05-1,96	2,02-1,90	1,99-1,84

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Indeks Gini	Angka	0,316	0,310	0,305	0,299	0,294	0,288	0,283
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,95	69,16-69,24	69,38-69,53	69,59-69,81	69,80-70,10	70,02-70,39	70,23-70,68
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,35	73,57-73,67	73,79-73,98	74,01-74,30	74,24-74,62	74,46-74,93	74,68-75,25
10	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	6,80	7,61-7,57	7,32-7,24	7,02-6,90	6,73-6,57	6,44-6,24	6,15-5,91
12	Angka Kematian ibu	Persen	6,00	5,71	5,43	5,14	4,86	4,57	4,29
13	Prevalensi Kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada Anak Balita	Persen	15,81	13,73	11,64	9,56	7,47	5,39	3,30
14	Jumlah Balita Gizi Buruk / Wasting	Jiwa	625	550	476	401	326	251	177
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97,90	98,00	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50
16	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,27	8,42-8,45	8,58-8,63	8,73-8,80	8,89-8,98	9,04-9,16	9,19-9,34
17	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,50	12,54	12,58	12,62	12,66	12,70
18	Angka Literasi SMP	Persen	68,81	65,68-65,71	67,00-67,08	68,33-68,44	69,65-69,81	70,98-71,17	72,31-72,54
19	Angka Literasi SD	Persen	65,42	68,81-68,84	70,13-70,20	71,46-71,55	72,79-72,91	74,12-74,27	75,44-75,63
20	Angka Numerasi SMP	Persen	63,52	56,59-56,96	57,76-57,95	58,93-59,22	60,10-60,48	61,27-61,75	62,44-63,01
21	Angka Numerasi SD	Persen	56,59	63,52-63,56	64,68-64,75	65,84-65,95	67,00-67,15	68,16-68,35	69,31-69,54
22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	73,42	74,21	75,00	75,79	76,58	77,37	78,16
23	Indeks Literasi Digital	Angka	45,75	47,98	50,21	52,44	54,67	56,9	59,13
24	Proporsi Peserta Program Jamsostek	Persen	53,00	55,24	57,48	59,71	61,95	64,19	66,43
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	NA	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
26	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	74,47	75,43-75,45	76,39-76,44	77,35-77,42	78,31-78,41	79,27-79,39	80,23-80,38
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	53,04	53,61-53,85	54,18-54,66	54,75-55,46	55,32-56,27	55,89-57,08	56,46-57,89
28	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Angka	42,50	42,93	43,35	43,78	44,20	44,63	45,05
29	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	54,86	55,815	56,77	57,725	58,68	59,635	60,59
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	62,24	63,00-63,50	64,00-65,00	65,50-66,00	67,00-67,50	68,00-68,50	69,50-70,00
31	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Angka	72,46	73,61-73,64	74,54-74,81	75,48-75,87	76,41-76,93	77,34-77,99	78,27-70,06

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,747	0,739	0,730	0,722	0,713	0,705	0,696
33	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,70	91,86-91,90	92,01-92,11	92,17-92,31	92,33-92,52	92,49-92,72	92,64-92,93
34	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	55,33	56,34	57,39	58,43	59,47	60,52	61,56
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	Persen	65,48	64,95	64,42	63,89	63,36	62,83	62,30
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,23	0,36	0,49	0,63	0,76	0,89	1,02
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,22	0,30-0,35	0,39-0,48	0,47-0,62	0,56-0,75	0,64-0,88	0,73-1,01
4	Rasio Kewirausahaan	Persen	5,60	5,86-5,88	6,07-6,11	6,27-6,34	6,48-6,57	6,69-6,80	6,90-7,04
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	83,53	83,79-83,84	84,06-84,15	84,32-84,45	84,59-84,76	84,85-85,07	85,11-85,38
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	38,26	38,82	39,38	39,94	40,5	41,06	41,62
7	Jumlah Tamu Wisatawan Manca Negara	Jiwa	1,068	1.373	1.678	1.983	2.288	2.593	2.898
8	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik/ Nusantara (angka)	Jiwa	36.831	37.931	39.031	40.131	41.231	42.330	43.430
9	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	NA	67,03-67,10	67,85-68,00	68,68-68,89	69,50-69,79	70,32-70,68	71,14-71,58
10	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	Angka	5,33	5,54	5,75	5,96	6,17	6,38	6,59
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp	27,840	27,885	27,930	27,975	28,020	28,065	28,110
12	Eksport Barang dan Jasa	Rp	-47,760	-46,925	-46,090	-45,255	-44,420	-43,585	-42,750
13	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	8,16	8,34-8,39	8,53-8,62	8,71-8,85	8,89-9,08	9,07-9,31	9,26-9,54
14	Tingkat inflasi	Persen	1,12	1,10-1,11	1,08-1,09	1,07-1,08	1,05-1,07	1,03-1,06	1,01-1,04
15	Nilai Investasi	(juta Rp)	35,60	42,72	49,84	56,96	64,08	71,2	78,32
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	70,13	72,00	74,45	75,00	75,75	76,00	76,75
17	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	52,67	54,26-54,73	56,04-57,00	57,83-59,26	59,62-61,52	61,41-63,79	63,19-66,05
18	Rasio konektivitas	Persen	0,23	0,27	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38
19	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Persen	84,92	85,00	85,15	85,51	85,87	86,23	86,59
20	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,69	1,39	1,39-2,08	2,08-2,78	2,08-2,78	2,78-3,47	3,04-3,80

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	76,02	77,00	82,00	85,00	90,00	95,00	100
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,42	2,47-2,50	2,52-2,57	2,57-2,65	2,63-2,72	2,68-2,80	2,73-2,87
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Angka)	Angka	2,4	2,5	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	52,83	60,40	64,25	67,38	69,89	71,70	73,80
5	Nilai Reformasi Birokrasi General	Angka	46,63	52,2	55,45	58,36	60,64	61,65	62,8
6	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Angka	6,2	8,2	8,8	9,02	9,25	10,05	11
7	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,33	3,50	3,70	3,90	4,10	4,20	4,30
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	60,09	61,07	62,05	63,04	63,85	64,67	65,00
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75,35	75,57-76,29	75,79-77,22	76,01-78,16	76,24-79,09	76,46-80,03	76,68-80,96
10	Otonomi Fiskal Daerah	Persen	4,71	4,96-5,06	5,21-5,40	5,47-5,75	5,72-6,10	5,97-6,45	6,22-6,79
11	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Angka	0,756	0,848	0,939	1,031	1,122	1,214	1,306
12	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pernyataan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	Persen	NA	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
14	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	71,39	71,45	71,56	71,92	72,23	72,57	72,76
15	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	NA	37	38	39	40	41	42
16	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,41	3,20-3,22	3,23-3,28	3,27-3,34	3,30-3,41	3,34-3,47	3,37-3,53
17	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Angka	2,86	2,89-2,91	2,93-2,95	2,97-2,99	3,01-3,03	3,05-3,07	3,09-3,11
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	DINAS PENDIDIKAN								
	Akses Dan Kualitas Pelayanan Publik (Rasio)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	38,93	39,73	40,53	40,70	40,75	40,77	40,80
	Persentase Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-12 tahun Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	98,54	98,74	98,85	98,94	98,97	98,99	99,01
	Persentase Partisipasi Sekolah Anak Usia 13-15 Tahun Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	91,82	92,02	92,22	92,50	92,70	92,75	92,80

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Angka Melek Huruf Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Dalam Satu Tahun Anggaran	Tahun	8,27	8,42-8,45	8,58-8,63	8,73-8,80	8,89-8,98	9,04-9,16	9,19-9,34
	Persentase Peserta Didik Yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	43,86	44,06	44,26	44,30	44,75	44,80	44,85
	Persentase Peserta Didik Yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	28,68	28,88	29,08	29,15	29,20	29,25	29,35
	Persentase Peserta Didik Yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	69,80	70,00	70,00	70,25	70,30	70,35	70,40
	Persentase Peserta Didik Yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	55,72	55,92	56,12	56,20	56,25	56,30	56,35
	Cakupan Satuan Pendidikan PAUD Yang Mendapatkan Akreditasi Minimal B Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	48,95	49,15	49,35	49,55	49,60	49,65	49,70
	Cakupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD Yang Mendapatkan Akreditasi Minimal B Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	60,83	61,03	61,23	61,43	61,50	61,57	61,60
	Cakupan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Mendapatkan Akreditasi Minimal B Dalam Satu Tahun Anggara	Persen	52,12	52,32	52,55	52,72	52,75	52,80	52,85
	Persentase Pendidik PAUD Yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah Diploma Empat D IV Atau Sarjana S1 Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	85,71	85,91	86,11	86,15	90,75	98,70	99,6
	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD Bersertifikat Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	88,66	88,86	89,06	89,12	89,17	89,23	89,27
	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP Bersertifikat Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	94,48	94,68	98,88	98,93	98,96	98,99	99,05
2	DINAS KESEHATAN								
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,35	73,57-73,67	73,79-73,98	74,01-74,30	74,24-74,62	74,46-74,93	74,68-75,25
	Indeks Keluarga Sehat (Angka)	Angka	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27
	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Persen	6,00	5,71	5,43	5,14	4,86	4,57	4,29
	Angka Kematian Balita (Akba) Per 1.000 KH Dalam Satu Tahun Anggaran (Per 10.000 KH)	Angka	11,8	11,8	11,0	10,0	9,0	8,0	7,0

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Peningkatan Balita Gizi Baik Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	83,65	83,65	85	87	90	93	95
	Persentase Peningkatan Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	42,78	42,78	80	65	75	85	95
	Persentase Peningkatan Pelayanan Sesuai Standar Terhadap Penderita Penyakit Menular Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	88,68	88,68	90	92	94	96	98
	Persentase Peningkatan Pelayanan Sesuai Standar Terhadap Penderita Penyakit Tidak Menular Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	53,33	53,33	60	65	70	75	80
	Prevelensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	6,85	7,57-7,61	7,32-7,24	7,02-6,90	6,73-6,57	6,44-6,24	6,15-5,91
	Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97,90	98,00	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50
	Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	Persen	15,81	13,73	11,64	9,56	7,47	5,39	3,30
	Jumlah Balita Gizi Buruk / Wasting	Jiwa	625	550	476	401	326	251	177
	Presentase Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Prasarana, Obat, Vaksin, Perbekalan, Dan Alat Kesehatan Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	73,12	73,12	75	77	79	82	85
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Sarana, Prasarana Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sesuai Standar	Persen	56	60	65	70	80	85	100
	Rata-Rata Ketersediaan Jenis Dan Jumlah SDM Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit	Persen	60	65	70	75	80	90	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (Spm) Rumah Sakit	Persen	65	70	75	80	85	90	100
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Angka	2,86	2,89-2,91	2,93-2,95	2,97-2,99	3,01-3,03	3,05-3,07	3,09-3,11
	Indeks Infrastruktur	Angka	70,13	71,22	72,12	72,53	73,11	73,67	74,76
	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)	Angka	0	0	15	20	25	30	35
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN								
	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Persen	84,92	85,00	85,15	85,51	85,87	86,23	86,59

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	59,40	68,81	72,73	76,65	80,56	84,48	88,40
	Persentase Kejelasan Hak Pakai Atas Tanah	Persen	67,95	69,88	71,81	73,75	75,58	77,61	79,54
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	0	37	38	39	40	41	42
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban	Angka	0	37	38	39	40	41	42
	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Angka	0	37	38	39	40	41	42
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Angka	0	35	36	37	38	39	40
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Angka	0	37	38	39	40	41	42
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Angka	126,22	122,5	118,96	115,33	111,7	108,07	104,44
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Persentase Desa Mandiri	Persen	0,69	1,39	1,39-2,08	2,08-2,78	2,08-2,78	2,78-3,47	3,04-3,80
	Persentase Bumdes Yang Berkontribusi Terhadap Pendapatan Asli Desa Secara Berkelanjutan	Persen	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	0	0	20	40	60	80	100
	Persentase Nilai AKIP Berkategori Baik Dan Sangat Baik	Persen	1,39	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Sebagai Mitra Pemerintah Desa	Persen	13,39	16,96	22,32	27,68	33,04	38,39	43,75
	Persentase Bumdes Yang Dibentuk, Didampingi Dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Persentase Pelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) Pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	2,56	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Ormas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	4,51	4,51	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02
	Persentase Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani	Persen	99	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	99,86	99,78	99,82	99,82	99,82	99,82	99,82
	Persentase LPLKK Yang Memenuhi Standar	Persen	0	0	1	1	1	1	1
	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak	Persen	25	16	15	15	15	15	15
	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	Persen	0	0	20	26	26	49	49
	Persentase Kegiatan Ormas Yang Sinergis Dengan Pemberdayaan Perempuan	Persen	5	5	10	10	10	10	10
	Persentase Kelembagaan LPLPP Yang Terstandarisasi	Persen	19	28	28	28	28	28	28
	Persentase Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Rumah Tangga Yang Bebas Dari Kekerasan	Persen	99,97	99,97	99,98	99,98	99,98	99,99	100
	Presentase Lembaga Pemerintah Desa Yang Responsif Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dan Layanan Perlindungan Anak	Persen	25	9,27	11,92	11,92	13,24	13,9	13,9
	Persentase tatakelola data gender dan anak yang terstandarisasi	Persen	0	0	20	20	20	20	21
10	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	0	0	25	30	35	40	45
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,24	63,00-63,50	64,00-65,00	65,50-66,00	67,00-67,50	68,00-68,50	69,50-70,00
	Persentase PPKS Di Kabupaten Lembata Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	59,44	71,75	72	74	76	78	80
	Persentase PPKS (Keluarga Miskin Yang Mengikuti Program Sekolah Rakyat)	Persen	0	0	50	55	60	65	70
	Rata Rata Pencapaian SPM Bidang Sosial	Persen	60	62	64	66	68	70	72
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Angka	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Persen	25,8	30	33	35	37	40	42
	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	21,6	22	21	20	19	18	17
	Persentase Keluarga Yang Berpartisipasi Dalam Program (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R)	Persen	0	0	15	17	19	21	23

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	71,74	72,18-72,23	72,62-72,72	73,06-73,21	73,50-73,70	73,94-74,19	74,39-74,68
	Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Angka	0	0	55	60	65	70	75
	Indeks Kualitas Air	Angka	53,33	71,2	71,4	71,6	71,8	72	72,2
	Indeks Kualitas Udara	Angka	95,32	90,24	90,44	90,64	90,84	91,04	91,24
	Indeks Kualitas Lahan	Angka	59,74	69,74	69,81	69,88	69,95	70,02	70,09
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Angka	0	3,7	3,75	3,8	3,82	3,85	3,85
	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	Persen	0	97	97,3	97,6	98	98,3	98,5
	Persentase Kepemilikan KTP-El Bagi Usia Wajib KTP	Persen	99,46	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,8
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia) Untuk Anak Usia 0 - Kurang Dari 17 Tahun	Persen	0	60	65	70	75	80	82
	Persentase Finalisasi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dengan OPD / Badan Hukum	Persen	0	50	60	70	90	100	100
	Persentase Jumlah Desa / Kelurahan Yang Menerapkan Buku Pokok Pemakaman (BPP)	Persen	0	75	76	78	79	80	82
	Persentase Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) Terhadap Total Perekaman Di Daerah	Persen	0	30	35	40	45	50	55
	Penyelesaian Penyusunan Profil Data Kependudukan Berskala Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	DINAS PERHUBUNGAN								
	Rasio Konektivitas	Persen	0,23	0,27	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38
	Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum	Persen	53.49%	57.5%	60.84%	64.16%	67.49%	70.81%	74.13%
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	0	10	21	41	61	71	81
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,4	2,5	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6
	Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	Angka	2,42	2,47-2,50	2,52-2,57	2,57-2,65	2,63-2,72	2,68-2,80	2,73-2,87
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program	Persen	97,98	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Persen	66,67	71,8	79,49	84,62	89,75	94,88	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	0	0	1	2	3	4	5
15	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	5,60	5,86-5,88	6,07-6,11	6,27-6,34	6,48-6,57	6,69-6,80	6,90-7,04
	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran	Persen	8,16	8,34-8,39	8,53-8,62	8,71-8,85	8,89-9,08	9,07-9,31	9,26-9,54
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,23	0,31-0,36	0,40-0,49	0,48-0,63	0,57-0,76	0,65-0,89	0,74-1,02
	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas	Persen	78,95	15,20	26,31	27,48	28,65	29,82	30,99
	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	0,89	3,89	3,58	3,29	3,50	3,08	3,28
	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	Persen	93,03	93,53	94,45	94,09	94,45	94,82	95,56
	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah	Persen	9,73	9,93	10,00	10,26	10,37	10,84	10,87
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Terintegrasi	Persen	90,26	91,88	93,5	95,12	96,74	98,30	100
	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	74,40	78,67	82,94	87,21	91,48	95,75	100
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN								
	Presentase Peningkatan Layanan Pengembangan Kepemimpinan Dan Partisipasi, Kewirausahaan Dan Kesempatan Kerja Pemuda	Persen	2,13	2,14	2,14	2,15	2,16	2,17	2,18
	Persentase Cabang Olahraga Yang Dikembangkan	Persen	66,67	66,70	70,00	70,30	70,80	80,00	80,20
	Presentase Peningkatan Pembangunan Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya Dan Ekspresi Budaya	Persen	40	43	45	50	60	80	100
	Peningkatan Ketersediaan Fasilitas, Keterlibatan Pemuda Dan Pengetahuan	Persen	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,18	2,19

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tingkat Partisipasi Masyarakat, Prestasi Atlit Dan Sarana Prasarana	Persen	66,67	66,70	70,00	70,50	80,00	80,50	90,00
	Tingkat Partisipasi Pendekatan 9 Kecamatan Dalam Pembangunan Kebudayaan	Persen	40	45	50	55	60	65	70
	Persentase Kualitas Pengadministrasian Penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
18	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan Dan Minum	Persen	0,22	0,30-0,35	0,39-0,48	0,47-0,62	0,56-0,75	0,64-0,88	0,73-1,01
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	5,76	5,89	6,02	6,14	6,25	6,35	6,45
	Persentase Peningkatan Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi	Persen	0	10	20	40	60	80	100
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	56,55	57,12	58,23	59,45	60,34	61,23	62,23
	Tingkat Digitalisasi Arsip	Persen	0	50,12	55,23	61,42	70,64	75,93	80,47
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	73,42	74,21	75,00	75,79	76,58	77,37	78,16
	Tingkat Pemerataan Layanan Perpustakaan	Angka	0,4302	0,5321	0,6212	0,7432	0,8433	0,9153	0,9833
	Tingkat Ketercukupan Koleksi	Angka	1,0000	1,1453	1,1524	1,1676	1,1786	1,1833	1,1985
	Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Angka	0,7249	0,7465	0,8654	0,8912	0,9123	0,9245	0,9486
	Tingkat Kunjungan Masyarakat	Angka	0,151	0,1567	0,1598	0,1612	0,1624	0,1634	0,1689
	Keanggotaan Perpustakaan	Angka	1,0000	1,1000	1,1254	1,1364	1,1476	1,1512	1,1567
	Perpustakaan BerSNP	Angka	0,8331	0,8845	0,8982	0,9123	0,9145	0,9267	0,9865
	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	Angka	1,0000	1,1343	1,1578	1,2145	1,2522	1,3543	1,3796
	Tingkat Keberadaan Keutuhan Arsip	Persen	0	23,12	23,23	23,34	23,45	23,56	23,76
	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persen	72,00	72,11	72,45	72,87	73,15	73,48	73,98
20	DINAS PERIKANAN								
	Nilai Tukar Pelaku Usaha Perikanan (NTPUP)	Angka	100	100	101	102	103	104	105
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	100	100	101	102	103	104	105
	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Angka	100	100	101	102	103	104	105

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	Angka	100	100	101	102	103	104	105
21	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								
	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	70,11	71.06-71.53	72-72.96	72.95-74.38	73.90-75.80	74.85-77.23	75.79-78.65
	Nilai Tukar Petani	Angka	100,96	101	101,5	102	102,5	103	103,5
	Indeks Ketersediaan Pangan	Angka	81,69	82	83	84	85	86	87
	Indeks Keterjangkauan Pangan	Angka	65,54	66	66,5	67	67,5	68	68,5
	Indeks Pemanfaatan Pangan	Angka	64,85	65	65,50	66	66,50	67	67,50
	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi Dan Bahan Pangan Lokal Lainnya Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	5	5,36	5,58	6,11	6,94	7	7,22
	Persentase Peningkatan Jumlah Produk Peternakan Yang Berhasil Dihilirisasi	Persen	2	3	5	5	10	10	15
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	83,53	83,79-83,84	84,06-84,15	84,32-84,45	84,59-84,76	84,85-85,07	85,11-85,38
	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persen	0	0	100	100	100	100	100
	Persentase Transmigran yang Diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
23	SEKRETARIAT DAERAH								
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	52,83	60,4	64,25	67,38	69,89	71,7	73,8
	Nilai RB General	Angka	46,63	52,2	55,45	58,36	60,64	61,65	62,8
	Nilai RB Tematik	Angka	6,2	8,2	8,8	9,02	9,25	10,05	11
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	0	60	65	70	75	80	85
	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Untuk Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Untuk Pembahasan Dan Persetujuan Kebijakan Anggaran Serta Penyelenggaraan Layanan Keuangan Dan Administrasi DPRD Dalam Satu Tahun Anggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Untuk Dukungan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Penggunaan Anggaran Serta Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Dukungan Terhadap Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	0	80	85	90	95	100	100
	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	0	80	80	80	80	80	80
	Keselaran Dokumen RPJMD Dengan Dokumen RPJMN	Bobot	0	8	8	9	9	9	9
	Keselaran Dokumen RKPD Dengan RKP	Bobot	0	8	8	9	9	13	13
	Kesesuaian Anggaran Daerah Dalam Kontribusinya Terhadap PN Di Daerah	Bobot	0	8	8	9	9	10	10
	Kesesuaian Antar Isu Strategis - Target - Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Di RPJMD Atau RKPD	Bobot	0	40	45	45	49	49	49
	Inovasi Perencanaan Pembangunan	Bobot	0	8	8	9	9	9	9
	Bobot Target Dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target Dan Sasaran Kinerja PD Terkait	Bobot	0	8	8	9	10	10	10
	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	0	100	100	100	100	100	100
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	Indeks Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Angka	54,77	55,77	56	57	58	59	60
	Nilai Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran	Angka	2,92	3	3	3,5	4	4,5	5
	Nilai Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	Angka	19,31	20	20	20	20	20	20
	Nilai Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	15	15	15	15	15	15	15
	Nilai Dimensi Penyerapan Anggaran	Angka	15	15	16	17	18	19	20
	Nilai Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	Angka	2,54	2,75	3	3,5	4	4,5	5
	Dimensi Opini Atas LKD	Angka	15	15	15	15	15	15	15
	Persentase Pelaksanaan Manajemen Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	75	75	75	75	75	75	75
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH								

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (%)	Persen	58,38	100	100	100	100	100	100
	Nilai Capaian Realisasi PAD Dari Sektor Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Yang Bersangkutan	Persen	58,38	100	100	100	100	100	100
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
	Indeks Implementasi Nspk Manajemen Asn	Angka	88,33	89,264	90,198	91,132	92,066	93	93
	Indeks Sistem Merit	Angka	255,5	255,5	256	257	258	259	260
	Indeks Profesionalitas Asn	Angka	73,79	75,032	76,274	77,516	78,758	80	80
	Nilai Capaian Unsur Penyusunan & Penetapan Kebutuhan Asn, Pengadaan, Pengangkatan, Jaminan Pensiun & Jht, Perlindungan, Pensiun, Pemberhentian, Penggajian/Tunjangan/Fasilitas	Angka	43,125	43,3	43,475	43,65	43,825	44,000	44,000
	Nilai Dimensi Kompetensi Teknis Dan Manajerial	Angka	23	23	23,06	24,79	26,53	28,23	30
	Nilai Capaian Unsur Pangkat, Mutasi, Jabatan	Angka	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15	15
	Nilai Capaian Unsur Penilaian Kinerja, Cuti, Kode Etik, Disiplin, Penghargaan, Pemberhentian (Tipikor & Hukdis)	Angka	24	24,3	24,4	24,6	24,8	25	25
	Nilai Capaian Unsur Pengembangan Karier, Pola Karier	Angka	7,705	7,964	8,223	8,482	8,741	9,00	9,00
29	INSPEKTORAT DAERAH								
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	2	3	3	3	3
	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pengawasan untuk mencapai Maturitas SPIP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kapabilitas APIP	Level	1	2	3	3	3	3	3
30	KECAMATAN								
	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	71,39	71,45	71,56	71,92	72,23	72,57	72,76
	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	84,25	84,35	84,45	84,55	84,65	84,75	84,85

No	Indikator	Satuan	Baseline (2023/ 2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Cakupan Wilayah Dan Kelompok Yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Dan Fasilitasi Partai Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Lembata 5 (lima tahun) ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh adanya penerapan manajemen berbasis kinerja secara konsisten pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi secara terpadu pengembangan manajemen pengetahuan, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur, penguatan peran desa dan kecamatan dengan mendelegasikan kewenangan dari perangkat daerah kepada kecamatan dan desa, pengendalian dan pengawasan secara terus menerus, serta pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha yang solid dan berkelanjutan.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025- 2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, disusun berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029. Dalam hal terdapat perbedaan substansi antara RKPD Tahun 2026 dengan Perda RPJMD 2025-2029, maka penyusunan APBD Tahun 2026 mengacu pada Perda RPJMD 2025-2029, dan akan dilaksanakan penyesuaian terhadap substansi RKPD Tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Lembata Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Lembata Tahun 2030-2034 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima tahun) berikutnya.

. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2030. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030 akan didasarkan pada RPJPD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045, sedangkan rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja

pembangunan daerah dimulai tahun 2025 sampai tahun 2030 dimana program 20230 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode tahun 2030-2034.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Lembata berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025- 2029 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029;
5. Seluruh Pemerintah Desa perlu menyusun dan/atau mensinkronkan RPJMDesa dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lembata;
7. Prioritas daerah yang bersifat lintas sektor dan lintas *stakeholders*, pemerintah mengintegrasikan dan memetakan peran lintas urusan dan lintas sektor setiap tahunnya dalam RKPD;
8. Dalam rangka menjamin dan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah menjalin kemitraan aktif dengan melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga lainnya termasuk relawan terutama yang berkaitan dengan isu-isu global;
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) melaksanakan pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025–2029;

10. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029;
11. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Lembata dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Lembata untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Terhadap program/kegiatan prioritas.

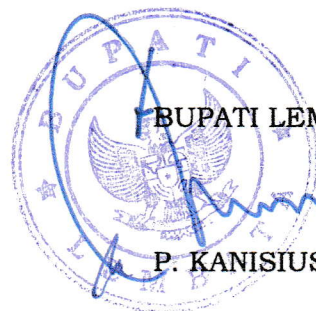
5.3. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Terhadap program/kegiatan prioritas, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi;
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 secara terpadu, sinergi dan searah dengan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat selama 5 (lima) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lembata, DPRD Kabupaten Lembata, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat menuju Lembata Maju, Lestari dan Berdaya Saing.

BUPATI LEMBATA,
P. KANISIUS TUAQ